



Katalog: 4104001

STATISTIK PENDUDUK LANJUT USIA 2019



BADAN PUSAT STATISTIK

STATISTIK PENDUDUK LANJUT USIA 2019



STATISTIK PENDUDUK LANJUT USIA 2019

ISSN : 2086-1036

Nomor Publikasi : 04220.1905

Katalog : 4104001

Ukuran Buku : 182 mm x 257 mm

Jumlah Halaman : xxvi + 258 halaman

Naskah :

Subdirektorat Statistik Pendidikan dan Kesejahteraan Sosial

Gambar Kulit :

Subdirektorat Statistik Pendidikan dan Kesejahteraan Sosial

Diterbitkan oleh :

©Badan Pusat Statistik

Dicetak Oleh:

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik

PENYUSUN NASKAH

Penanggung Jawab Umum : Gantjang Amannullah, M.A.

Penanggung Jawab Teknis : Wachyu Winarsih, M.Si.

Editor : Dwi Susilo, M.Si.

Ida Eridawaty Harahap, S.Si., M.Si.

Raden Sinang, S.ST., M.Si.

Penulis : Ika Maylasari, S.ST., M.Si.

Yeni Rachmawati, S.ST., M.Si.

Hendrik Wilson SST, S.Si, ME

Sigit Wahyu Nugroho, S.AP

Nindya Putri Sulistyowati, S.ST

Freshy Windy Rosmala Dewi, S.ST

Pengolah Data : Freshy Windy Rosmala Dewi, S.ST

KATA PENGANTAR

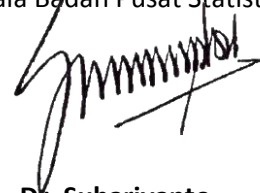
Peningkatan jumlah penduduk lansia memberikan konsekuensi yang tidak sederhana. Berbagai macam tantangan akibat penuaan penduduk telah menyentuh berbagai aspek kehidupan. Untuk menyikapi kondisi ini dibutuhkan suatu program pembangunan kelanjutusiaan yang mampu mengayomi kehidupan para lansia Indonesia. Berangkat dari fenomena ini, BPS berusaha untuk mengakomodasi kebutuhan akan data kelanjutusiaan yang konkret dan komprehensif dengan mewujudkannya dalam bentuk Publikasi Statistik Lanjut Usia 2019.

Melalui publikasi ini dapat diketahui sejauh mana potensi dan sumber daya penduduk lansia di Indonesia. Publikasi ini merupakan publikasi tahunan yang memuat informasi makro mengenai kondisi demografi penduduk lansia, status pendidikan, kondisi kesehatan, potensi ekonomi, keadaan sosial, serta akses penduduk lansia terhadap berbagai fasilitas perlindungan dan pemberdayaan bagi peningkatan kualitas hidupnya. Data yang digunakan dalam publikasi ini sebagian besar berdasar pada data hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) tahun 2019, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) tahun 2019 dan data sekunder dari Kementerian/Lembaga.

Publikasi ini diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak, baik dari kalangan masyarakat, lansia dan para penggiat lansia serta pemangku kepentingan sebagai salah satu dasar dalam penyusunan kebijakan. Selain itu sebagai acuan untuk dapat mengoptimalkan potensi penduduk lansia sebagai bagian dari kekuatan pembangunan.

Akhir kata, kami sampaikan terima kasih kepada tim penyusun dan semua pihak yang telah menyumbangkan pikiran dan tenaganya sehingga publikasi ini dapat diselesaikan. Semoga hasil karya ini dapat memberi manfaat sebesar-besarnya untuk dunia kelanjutusiaan Indonesia.

Jakarta, Desember 2019
Kepala Badan Pusat Statistik



Dr. Suhariyanto

RINGKASAN EKSEKUTIF

Lanjut usia menurut UU Nomor 13 Tahun 1998 adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun ke atas. Penduduk lanjut usia terus mengalami peningkatan seiring kemajuan di bidang kesehatan yang ditandai dengan meningkatnya angka harapan hidup dan menurunnya angka kematian. Perkembangan demografi ini dapat membawa dampak di bidang kesehatan, ekonomi, dan sosial. Untuk itu diperlukan data terkait kelanjutusiaan sebagai bahan pemetaan dan strategi kebijakan sehingga pertumbuhan jumlah penduduk lansia menjadi potensi yang turut membangun bangsa.

Dalam waktu hampir lima dekade, persentase lansia Indonesia meningkat sekitar dua kali lipat (1971-2019), yakni menjadi 9,6 persen (25 juta-an) di mana lansia perempuan sekitar satu persen lebih banyak dibandingkan lansia laki-laki (10,10 persen banding 9,10 persen). Dari seluruh lansia yang ada di Indonesia, lansia muda (60-69 tahun) jauh mendominasi dengan besaran yang mencapai 63,82 persen, selanjutnya diikuti oleh lansia madya (70-79 tahun) dan lansia tua (80+ tahun) dengan besaran masing-masing 27,68 persen dan 8,50 persen. Pada tahun ini sudah ada lima provinsi yang memiliki struktur penduduk tua di mana penduduk lansianya sudah mencapai 10 persen, yaitu: DI Yogyakarta (14,50 persen), Jawa Tengah (13,36 persen), Jawa Timur (12,96 persen), Bali (11,30 persen) dan Sulawesi Barat (11,15 persen).

Meningkatnya jumlah lansia beriringan dengan peningkatan jumlah rumah tangga yang dihuni oleh lansia. Persentase rumah tangga lansia tahun 2019 sebesar 27,88 persen, dimana 61,75 persen diantaranya dikepalai oleh lansia. Yang menarik dari keberadaan lansia Indonesia adalah ketersediaan dukungan potensial baik ekonomi maupun sosial yang idealnya disediakan oleh keluarga. Data Susenas 2019 menunjukkan bahwa 9,38 persen lansia tinggal sendiri, di mana persentase lansia perempuan yang tinggal sendiri hampir tiga kali lipat dari lansia laki-laki (13,39 persen berbanding 4,98 persen). Dibutuhkan perhatian yang cukup tinggi dari seluruh elemen masyarakat terkait hal ini, karena lansia yang tinggal sendiri membutuhkan dukungan dari lingkungan sekitar mereka mengingat hidup mereka lebih berisiko, terlebih pada lansia perempuan yang cenderung termarginalkan.

Aspek penting yang akan berdampak terhadap kualitas hidup lansia, yakni pendidikan dan kesehatan. Kedua aspek ini mampu meningkatkan kapasitas lansia dalam hidup

bermasyarakat. Angka Melek Huruf (AMH) lansia terus mengalami peningkatan menjadi 80,49 persen pada tahun 2019. Kesenjangan AMH antara lansia laki-laki dan perempuan kian menyempit. Hal ini disebabkan oleh kenaikan AMH lansia perempuan yang jauh lebih besar dibandingkan lansia laki-laki. Secara umum, sebagian besar lansia berpendidikan rendah (SD/ sederajat ke bawah). Rata-rata lama sekolah lansia sebesar 4,98 tahun atau setara dengan kelas 4 SD/ sederajat. Saat ini, lansia juga sudah memiliki kemampuan dalam memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Sekitar 4 dari 10 lansia menggunakan telepon seluler (HP) dalam tiga bulan terakhir. Meskipun persentase lansia yang mengakses internet dalam tiga bulan terakhir hanya 7,94 persen, angka tersebut terus mengalami kenaikan sejak tahun 2015 (1,39 persen) seiring masuknya kita pada era revolusi industri 4.0.

Sementara itu, dari sisi kesehatan masih ada sekitar separuh lansia yang mengalami keluhan kesehatan selama sebulan terakhir. Angka kesakitan lansia cenderung menurun setiap tahun. Pada tahun 2019, satu dari empat lansia sakit dalam sebulan terakhir. Kesadaran lansia terhadap keluhan kesehatan yang dideritanya cukup tinggi. Mayoritas lansia mengobati keluhan kesehatannya, baik dengan mengobati sendiri maupun berobat jalan (96,46 persen). Mengingat kondisi kesehatan lansia yang rentan terserang penyakit, perilaku sehat seperti rajin berolahraga dan tidak merokok, perlu diterapkan. Sayangnya masih ada lansia yang punya kebiasaan merokok. Hasil Susenas 2019 menunjukkan hampir seperempat lansia merokok, baik merokok elektrik maupun tembakau. Lansia perokok didominasi oleh laki-laki daripada perempuan (48,86 persen berbanding 1,95 persen).

Hal utama yang perlu diperhatikan dalam mendorong pemberdayaan dan pengembangan tenaga kerja lansia potensial adalah tersedianya kesempatan kerja yang sesuai bagi tenaga kerja lansia. Hampir separuh lansia masih aktif bekerja di usia senjanya. Persentase lansia bekerja di tahun 2019 mencapai 49,39 persen, artinya satu dari dua lansia Indonesia masih bekerja. Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak lansia yang terlibat aktif secara ekonomi untuk menghasilkan barang atau jasa, baik sebagai bentuk aktualisasi diri maupun karena adanya desakan ekonomi. Persentase lansia bekerja lebih tinggi di perdesaan dibandingkan lansia di perkotaan (56,51 persen berbanding 43,06 persen). Berdasarkan jenis kelamin, persentase lansia laki-laki yang bekerja lebih tinggi dibandingkan lansia perempuan (64,47 persen berbanding 35,66 persen). Sebagian besar lansia yang bekerja berpendidikan SD ke bawah (80,76 persen). Sejalan dengan tingkat pendidikan yang rendah tersebut, lapangan usaha lansia pun didominasi sektor pertanian

(52,86 persen) yang tidak memerlukan keterampilan tertentu. Besarnya persentase lansia bekerja tidak didukung dengan upah yang memadai. Sebesar 46,22 persen lansia memperoleh pendapatan kurang dari 1.000.000 per bulan. Selain dari segi upah, jam kerja lansia pun memprihatinkan. Satu dari lima lansia bekerja melebihi jam kerja normal, yaitu 48 jam.

Sebagian besar lansia Indonesia yang bekerja merupakan pekerja informal (84,29 persen). Mereka adalah para pekerja yang membutuhkan perhatian khusus mengingat kebanyakan diantaranya kurang memiliki perlindungan sosial, dasar hukum pekerjaan, ataupun imbalan kerja yang layak. Selain itu, dari seluruh lansia yang bekerja, 74,15 persen diantaranya memiliki risiko tinggi mengalami kerentanan ekonomi karena tidak memiliki kesempatan kerja yang cukup, perlindungan sosial yang tidak memadai, tidak terpenuhi hak-hak di tempat kerjanya, serta tidak memiliki kesempatan mengekspresikan pendapat mengenai pekerjaan yang mereka lakukan (BPS, 2018).

Memasuki usia senja, lansia memerlukan dukungan sosial dan ekonomi. Dari aspek kelayakan rumah tempat tinggal, sebesar 89,53 persen lansia tinggal di rumah layak huni. Persentase ini meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Menurut status ekonomi, rumah tangga lansia masih didominasi oleh mereka yang tinggal pada rumah tangga dengan kelompok pengeluaran 40 persen terbawah sebesar 43,84 persen. Pada kondisi ini, tidak ada perbedaan yang signifikan antara rumah tangga lansia dengan pengeluaran 40 persen terbawah di perkotaan maupun perdesaan (42,84 persen berbanding 43,46 persen). Akan tetapi, jika kita cermati menurut jenis kelamin, lansia perempuan (45,54 persen) yang berada pada rumah tangga dengan kelompok pengeluaran 40 persen terbawah mencapai besaran yang lebih tinggi daripada lansia laki-laki (41,97 persen). Selanjutnya, sekitar 1 persen lansia pernah menjadi korban kejahatan dalam setahun terakhir, dimana 89,52 persen diantaranya menjadi korban pencurian.

Seiring dengan beralihnya program Bansos Rastra menjadi BPNT yang tersebar di 295 kabupaten/kota di Indonesia pada tahun 2019, persentase rumah tangga lansia yang menerima Bansos Rastra cenderung menurun jika dibandingkan dengan kondisi tahun sebelumnya (42,06 persen menjadi 11,14 persen). Sedangkan rumah tangga lansia yang menerima Bansos Rastra di perdesaan empat kali lipat lebih tinggi daripada perkotaan (18,73 persen berbanding 4,38 persen).

Sebesar 12,91 persen rumah tangga lansia telah memiliki jaminan sosial. Persentase rumah tangga lansia yang memiliki jaminan sosial di perkotaan jauh lebih besar dibandingkan perdesaan (17,81 persen berbanding 7,40 persen). Hal ini dimungkinkan

karena adanya kecenderungan rumah tangga lansia yang tinggal di perkotaan banyak terpapar dengan jaminan yang diperoleh dari tempat mereka bekerja, misalnya jaminan pensiun/veteran, jaminan hari tua, asuransi kecelakaan kerja, jaminan/asuransi kematian, dan pesangon PHK. Akses dan fasilitas yang lebih baik memudahkan lansia di perkotaan lebih mudah untuk mendapatkan jaminan sosial dibandingkan mereka yang tinggal di perdesaan.

Selama tahun 2019, rumah tangga lansia yang masih tercatat/menjadi penerima PKH yaitu sebesar 10,81 persen. Persentase rumah tangga lansia yang masih tercatat/menjadi penerima PKH di perdesaan lebih besar daripada di perkotaan (13,94 persen berbanding 8,01 persen). Sementara itu, persentase rumah tangga lansia yang memiliki kartu PKH sebesar 11,25 persen, dengan persentase di perdesaan lebih besar daripada di perkotaan (14,54 persen berbanding 8,32 persen).

Jaminan kesehatan belum menjangkau seluruh lansia. Sekitar tiga dari lima lansia telah memiliki jaminan kesehatan (69,69 persen). Jaminan kesehatan yang paling banyak dimiliki oleh lansia adalah BPJS Kesehatan PBI (Penerima Bantuan Iuran), yaitu sebesar 39,64 persen. Sedangkan jaminan kesehatan yang paling sedikit dimiliki lansia adalah asuransi kantor (0,56 persen).

Pelayanan Kesejahteraan Lansia telah ditekankan dalam UU No. 13 Tahun 1998. Lansia memiliki hak untuk meningkatkan kesejahteraan sosial yang meliputi pelayanan keagamaan dan mental spiritual, pelayanan kesehatan, pelayanan kesempatan kerja, pelayanan pendidikan dan pelatihan, kemudahan dalam penggunaan fasilitas, sarana, dan prasarana umum, kemudahan dalam layanan dan bantuan hukum, perlindungan sosial, dan bantuan sosial.

Di dalam Permensos RI Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelayanan Sosial Lansia menyebutkan bahwa pelayanan sosial lansia adalah upaya yang ditujukan untuk membantu lansia dalam memulihkan dan mengembangkan fungsi sosialnya. Pelayanan sosial lansia ini meliputi kegiatan pelayanan dalam panti dan luar panti; perlindungan; dan pengembangan kelembagaan sosial lansia. Secara garis besar program-program pelayanan dan pemberdayaan lansia antara lain: pelayanan dalam panti, program pendampingan sosial lansia melalui perawatan di rumah (*home care*), program asistensi sosial lanjut usia telantar (ASLUT), pelayanan sosial kedaruratan bagi lansia, program *family support* lansia, *day care services*, pengembangan kawasan ramah lansia, dan program lansia tangguh.

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	v
Ringkasan Eksekutif	vii
Daftar Isi	xi
Daftar Gambar	xiii
Daftar Tabel	xvii
Daftar Lampiran Tabel	xxi
Daftar <i>Sampling Error</i>	xxiii
Daftar Singkatan	xxv
BAB 1 Pendahuluan	
Penuaan Penduduk di Indonesia	3
Tantangan Utama Lansia Indonesia	4
Lansia Indonesia dalam Bingkai Kebijakan	5
Data Kelanjutusiaan untuk Pembangunan	6
BAB 2 Demografi	
Struktur Umur Penduduk Lansia	11
Lansia dalam Rumah Tangga	17
Status Tinggal Lansia	18
BAB 3 Pendidikan	
Kemampuan BacaTulis Lansia	25
Tingkat Pendidikan Lansia	28
Akses Teknologi Informasi dan Komunikasi	31
BAB 4 Kesehatan	
Kondisi Kesehatan Lansia	37
Perilaku Pencarian Pengobatan Lansia	40
Perilaku Merokok Lansia	50

BAB 5	Ketenagakerjaan	
	Lansia Bekerja	55
	Karakteristik Pekerja Lansia	59
	Jam Kerja Layak	66
	Pendapatan/Upah/Gaji yang Mencukupi	68
BAB 6	Sosial Ekonomi	
	Rumah Layak Bagi Lansia	75
	Status Ekonomi Lansia	78
	Lansia Korban Kejahatan	80
BAB 7	Perlindungan Sosial	
	Bantuan Sosial Lansia	85
	Jaminan Sosial Lansia	93
BAB 8	Program Pro Lansia	
	Kebijakan Umum Pelayanan Kesejahteraan Lansia	99
	Program Pelayanan Lansia	100
	Daftar Pustaka	111
	Catatan Teknis	117
	Lampiran Tabel	125
	Penghitungan <i>Sampling Error</i>	215

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Judul	Halaman
1.1	Persentase Penduduk Usia 65 Tahun Ke Atas dan Rasio Ketergantungan, 1971-2045	4
2.1	Piramida Penduduk Indonesia, Tahun 1971, 2000, 2019	12
2.2	Distribusi Penduduk Lansia, 2019	13
2.3	Lima Provinsi dengan Struktur Penduduk Tua di Indonesia, 2019	15
2.4	Rasio Ketergantungan Penduduk Lansia, 2010-2019	16
2.5	Persentase Penduduk Lansia yang Menjadi Kepala Rumah Tangga (KRT), 2019	17
3.1	Angka Melek Huruf Penduduk Lansia, 2015-2019	25
3.2	Persentase Penduduk Lansia Menurut Kemampuan Baca Tulis, 2019	26
3.3	Angka Melek Huruf Penduduk Lansia Menurut Provinsi, 2019	27
3.4	Persentase Penduduk Lansia Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan Kelompok Pengeluaran, 2019	29
3.5	Rata-rata Lama Sekolah (tahun) Penduduk Lansia Menurut Tipe Daerah, Jenis Kelamin dan Kelompok Umur, 2019	30
3.6	Rata-rata Lama Sekolah (tahun) Penduduk Lansia Menurut Kelompok Pengeluaran dan Status Disabilitas, 2019	30
3.7	Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Lansia Menurut Provinsi, 2019	31
3.8	Persentase Penduduk Lansia yang Mengakses Internet, 2015- 2019	33
4.1	Angka Kesakitan Penduduk Lansia, 2015-2019	39
4.2	Persentase Lansia yang Tidak Berobat Jalan Menurut Alasan Utama Tidak Berobat Jalan, 2019	45
4.3	Rata-rata Lama Rawat Inap Penduduk Lansia (hari) Menurut Tipe Daerah dan Jenis Kelamin, 2019	46

Gambar	Judul	Halaman
4.4	Persentase Lansia yang Pernah Merokok Menurut Tipe Daerah dan Jenis Kelamin, 2019	51
5.1	Persentase Penduduk Lansia Bekerja, 2016-2019	56
5.2	Persentase Penduduk Lansia Menurut Jenis Kegiatan dalam Seminggu Terakhir, 2019	57
5.3	Distribusi Penduduk Lansia yang Bekerja Menurut Jenjang Pendidikan, 2019	59
5.4	Persentase Penduduk Lansia Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama, 2019	61
5.5	Persentase Penduduk Lansia yang Bekerja di Sektor Informal Menurut Jenjang Pendidikan, 2019	63
5.6	Persentase Lansia Bekerja dengan Status Berusaha Sendiri, Berusaha Dibantu Buruh Tidak Dibayar, dan Pekerja Keluarga/Tidak Dibayar (Status 1, 2, dan 7), 2019	64
5.7	Persentase Penduduk Lansia Bekerja yang Termasuk <i>Precarious Employment</i> , 2019	65
5.8	Rata-rata Jumlah Jam Kerja dari Penduduk Lansia yang Bekerja Menurut Kelompok Umur, 2019	68
5.9	Rata-rata Besarnya Pendapatan/Upah/Gaji (ribu rupiah) dari Lansia yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha, 2019	69
5.10	Persentase Penduduk Lansia yang Bekerja dengan Upah Rendah, 2019	71
6.1	Persentase Penduduk Lansia yang Tinggal di Rumah Layak Huni, 2014-2019	77
6.2	Persentase Rumah Tangga Lansia Menurut Sumber Pembiayaan Terbesar Rumah Tangga, 2019	80
6.3	Persentase Lansia yang Pernah Menjadi Korban Kejahatan, 2019	81
7.1	Persentase Rumah Tangga Lansia yang Menerima Bansos Rastra, 2016-2019	86
7.2	Persentase Rumah Tangga Lansia yang Menerima Bansos Rastra Menurut Tipe Daerah, 2019	87

Gambar	Judul	Halaman
7.3	Persentase Rumah Tangga Lansia yang Memiliki Kartu PKH dan yang Masih Tercatat/Menjadi Penerima PKH Menurut Tipe Daerah, 2019	90
7.4	Persentase Rumah Tangga Lansia yang Memiliki KPS/KKS, 2017-2019	90
7.5	Persentase Rumah Tangga Lansia yang Memiliki KPS/KKS, Menurut Tipe Daerah dan Kelompok Pengeluaran, 2019	91
7.6	Persentase Rumah Tangga Lansia yang Memiliki Jaminan Sosial Menurut Tipe Daerah, 2019	95
7.7	Persentase Rumah Tangga Lansia yang Memiliki Jaminan Sosial Menurut Tipe Daerah dan Jenis Jaminan Sosial, 2019	96

DAFTAR TABEL

Tabel	Judul	Halaman
2.1	Persentase Penduduk Lansia Menurut Kelompok Umur, 2019	14
2.2	Persentase Penduduk Lansia Menurut Status Perkawinan, 2019	19
2.3	Persentase Lansia Menurut Status Tinggal Bersama, 2019	20
3.1	Persentase Penduduk Lansia Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, 2019	28
3.2	Persentase Penduduk Lansia Menurut Akses Teknologi Informasi dan Komunikasi, 2019	32
4.1	Persentase Penduduk Lansia Menurut Kondisi Kesehatan, 2019	38
4.2	Persentase Penduduk Lansia Menurut Tindakan Pengobatan, 2019	41
4.3	Persentase Penduduk Lansia yang Berobat Jalan Menurut Tempat Berobat, 2019	43
4.4	Persentase Penduduk Lansia yang Berobat Jalan Menurut Jaminan Kesehatan yang Digunakan, 2019	44
4.5	Persentase Penduduk Lansia yang Rawat Inap menurut Lamanya Rawat Inap, 2019	47
4.6	Persentase Penduduk Lansia yang Pernah Rawat Inap Setahun Terakhir Menurut Tempat Rawat Inap, 2019	48
4.7	Persentase Penduduk Lansia yang Rawat Inap Menurut Jaminan Kesehatan yang Digunakan, 2019	49
4.8	Persentase Lansia Menurut Kebiasaan Merokok, 2019	50
5.1	Persentase Penduduk Lansia Menurut Jenis Kegiatan dalam Seminggu Terakhir, 2019	58

Tabel	Judul	Halaman
5.2	Persentase Penduduk Lansia Bekerja Menurut Lapangan Usaha Utama, 2019	60
5.3	Persentase Penduduk Lansia Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama, 2019	62
5.4	Persentase Penduduk Lansia Bekerja Menurut Jumlah Jam Kerja dalam Seminggu, 2019	67
5.5	Persentase Penduduk Lansia Bekerja Menurut Pendapatan/ Upah/ Gaji dalam Sebulan, 2019	70
6.1	Persentase Penduduk Lansia Menurut Status Kepemilikan Tempat Tinggal, 2019	76
6.2	Persentase Penduduk Lansia Menurut Status Kelayakan Rumah Tempat Tinggal, 2019	78
6.3	Persentase Penduduk Lansia Menurut Kelompok Pengeluaran, 2019	79
6.4	Persentase Lansia yang Menjadi Korban Kejahatan Menurut Jenis Kejahatan, 2019	82
7.1	Karakteristik Penyaluran Bantuan Sosial Beras Sejahtera (Bansos Rastra) kepada Rumah Tangga Lansia, 2019	88
7.2	Persentase Rumah Tangga Lansia yang Menerima Bansos Rastra Menurut Tipe Daerah dan Kelompok Pengeluaran, 2019	89
7.3	Persentase Rumah Tangga Lansia yang Menerima Kredit Pengembangan Usaha Menurut Tipe Kredit dan Tipe Daerah, 2019	92
7.4	Persentase Penduduk Lansia yang Menerima Jaminan Kesehatan Menurut Jenis Jaminan Kesehatan, 2019	94

DAFTAR LAMPIRAN TABEL

Tabel	Judul	Halaman
2.1.1-2.1.5	Distribusi Penduduk Lansia Menurut Provinsi dan Kelompok Umur, 2019	125-129
2.2	Persentase Rumah Tangga Lansia Menurut Provinsi dan Tipe Daerah, 2019	130
2.3	Persentase Penduduk Lansia Menurut Provinsi, Tipe Daerah dan Jenis Kelamin, 2019	131
2.4.1-2.4.5	Persentase Penduduk Lansia Menurut Provinsi dan Status Keanggotaan Rumah Tangga, 2019	132-136
2.5.1-2.5.5	Persentase Penduduk Lansia Menurut Provinsi dan Status Perkawinan, 2019	137-141
2.6.1-2.6.5	Persentase Penduduk Lansia Menurut Provinsi dan Status Tinggal Bersama, 2019	142-146
3.1.1-3.1.3	Angka Melek Huruf Penduduk Lansia Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2019	147-149
3.2.1-3.2.5	Persentase Penduduk Lansia Menurut Provinsi dan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, 2019	150-154
3.3	Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Lanjut Usia Menurut Provinsi, Tipe Daerah, dan Jenis Kelamin, 2019	155
3.4	Persentase Penduduk Lansia Menurut Akses Teknologi Informasi dan Komunikasi, 2019	156
4.1	Persentase Penduduk Lansia yang Mengalami Keluhan Kesehatan Selama Sebulan Terakhir Menurut Provinsi, Jenis Kelamin, dan Tipe Daerah, 2019	157
4.2	Angka Kesakitan Penduduk Lansia Menurut Provinsi, Jenis Kelamin, dan Tipe Daerah, 2019	158
4.3	Persentase Penduduk Lansia yang Mengalami Keluhan Kesehatan Selama Sebulan Terakhir dan Mengobati Sendiri Menurut Provinsi, Jenis Kelamin, dan Tipe Daerah, 2019	159

Tabel	Judul	Halaman
4.4	Persentase Penduduk Lansia yang Mengalami Keluhan	160
4.5	Kesehatan Selama Sebulan Terakhir dan Berobat Jalan Menurut Provinsi, Jenis Kelamin, dan Tipe Daerah, 2019	161
4.6	Persentase Penduduk Lansia yang Berobat Jalan Menurut Provinsi dan Tempat Berobat, 2019	162
4.7	Persentase Penduduk Lansia yang Tidak Berobat Jalan Menurut Provinsi dan Alasan Utama Tidak Berobat Jalan, 2019	163
4.8	Persentase Penduduk Lansia Berobat Jalan yang Menggunakan Jaminan Kesehatan untuk Berobat Jalan, 2019	164
4.9	Persentase Penduduk Lansia yang Pernah Dirawat Inap Setahun Terakhir Menurut Provinsi, Jenis Kelamin, dan Tipe Daerah, 2019	165
4.10	Rata-rata Lama Rawat Inap (dalam hari) Lansia yang Pernah Dirawat Inap Setahun Terakhir Menurut Provinsi, Jenis Kelamin, dan Tipe Daerah, 2019	166
4.11	Persentase Penduduk Lansia yang Pernah Dirawat Inap Setahun Terakhir Menurut Provinsi, Jenis Kelamin, dan Tipe Daerah, 2019	167
4.12	Persentase Penduduk Lansia yang Rawat Inap Menurut Provinsi dan Tempat Rawat Inap, 2019	168
4.13	Persentase Penduduk Lansia Rawat Inap yang Menggunakan Jaminan Kesehatan untuk Rawat Inap, 2019	169
5.1.1-5.1.5	Persentase Penduduk Lanjut Usia Menurut Provinsi dan Jenis Kegiatan dalam Seminggu Terakhir, 2019	170-174
5.2	Persentase Penduduk Lanjut Usia Bekerja Menurut Provinsi dan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, 2019	175
5.3	Persentase Penduduk Lanjut Usia Bekerja Menurut Provinsi dan Lapangan Pekerjaan Utama, 2019	176
5.4	Persentase Penduduk Lanjut Usia Bekerja Menurut Provinsi dan Status Pekerjaan Utama, 2019	177
5.5	Persentase Penduduk Lanjut Usia yang Termasuk <i>Precarious Work</i> Menurut Provinsi dan Tipe Daerah, 2019	178

Tabel	Judul	Halaman
5.6	Persentase Penduduk Lanjut Usia yang Bekerja di Sektor Informal Menurut Provinsi dan Tipe Daerah, 2019	179
5.7	Rata-rata dan Persentase Jumlah Jam Kerja dalam Seminggu dari Penduduk Lansia Bekerja Menurut Provinsi, 2019	180
5.8	Rata-rata dan Persentase Pendapatan/Upah/Gaji dari Penduduk Lansia Bekerja Menurut Provinsi, 2019	181
5.9	Persentase Penduduk Lanjut Usia yang Bekerja sebagai Buruh dan Memperoleh Upah Rendah Menurut Provinsi, Tipe Daerah, dan Jenis Kelamin, 2019	182
6.1.1-6.1.5	Persentase Penduduk Lansia Menurut Provinsi dan Status Kepemilikan Tempat Tinggal, 2019	183 – 187
6.2.1-6.2.5	Persentase Penduduk Lansia Menurut Provinsi dan Status Kelayakan Tempat Tinggal, 2019	188 – 192
6.3.1-6.3.5	Persentase Penduduk Lansia Menurut Provinsi dan Status Ekonomi Rumah Tangga, 2019	193 – 197
6.4	Persentase Penduduk Lansia yang Pernah Menjadi Korban Kejahatan Setahun Terakhir Menurut Provinsi dan Tipe Daerah, 2019	198
7.1	Persentase Rumah Tangga Lansia yang Membeli/Menerima Bantuan Sosial Beras Sejahtera (Bansos Rastra) dalam Empat Bulan Terakhir Menurut Provinsi dan Tipe Daerah, 2019	199
7.2	Rata-rata Banyaknya (kg) Beras Sejahtera yang Dibeli/Diterima Rumah Tangga Lansia Menurut Provinsi dan Tipe Daerah, 2019	200
7.3	Rata-rata Harga per kg (rupiah) Beras Sejahtera yang Dibeli/Diterima Rumah Tangga Lansia Menurut Provinsi dan Tipe Daerah, 2019	201
7.4	Persentase Rumah Tangga Lansia yang Memiliki Kartu PKH Menurut Provinsi dan Tipe Daerah, 2019	202
7.5	Persentase Rumah Tangga Lansia yang Masih Tercatat/Menjadi Penerima PKH Menurut Provinsi dan Tipe Daerah, 2019	203
7.6.1-7.6.3	Persentase Rumah Tangga Lansia Menurut Provinsi dan Kepemilikan Kartu Perlindungan Sosial (KPS)/Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), 2019	204 – 206

Tabel	Judul	Halaman
7.7	Persentase Penduduk Lansia yang Memiliki Jaminan Kesehatan Menurut Provinsi, Tipe Daerah, dan Jenis Kelamin, 2019	207
7.8	Persentase Penduduk Lansia yang Memiliki Jaminan Kesehatan Menurut Provinsi dan Jenis Jaminan Kesehatan, 2019	208
7.9	Persentase Rumah Tangga Lansia yang Memiliki Jaminan Sosial Menurut Provinsi dan Tipe Daerah, 2019	209
7.10	Persentase Rumah Tangga Lansia yang Memiliki/Menerima Jaminan Sosial Menurut Provinsi dan Jenis Jaminan Sosial, 2019	210

<https://www.bps.go.id>

DAFTAR *SAMPLING ERROR*

Tabel	Judul	Halaman
A.1-A.5	<i>Sampling Error</i> Persentase Penduduk Lansia menurut Provinsi, 2019	215 – 219
B.1-B.3	<i>Sampling Error</i> Persentase Rumah Tangga Penduduk Lansia menurut Provinsi, 2019	220 – 222
C.1-C.5	<i>Samplin Error</i> Persentase Penduduk Lansia yang Tinggal Sendiri menurut Provinsi, 2019	223 – 227
D.1-D.5	<i>Sampling Error</i> Rata-rata Lama Sekolah dari Penduduk Lansia Menurut Provinsi, 2019	228 – 232
E.1-E.5	<i>Sampling Error</i> Angka Kesakitan Penduduk Lansia Menurut Provinsi, 2019	233 – 237
F.1-F.5	<i>Sampling Error</i> Persentase Penduduk Lanjut Usia yang Bekerja Menurut Provinsi, 2019	238 – 242
G.1-G.5	<i>Sampling Error</i> Persentase Penduduk Lansia yang Tinggal di Rumah Tangga Ekonomi Bawah menurut Provinsi, 2019	243 – 247
H.1-H.3	<i>Sampling Error</i> Persentase Rumah Tangga Lansia yang Menerima Beras Sejahtera (Rastra) menurut Provinsi, 2019	248 – 250
I.1-I.3	<i>Sampling Error</i> Persentase Rumah Tangga Lansia yang Memiliki Jaminan Sosial menurut Provinsi, 2019	251 – 253
J.1-J.5	<i>Sampling Error</i> Persentase Penduduk Lansia yang Memiliki Jaminan Kesehatan menurut Provinsi, 2019	254 – 258

DAFTAR SINGKATAN

1. AHH : Angka Harapan Hidup
2. AMH : ANgka Melek Huruf
3. ART : Anggota Rumah Tangga
4. ASLUT : Asistensi Sosial Lanjut Usia
5. Bansos Rastra : Bantuan Sosial Beras Sejahtera
6. BPJS : Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan
7. BPNT : Bantuan Pangan Non Tunai
8. BPS : Badan Pusat Statistik
9. ILO : *International Labour Organization*
10. Jamkesda : Jaminan Kesehatan Daerah
11. Jamkesmas : Jaminan Kesehatan Masyarakat
12. JKN : Jaminan Kesehatan Nasional
13. JSLU : Program Jaminan Sosial Lanjut Usia
14. KB : Keluarga Berencana
15. KDRT : Kekerasan Dalam Rumah Tangga
16. KKS : Kartu Keluarga Sejahtera
17. KPS : Kartu Perlindungan Sosial
18. KRT : Kepala Rumah Tangga
19. KUR : Kredit Usaha Rakyat
20. Lansia : Lanjut usia
21. LKS-LU : Lembaga Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia
22. LTC : *Long Term Care* (Perawatan Jangka Panjang)
23. LSM : Lembaga Swadaya Masyarakat
24. ODR : *Old Dependency Ratio* (Rasio ketergantungan lansia)
25. Ormas : Organisasi Masyarakat
26. PBI : Penerima Bantuan Iuran
27. PHK : Pemutusan Hubungan Kerja
28. PKH : Program Keluarga Harapan
29. Pustu : Puskesmas Pembantu
30. RPJMN : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
31. RSE : *Relative Standard Error*
32. RTS : Rumah Tangga Sasaran
33. Sakernas : Survei Angkatan Kerja Nasional
34. SD : Sekolah Dasar

- 35. SDM : Sumber Daya Manusia
- 36. SMA : Sekolah Menengah Atas
- 37. SMART : Sehat, Mandiri, Aktif, Produktif
- 38. TIK : Teknologi Informasi dan Komunikasi
- 39. Toga : Tokoh Agama
- 40. Toma : Tokoh Masyarakat
- 41. PT : Perguruan Tinggi
- 42. Susenas : Survei Sosial Ekonomi Nasional
- 43. TPAK : Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
- 44. KPM : Keluarga Penerima Manfaat

<https://www.bps.go.id>



PERLINDUNGAN
SOSIAL



EKONOMI



TANTANGAN
PENUAAN
PENDUDUK



LINGKUNGAN
KELUARGA



KESEHATAN

PENDAHULUAN

1



LANSIA MENJADI
POTENSI
JIKA
SEHAT, MANDIRI,
AKTIF, DAN
PRODUKTIF

Lanjut usia menurut UU Nomor 13 Tahun 1998 adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun ke atas. Penduduk lanjut usia terus mengalami peningkatan seiring kemajuan di bidang kesehatan yang ditandai dengan meningkatnya angka harapan hidup dan menurunnya angka kematian. Perkembangan demografi ini dapat membawa dampak di bidang kesehatan, ekonomi, dan sosial. Untuk itu diperlukan data terkait kelanjutusiaan sebagai bahan pemetaan dan strategi kebijakan sehingga pertumbuhan jumlah penduduk lansia menjadi potensi yang turut membangun bangsa.



Lansia adalah
seseorang yang
telah mencapai
usia 60 (enam
puluh) tahun ke
atas

UU Nomor 13 Tahun
1998

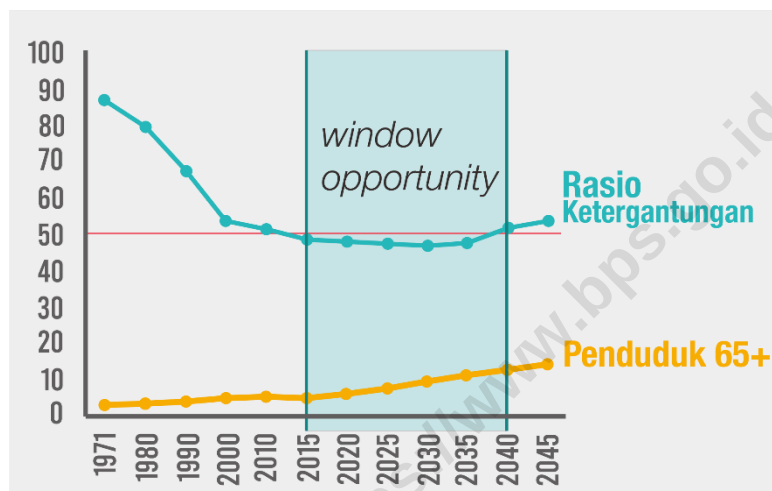
Penuaan Penduduk di Indonesia

Tahun 1960an, Indonesia berada pada era tambahan jumlah bayi yang luar biasa, yang dikenal dengan *baby boom*. Masa ini berlangsung sampai dengan digerakkannya program KB di tahun 1970an yang kemudian berhasil menekan pertumbuhan penduduk melalui kelahiran. Perbaikan ketersediaan sumber pangan dan perbaikan kesehatan mengurangi risiko penyakit dan menambah usia harapan hidup penduduk. Hasil perbaikan tersebut, kini membawa bayi-bayi pada era *baby boom* menua, sehingga memperlebar piramida kelompok penduduk tua. Era ini diperkirakan akan terus berlangsung, dan pada tahun 2050 diperkirakan jumlah mereka mencapai 2,1 miliar di seluruh dunia (UN, 2017).

Perubahan demografi ini tak pelak juga terjadi di Indonesia. Sebagai imbas dari tingkat kelahiran yang mengecil dan jumlah penduduk usia produktif yang meningkat, angka ketergantungan penduduk Indonesia mulai turun di bawah angka 50 persen pada tahun 2015. Saat inilah Indonesia mulai memasuki masa bonus demografi, dimana penduduk usia produktif berada pada jumlah yang lebih banyak sehingga beban rasio ketergantungan penduduk berada pada titik di bawah 50

persen. Angka tersebut diprediksi akan kembali meningkat di atas 50 persen pada tahun 2045, yang juga bermakna kembali naiknya beban ekonomi. Kembali naiknya angka ketergantungan tersebut diiringi dengan semakin besarnya jumlah penduduk lansia. Besaran jumlah lansia Indonesia di masa depan tersebut tentunya bisa berdampak positif maupun negatif.

Gambar 1.1 Persentase Penduduk Usia 65 Tahun Ke Atas dan Rasio Ketergantungan, 1971-2045



Sumber : BPS, Hasil Sensus Penduduk 2010
BPS, Proyeksi Penduduk Indonesia (2015-2045)

Tantangan Utama Lansia Indonesia

Proses penuaan penduduk berdampak pada berbagai aspek kehidupan, ekonomi maupun sosial. Penurunan fungsi tubuh seiring kelanjutusiaan dapat menimbulkan permasalahan kesehatan, yang meningkatkan risiko disabilitas. Kondisi ini menghadapi lansia pada berbagai kebutuhan tambahan dari sisi kesehatan dan asistensi. Usia lansia juga secara siklus akan menggeser lansia kepada usia pensiun, sebagai bagian dari kelompok yang tidak produktif secara ekonomi. Lansia Indonesia yang banyak disebutkan ‘tua sebelum kaya’, tentunya akan lebih memperbesar kebergantungan lansia pada kelompok penduduk usia produktif. Sehingga kelanjutusiaan dan segala

kebutuhannya menuntut keluarga penanggung lansia memperoleh pendapatan ekstra untuk membantu memenuhi kebutuhan tersebut. Kondisi ini menghadapi penduduk usia produktif menjadi bagian dari *sandwich generation*. Mereka harus menghidupi anak istri di dalam keluarga inti, orang tua, dan dirinya sendiri. Termasuk mempersiapkan masa pensiun mereka sendiri.

Dari sisi sosial, keberadaan anggota rumah tangga lain utamanya pasangan hidup lansia sangat berarti untuk menemani dan menghabiskan sisa perjalanan hidup. Namun, pergeseran tatanan hidup keluarga dari keluarga besar menjadi keluarga inti tentunya menjadi kendala tersendiri bagi kebutuhan dukungan hidup bagi lansia ini.

Berbagai kondisi kelanjutusiaan tersebut, merupakan suatu siklus hidup manusia yang dapat disikapi dan dipersiapkan sejak dini. Bagaimana kondisi lansia di hari ini ditentukan oleh pola hidup mereka di masa lalu. Lansia akan menjadi potensi apabila sehat, mandiri, aktif, produktif, dan berdayaguna.

Lansia Indonesia dalam Bingkai Kebijakan

Perhatian pemerintah terhadap kehidupan para lansia Indonesia diatur dalam Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. Selanjutnya pada tahun 1998, perhatian ini diperkuat dengan diterbitkannya UU No.13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lansia. Selain itu, Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa setiap orang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan

perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya. Pasal-Pasal tersebut bermakna bahwa penghormatan, pelindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan Hak Asasi Manusia oleh Pemerintah harus dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat di Indonesia. Termasuk perlakuan dan perlindungan khusus bagi kelompok rentan seperti kelompok lanjut usia.

Guna merealisasikan kewajiban dan tanggung jawab yang diundangkan tersebut, Pemerintah menyempurnakan melalui dokumen-dokumen turunan, antara lain RPJMN 2015-2019, dengan memerhatikan dua hal pokok, yaitu: peningkatan pemenuhan hak dasar dan inklusivitas, serta penguatan skema perlindungan sosial bagi lansia. Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia Tahun 2015-2019, juga memuat sasaran, strategi, dan fokus kegiatan prioritas lansia. Selain itu, ada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2016 Tentang rencana Aksi Nasional Kesehatan Lanjut Usia Tahun 2016-2019, yang ditujukan untuk memberikan acuan bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lain berupa langkah-langkah konkrit yang harus dilaksanakan secara berkesinambungan dalam rangka peningkatan derajat kesehatan lanjut usia untuk mencapai lanjut usia yang sehat, mandiri, aktif, produktif dan berdayaguna bagi keluarga dan masyarakat. Dengan semakin banyak perhatian yang tercurah terkait kelanjutusiaan, diharapkan memberikan regulasi yang terarah, terstruktur dan komprehensif. Sehingga menempatkan lansia Indonesia dalam sudut pandang yang lebih optimistis.

Data Kelanjutusiaan untuk Pembangunan

Mengingat keberadaan lansia Indonesia yang persentasenya kian meningkat dari waktu ke waktu dan telah menciptakan tantangan tersendiri, dibutuhkan kebijakan

yang sesuai dengan kebutuhan lansia serta mempertimbangkan segala aspek kehidupan. Oleh karena itu, keberadaan data dan informasi terkait kelanjutusiaan, baik pada tingkat nasional maupun regional mutlak dibutuhkan untuk memetakan situasi dan kondisi terkini lansia Indonesia. Menyikapi kondisi tersebut, BPS melakukan penyusunan informasi terkait lansia dalam buku publikasi “Statistik Lanjut Usia 2019”. Publikasi tersebut memuat informasi lansia yang dilihat dari berbagai aspek, yaitu: demografi, pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, sosial ekonomi, dan perlindungan sosial serta program-program pro lansia yang sudah dijalankan oleh pemerintah. Secara keseluruhan, publikasi ini menyajikan data dan informasi tentang lansia yang sangat bermanfaat sebagai bahan perencanaan, monitoring dan evaluasi kebijakan maupun program pembangunan di bidang kelanjutusiaan berdasarkan data yang bersumber dari hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2019, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) 2019, serta data sekunder dari Kementerian/Lembaga.

Publikasi ini disusun secara sistematis menjadi delapan bagian dengan mempertimbangkan aspek-aspek yang mampu menggambarkan kehidupan lansia Indonesia serta berbagai fenomena yang menyertainya. Ringkasan eksekutif di bagian awal publikasi dimaksudkan untuk memberikan gambaran ringkas dari keseluruhan isi publikasi. Uraian yang rinci disajikan dalam bab-bab sesuai tema bahasan dari publikasi. Bagian pertama (Bab 1) menyajikan bagaimana perjalanan penuaan penduduk Indonesia dari waktu ke waktu beserta tantangan yang akan dihadapinya. Selanjutnya, bagaimana potret lansia Indonesia dari sudut pandang demografi dijabarkan pada Bab 2. Lansia juga memiliki potensi yang dapat diberdayakan guna menunjang data lansia untuk perencanaan, monitoring dan evaluasi kebijakan pembangunan nasional. Potensi lansia ditinjau dari sisi

pendidikan disajikan pada Bab 3, sementara itu potensi lansia dari sisi kesehatan disajikan pada Bab 4. Selanjutnya, untuk mengukur keterlibatan lansia secara nyata dalam menggerakkan perekonomian negeri ini dapat dilihat pada Bab 5. Kondisi sosial ekonomi rumah tangga lansia dijabarkan pada Bab 6. Selanjutnya, program-program yang sudah diterima oleh rumah tangga lansia digambarkan pada Bab 7. Bab 8 menjelaskan sudah sejauh mana Kementerian/Lembaga sudah menjalankan program pro lansia. Sebagai penutup dari penulisan buku ini ditampilkan catatan teknis yang menjelaskan beberapa istilah yang digunakan dalam penulisan buku ini serta *Relative Standard Error (RSE)* yang menggambarkan rentang kesalahan data hasil survei.



TERDAPAT **9,60%**
LANSA DI INDONESIA

DEMOGRAFI

2



RASIO KETERGANTUNGAN LANSAIA
TERHADAP PENDUDUK PRODUKTIF (15-59 TAHUN)
MENINGKAT MENJADI **15,01%**

Transisi demografi yang terjadi di Indonesia telah memberikan dampak yang signifikan terhadap pergeseran umur penduduk. Baby boom yang telah terjadi pada beberapa dekade yang lalu dan munculnya upaya penekanan laju pertumbuhan penduduk yang diiringi membaiknya sisi kesehatan manusia Indonesia memberikan efek domino di saat ini. Hasilnya, seperti yang terlihat saat ini, dimana angka kelahiran relatif menurun antar waktu dan angka penduduk lansia semakin tumbuh melesat. Untuk mengambil langkah lebih lanjut terkait penuaan penduduk di Indonesia, perlu diketahui bagaimana komposisi lansia di Indonesia melalui sudut pandang demografi. Hal ini bermanfaat sebagai bahan acuan dalam memetakan kondisi lansia Indonesia guna menentukan kebijakan yang tepat dan komprehensif.

Struktur Umur Penduduk Lansia



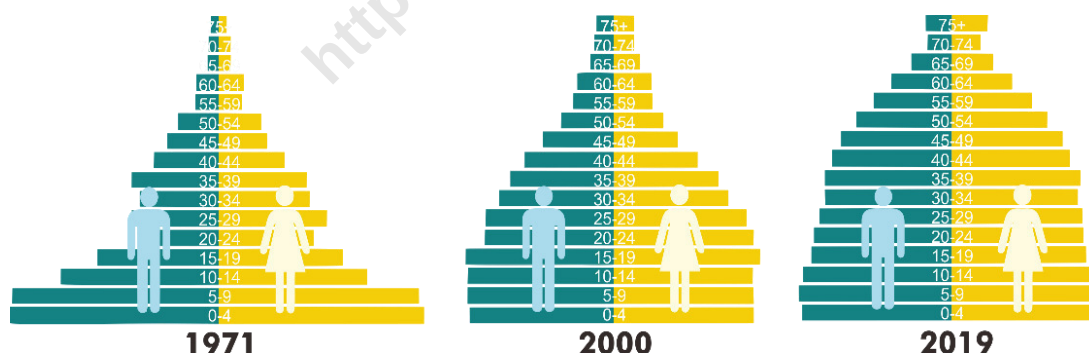
6 dari 10
lansia merupakan
kelompok
lansia muda
(60-69 tahun)

Proses menua merupakan proses berkurangnya daya tahan tubuh dalam menghadapi rangsangan dari dalam maupun luar tubuh. Pada masa ini, sedikit demi sedikit seseorang akan mengalami kemunduran fisiologis, psikologis, dan sosial, dimana perubahan ini akan berpengaruh terhadap seluruh aspek kehidupan termasuk pada aspek kesehatan. Pesatnya peningkatan penduduk tua atau lanjut usia merupakan dampak dari peningkatan usia harapan hidup sehingga membawa konsekuensi bertambahnya jumlah dan persentase penduduk usia lanjut. Keberhasilan pembangunan terkait perbaikan kualitas kesehatan dan kondisi sosial masyarakat yang meningkat menjadi faktor pendorong tingginya jumlah dan persentase penduduk lanjut usia. Hal tersebut tentu saja tidak serta merta terjadi begitu saja akan tetapi telah melalui suatu proses yang berlangsung cukup lama, dimana saat ini prevalensi kematian dan kelahiran sudah relatif stabil.

Sebagaimana yang terlihat pada Gambar 2.1, selama kurun waktu 1971-2019 terlihat bahwa struktur umur penduduk Indonesia terus mengalami perubahan dan mulai bergeser menuju usia lanjut. Mereka yang sebelumnya merupakan bonus dari demografi dan terlahir di era *baby boom*, mulai bergeser menjadi penduduk produktif yang nantinya akan menjadi penduduk lansia.

Menjadi lansia artinya menduduki puncak dari siklus hidup manusia dan setiap fase di dalamnya bagaikan rantai kehidupan yang saling berkaitan. Oleh karena itu, keadaan lansia saat ini ditentukan oleh bagaimana kehidupan mereka di masa lalu. Mempersiapkan pralansia untuk menyongsong masa tua dengan tangguh dan produktif perlu dilakukan sejak dini dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat. Hal ini bertujuan agar sekitar 17 persen pralansia Indonesia di tahun 2019 ini tetap memiliki kesehatan prima, produktivitas tinggi, hidup sejahtera dan bahagia hingga memasuki masa lansia.

Gambar 2.1 Piramida Penduduk Indonesia Tahun 1971, 2000, 2019



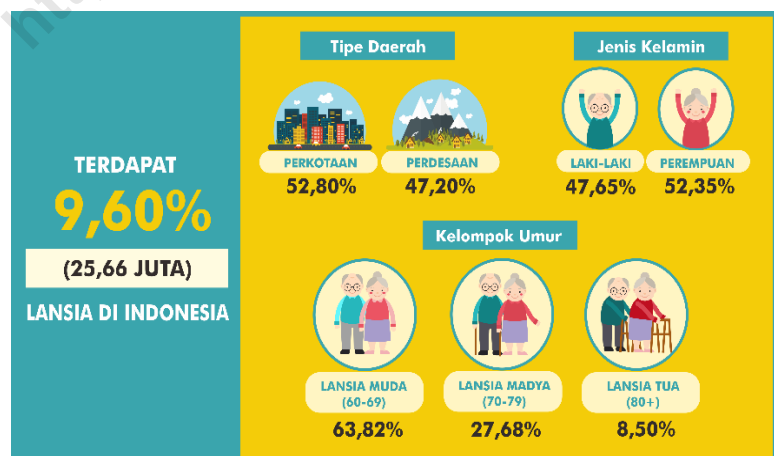
Sumber : SP 1971, SP 2000, dan Proyeksi Penduduk Indonesia 2019

Selama kurun waktu hampir lima dekade (1971-2019), persentase penduduk lansia Indonesia meningkat sekitar dua kali lipat. Pada tahun 2019, persentase lansia mencapai 9,60 persen atau sekitar 25,64 juta orang. Kondisi ini menunjukkan bahwa Indonesia sedang bertransisi menuju ke arah penuaan penduduk

karena persentase penduduk berusia di atas 60 tahun mencapai di atas 7 persen dari keseluruhan penduduk dan akan menjadi negara dengan struktur penduduk tua (*ageing population*) jika sudah berada lebih dari 10 persen. Fenomena ini merupakan cerminan dari meningkatnya angka harapan hidup penduduk Indonesia. Apabila diimbangi dengan kemampuan kelompok lanjut usia yang bisa mandiri, berkualitas, dan tidak menjadi beban masyarakat, maka secara tidak langsung *ageing population* akan memberikan pengaruh positif terhadap pembangunan nasional.

Keberadaan penduduk lansia tersebar baik di perkotaan maupun perdesaan, dimana lansia yang tinggal di perkotaan lebih tinggi dari perdesaan (52,80 persen berbanding 47,20 persen). Adapun persentase lansia di Indonesia didominasi oleh lansia muda (kelompok umur 60-69 tahun) yang persentasenya mencapai 63,82 persen, sisanya adalah lansia madya (kelompok umur 70-79 tahun) sebesar 27,68 persen dan lansia tua (kelompok umur 80+ tahun) sebesar 8,50 persen sebagaimana yang dapat dilihat pada Gambar 2.2 berikut.

Gambar 2.2 Distribusi Penduduk Lansia, 2019



Sumber: BPS, Susenas Maret 2019

Kelompok lanjut usia biasanya merasakan kesepian di tengah masyarakat. Kondisi tersebut akan semakin buruk jika ditambah dengan perekonomian yang sulit dan kondisi sosial

yang tidak kondusif sehingga menyebabkan lansia stres, depresi, hingga *schizophrenia*. Secara biologis, daya tahan fisik penduduk lansia semakin lemah, sehingga mereka lebih rentan terhadap serangan penyakit. Hal ini disebabkan karena terjadinya penurunan dalam struktur dan fungsi sel, jaringan, serta sistem organ pada tubuh lansia. Keterlibatan lansia terhadap sumber daya ekonomi, pengaruh terhadap pengambilan keputusan, serta luasnya hubungan sosial juga semakin menurun. Keterbatasan-keterbatasan yang dimiliki lansia tersebut menjadikan mereka tidak memiliki pilihan ruang yang lebih luas sehingga cenderung lebih nyaman berada dalam komunitas dengan kultur yang relatif sama.

Tabel 2.1 Persentase Penduduk Lansia Menurut Kelompok Umur, 2019

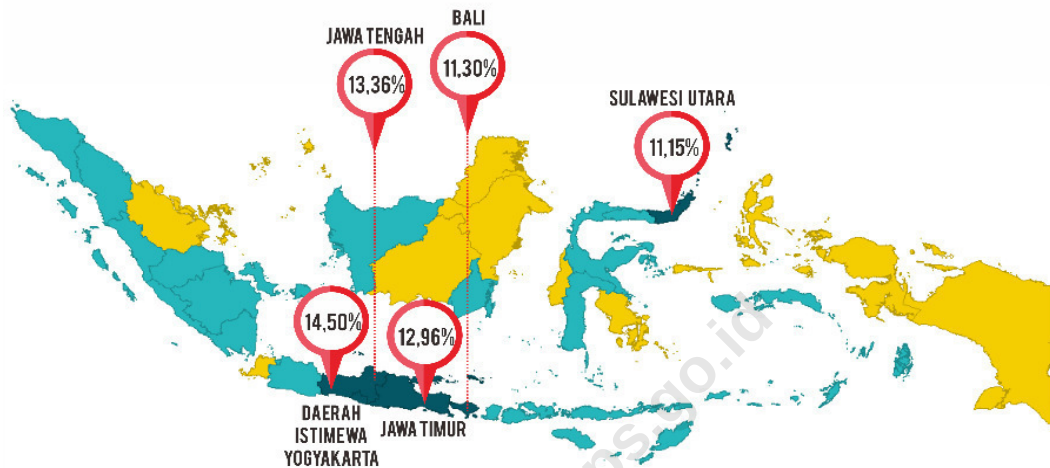
Karakteristik	Kelompok Umur				
	Pralansia (45-59)	Lansia Muda (60-69)	Lansia Madya (70-79)	Lansia Tua (80+)	Lansia (60+)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total	17,16	6,12	2,66	0,82	9,60
Tipe Daerah					
Perkotaan	17,14	5,86	2,49	0,72	9,07
Perdesaan	17,19	6,46	2,86	0,94	10,27
Jenis Kelamin					
Laki-Laki	17,01	6,07	2,38	0,64	9,10
Perempuan	17,31	6,18	2,93	0,99	10,10

Sumber: BPS, Susenas Maret 2019

Data Susenas Maret 2019 menunjukkan bahwa provinsi dengan persentase penduduk lansia terbanyak pada tahun 2019 adalah Daerah Istimewa Yogyakarta (14,50 persen), Jawa Tengah (13,36 persen), Jawa Timur (12,96 persen), Bali (11,30 persen), dan Sulawesi Utara (11,15 persen). Kelima provinsi tersebut merupakan provinsi yang memiliki struktur penduduk

tua mengingat persentase lansianya sudah berada di atas 10 persen (Lampiran 2.1.5).

Gambar 2.3 Lima Provinsi dengan Struktur Penduduk Tua di Indonesia, 2019



Sumber: BPS, Susenas Maret 2019



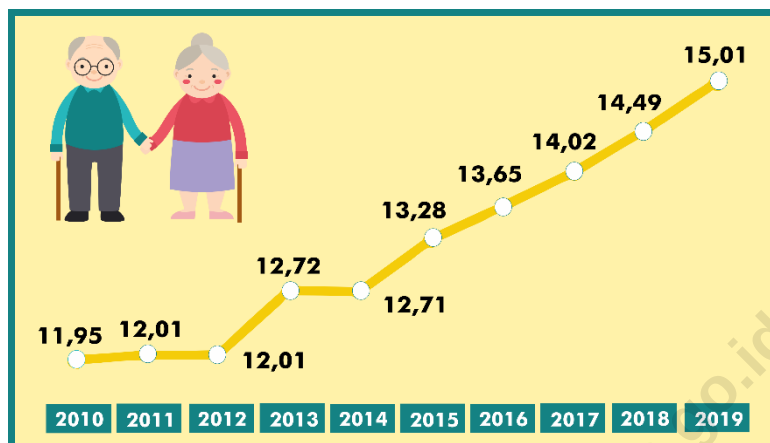
Lima provinsi di Indonesia memiliki struktur penduduk tua

Meningkat semakin meningkatnya jumlah penduduk lanjut usia di Indonesia, maka pengembangan di bidang pelayanan lansia perlu mempertimbangkan kebutuhan mereka seiring dengan menurunnya metabolisme tubuh agar memberikan rasa nyaman dan aman bagi lansia baik secara fisik maupun psikologis. Hal ini penting guna mendukung lansia dalam mengaktualisasikan dirinya secara optimal dalam berinteraksi sosial, serta mudah mengakses pelayanan yang dibutuhkan. Investasi ini perlu dilakukan di seluruh provinsi dan pelosok negeri terutama wilayah dengan jumlah penduduk lanjut usia yang lebih besar.

Secara ekonomi, penduduk lansia lebih sering dipandang sebagai beban daripada sebagai sumber daya. Penduduk lansia dianggap sudah tidak produktif dan hidupnya bergantung pada generasi yang lebih muda. Beberapa penduduk lansia masih berperan dalam dunia kerja, namun produktivitasnya sudah menurun sehingga umumnya mereka

memiliki pendapatan yang lebih rendah dibandingkan penduduk usia produktif.

Gambar 2.4 Rasio Ketergantungan Penduduk Lansia, 2010-2019



Sumber: BPS, Susenas Maret 2019

Rasio ketergantungan lansia terhadap penduduk produktif terus meningkat. Pada tahun 2019, tercatat bahwa rasio ketergantungan lansia sebesar 15,01. Artinya, pada tahun 2019 setiap 100 orang penduduk usia produktif (usia 15-59 tahun) harus menanggung 15 orang penduduk lansia. Banyaknya populasi lansia menyebabkan tuntutan perawatan yang lebih besar sehingga menambah tanggungan beban ekonomi penduduk usia produktif untuk membiayai penduduk lansia. Oleh karena itu, penuaan berpengaruh besar terhadap generasi lainnya. Angka rasio ketergantungan penduduk lansia meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk lanjut usia karena bertambahnya jumlah penduduk lanjut usia cenderung menambah beban tanggungan penduduk usia produktif. Apabila jumlah penduduk lanjut usia semakin meningkat, maka hal ini berkaitan dengan tuntutan biaya perawatan lansia yang cukup besar. Sebaliknya, apabila penduduk lansia dalam kondisi sehat, aktif, dan produktif, maka besarnya jumlah penduduk lansia berdampak positif terhadap angka rasio ketergantungan (umur) serta kondisi sosial ekonomi keluarga, masyarakat, dan negara.

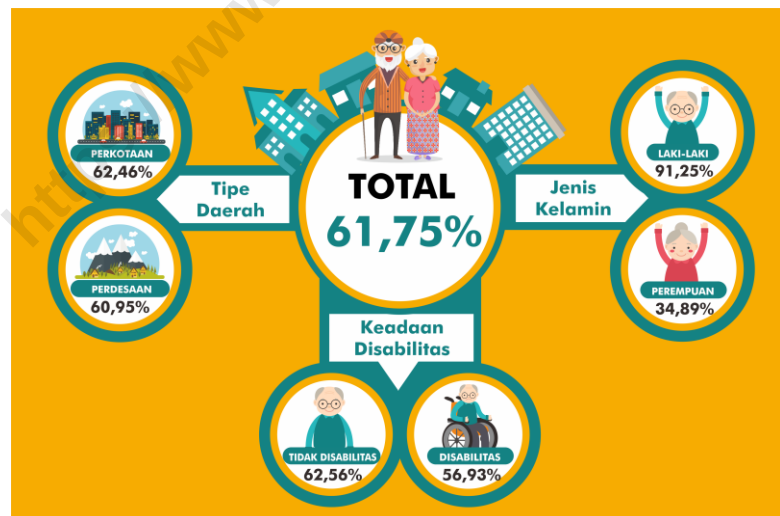


1 dari 4
rumah tangga di
Indonesia
merupakan
rumah tangga
lansia

Lansia dalam Rumah Tangga

Jumlah lansia yang semakin bertambah tiap tahunnya, berpengaruh terhadap banyaknya jumlah rumah tangga yang dihuni oleh lansia. Dalam lima tahun terakhir, rumah tangga lansia bertambah hampir 3 persen (dari 25,14 persen menjadi 27,88 persen). Dengan kata lain, di antara empat rumah tangga di Indonesia, satu di antaranya merupakan rumah tangga lansia. Berdasarkan angka proyeksi penduduk Indonesia tahun 2010-2035, penduduk lansia semakin bertambah tiap tahunnya. Hal ini perlu menjadi perhatian bagi seluruh kalangan, baik keluarga maupun masyarakat di sekitar lingkungan tempat tinggal mereka untuk memberikan dukungan, baik sosial maupun ekonomi.

Gambar 2.5 Persentase Penduduk Lansia yang Menjadi Kepala Rumah Tangga (KRT), 2019



Sumber: BPS, Susenas Maret 2019

Jika dilihat secara total, persentase lansia yang menjadi Kepala Rumah Tangga (KRT) relatif sama dengan tahun sebelumnya yaitu ada 61,75 persen. Dengan kata lain, enam dari sepuluh lansia di Indonesia berperan sebagai KRT, terlepas apakah mereka produktif atau tidak. Masih banyaknya lansia yang berperan sebagai KRT berkaitan dengan sudut pandang

sosial masyarakat tradisional Asia, termasuk Indonesia, dimana penduduk lansia menduduki kelas sosial yang tinggi sehingga harus dihormati oleh masyarakat yang usianya lebih muda. Sistem budaya patrilineal yang masih sangat melekat di masyarakat Indonesia mengakibatkan masih tingginya lansia laki-laki yang menjadi KRT. Data Susenas Maret 2019 menunjukkan bahwa sembilan dari sepuluh lansia laki-laki menjadi KRT.

Salah satu fenomena yang menarik adalah adanya lansia perempuan yang menjadi KRT dengan besaran mencapai 34,89 persen. Keadaan tersebut kemungkinan berhubungan dengan tingginya Angka Harapan Hidup (AHH) perempuan dibandingkan laki-laki. Selain itu, kebanyakan lansia perempuan hidup menua dengan status cerai mati dan memilih untuk hidup tanpa pasangan dibandingkan lansia laki-laki yang cenderung untuk menikah kembali. Beberapa penelitian sebelumnya mengungkapkan bahwa rumah tangga yang dikepalai oleh lansia perempuan cenderung memiliki status ekonomi yang relatif rendah.



1 dari 3 lansia
perempuan
menjadi KRT

Status Tinggal Lansia

Ketika manusia memasuki masa tua, lansia akan mengalami perubahan fisik, mental sosial, dan kesehatan, sehingga tidak sedikit lansia yang merasa sendirian, frustrasi, dan kehilangan kepercayaan diri (Osman et al, 2012). Pada kondisi inilah terlihat bahwa lansia bergantung kepada penduduk yang lain untuk mendapatkan dukungan/bantuan baik secara ekonomi maupun sosial. Idealnya, berada dekat keluarga adalah tempat terbaik untuk menghabiskan masa tua, mengingat keluarga merupakan pemberi dukungan yang paling potensial terhadap kelangsungan hidup mereka. Lansia dapat menjadi usia yang bahagia jika memiliki kesehatan yang baik, lingkungan sosial yang kuat, kondisi ekonomi yang memadai serta hubungan interpersonal yang baik. Adanya keluarga atau

pasangan akan sangat membantu lansia untuk dapat menjalani kehidupannya sehari-hari baik fisik maupun psikis. Pendampingan dari pasangan atau keluarga akan lebih berarti dibandingkan dukungan dari orang lain yang tidak memiliki hubungan sama sekali. Dengan adanya dukungan dan pendampingan tersebut, risiko terkena penyakit dan kematian pada lansia dapat dikurangi.

Tabel 2.2 Persentase Penduduk Lansia Menurut Status Perkawinan, 2019

Karakteristik	Status Perkawinan				Total
	Belum Kawin	Kawin	Cerai Hidup	Cerai Mati	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total	1,05	60,73	2,31	35,91	100,00
Tipe Daerah					
Perkotaan	1,21	60,25	2,46	36,07	100,00
Perdesaan	0,86	61,28	2,13	35,73	100,00
Jenis Kelamin					
Laki-Laki	0,79	82,05	1,62	15,53	100,00
Perempuan	1,28	41,33	2,93	54,46	100,00

Sumber: BPS, Susenas Maret 2019

Sebagian besar lansia masih mempunyai pasangan, sekitar 60,37 persen lansia berstatus kawin pada tahun 2019, sedangkan sisanya tidak memiliki pasangan, baik karena belum kawin, cerai hidup, maupun cerai mati. Tabel 2.2 menyatakan bahwa pola status kawin lansia di perkotaan relatif sama dengan di perdesaan. Persentase lansia yang kawin di perkotaan sekitar 60,25 persen, sedangkan di perdesaan sekitar 61,28 persen. Dukungan sosial yang terpenting adalah dukungan yang berasal dari keluarga (Kaplan, 2010). Keluarga memberikan intervensi perawatan kesehatan efektif untuk meningkatkan kualitas hidup lansia yang optimal dan dalam memenuhi aktivitas sehari-hari lansia termasuk status kesehatannya (Jikun, 2012). Jika dilihat

berdasarkan jenis kelamin, persentase lansia laki-laki yang kawin (82,05 persen) banyaknya dua kali lipat dari lansia perempuan yang kawin (41,33 persen). Hal ini diasumsikan karena umumnya lansia laki-laki tidak dapat mengurus kebutuhannya sendiri sehingga memerlukan pasangan untuk membantunya, atau dengan kata lain adanya kecenderungan lansia laki-laki untuk menikah lagi ketika menduda.

Tabel 2.3 Persentase Penduduk Lansia Menurut Status Tinggal Bersama, 2019

Karakteristik	Status Tinggal Bersama					Total
	Tinggal Sendiri	Bersama Pasangan	Bersama Keluarga	Tiga Generasi	Lainnya	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Total	9,38	20,03	27,30	40,64	2,66	100,00
Tipe Daerah						
Perkotaan	8,74	18,84	29,97	39,63	2,81	100,00
Perdesaan	10,10	21,35	24,31	41,76	2,48	100,00
Jenis Kelamin						
Laki-Laki	4,98	25,28	32,25	36,04	1,45	100,00
Perempuan	13,39	15,24	22,79	44,82	3,76	100,00

Sumber: BPS, Susenas Maret 2019

Pola bertempat tinggal lansia juga berkaitan erat dengan perawatan kesehatan lansia. Tabel 2.3 menunjukkan persentase penduduk lansia berdasarkan status tinggal lansia, yaitu lansia yang tinggal bersama pasangannya (20,03 persen), bersama keluarga (27,30 persen), dan tiga generasi (40,64 persen). Umumnya, kehidupan lansia yang masih memiliki pasangan akan diperhatikan oleh pasangannya. Sedangkan lansia yang berstatus sebagai orang tua/ mertua kehidupannya akan diperhatikan oleh anak atau menantunya. Memberi dukungan kepada penduduk lansia juga diyakini merupakan tanggung jawab dan kewajiban keluarga, terutama anak sebagai keturunannya. Anak dianggap sebagai tempat bergantung jika mereka sudah tua dan tidak sanggup hidup sendiri, baik karena

alasan ekonomi maupun alasan kesehatan. Melalui dukungan keluarga, lansia akan merasa masih ada yang memperhatikan. Dukungan keluarga dapat diwujudkan dengan memberikan perhatian, bersikap empati, memberikan dorongan, memberikan saran, memberikan pengetahuan dan sebagainya.

Peningkatan persentase lansia yang tinggal dengan anggota keluarga maupun pasangannya mencerminkan peningkatan kesadaran keluarga dalam memperhatikan kesejahteraan lansia. Hal menarik lainnya yaitu keberadaan lansia yang tinggal sendiri, di mana persentasenya mencapai 9,38 persen. Jika dilihat berdasarkan tipe daerah, persentase lansia di perdesaan yang tinggal sendiri lebih tinggi dibandingkan lansia di perkotaan (10,10 persen berbanding 8,74 persen). Bahkan, terdapat kesenjangan yang cukup tinggi pada lansia yang tinggal sendiri antara lansia perempuan dengan laki-laki (13,39 persen berbanding 4,98 persen).

Menurut WHO (1977) lansia yang tinggal sendiri digambarkan sebagai kelompok yang berisiko dan membutuhkan perhatian khusus (Iliffe dkk. 1992). Isu mengenai lansia yang tinggal sendiri akan menjadi semakin menarik jika kita mengetahui hal-hal yang melatarbelakangi fenomena ini, apakah tinggal sendiri merupakan bagian dari pilihan hidup para lansia karena tidak memiliki anak, tidak memiliki pasangan, tidak memiliki keluarga, telantar atau disisihkan dari kehidupan keluarga besar mereka. Untuk menjawabnya memang dibutuhkan penelitian lebih lanjut terkait kehidupan lansia.



RATA-RATA LANSIA
BERSEKOLAH
SAMPAI KELAS
4 SD /
SEDERAJAT

PENDIDIKAN

3

RATA-RATA LAMA
SEKOLAH
MENURUT UMUR

TOTAL

4,98
TAHUN

LANSIA MUDA
(60-69)



5,52
TAHUN

LANSIA MADYA
(70-79)



4,40
TAHUN

LANSIA TUA
(80+)



2,27
TAHUN

<https://www.bps.go.id>

Lansia saat ini adalah mereka yang lahir pada era tahun 1950-an. Sementara itu, kita semua tahu bahwa pendidikan di negeri ini baru mulai digiatkan pada awal tahun 1970-an melalui SD Inpres. Oleh karenanya, masih banyak lansia yang belum terpapar dengan dunia pendidikan. Salah satu indikator capaian pendidikan lansia terlihat melalui kemampuan baca tulis mereka. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat sejauh mana tingkat pendidikan lansia pada pembahasan berikut.

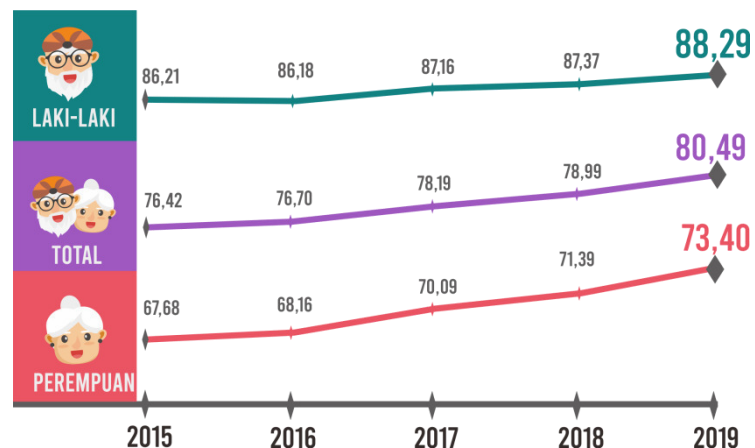


AMH Lansia
cenderung
meningkat dalam
lima tahun terakhir

Kemampuan Baca Tulis Lansia

Melek huruf merupakan modal dasar yang paling utama dari setiap individu untuk mensejajarkan diri dengan perkembangan zaman. Seseorang akan lebih mudah menjalani hidup dengan didukung oleh kemampuan membaca dan menulis. Akses informasi akan lebih terbuka bagi mereka yang melek huruf. Pemerintah menyelenggarakan program keaksaraan fungsional untuk membantu penduduk yang buta huruf belajar membaca dan menulis.

Gambar 3.1 Angka Melek Huruf Lansia 2015-2019



Sumber: BPS, Susenas Maret 2019

Hasil Susenas menunjukkan Angka Melek Huruf (AMH) lansia cenderung meningkat dalam lima tahun terakhir,

dimana AMH pada tahun 2019 berada di angka 80 persen. Dalam kurun waktu lima tahun, AMH lansia laki-laki naik hanya sebesar dua persen. Sedangkan AMH lansia perempuan naik sebesar enam persen. Hal ini memperlihatkan bagaimana akses pendidikan bagi kaum perempuan semakin terbuka lebar seiring dengan perkembangan zaman.

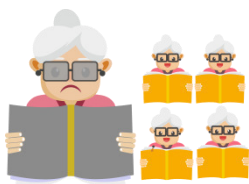
Adapun dilihat dari berbagai karakteristik, terdapat perbedaan kemampuan baca tulis lansia. AMH lansia di perkotaan lebih tinggi daripada perdesaan dengan besaran masing-masing 86,71 persen dan 73,55 persen. Menurut jenis kelamin, AMH lansia laki-laki lebih tinggi dibandingkan lansia perempuan (88,29 persen berbanding 73,40 persen). Selain itu, persentase AMH lansia semakin rendah seiring bertambahnya umur.

Gambar 3.2 Persentase Penduduk Lansia Menurut Kemampuan Baca Tulis, 2019



Sumber : BPS, Susenas Maret 2019

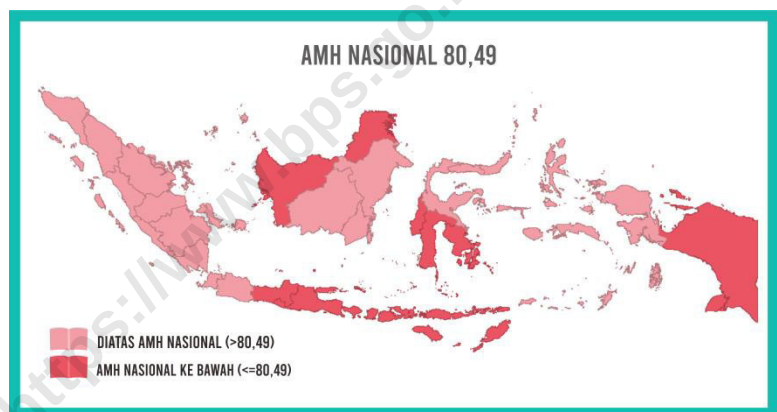
Adanya disparitas status ekonomi rumah tangga lansia turut mempertajam kesenjangan kemampuan baca tulis lansia.



Satu dari Lima
lansia tidak bisa
baca tulis

Semakin baik status ekonomi semakin besar persentase lansia yang melek huruf. Status ekonomi disini merupakan status ekonomi rumah tangga yang diukur menggunakan pendekatan pengeluaran per kapita sebulan, dengan asumsi bahwa pengeluaran per kapita sebulan sama dengan pendapatannya. Kemudian dilihat dari status disabilitas, lansia penyandang disabilitas cenderung menghasilkan persentase AMH yang relatif rendah dibandingkan yang bukan penyandang disabilitas (69,38 persen berbanding 82,37 persen).

Gambar 3.3 Angka Melek Huruf Penduduk Lansia Menurut Provinsi, 2019



Sumber: BPS, Susenas Maret 2019

Gambar 3.2 memperlihatkan wilayah provinsi Indonesia yang diberi gradasi warna merah. Warna gelap menunjukkan AMH lansia di provinsi tersebut berada dibawah AMH nasional (80,49 persen). Keseluruhan Pulau Sumatera tampak berwarna terang, artinya provinsi di Pulau Sumatera memiliki AMH di atas angka nasional. AMH lansia Provinsi Papua berada dibawah AMH nasional. Begitu pula provinsi Jawa Timur dan Bali yang merupakan provinsi besar dan maju juga masih berada dibawah nilai AMH nasional. Provinsi dengan AMH lansia terendah adalah Nusa Tenggara Barat, dimana hanya separuh penduduk lansianya yang melek huruf (51,30 persen).

Tingkat Pendidikan Lansia

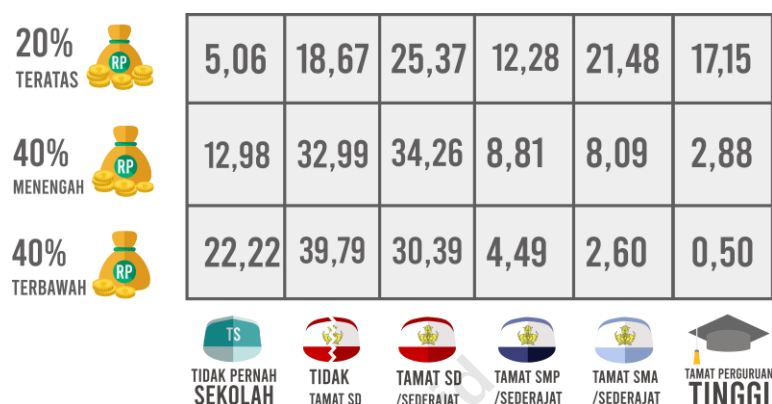
Umumnya, sebagian besar lansia Indonesia masih berpendidikan rendah dimana sepertiga di antaranya tidak tamat SD dan sekitar 15 persen lansia tidak pernah sekolah. Kesenjangan tingkat pendidikan antara lansia di perkotaan dan perdesaan terlihat cukup lebar. Sebagai contoh, lansia berpendidikan SD/ sederajat ke bawah yang tinggal di perkotaan sebesar 69,75 persen, sementara di perdesaan mencapai 90,79 persen. Lebih lanjut juga terlihat kesenjangan yang cukup lebar untuk lansia berpendidikan SMP/ sederajat ke atas (Tabel 3.1).

Tabel 3.1 Persentase Penduduk Lansia Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, 2019

Karakteristik	Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan (persen)						Total
	Tidak pernah sekolah	Tidak tamat SD	SD/ sederajat	SMP/ sederajat	SM/ sederajat	PT	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Total	15,53	33,26	30,88	7,58	8,21	4,54	100,00
Tipe Daerah							
Perkotaan	11,05	27,70	31,00	10,39	12,66	7,20	100,00
Perdesaan	20,55	39,49	30,75	4,42	3,24	1,55	100,00
Jenis Kelamin							
Laki-laki	8,94	30,49	33,99	9,29	11,08	6,20	100,00
Perempuan	21,53	35,78	28,05	6,01	5,60	3,02	100,00
Kelompok Umur							
Lansia Muda (60-69)	11,04	32,56	32,95	8,90	9,04	5,51	100,00
Lansia Madya (70-79)	20,17	33,72	29,28	5,93	7,61	3,29	100,00
Lansia Tua (80+)	34,20	37,07	20,58	2,98	3,94	1,23	100,00

Sumber: BPS, Susenas Maret 2019

Gambar 3.4 Persentase Penduduk Lansia Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan Kelompok Pengeluaran, 2019

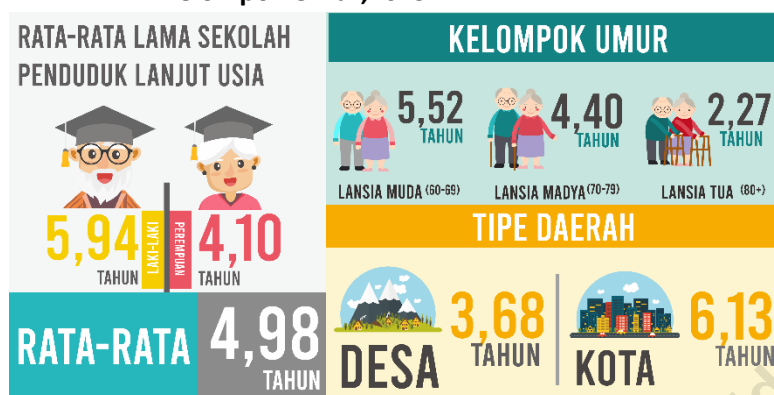


Sumber : BPS, Susenas Maret 2019

Status ekonomi berbanding lurus dengan tingkat pendidikan. Hal ini terlihat dari sekitar 17 persen lansia yang tinggal di rumah tangga dengan kelompok pengeluaran 20 persen teratas tamat perguruan tinggi. Sebaliknya, persentase lansia dari kelompok pengeluaran 40 persen terbawah yang tamat PT hanya 0,5 persen. Mayoritas lansia dengan status ekonomi terbawah hanya duduk di bangku sekolah dasar (70,18 persen), namun tidak sampai separuhnya menamatkan SD/ sederajat (30,39 persen).

Rendahnya pendidikan lansia sejalan dengan rata-rata lama sekolah lansia yang rendah. Rata-rata lansia bersekolah selama 4,98 tahun. Ketimpangan capaian pendidikan lansia di perkotaan dan perdesaan nyata terlihat dimana lansia di perkotaan lebih lama bersekolah dibandingkan di perdesaan. Sementara itu, dilihat dari jenis kelamin, lansia laki-laki bersekolah dua tahun lebih lama dibandingkan lansia perempuan. Adapun dari segi usia, semakin bertambah usia semakin kecil rata-rata lama sekolahnya. Lansia tua rata-rata bersekolah selama 2,27 tahun (setara kelas 2 SD/ sederajat).

Gambar 3.5 Rata-rata Lama Sekolah (tahun) Penduduk Lansia menurut Tipe daerah, Jenis Kelamin, dan Kelompok Umur, 2019



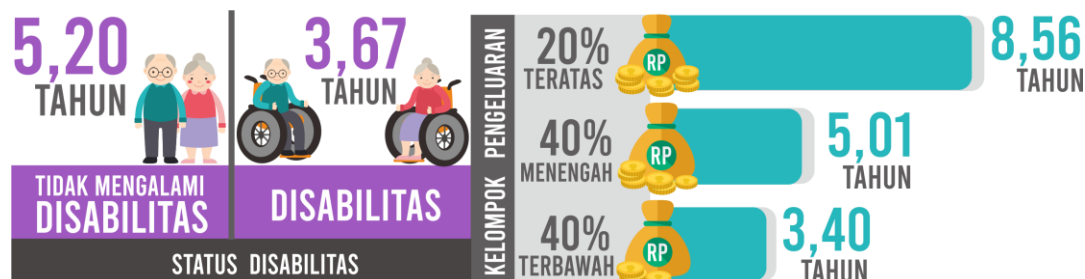
Sumber : BPS, Susenas Maret 2019

Imbas ketimpangan ekonomi terhadap pendidikan juga tampak nyata pada indikator rata-rata lama sekolah. Kesenjangan rata-rata lama sekolah begitu lebar antara status ekonomi tertinggi dan lainnya. Lansia dari kelompok pengeluaran tertinggi rata-rata bersekolah 8,56 tahun (setara kelas 2 SMP/ sederajat), sedangkan lansia dari kelompok pengeluaran menengah dan terbawah rata-rata tidak lulus SD/ sederajat. Lansia yang berpendidikan tinggi cenderung memiliki kehidupan layak dan berkecukupan. Dengan demikian, mempersiapkan kesejahteraan lansia dimulai sejak dini. Partisipasi sekolah anak dan pemuda seyogyanya terus ditingkatkan sebagai bekal hari tua mereka.



Lansia laki-laki bersekolah hampir dua tahun lebih lama dibandingkan lansia perempuan

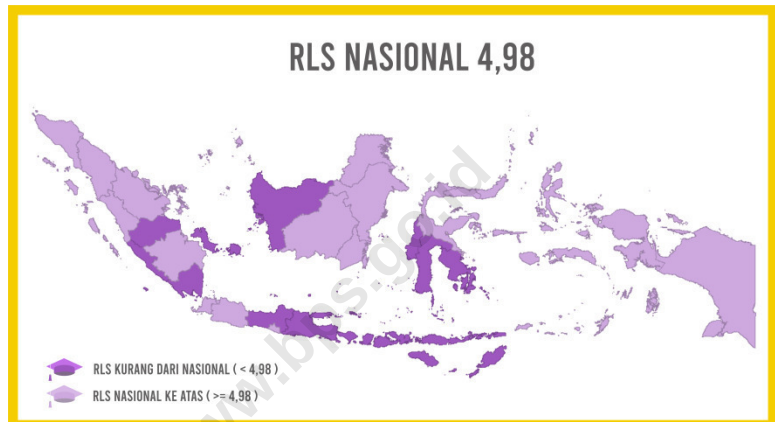
Gambar 3.6 Rata-rata Lama Sekolah (tahun) Penduduk Lansia Menurut Kelompok Pengeluaran dan Status Disabilitas, 2019



Sumber: BPS, Susenas Maret 2019

Sementara itu, terdapat juga perbedaan rata-rata lama sekolah antara lansia penyandang disabilitas dan bukan penyandang disabilitas. Lansia bukan penyandang disabilitas lebih lama bersekolah dibandingkan lansia penyandang disabilitas (5,20 tahun berbanding 3,67 tahun).

Gambar 3.7 Rata-rata Lama Sekolah (tahun) Penduduk Lansia Menurut Provinsi, 2019



Sumber: BPS, Susenas Maret 2019

Rata-rata lama sekolah lansia tidak merata di wilayah Indonesia. DKI Jakarta yang merupakan ibu kota negara sekaligus pusat pemerintahan memiliki angka tertinggi yakni 9,09 tahun, artinya rata-rata lansia bersekolah sampai lulus SMP/ sederajat. Hanya provinsi Jakarta dan Sulawesi Utara yang memiliki rata-rata lama sekolah lebih besar dari 7 tahun, sedangkan provinsi lainnya dibawah 7 tahun. Bahkan di NTB rata-rata lama sekolah penduduk lansia hanya 2,54 tahun (tidak sampai selesai kelas 3 SD/ sederajat).

Akses Teknologi Informasi dan Komunikasi

Salah satu target SDGs adalah meningkatkan akses teknologi komunikasi bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk di dalamnya penduduk lansia. Akses teknologi informasi dan komunikasi yang ditangkap dari Susenas 2019 antara lain menggunakan telepon seluler (HP), menggunakan komputer,

dan menggunakan internet dalam tiga bulan terakhir. Di antara ketiga akses TIK tersebut, penggunaan telepon seluler merupakan hal yang paling bersinggungan dengan lansia dimana 4 dari 10 lansia menggunakan HP. Dilihat dari kelompok umur, separuh lansia muda menggunakan HP.

Tabel 3.2 Persentase Penduduk Lansia Menurut Akses Teknologi Informasi dan Komunikasi, 2019

Karakteristik	Akses Teknologi Informasi dan Komunikasi		
	Menggunakan HP	Menggunakan Komputer	Menggunakan Internet
(1)	(2)	(3)	(4)
Total	43,08	1,55	7,94
Tipe Daerah			
Perkotaan	49,05	2,61	13,43
Perdesaan	36,41	0,36	1,80
Jenis Kelamin			
Laki-laki	51,81	2,14	10,35
Perempuan	35,14	0,76	5,75
Kelompok Umur			
Lansia Muda (60-69)	51,52	2,14	10,59
Lansia Madya (70-79)	32,18	0,59	3,96
Lansia Tua (80+)	15,28	0,18	1,06
Kelompok Pengeluaran			
40% terbawah	28,13	0,13	1,11
40% menengah	46,43	0,57	5,09
20% teratas	71,14	6,75	29,39
Status Disabilitas			
Disabilitas	22,00	0,43	2,14
Non Disabilitas	46,64	1,74	8,92

Sumber: BPS, Susenas Maret 2019

Ketimpangan akses TIK oleh lansia beriringan dengan disparitas tipe daerah dan gender. Penggunaan HP, komputer, ataupun internet lebih tinggi di perkotaan dibandingkan

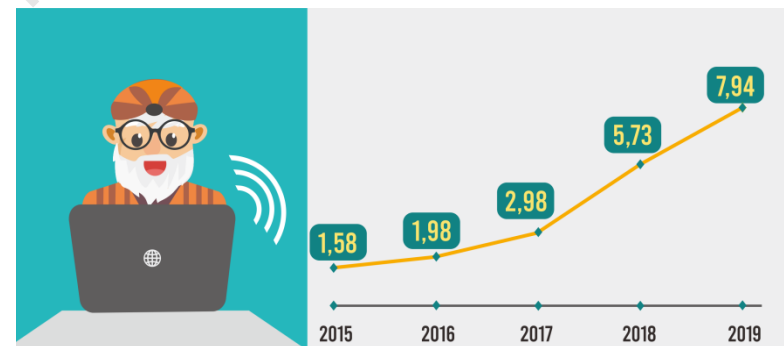


Dalam menggunakan internet, **disparitas tipe daerah** lebih besar dibandingkan **disparitas gender**

perdesaan. Dilihat dari jenis kelamin, lansia laki-laki cenderung lebih terpapar TIK. Separuh lansia laki-laki menggunakan HP, sedangkan persentase lansia perempuan yang menggunakan HP hanya 35,40 persen. Dalam menggunakan internet, disparitas tipe daerah lebih lebar dibandingkan disparitas gender.

Akses teknologi informasi dan komunikasi turut dipengaruhi oleh status ekonomi lansia. Semakin tinggi kelompok pengeluaran rumah tangga, semakin besar persentase lansia yang menggunakan HP, komputer, maupun internet. Sekitar 71 persen lansia dari kelompok pengeluaran 20 persen teratas menggunakan HP, sedangkan yang menggunakan komputer sekitar 7 persen. Sejalan dengan itu, lebih dari seperempat lansia dari kelompok pengeluaran tertinggi menggunakan internet. Angka tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan dengan kelompok pengeluaran 40 persen terbawah. Sementara itu, dilihat dari status disabilitas, lansia penyandang disabilitas lebih rentan untuk tidak terpapar teknologi informasi dan komunikasi.

Gambar 3.8 Persentase Penduduk Lansia yang Mengakses Internet, 2015-2019



Sumber: BPS, Susenas Maret 2019

Target SDGs lainnya yang terkait TIK adalah menyediakan akses internet yang terjangkau dan universal bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk lansia. Gambar 3.7 memperlihatkan perkembangan lansia yang mengakses internet. Meskipun persentase lansia yang mengakses internet

boleh terbilang kecil, angka ini terus mengalami peningkatan setiap tahun. Dalam tiga tahun terakhir, persentase lansia yang mengakses internet cenderung melesat naik (hampir 5 persen), dimana pada tahun 2019 persentasenya mencapai 7,94 persen.

<https://www.bps.go.id>



KESEHATAN

4

1 DARI 4



**LANZIA INDONESIA
MENGALAMI SAKIT**

MESKIPUN DEMIKIAN, PERSENTASE LANZIA YANG
MENGALAMI SAKIT CENDERUNG MENURUN SELAMA
LIMA TAHUN TERAKHIR

Salah satu tujuan pembangunan di RPJMN 2020 – 2024 adalah membentuk sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing, yaitu sumber daya manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter. Untuk mencapai tujuan tersebut, kebijakan pembangunan manusia diarahkan pada pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan, pemenuhan pelayanan dasar, serta perlindungan sosial, termasuk memperhatikan kebutuhan penduduk lansia (Bappenas, 2019).

Keberhasilan pembangunan di segala bidang terutama di bidang kesehatan, akan memperbaiki kualitas hidup dan kesehatan masyarakat. Hal tersebut pada akhirnya akan berdampak pada peningkatan angka harapan hidup dan jumlah penduduk lansia dari tahun ke tahun. Inilah yang saat ini sedang terjadi di Indonesia. Peningkatan jumlah penduduk lansia di masa depan dapat membawa dampak positif maupun negatif. Akan berdampak positif apabila penduduk lansia berada dalam keadaan sehat, aktif, dan produktif. Disisi lain, peningkatan jumlah penduduk lansia akan menjadi beban apabila lansia memiliki masalah penurunan kesehatan (Kementerian Kesehatan RI, 2017).

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, definisi kesehatan adalah keadaan sehat baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Dalam mewujudkan kesehatan, setiap orang mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau, tidak terkecuali penduduk lansia. Pelayanan kesehatan tersebut dimaksudkan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan dan kemampuan mereka agar kondisi fisik, mental, dan sosialnya dapat berfungsi secara wajar.

Kondisi Kesehatan Lansia

Proses penuaan yang terjadi akan berdampak pada berbagai aspek kehidupan, terutama kesehatan. Penduduk lansia secara biologis akan mengalami proses penuaan yang ditandai dengan menurunnya daya tahan fisik. Hal ini dapat

menyebabkan tubuh lebih rentan terhadap penyakit tertentu, yang terdeteksi melalui keluhan kesehatan.

Konsep dan definisi keluhan kesehatan yang digunakan dalam Susenas adalah keadaan seseorang yang mengalami gangguan kesehatan atau kejiwaan, baik karena gangguan/penyakit yang sering dialami penduduk seperti panas, pilek, diare, pusing, sakit kepala, maupun karena penyakit akut, penyakit kronis, kecelakaan, kriminalitas atau keluhan lainnya. Keluhan kesehatan tidak selalu mengakibatkan terganggunya aktivitas sehari-hari. Akan tetapi terjadinya keluhan kesehatan dan jenis keluhan yang dialami oleh penduduk dapat menggambarkan tingkat/derajat kesehatan secara kasar.

Tabel 4.1 Persentase Penduduk Lansia Menurut Kondisi Kesehatan, 2019

Karakteristik	Mengalami Keluhan Kesehatan	Mengalami Sakit
(1)	(2)	(3)
Total	51,08	26,20
Tipe Daerah		
Perkotaan	49,92	23,93
Perdesaan	52,39	28,73
Jenis Kelamin		
Laki-Laki	49,74	26,08
Perempuan	52,31	26,30
Kelompok Umur		
Lansia Muda (60-69)	48,75	23,83
Lansia Madya (70-79)	54,85	29,69
Lansia Tua (80+)	56,31	32,59
Kelompok Pengeluaran		
40% terbawah	50,49	26,92
40% menengah	52,63	27,03
20% teratas	49,41	22,86
Status Disabilitas		
Disabilitas	66,19	45,10
Non Disabilitas	48,53	23,00

Sumber: BPS, Susenas Maret 2019

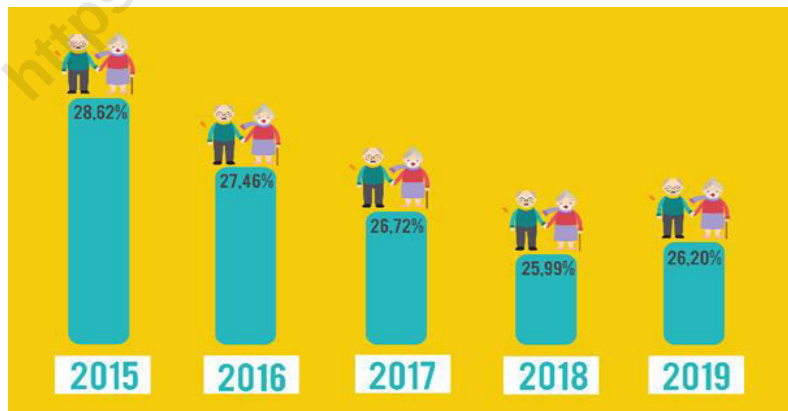
Sepuluh lansia Indonesia mengalami keluhan kesehatan dan persentasenya semakin meningkat seiring dengan bertambahnya umur lansia. Bila dilihat menurut jenis kelamin, keluhan kesehatan pada lansia perempuan (52,31 persen) lebih tinggi persentasenya dibandingkan dengan lansia laki-laki (49,74 persen). Selanjutnya, lansia yang mengalami disabilitas lebih banyak yang mengalami keluhan kesehatan dibandingkan lansia yang tidak mengalami disabilitas.



1 dari 4 lansia
sakit dalam
sebulan terakhir

Sementara itu, kondisi sakit adalah keluhan kesehatan yang mengganggu kegiatan sehari-hari sehingga tidak dapat melakukan kegiatan secara normal sebagaimana biasanya. Persentase lansia yang sakit disebut juga *morbidity rate*/angka kesakitan lansia. Angka kesakitan merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur derajat kesehatan. Semakin tinggi angka kesakitan, menunjukkan derajat kesehatan penduduk semakin buruk. Sebaliknya, semakin rendah angka kesakitan, derajat kesehatan penduduk akan semakin baik.

Gambar 4.1 Angka Kesakitan Penduduk Lansia, 2015-2019



Sumber: BPS, Susenas Maret 2015 - 2019

Angka kesakitan penduduk lansia tahun 2019 sebesar 26,20 persen. Artinya, terdapat 26 sampai 27 lansia yang sakit dari 100 lansia. Angka kesakitan lansia daerah perkotaan (23,93 persen) lebih rendah dibandingkan lansia daerah perdesaan (28,73 persen). Hal ini menunjukkan bahwa derajat kesehatan lansia di

perkotaan relatif lebih baik dibandingkan derajat kesehatan lansia di perdesaan. Dalam lima tahun terakhir, angka kesakitan penduduk lansia cenderung turun meskipun penurunannya relatif tidak terlalu besar. Penurunan tersebut menunjukkan indikasi derajat kesehatan masyarakat yang semakin baik.

Perilaku Pencarian Pengobatan Lansia

Ketika lansia mengalami keluhan kesehatan, apalagi keluhan tersebut mengganggu aktivitas sehari-hari, berbagai upaya akan dilakukan untuk bisa sehat dan beraktifitas normal. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui perilaku pencarian pengobatan. Perilaku tersebut dapat dilakukan secara mandiri (mengobati sendiri) atau dengan mengunjungi tempat pelayanan kesehatan (berobat jalan).

Mengobati sendiri adalah melakukan pengobatan dengan menentukan sendiri jenis obatnya tanpa saran/resep dari tenaga kesehatan/tenaga pengobatan tradisional. Adapun berobat jalan adalah memeriksakan diri dan mendapatkan pengobatan dengan mendatangi tempat pelayanan kesehatan baik modern maupun tradisional tanpa menginap, termasuk mendatangkan petugas kesehatan ke rumah.

Sebagian besar penduduk lansia Indonesia sudah memiliki respon aktif yang baik terhadap keluhan kesehatan yang mereka alami, baik dengan cara mengobati sendiri, berobat jalan, maupun keduanya (96,46 persen). Meskipun demikian, masih ada sekitar empat dari 100 orang lansia yang enggan untuk mengobati keluhan kesehatan yang mereka alami.

Mayoritas lansia di perdesaan (42,12 persen) cenderung memilih mengobati penyakitnya secara mandiri dibandingkan dengan lansia di perkotaan (37,98 persen). Lansia dengan tingkat pengeluaran rumah tangga 40% terbawah juga cenderung memilih mengobati sendiri (43,72 persen)

dibandingkan lansia dengan tingkat pengeluaran rumah tangga 40% menengah (39,46 persen), dan 20% teratas (32,24 persen).

Tabel 4.2 Persentase Penduduk Lansia Menurut Tindakan Pengobatan, 2019

Karakteristik	Tindakan Pengobatan				Total
	Mengobati Sendiri	Berobat Jalan	Mengobati Sendiri dan Berobat Jalan	Tidak Mengobati Sendiri/ Berobat Jalan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total	39,99	24,61	31,86	3,54	100,00
Tipe Daerah					
Perkotaan	37,98	26,35	32,45	3,23	100,00
Perdesaan	42,12	22,76	31,24	3,88	100,00
Jenis Kelamin					
Laki-Laki	40,82	24,00	31,72	3,45	100,00
Perempuan	39,26	25,13	31,98	3,62	100,00
Kelompok Umur					
Lansia Muda (60-69)	41,02	24,05	31,70	3,24	100,00
Lansia Madya (70-79)	37,91	25,46	33,01	3,62	100,00
Lansia Tua (80+)	39,87	25,55	29,32	5,27	100,00
Kelompok Pengeluaran					
40% terbawah	43,72	22,87	29,41	4,00	100,00
40% menengah	39,46	24,36	32,93	3,25	100,00
20% teratas	32,24	29,25	35,43	3,07	100,00
Status Disabilitas					
Disabilitas	36,62	26,08	32,35	4,95	100,00
Non Disabilitas	40,76	24,27	31,73	3,22	100,00

Sumber: BPS, Susenas Maret 2019

Pembenahan dan peningkatan sistem pelayanan kesehatan khususnya untuk lansia di Indonesia perlu dilaksanakan. Sistem pelayanan kesehatan yang “ramah lansia” merupakan tuntutan yang harus segera dipenuhi. Harapannya beberapa tahun ke depan bisa terjadi penurunan persentase lansia yang tidak melakukan tindakan apapun terhadap keluhan

kesehatannya. Hal ini penting, mengingat bahwa lansia perlu mempertahankan kesehatan tubuh mereka agar tetap prima dan produktif dalam menikmati masa tuanya.

Satu kondisi yang perlu diperhatikan juga adalah lansia penyandang disabilitas yang memilih untuk tidak melakukan pengobatan apapun, di mana persentasenya lebih besar (4,95 persen) dibandingkan lansia bukan penyandang disabilitas (3,22 persen). Kondisi ini menempatkan lansia pada posisi sulit dan membutuhkan perhatian khusus karena keterbatasan yang mereka miliki. Dibutuhkan perhatian pemerintah terhadap mekanisme Perawatan Jangka Panjang/*Long Term Care* (LTC) yang dapat mengakomodasi kebutuhan lansia penyandang disabilitas.

Ketika cara pengobatan mandiri belum berhasil menghilangkan keluhan kesehatan, seseorang akan mengunjungi fasilitas pelayanan kesehatan untuk berobat. Perencanaan pelayanan kesehatan harus dirancang berdasarkan kondisi lanjut usia dan pola pelayanan yang dibutuhkan, mengacu pada pilihan sarana pelayanan kesehatan yang diakses lanjut usia dalam mencari pengobatan (Peraturan Menteri Kesehatan RI, 2016).

Lebih dari separuh lansia yang mengalami keluhan kesehatan melakukan berobat jalan dan mayoritas di antaranya memilih fasilitas kesehatan modern sebagai tempat tujuan berobat jalan. Hanya sebagian kecil saja yang melakukan pengobatan tradisional/alternatif. Kepemilikan akses terhadap penggunaan fasilitas kesehatan oleh lansia dapat meningkatkan derajat kesehatan mereka (Howel & Priebe, 2013).

Dilihat dari jenis fasilitas kesehatan, praktik dokter/bidan menjadi tujuan favorit lansia yang berobat jalan dengan persentase tertinggi yakni 39,90 persen. Hal ini kemungkinan terjadi mengingat keberadaan fasilitas tersebut lebih mudah dijangkau oleh para lansia. Fasilitas kesehatan pemerintah juga menjadi pilihan lansia untuk berobat jalan.



1 dari 3 lansia
memilih praktik
dokter/bidan
untuk berobat jalan

Hampir sepertiga lansia berobat ke puskesmas/pustu. Persentase lansia yang berobat jalan ke rumah sakit pemerintah lebih besar dibandingkan dengan rumah sakit swasta.

Tabel 4.3 Persentase Penduduk Lansia yang Berobat Jalan Menurut Tempat Berobat, 2019

Karakteristik	Tempat Berobat								
	Lansia Berobat Jalan	RS Pemerintah	RS Swasta	Praktik dokter/ bidan	Klinik/ dokter bersama	Puskesmas/ Pustu	UKBM	Pengobatan tradisional	Lainnya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Total	56,47	12,35	9,84	39,90	12,84	29,90	3,70	2,65	1,30
Tipe Daerah									
Perkotaan	58,80	15,23	13,97	33,04	15,67	28,27	2,16	2,45	1,11
Perdesaan	53,99	9,02	5,05	47,85	9,55	31,79	5,49	2,89	1,54
Jenis Kelamin									
Laki-Laki	55,73	13,74	10,63	39,82	13,03	28,39	3,19	2,54	1,33
Perempuan	57,12	11,18	9,17	39,96	12,68	31,17	4,13	2,75	1,29
Kelompok Umur									
Lansia Muda (60-69)	55,74	12,85	9,76	38,68	13,16	30,72	3,59	2,52	1,24
Lansia Madya (70-79)	58,47	12,17	10,55	40,22	12,38	29,22	3,61	3,11	1,38
Lansia Tua (80+)	54,87	9,68	7,96	46,83	12,24	26,79	4,73	1,95	1,46
Kelompok Pengeluaran									
40% terbawah	52,28	7,98	4,51	44,67	9,89	33,92	5,32	2,70	1,62
40% menengah	57,29	12,39	9,41	40,43	12,93	30,57	3,38	2,88	1,32
20% teratas	64,68	20,64	20,84	29,76	18,31	20,95	1,21	2,13	0,67
Status Disabilitas									
Disabilitas	58,43	17,21	12,23	37,43	11,98	27,93	3,25	4,78	1,49
Non Disabilitas	56,02	11,18	9,27	40,49	13,04	30,37	3,81	2,14	1,26

Sumber: BPS, Susenas Maret 2019

Salah satu strategi dari Rencana Aksi Nasional Lanjut Usia 2016-2019 dalam mewujudkan peningkatan kualitas hidup lansia adalah dengan memperkuat dasar hukum pelaksanaan pelayanan Kesehatan lansia melalui tersedianya kebijakan

mengenai perlakuan khusus bagi lansia dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Tabel 4.4 Persentase Penduduk Lansia yang Berobat Jalan Menurut Jaminan Kesehatan yang Digunakan, 2019

Karakteristik	Lansia yang Berobat Jalan dengan Menggunakan Jaminan Kesehatan	Jaminan Kesehatan				
		PBI	Non PBI	Jamkesda	Asuransi Swasta	Asuransi Perusahaan/Kantor
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Total	46,64	54,17	38,59	6,07	0,27	1,53
Tipe Daerah						
Perkotaan	54,76	46,54	46,68	4,85	0,38	2,09
Perdesaan	37,22	67,20	24,80	8,14	0,08	0,59
Jenis Kelamin						
Laki-Laki	47,27	51,73	41,04	6,02	0,19	1,83
Perempuan	46,11	56,28	36,47	6,11	0,34	1,28
Kelompok Umur						
Lansia Muda (60-69)	48,29	53,28	39,35	5,99	0,30	1,58
Lansia Madya (70-79)	45,32	53,98	39,07	6,12	0,17	1,56
Lansia Tua (80+)	40,24	61,93	30,80	6,51	0,42	1,08
Kelompok Pengeluaran						
40% terbawah	40,26	75,76	16,59	8,03	0,02	0,25
40% menengah	46,28	54,22	38,70	5,99	0,08	1,58
20% teratas	59,53	26,15	66,93	3,63	0,87	3,12
Status Disabilitas						
Disabilitas	47,41	57,01	36,67	5,57	0,33	1,29
Non Disabilitas	46,46	53,47	39,07	6,19	0,26	1,59

Sumber: BPS, Susenas Maret 2019

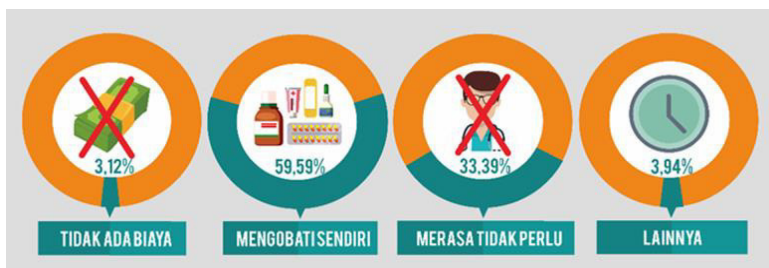
Tabel 4.4 menunjukkan bahwa lansia yang berobat jalan dengan menggunakan jaminan kesehatan belum mencapai separuh dari lansia yang mengalami keluhan kesehatan (46,64 persen).

Sementara itu, dari mereka yang menggunakan jaminan kesehatan untuk berobat jalan, penggunaan jaminan kesehatan BPJS PBI masih mendominasi di antara jaminan kesehatan lainnya (54,17 persen). Secara tidak langsung hal ini mencerminkan bagaimana kondisi ekonomi rumah tangga lansia Indonesia yang pada umumnya masih didominasi oleh kelompok pengeluaran rumah tangga 40 persen terbawah. Pola yang sama terlihat pada jenis wilayah, dimana di perdesaan penggunaan jaminan kesehatan BPJS PBI masih mendominasi (67,20 persen), sedangkan untuk wilayah perkotaan didominasi pengguna jaminan kesehatan BPJS non PBI (46,68 persen).

Demikian halnya dengan penggunaan jaminan kesehatan menurut kelompok pengeluaran rumah tangga, dimana semakin baik kondisi ekonomi rumah tangga lansia, penggunaan jaminan kesehatannya semakin tinggi. Hal menarik lainnya ditunjukkan oleh lansia yang tinggal di perkotaan maupun lansia yang berada pada kelompok pengeluaran rumah tangga 20 persen teratas, dimana penggunaan jaminan kesehatan Non PBI untuk berobat jalan mendominasi.

Gambar 4.2 memperlihatkan bahwa sebagian besar lansia Indonesia memilih tidak berobat jalan karena merasa cukup dengan pengobatan mandiri yang dilakukannya (59,59 persen), sementara 33,39 persen lansia merasa tidak perlu berobat jalan. Hal ini biasanya disebabkan karena keluhan kesehatan yang dialami belum mengganggu aktivitas mereka.

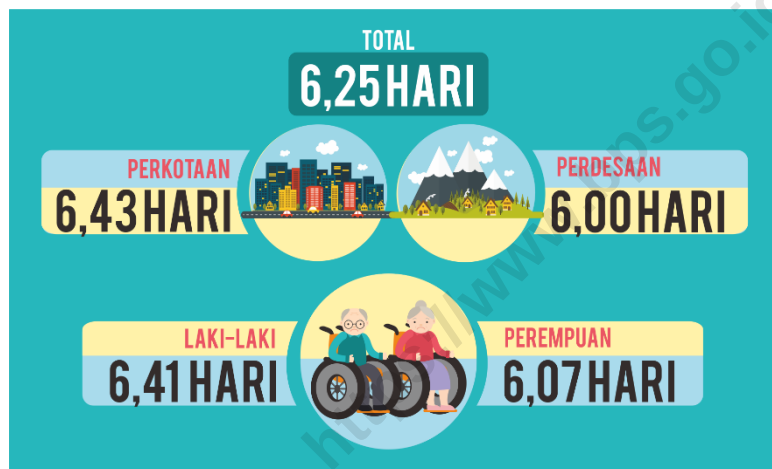
Gambar 4.2 Persentase Lansia yang Tidak Berobat Jalan Menurut Alasan Utama Tidak Berobat Jalan, 2019



Sumber: BPS, Susenas Maret 2019

Di sisi lain masih ada sekitar tiga persen lansia yang tidak berobat jalan karena tidak ada biaya, baik itu biaya untuk berobat maupun untuk transportasi ke tempat berobat. Lansia yang tidak berobat jalan karena alasan lainnya memiliki persentase yang tidak jauh berbeda. Alasan lainnya yang dimaksud antara lain tidak ada sarana transportasi, tidak ada yang mendampingi, dan waktu tunggu pelayanan lama.

Gambar 4.3 Rata-rata Lama Rawat Inap Penduduk Lansia (hari) Menurut Tipe Daerah dan Jenis Kelamin, 2019



Sumber: BPS, Susenas Maret 2019

Tingkat keparahan penyakit dan daya tahan tubuh menentukan lama waktu seseorang untuk sembuh. Pada umumnya, lansia memerlukan waktu yang lebih lama dalam proses penyembuhannya akibat kemunduran fungsi organ dan menurunnya daya tahan tubuh pada lansia. Bahkan, beberapa keluhan kesehatan memerlukan penanganan yang lebih serius, sehingga mewajibkan penderita untuk dirawat inap. Dalam proses penyembuhan, lama lansia dirawat inap rata-rata kurang dari seminggu (sekitar 6 hari). Sebagaimana yang tersaji pada Tabel 4.5, sebagian besar lansia yang rawat inap membutuhkan sekitar 4-7 hari perawatan (45,56 persen). Pola tersebut relatif sama dilihat dari berbagai karakteristik.

Tabel 4.5 Persentase Penduduk Lansia yang Rawat Inap Menurut Lamanya Rawat Inap, 2019

Karakteristik	Lama Rawat Inap (Hari)				Total
	1-3 hari	4-7 hari	8-14 Hari	>14 hari	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total	34,78	45,56	13,31	6,35	100,00
Tipe Daerah					
Perkotaan	32,15	47,37	13,88	6,61	100,00
Perdesaan	38,32	43,12	12,55	6,00	100,00
Jenis Kelamin					
Laki-Laki	33,95	45,42	14,11	6,53	100,00
Perempuan	35,66	45,72	12,46	6,16	100,00
Kelompok Umur					
Lansia Muda (60-69)	35,29	44,80	13,65	6,26	100,00
Lansia Madya (70-79)	33,35	46,96	13,22	6,48	100,00
Lansia Tua (80+)	36,62	45,57	11,32	6,49	100,00
Kelompok Pengeluaran					
40% terbawah	40,05	46,81	9,64	3,50	100,00
40% menengah	34,40	45,59	13,50	6,51	100,00
20% teratas	29,70	44,20	16,94	9,16	100,00
Status Disabilitas					
Disabilitas	26,17	45,49	17,96	10,38	100,00
Non Disabilitas	37,39	45,58	11,90	5,13	100,00

Sumber: BPS, Susenas Maret 2019

Sebesar 8,89 persen lansia pernah rawat inap dalam setahun terakhir. Rumah sakit menjadi prioritas oleh sebagian besar lansia untuk rawat inap, dimana lansia yang rawat inap di rumah sakit pemerintah persentasenya lebih besar (46,98 persen) dibandingkan rawat inap di rumah sakit swasta (37,10 persen). Pola ini relatif sama pada semua karakteristik. Tingginya persentase lansia yang rawat inap di rumah sakit pemerintah disebabkan oleh biaya pengobatan di rumah sakit swasta yang umumnya lebih mahal. Selain itu, jaminan kesehatan yang

mencakup biaya pengobatan untuk golongan pengeluaran terbawah lebih banyak tersedia di rumah sakit pemerintah.

Tabel 4.6 Persentase Penduduk Lansia yang Pernah Rawat Inap Setahun Terakhir Menurut Tempat Rawat Inap, 2019

Karakteristik	Tempat Berobat							
	Lansia Rawat Inap	RS Pemerintah	RS Swasta	Praktik dokter/ bidan	Klinik/ dokter bersama	Puskesmas/ Pustu	Pengobatan tradisional	Lain-Nya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Total	8,89	46,98	37,10	1,50	4,44	13,22	0,34	0,23
Tipe Daerah								
Perkotaan	9,67	48,31	43,24	0,90	3,50	6,98	0,22	0,22
Perdesaan	8,00	45,18	28,81	2,31	5,71	21,64	0,51	0,25
Jenis Kelamin								
Laki-Laki	9,66	48,20	38,53	1,51	3,92	11,06	0,31	0,13
Perempuan	8,18	45,67	35,57	1,49	5,00	15,54	0,37	0,35
Kelompok Umur								
Lansia Muda (60-69)	8,26	47,90	36,60	1,57	4,35	12,85	0,41	0,26
Lansia Madya (70-79)	10,33	44,57	38,82	1,43	4,67	13,78	0,25	0,23
Lansia Tua (80+)	8,88	49,66	34,10	1,24	4,22	13,62	0,22	0,07
Kelompok Pengeluaran								
40% terbawah	6,15	44,90	26,15	2,16	5,72	22,84	0,34	0,26
40% menengah	9,82	46,71	38,14	1,23	4,80	13,08	0,24	0,30
20% teratas	13,40	49,58	47,25	1,18	2,56	3,18	0,49	0,11
Status Disabilitas								
Disabilitas	14,32	53,59	34,72	1,30	3,01	11,45	0,34	0,27
Non Disabilitas	7,97	44,97	37,83	1,56	4,88	13,75	0,71	0,22

Sumber: BPS, Susenas Maret 2019

Tabel 4.7 menggambarkan bahwa dari 100 orang lansia yang melakukan rawat inap pada tahun 2019, ada sekitar 72 orang di antaranya menggunakan jaminan kesehatan. Penggunaan jaminan kesehatan ketika rawat inap dinilai lebih

menguntungkan daripada berobat jalan mengingat biaya yang dikeluarkan ketika rawat inap lebih besar.

Tabel 4.7 Persentase Penduduk Lansia yang Rawat Inap Menurut Jaminan Kesehatan yang Digunakan, 2019

Karakteristik	Lansia yang Rawat Inap dengan Menggunakan Jaminan Kesehatan	Jaminan Kesehatan				
		PBI	Non PBI	Jamkesda	Asuransi Swasta	Asuransi Perusahaan/Kantor
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Total	72,39	50,52	43,79	4,01	0,64	1,56
Tipe Daerah						
Perkotaan	77,87	42,60	51,16	3,51	0,98	2,21
Perdesaan	64,98	63,34	31,85	4,82	0,09	0,51
Jenis Kelamin						
Laki-Laki	74,58	49,22	44,52	4,10	0,66	1,93
Perempuan	70,04	52,00	42,95	3,91	0,61	1,14
Kelompok Umur						
Lansia Muda (60-69)	74,26	50,68	43,97	3,63	0,80	1,50
Lansia Madya (70-79)	70,41	49,07	44,56	4,63	0,27	1,88
Lansia Tua (80+)	66,81	55,01	39,28	4,49	0,82	0,77
Kelompok Pengeluaran						
40% terbawah	69,78	75,63	19,98	4,39	0,12	0,16
40% menengah	72,08	50,59	44,44	3,92	0,16	1,16
20% teratas	75,61	25,77	66,25	3,76	1,80	3,50
Status Disabilitas						
Disabilitas	77,17	51,06	42,88	4,51	0,84	1,52
Non Disabilitas	70,94	50,34	44,09	3,84	0,57	1,58

Sumber: BPS, Susenas Maret 2019

Berdasarkan jenis jaminan kesehatan, mayoritas lansia menggunakan PBI ketika melakukan rawat inap (50,52 persen). Akan tetapi, hal yang berbeda terjadi pada lansia yang tinggal di perkotaan atau lansia yang berada pada kelompok pengeluaran rumah tangga 20 persen teratas, dimana mayoritas lansia menggunakan jaminan kesehatan Non PBI ketika rawat inap.

Perilaku Merokok Lansia

Salah satu hal penting yang dapat mempengaruhi kesehatan adalah pola hidup yang tidak sehat. Diantaranya yaitu mengkonsumsi rokok. Rokok memiliki pengaruh yang negatif terhadap kesehatan karena kandungan zat kimia pada rokok sangat berbahaya, terutama bagi sistem pernafasan dan jantung. Apalagi jika ini dilakukan oleh para lansia, tentunya akan memiliki risiko yang lebih tinggi. Akan tetapi tetap saja masih ada lansia yang mempunyai kebiasaan merokok.



Hampir
satu dari empat
lansia merokok
selama sebulan
terakhir

Tabel 4.8 Persentase Lansia Menurut Kebiasaan Merokok, 2019

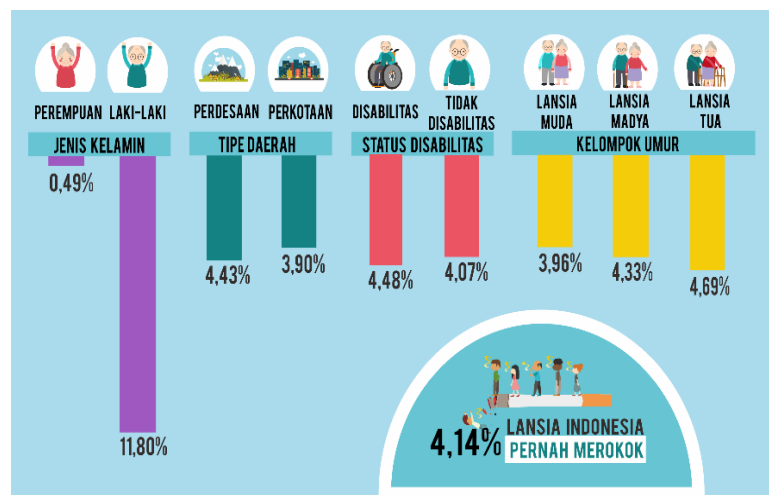
Karakteristik	Kebiasaan Merokok			Tidak Merokok
	Setiap Hari	Tidak Setiap Hari	Total	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Total	22,15	2,15	24,30	75,70
Tipe Daerah				
Perkotaan	20,19	1,97	22,16	77,84
Perdesaan	24,35	2,35	26,70	73,30
Jenis Kelamin				
Laki-Laki	44,67	4,19	48,86	51,14
Perempuan	1,66	0,29	1,95	98,05
Kelompok Umur				
Lansia Muda (60-69)	25,34	2,28	27,61	72,39
Lansia Madya (70-79)	17,67	2,10	19,78	80,22
Lansia Tua (80+)	12,85	1,34	14,19	85,81
Kelompok Pengeluaran				
40% terbawah	21,52	2,44	23,95	76,05
40% menengah	24,60	2,11	26,71	73,29
20% teratas	18,82	1,55	20,38	79,62
Status Disabilitas				
Disabilitas	13,09	2,04	15,13	84,88
Non Disabilitas	23,69	2,17	25,86	74,15

Sumber: BPS, Susenas Maret 2019

Intensitas merokok mencerminkan seberapa akut kebiasaan merokok. Pada umumnya, seseorang memulai mencoba merokok di usia remaja dan menjadi suatu kebiasaan sampai dewasa dan lansia. Semakin lama penggunaan rokok, tingkat ketergantungan merokok akan semakin tinggi (Risadiana & Proboningrum, 2019). Lansia yang merokok setiap hari tentu jauh lebih berisiko terkena penyakit daripada yang kadang-kadang (tidak setiap hari). Sayangnya, persentase lansia yang merokok setiap hari jauh lebih besar (22,15 persen) dibandingkan yang merokok tidak setiap hari (2,15 persen).

Hasil Susenas 2019 menunjukkan hampir seperempat lansia merokok selama sebulan terakhir. Lansia perokok didominasi oleh laki-laki. Terlihat dari Tabel 4.8, sebanyak 48,86 persen lansia laki-laki adalah perokok. Di wilayah perkotaan, lansia yang merokok persentasenya lebih sedikit dibandingkan lansia di perdesaan. Dilihat dari kelompok umur, persentase lansia yang merokok semakin menurun seiring dengan bertambahnya umur. Kondisi fisik lansia yang melemah menuntut lansia untuk berhenti merokok dan mulai menerapkan perilaku hidup sehat.

Gambar 4.4 Persentase Lansia yang Pernah Merokok Menurut Karakteristik Penduduk Lansia, 2019



Sumber: BPS, Susenas Maret 2019

Susenas 2019 memuat informasi mengenai riwayat kebiasaan merokok lansia sebelum sebulan terakhir. Lansia yang tidak merokok ditanya mengenai kebiasaan merokok sebelumnya. 4,14 persen lansia yang sudah tidak merokok selama sebulan terakhir sebelumnya pernah merokok. Adapun lansia laki-laki yang berhenti merokok cukup besar yakni sekitar 11,80 persen.

<https://www.bps.go.id>



**SATU DARI DUA
LANSIA MASIH
BEKERJA**

KETENAGAKERJAAN

5



52,86%

**LANSIA BEKERJA
DI SEKTOR
PERTANIAN**

Populasi penduduk lanjut usia (lansia) yang terus meningkat seiring dengan peningkatan kualitas hidup manusia yang ditandai dengan meningkatnya angka harapan hidup di Indonesia memberi tantangan tersendiri bagi pemerintah di bidang ketenagakerjaan. Menurut Undang-undang Nomor 13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia, penduduk lansia dibagi menjadi dua, yaitu lansia potensial dan tidak potensial. Lansia potensial adalah lansia yang masih mampu melakukan pekerjaan dan/atau kegiatan yang dapat menghasilkan barang dan/atau jasa, sedangkan Lansia Tidak Potensial adalah lansia yang tidak berdaya mencari nafkah sehingga hidupnya bergantung pada bantuan orang lain. Bagaimana memberdayakan dan memacu produktivitas para lansia potensial tersebut sehingga mereka mandiri secara ekonomi dan tidak menjadi beban bagi keluarga, orang lain, maupun negara menjadi hal yang perlu diperhatikan oleh pemerintah.

Lansia akan mengalami berbagai penurunan kondisi dan kemampuan baik secara fisik maupun psikologis karena faktor usia sehingga pekerjaan yang sepantasnya dilakukan oleh lansia adalah pekerjaan yang layak. Pekerjaan layak menurut International Labour Organization (ILO) mencakup 10 aspek, yaitu kesempatan kerja; pendapatan setara dan kerja produktif; jam kerja yang layak; menggabungkan pekerjaan, keluarga dan kehidupan pribadi; pekerjaan paksa; stabilitas dan keamanan kerja; kesempatan dan perlakuan yang setara dalam pekerjaan; lingkungan kerja yang aman; keamanan sosial; dialog sosial, perwakilan pekerja dan pengusaha. Dengan kebijakan yang tepat dan kerja sama yang baik dari seluruh pihak, tentu ada kesempatan untuk mengatasi tantangan terkait ketenagakerjaan lansia ini.

Lansia Bekerja

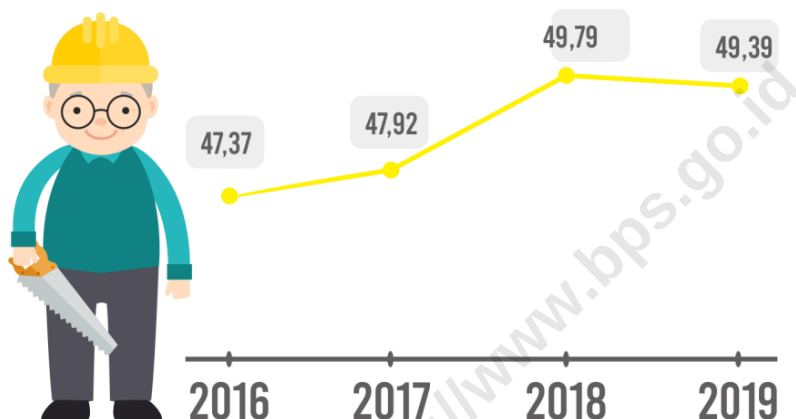
Hal utama yang perlu diperhatikan dalam mendorong pemberdayaan dan pengembangan tenaga kerja lansia potensial adalah tersedianya kesempatan kerja yang sesuai bagi tenaga kerja lansia. Pemerintah telah memberi perhatian terkait kesempatan kerja bagi lansia melalui UU No. 13 Tahun 1998

Pasal 5 yang menyatakan bahwa sebagai penghormatan dan penghargaan kepada lanjut usia diberikan hak untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, salah satunya adalah pelayanan kesempatan kerja. Pelayanan kesempatan kerja bagi lansia potensial dimaksudkan memberi peluang untuk mendayagunakan pengetahuan, keahlian, kemampuan, keterampilan, dan pengalaman yang dimilikinya.



1 dari 2
lansia masih
bekerja

Gambar 5.1 Persentase Penduduk Lansia Bekerja, 2016-2019

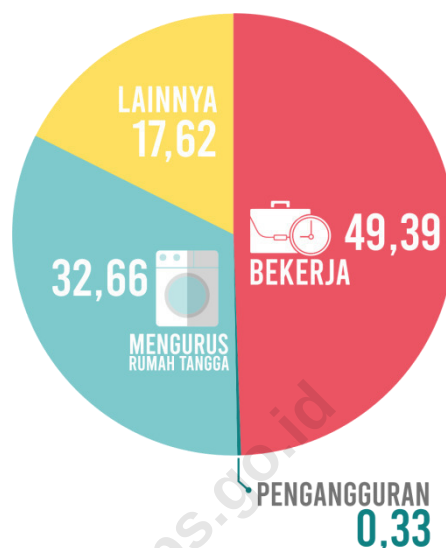


Sumber : BPS, Sakernas Agustus 2019

Pada tahun 2019, persentase lansia bekerja mencapai 49,39 persen. Persentase tersebut cenderung stagnan dibandingkan tahun sebelumnya (49,79 persen). Dengan kata lain, 1 dari 2 lansia masih bekerja di usia tuanya. Hal ini menunjukkan bahwa tidak sedikit penduduk usia lanjut yang tetap ingin produktif untuk mengisi hari-hari tuanya.

Pada Gambar 5.2 terlihat bahwa sebesar 32,66 persen lansia mengurus rumah tangga, 17,62 persen lansia melakukan kegiatan lainnya, dan sisanya sebesar 0,33 persen merupakan lansia pengangguran atau mencari pekerjaan.

Gambar 5.2 Persentase Penduduk Lansia Menurut Jenis Kegiatan dalam Seminggu Terakhir, 2019



Sumber: BPS, Sakernas Agustus 2019

Jika dilihat menurut tipe daerah, pada Tabel 5.1 terlihat bahwa persentase lansia di perdesaan yang bekerja lebih tinggi dibandingkan lansia di perkotaan (56,51 persen berbanding 43,06 persen). Alasan yang dapat melatarbelakangi lansia di perdesaan tetap bekerja adalah kebutuhan ekonomi. Menurut Giles et al. (2011), akumulasi kekayaan lansia di perdesaan lebih rendah dibandingkan lansia di perkotaan sehingga mereka harus tetap bekerja untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Selain itu, banyak lansia di perkotaan yang mendapatkan tunjangan pensiun yang dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari (Ravallion dan Chen, 2007).

Tabel 5.1 juga menunjukkan bahwa jika dilihat berdasarkan jenis kelamin, persentase lansia laki-laki yang bekerja jauh lebih tinggi dibandingkan lansia perempuan (64,47 persen berbanding 35,66 persen). Lansia perempuan lebih terkonsentrasi pada kegiatan mengurus rumah tangga (49,39 persen).

Tabel 5.1 Persentase Penduduk Lansia Menurut Jenis Kegiatan dalam Seminggu Terakhir, 2019

Karakteristik	Bekerja	Pengangguran	Mengurus Rumah Tangga	Lainnya	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total	49,39	0,33	32,66	17,62	100,00
Tipe Daerah					
Perkotaan	43,06	0,45	37,28	19,22	100,00
Perdesaan	56,51	0,20	27,46	15,83	100,00
Jenis Kelamin					
Laki-Laki	64,47	0,42	13,79	21,31	100,00
Perempuan	35,66	0,25	49,82	14,26	100,00
Kelompok Umur					
Lansia Muda (60-69)	58,89	0,43	30,42	10,26	100,00
Lansia Madya (70-79)	37,33	0,17	37,52	24,98	100,00
Lansia Tua (80+)	16,72	0,10	33,70	49,47	100,00

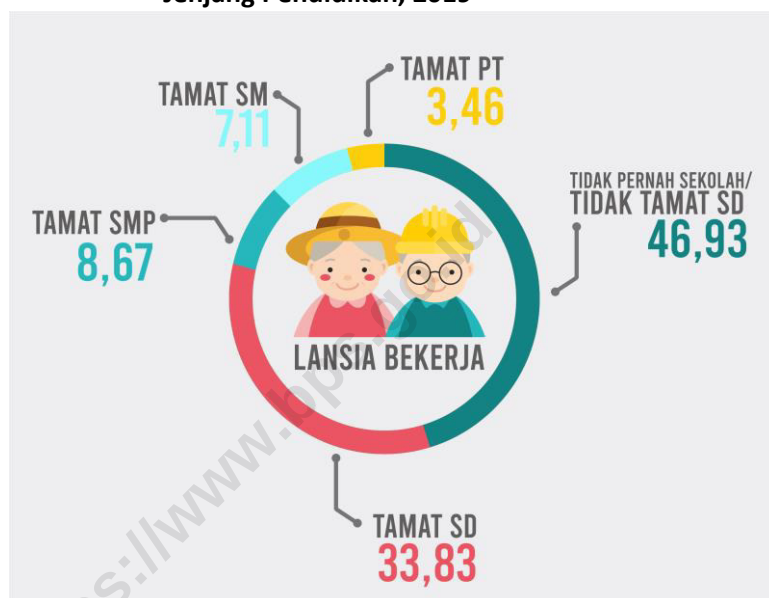
Sumber: BPS, Sakernas Agustus 2019

Jika melihat kelompok umur, semakin tua umur lansia, semakin kecil persentase lansia yang bekerja. Persentase lansia bekerja untuk kelompok umur lansia muda, lansia madya, dan lansia tua berturut-turut yaitu 58,89 persen, 37,33 persen, dan 16,72 persen. Hal ini tidak lain disebabkan karena semakin tua lansia, akan semakin mengalami berbagai penurunan kondisi dan kemampuan baik secara fisik maupun psikologis sehingga menghalanginya untuk melakukan kegiatan khususnya bekerja.

Semakin tinggi jenjang pendidikan lansia, semakin sedikit lansia yang bekerja di hari tuanya. Gambar 5.3 menunjukkan lansia yang bekerja didominasi oleh lansia berpendidikan rendah. Sebesar 46,93 persen lansia bekerja tidak pernah sekolah/tidak tamat SD dan sebesar 33,83 persen adalah tamat SD. Persentase lansia bekerja tamat SM dan tamat PT berturut-turut adalah 7,11 persen dan 3,46 persen. Hal ini disebabkan karena lansia dengan tingkat pendidikan tinggi

dulunya memiliki pekerjaan yang menjanjikan sehingga ketika mereka memasuki usia lanjut telah memiliki kekayaan yang cukup untuk masa tuanya, kontras dengan lansia yang berpendidikan rendah (ILO, 2015).

Gambar 5.3 Distribusi Penduduk Lansia yang Bekerja Menurut Jenjang Pendidikan, 2019



Sumber: BPS, Sakernas Agustus 2019

Karakteristik Pekerja Lansia

Salah satu fokus ILO saat ini adalah membuka kesempatan seluas-luasnya bagi semua orang untuk mendapatkan pekerjaan layak (ILO, 2013). Pekerjaan layak tidak dapat tercapai tanpa adanya penciptaan lapangan pekerjaan yang berkelanjutan. Dari seluruh lansia yang bekerja, sekitar separuhnya bekerja di lapangan usaha pertanian (52,86 persen). Di negara berkembang seperti Indonesia, lapangan usaha pertanian merupakan sektor yang menyerap sebagian besar tenaga kerja karena tidak memerlukan kualifikasi yang terlalu tinggi dan keahlian yang spesifik sehingga wajar bila pekerja lansia paling banyak terserap dalam lapangan usaha ini. Sayangnya, sektor pertanian merupakan salah satu jenis



**Lebih dari
separuh pekerja
lansia berada di
sektor Pertanian**

lapangan usaha yang mengarah pada pekerjaan tidak layak karena upah yang cenderung kecil dan tidak adanya perlindungan ketenagakerjaan (Anker dkk, 2002).

Tabel 5.2 Persentase Penduduk Lansia Bekerja Menurut Lapangan Usaha Utama, 2019

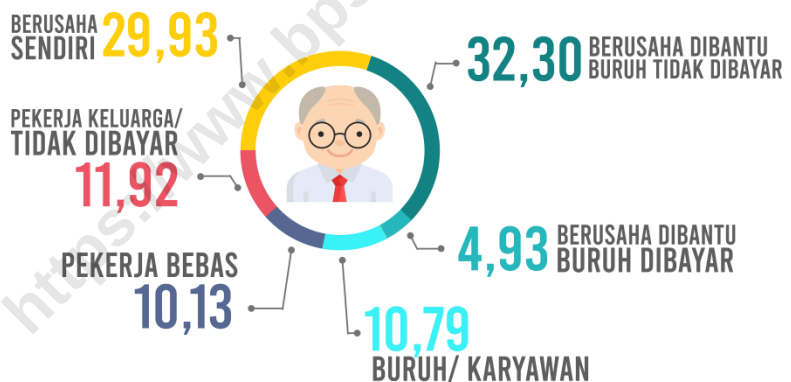
Karakteristik	Pertanian	Industri	Jasa	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Total	52,86	14,56	32,58	100,00
Tipe Daerah				
Perkotaan	30,71	18,24	51,05	100,00
Perdesaan	71,83	11,41	16,76	100,00
Jenis Kelamin				
Laki-Laki	57,37	15,20	27,44	100,00
Perempuan	45,45	13,51	41,04	100,00
Kelompok Umur				
Lansia Muda (60-69)	50,50	15,35	34,15	100,00
Lansia Madya (70-79)	60,34	11,95	27,71	100,00
Lansia Tua (80+)	61,30	12,43	26,27	100,00
Jenjang Pendidikan				
Tidak Pernah Sekolah/ Tidak Tamat SD	61,40	13,26	25,34	100,00
Tamat SD/ sederajat	54,08	15,61	30,31	100,00
Tamat SMP/ sederajat	35,87	16,67	47,46	100,00
Tamat SM/ sederajat	25,92	16,70	57,38	100,00
Tamat Perguruan Tinggi	23,06	12,22	64,72	100,00

Sumber: BPS, Sakernas Agustus 2019

Jika dilihat berdasarkan tipe daerah, terdapat perbedaan pola lapangan usaha antara lansia yang bekerja di perdesaan dan di perkotaan. Lansia di perdesaan yang bekerja terkonsentrasi pada lapangan usaha pertanian, yaitu sebesar 71,83 persen. Sementara lansia di perkotaan yang bekerja terkonsentrasi pada lapangan usaha jasa, yaitu sebesar 51,05 persen.

Hal yang menarik dari Tabel 5.2 adalah terjadi perbedaan pola lansia bekerja menurut lapangan usaha berdasarkan jenjang pendidikan. Seiring dengan peningkatan jenjang pendidikan, lansia bekerja dengan pendidikan tamat SD/ sederajat ke bawah terkonsentrasi pada lapangan usaha pertanian. Sementara itu, lansia bekerja dengan tingkat pendidikan tamat SMP/ sederajat ke atas terkonsentrasi pada lapangan usaha jasa. Hal ini memberikan gambaran bahwa semakin tinggi keterampilan atau kualifikasi yang dimiliki lansia, semakin tinggi minat untuk bekerja di luar sektor pertanian, khususnya di sektor jasa.

Gambar 5.4 Persentase Penduduk Lansia Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama, 2019



Sumber: BPS, Sakernas Agustus 2019

Status pekerjaan lansia yang bekerja dapat memberikan gambaran mengenai kedudukan lansia dalam pekerjaan serta seberapa besar peran aktif mereka dalam kegiatan ekonomi. Dari seluruh lansia yang bekerja, sebesar 29,93 persen diantaranya berusaha sendiri, 32,30 persen berusaha dibantu buruh tidak dibayar, dan 4,93 persen berusaha dibantu buruh dibayar. Dengan kata lain, sekitar 67,16 persen lansia yang bekerja menunjukkan kemandirian dalam kegiatan ekonomi dengan berwirausaha.

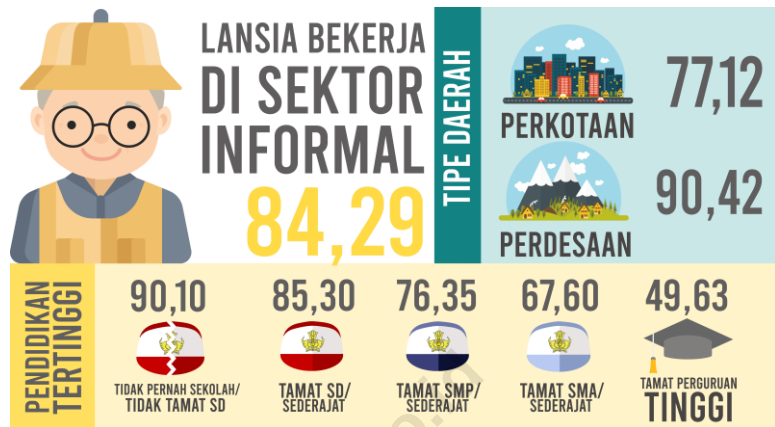
Tabel 5.3 Persentase Penduduk Lansia Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama, 2019

Karakteristik	Berusaha Sendiri	Berusaha dibantu Buruh Tidak Dibayar	Berusaha dibantu Buruh Dibayar	Buruh/ Karyawan	Pekerja Bebas	Pekerja Keluarga/ Tidak Dibayar	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Total	29,93	32,30	4,93	10,79	10,13	11,92	100,00
Tipe Daerah							
Perkotaan	34,64	23,64	6,44	16,44	9,91	8,93	100,00
Perdesaan	25,90	39,72	3,63	5,95	10,32	14,48	100,00
Jenis Kelamin							
Laki-Laki	27,63	38,87	6,09	12,55	10,85	4,01	100,00
Perempuan	33,73	21,49	3,01	7,89	8,96	24,92	100,00
Kelompok Umur							
Lansia Muda (60-69)	29,40	30,86	4,92	11,91	10,80	12,11	100,00
Lansia Madya (70-79)	30,98	37,26	4,94	7,45	8,23	11,14	100,00
Lansia Tua (80+)	36,50	34,41	4,94	5,30	6,29	12,56	100,00
Jenjang Pendidikan							
Tidak Pernah Sekolah/ Tidak Tamat SD	31,25	33,29	2,62	7,28	12,27	13,29	100,00
Tamat SD / sederajat	28,47	34,42	4,47	10,22	10,69	11,71	100,00
Tamat SMP/ sederajat	32,70	28,54	8,73	14,92	5,60	9,51	100,00
Tamat SMA/ sederajat	28,99	26,29	12,59	19,80	3,48	8,85	100,00
Tamat Perguruan Tinggi	21,36	19,86	15,37	35,00	0,75	7,66	100,00

Sumber: BPS, Sakernas Agustus 2019

Dari status pekerjaan, dapat dilihat seberapa besar lansia yang bekerja di sektor informal. Pekerja informal, khususnya pekerja lansia, perlu mendapat perhatian khusus karena mereka umumnya kurang memiliki perlindungan sosial, dasar hukum pekerjaan, ataupun imbalan kerja yang layak. Pekerja informal adalah seseorang yang bekerja dengan status pekerjaan berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap/tidak dibayar, pekerja bebas pertanian dan non-pertanian, serta pekerja keluarga/pekerja tidak dibayar (BPS, 2018).

Gambar 5.5 Persentase Penduduk Lansia yang Bekerja di Sektor Informal Menurut Jenjang Pendidikan, 2019



Sumber: BPS, Sakernas Agustus 2019

Pada Gambar 5.5 terlihat bahwa sebagian besar lansia bekerja pada sektor informal (84,29 persen). Hal ini dapat disebabkan kesempatan kerja bagi para lansia di sektor formal yang memang sedikit karena sektor formal lebih mengedepankan kualifikasi dan keterampilan pekerja (ILO, 2014). Dengan kemampuan lansia yang sudah menurun secara fisik dan psikologis, tentu sektor informal menjadi pilihan bagi para pekerja lansia tersebut.

Jika dilihat menurut jenjang pendidikan, pekerja lansia yang berpendidikan rendah lebih banyak yang bekerja di sektor informal. Bahkan, terdapat 9 dari 10 pekerja lansia tidak pernah sekolah/tidak tamat SD yang bekerja di sektor ini. Terlihat pula bahwa semakin tinggi jenjang pendidikan, semakin sedikit pekerja lansia yang bekerja di sektor informal. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi pendidikan pekerja lansia, semakin tinggi kesempatan mereka untuk bekerja di sektor formal karena memiliki kualifikasi dan keterampilan yang mencukupi.

Gambar 5.6 Persentase Lansia Bekerja dengan Status Berusaha Sendiri, Berusaha Dibantu Buruh Tidak Dibayar, dan Pekerja Keluarga/Tidak Dibayar (Status 1, 2, dan 7), 2019



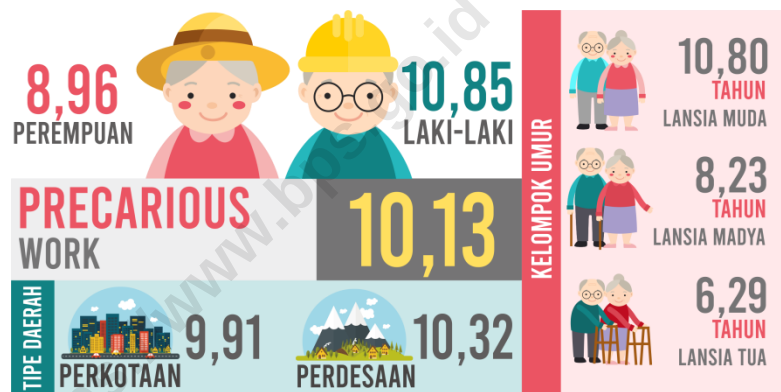
Sumber: BPS, Sakernas Agustus 2019

Lansia yang bekerja dengan status pekerjaan berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap/tidak dibayar, dan pekerja keluarga/tidak dibayar (dalam bidang ketenagakerjaan disebut status 1, 2, dan 7) adalah yang mempunyai risiko tinggi terhadap kerentanan ekonomi karena tidak memiliki kesempatan kerja yang cukup, perlindungan sosial yang tidak memadai, tidak terpenuhi hak-hak di tempat kerjanya, serta tidak memiliki kesempatan mengekspresikan pendapat mengenai pekerjaan yang mereka lakukan (BPS, 2018).

Dari Gambar 5.6 terlihat bahwa dari seluruh lansia yang bekerja, sekitar 74,15 persen diantaranya memiliki risiko tinggi mengalami kerentanan ekonomi karena berada pada status pekerjaan 1, 2, dan 7. Menurut kelompok umur, semakin tua lansia, semakin tinggi persentase pekerja lansia yang berstatus kerja 1, 2, dan 7. Hal ini berarti risiko ekonomi yang ditanggung oleh lansia tua yang bekerja lebih besar dibandingkan dengan lansia madya dan lansia muda.

Jika dilihat menurut tipe daerah, persentase pekerja lansia yang berstatus 1, 2, dan 7 di perdesaan jauh lebih tinggi dibandingkan perkotaan. Dari 10 pekerja lansia di perdesaan, 8 diantaranya memiliki risiko mengalami kerentanan ekonomi. Meskipun lebih rendah, namun persentase pekerja lansia di perkotaan yang berstatus pekerjaan 1, 2, dan 7 juga terbilang masih cukup besar. Setidaknya 2 dari 3 pekerja lansia di perkotaan berada pada status pekerjaan tersebut.

Gambar 5.7 Persentase Penduduk Lansia Bekerja yang Termasuk *Precarious Employment*, 2019



Sumber: BPS, Sakernas Agustus 2019

Status pekerjaan juga menjadi acuan untuk melihat stabilitas pekerjaan. Pekerjaan yang tidak stabil merupakan salah satu sumber stres dan kekhawatiran utama bagi pekerja karena memiliki banyak risiko, tidak terkecuali bagi pekerja lansia. Untuk melihat stabilitas pekerjaan, indikator utama yang digunakan adalah *precarious employment* atau pekerja tidak tetap. Pekerja tidak tetap dalam hal ini adalah mereka yang bekerja sebagai pekerja bebas, buruh dengan kontrak kerja jangka waktu tertentu, dan buruh dengan kontrak kerja lisan (BPS, 2018).

Secara umum, sebesar 10,13 persen lansia yang bekerja merupakan pekerja tidak tetap. Persentase pekerja tidak tetap laki-laki (10,85 persen) lebih tinggi dibandingkan perempuan

(8,96 persen). Laki-laki cenderung rela bekerja apa saja karena tuntutan mencari nafkah untuk keluarganya. Jika dilihat menurut kelompok umur, semakin tua umur lansia menunjukkan persentase pekerja tidak tetap yang semakin rendah. Pekerja lansia yang termasuk dalam *precarious employment* perlu diperhatikan secara serius karena di usia yang sudah lanjut, mereka tidak memiliki hubungan kerja yang permanen (hanya dipekerjakan saat diperlukan) dan biasanya tidak terlindungi jaminan sosial di tempat mereka bekerja.

Jam Kerja Layak

Selain lapangan usaha dan status pekerjaan, jam kerja juga menjadi aspek penting berikutnya dalam pekerjaan layak (ILO, 2013). Jam kerja tentu menjadi sangat penting jika berbicara mengenai pekerja lansia. Lansia dengan kondisi fisiknya yang semakin menurun tentu tidak sepatutnya bekerja berlebihan. Jam kerja berlebih (*excessive hours*) dalam konteks Indonesia didefinisikan berdasarkan ambang batas 48 jam per minggu seperti yang dinyatakan pada Konvensi ILO No 1 dan No 30. Apabila jam kerja melebihi batas tersebut, maka pekerjaan tergolong tidak layak.

Sekitar separuh pekerja lansia merupakan pekerja penuh, yakni bekerja 35 jam atau lebih dalam seminggu. Sayangnya, masih terdapat 22,53 persen pekerja lansia yang memiliki jam kerja berlebihan atau bekerja lebih dari 48 jam dalam seminggu. Kondisi ini perlu menjadi perhatian mengingat jam kerja berlebih dapat mengancam kondisi fisik dan mental lansia dalam jangka panjang, serta menurunkan produktivitas dalam bekerja (Anker dkk, 2002).

Tabel 5.4 menunjukkan persentase lansia yang bekerja secara berlebihan lebih tinggi di perkotaan dibandingkan lansia di perdesaan (27,32 persen berbanding 18,43 persen). Rendahnya persentase lansia dengan jam kerja berlebih di

perdesaan dapat diakibatkan karena sebagian besar lansia di perdesaan bekerja di sektor informal, khususnya di sektor pertanian, yang tidak memerlukan waktu kerja yang lama.

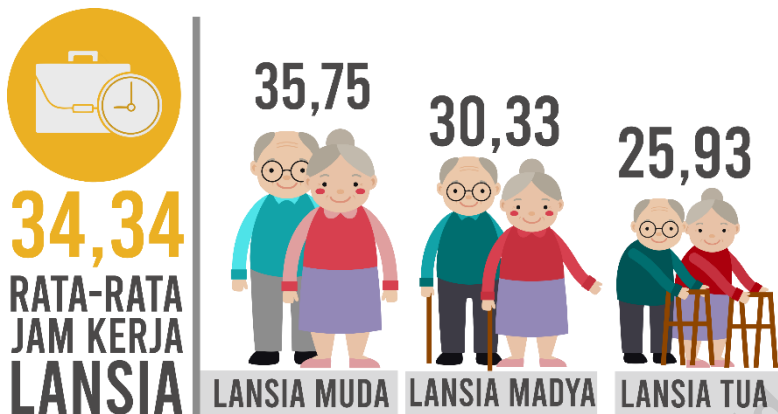
Tabel 5.4 Persentase Penduduk Lansia Bekerja Menurut Jumlah Jam Kerja dalam Seminggu, 2019

Karakteristik	<1 jam	1-14 Jam	15-34 jam	35-48 jam	≥ 49 jam	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Total	4,10	13,56	32,30	27,50	22,53	100,00
Tipe Daerah						
Perkotaan	3,88	12,06	27,21	29,52	27,32	100,00
Perdesaan	4,29	14,84	36,66	25,78	18,43	100,00
Jenis Kelamin						
Laki-Laki	4,15	10,51	30,53	30,37	24,44	100,00
Perempuan	4,03	18,58	35,22	22,79	19,39	100,00
Kelompok Umur						
Lansia Muda (60-69)	3,79	11,82	30,95	28,91	24,52	100,00
Lansia Madya (70-79)	5,08	18,27	36,41	23,58	16,67	100,00
Lansia Tua (80+)	5,41	25,44	38,36	18,56	12,24	100,00
Lapangan Usaha						
Pertanian	4,98	16,18	40,02	25,17	13,65	100,00
Industri	3,57	8,91	25,58	36,64	25,30	100,00
Jasa	2,92	11,37	22,78	27,21	35,70	100,00

Sumber: BPS, Sakernas Agustus 2019

Jika dilihat menurut lapangan usaha, sebagian besar pekerja lansia di sektor pertanian bekerja selama 15-34 jam dalam seminggu. Sementara itu, lapangan usaha jasa merupakan sektor yang paling banyak memiliki jumlah jam kerja. Persentase pekerja lansia di sektor jasa semakin besar seiring meningkatnya jumlah jam kerja. Bahkan, lansia yang bekerja berlebihan dalam sektor ini mencapai 35,70 persen.

Gambar 5.8 Rata-rata Jumlah Jam Kerja dari Penduduk Lansia yang Bekerja Menurut Kelompok Umur, 2019



Sumber: BPS, Sakernas Agustus 2019

Secara rata-rata, dalam seminggu lansia bekerja sekitar 34 jam. Apabila dilihat berdasarkan kelompok umur, semakin tua umur lansia, semakin sedikit jumlah jam kerja dalam seminggu. Dari ketiga kelompok lansia tersebut, hanya lansia muda yang merupakan pekerja penuh. Hal ini wajar mengingat kondisi fisik lansia semakin menurun seiring bertambahnya umur sehingga kemampuan bekerja mereka semakin terbatas

Pendapatan/Upah/Gaji yang Mencukupi

Pendapatan yang mencukupi adalah hal penting dalam memastikan kesejahteraan para pekerja dan merupakan komponen penting dalam pekerjaan layak, tidak terkecuali bagi lansia. Lansia memiliki hak untuk memperoleh pendapatan/upah/gaji yang layak guna menjamin kesejahteraan dan memenuhi kebutuhan hidupnya. Ditambah lagi, lansia memerlukan biaya untuk perawatan kesehatan dikarenakan kondisi fisik mereka yang menurun.

Lapangan usaha sangat menentukan besarnya pendapatan/upah/gaji yang diterima pekerja. Pada Gambar 5.9 terlihat bahwa lansia yang bekerja di lapangan usaha pertanian memiliki pendapatan/upah/gaji terendah jika dibandingkan

lapangan usaha lainnya, yaitu sekitar 1,1 juta per bulan. Sementara itu, lapangan usaha dengan pendapatan/upah/gaji tertinggi adalah jasa, yaitu sekitar 1,8 juta per bulan. Dari bahasan sebelumnya, diketahui bahwa sebagian besar lansia bekerja di lapangan usaha pertanian sehingga perlu diperhatikan kesejahteraan para pekerja lansia tersebut secara ekonomi.

Gambar 5.9 Rata-rata Besarnya Pendapatan/Upah/Gaji (ribu rupiah) dari Lansia yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha, 2019



Sumber: BPS, Sakernas Agustus 2019

Jika dilihat menurut kelompok pendapatan, sebesar 46,22 persen lansia bekerja memperoleh pendapatan/upah/gaji kurang dari satu juta per bulan. Secara umum, pekerja lansia perempuan memperoleh pendapatan yang lebih kecil dibandingkan laki-laki. Terdapat sekitar 61,44 persen pekerja lansia perempuan yang berpendapatan kurang dari satu juta per bulan dan persentase tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan pekerja lansia laki-laki (37,05 persen).

Apabila dilihat menurut tipe daerah, persentase lansia bekerja di perdesaan yang memperoleh pendapatan/upah/gaji kurang dari satu juta per bulan lebih tinggi dibandingkan lansia di perkotaan (54,15 persen berbanding 39,81 persen). Rendahnya pendapatan dari sebagian besar pekerja lansia di perdesaan ini berkaitan erat dengan banyaknya pekerja lansia di

lapangan usaha pertanian yang memberikan pendapatan/upah/gaji lebih rendah dibandingkan lapangan usaha lainnya.

Tabel 5.5 Persentase Penduduk Lansia Bekerja Menurut Pendapatan/Upah/Gaji dalam Sebulan, 2019

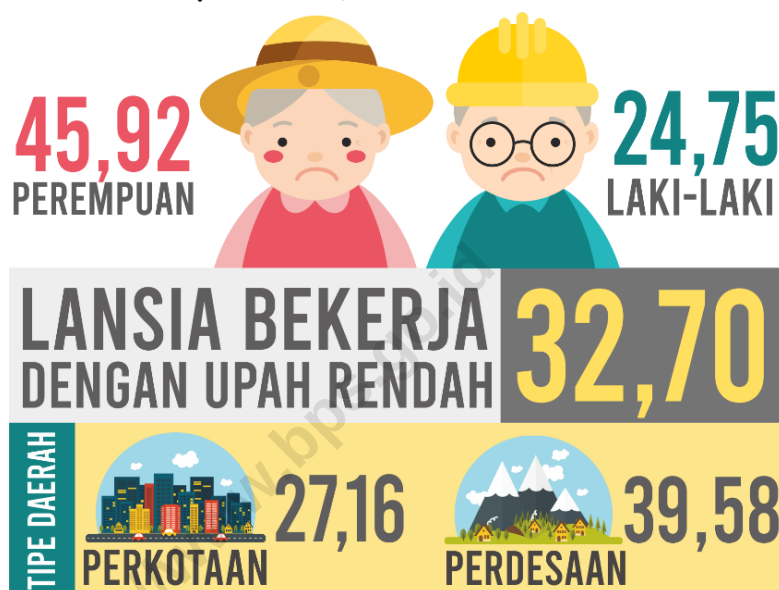
Karakteristik	Kurang dari 1.000.000	1.000.000- 1.999.999	2.000.000- 2.999.999	3.000.000 atau lebih	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total	46,22	29,16	12,70	11,92	100,00
Tipe Daerah					
Perkotaan	39,81	29,61	14,49	16,09	100,00
Perdesaan	54,15	28,60	10,48	6,77	100,00
Jenis Kelamin					
Laki-Laki	37,05	32,07	15,87	15,01	100,00
Perempuan	61,44	24,33	7,43	6,80	100,00
Kelompok Umur					
Lansia Muda (60-69)	42,13	30,82	13,86	13,19	100,00
Lansia Madya (70-79)	59,58	23,96	8,76	7,70	100,00
Lansia Tua (80+)	69,66	17,88	7,13	5,34	100,00
Jenjang Pendidikan					
Tidak Pernah Sekolah/ Tidak Tamat SD	57,81	27,36	9,65	5,18	100,00
Tamat SD / sederajat	42,25	33,16	14,29	10,30	100,00
Tamat SMP / sederajat	29,60	33,43	17,35	19,63	100,00
Tamat SMA / sederajat	24,87	24,15	19,10	31,89	100,00
Tamat Perguruan Tinggi	18,76	16,48	13,25	51,51	100,00

Sumber: BPS, Sakernas Agustus 2019

Pendapatan/upah/gaji juga berkaitan erat dengan tingkat pendidikan pekerja lansia. Seperti yang terlihat pada Tabel 5.5, persentase lansia bekerja dengan pendidikan tamat SD/sederajat ke bawah sebagian besar menerima pendapatan/upah/gaji kurang dari 1 juta rupiah. Sementara itu, lebih dari separuh pekerja lansia yang tamat perguruan tinggi (PT) menerima pendapatan/upah/gaji tiga juta atau lebih per bulan. Hal ini disebabkan karena lansia yang menamatkan PT

memiliki kualifikasi dan kemampuan yang lebih tinggi sehingga dapat terserap dalam pekerjaan yang menawarkan pendapatan/upah/gaji tinggi.

Gambar 5.10 Persentase Penduduk Lansia yang Bekerja dengan Upah Rendah, 2019



Sumber: BPS, Sakernas Agustus 2019

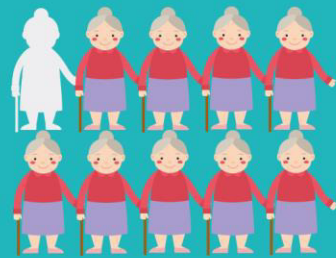
Upah rendah dijabarkan sebagai upah yang kurang dari dua per tiga upah median (BPS, 2018). Upah rendah dalam publikasi ini terbatas untuk status pekerjaan berusaha sendiri, buruh/karyawan, dan pekerja bebas baik pertanian maupun non pertanian. Dari Gambar 5.10, dapat dilihat bahwa sebesar 32,70 persen pekerja lansia memperoleh upah yang rendah. Persentase lansia bekerja dengan upah rendah lebih tinggi di perdesaan daripada di perkotaan jika dilihat berdasarkan tipe daerah. Sekitar 4 dari 10 lansia yang bekerja di perdesaan mendapat upah yang rendah. Hal ini sejalan dengan pembahasan-pembahasan sebelumnya yang menunjukkan bahwa penduduk di perdesaan lebih banyak yang bekerja di sektor pertanian yang memberikan upah lebih rendah dibandingkan sektor lain sehingga menyebabkan persentase lansia yang bekerja dengan upah rendah di perdesaan lebih

tinggi dibandingkan perkotaan. Apabila dibedakan berdasarkan jenis kelamin, persentase lansia perempuan yang bekerja dengan upah rendah jauh lebih tinggi dibandingkan laki-laki (45,92 persen berbanding 24,75 persen).

<https://www.bps.go.id>

1 DARI 10

LANSIA **PERNAH** MENJADI
KORBAN KEJAHATAN DALAM
SATU TAHUN TERAKHIR,



9 DARI 10

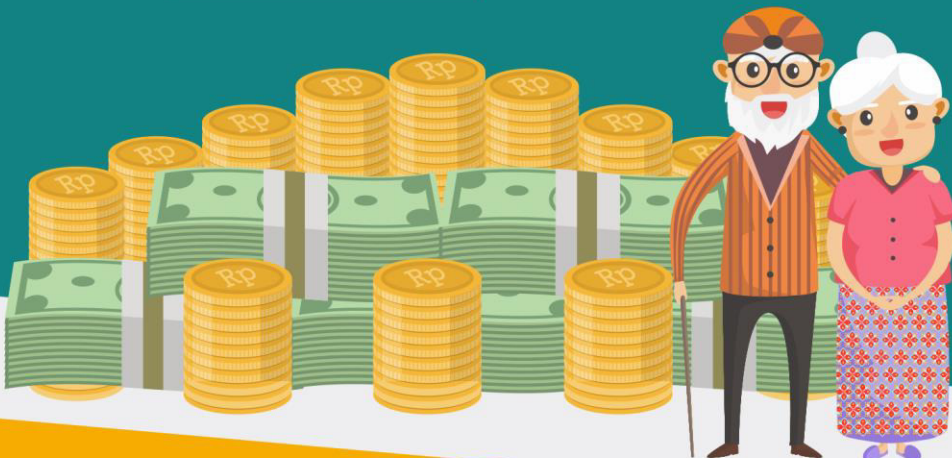
LANSIA TELAH MEMILIKI
RUMAH SENDIRI



SOSIAL EKONOMI

6

4 DARI 10 **RUMAH TANGGA LANSIA**
BELUM MAPAN SECARA EKONOMI



Meningkatnya angka rata-rata harapan hidup mencerminkan makin bertambah panjangnya masa hidup penduduk secara keseluruhan. Hal ini membawa konsekuensi jumlah penduduk lansia semakin bertambah. Peningkatan jumlah penduduk lansia merupakan imbas dari peningkatan ekonomi, pendidikan, sistem kesehatan, sanitasi, dan nutrisi. Peningkatan jumlah penduduk lansia membawa dampak terhadap sosial ekonomi. Lansia cenderung mengalami permasalahan yang kompleks dilihat dari kondisi sosial-ekonomi. Terjadinya transisi dari usia muda ke usia senja mengakibatkan menurunnya kapabilitas lansia dan ketergantungan pada orang lain. Transisi dari masa bekerja menuju masa pensiun akan mengakibatkan peningkatan waktu luang yang dimiliki lansia. Bersosialisasi dan bepergian menjadi suatu kebutuhan bagi lansia dikarenakan lansia rentan untuk merasa kesepian. Transisi tersebut juga mengakibatkan lansia memerlukan dukungan secara finansial untuk melanjutkan hidupnya. Penelitian terkait menemukan bahwa kerawanan sosial meningkat seiring dengan bertambahnya usia (Melchiorre, 2013). Rasa kesepian dan dukungan sosial yang rendah merupakan faktor penting yang dapat memengaruhi kondisi psikis lansia. Oleh karenanya, penting untuk memastikan kebutuhan sosial dan ekonomi lansia terpenuhi untuk meningkatkan kualitas hidup lansia.

Rumah Layak Bagi Lansia



9 dari 10 lansia
tinggal di rumah
berstatus milik
sendiri

Salah satu aspek dari kualitas hidup adalah perumahan. Rumah merupakan kebutuhan dasar manusia. Selain sebagai tempat berlindung, rumah sebagai tempat tinggal harus aman dan nyaman. Rumah yang layak ditinggali adalah rumah yang melindungi penghuninya dari bahaya dan memenuhi kriteria rumah yang sehat. Terpenuhinya kebutuhan dasar rumah yang layak huni diharapkan mampu meningkatkan ketahanan hidup masyarakat. Kepemilikan tempat tinggal menjadi salah satu gambaran kesejahteraan penduduk lansia. Kepemilikan rumah menunjukkan bahwa lansia memiliki status sosial-ekonomi yang baik. Dengan tinggal di rumah milik sendiri, lansia akan merasa memiliki kendali terhadap hidupnya dan merasa memiliki tempat kembali. Persentase penduduk lansia menurut

karakteristik demografi dan status kepemilikan tempat tinggal dapat dilihat pada Tabel 6.1.

Tabel 6.1 Persentase Penduduk Lansia Menurut Status Kepemilikan Tempat Tinggal, 2019

Karakteristik Demografi	Status Kepemilikan Tempat Tinggal					Total
	Milik Sendiri	Kontrak/ Sewa	Bebas Sewa	Dinas	Lainnya	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Total	92,82	2,12	4,67	0,23	0,16	100,00
Tipe Daerah						
Perkotaan	90,10	3,69	5,76	0,29	0,15	100,00
Perdesaan	95,87	0,36	3,45	0,17	0,16	100,00
Jenis Kelamin						
Laki-Laki	93,39	2,20	3,98	0,29	0,14	100,00
Perempuan	92,31	2,04	5,30	0,19	0,17	100,00

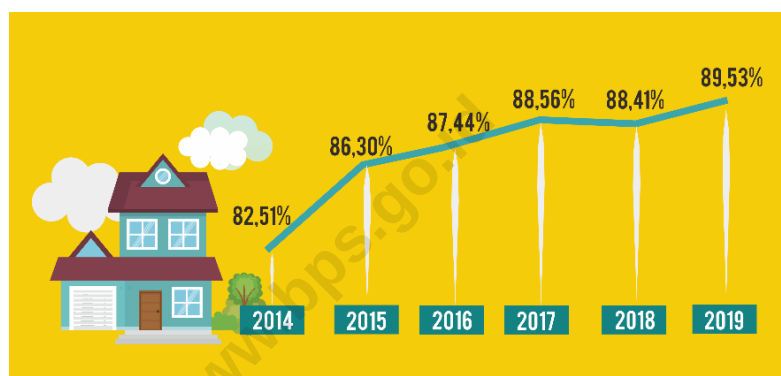
Sumber: BPS, Susenas Maret 2019

Pada tahun 2019, sekitar 9 dari 10 lansia tinggal di rumah milik sendiri. Berdasarkan tipe daerah, lansia yang tinggal di perdesaan memiliki persentase tinggal di rumah sendiri lebih tinggi dibandingkan lansia yang tinggal di perkotaan. Sebesar 95,87 persen lansia di perdesaan tinggal di rumah milik sendiri. Sementara itu, lansia di perkotaan yang tinggal di rumah milik sendiri sebesar 90,10 persen. Jika dilihat berdasarkan jenis kelamin, persentase penduduk lansia yang tinggal di rumah sendiri antara lansia perempuan dan lansia laki-laki tidak jauh berbeda.

Tidak hanya status kepemilikan rumah tempat tinggal, aspek perumahan lain yang patut diperhatikan adalah kelayakan tempat tinggal. Pasal 5 Ayat 1 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman menyatakan bahwa “Setiap warga negara mempunyai hak untuk menempati dan/atau menikmati dan/atau memiliki rumah yang layak dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur” (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23). Ditinjau dari sisi kelayakan, rumah dapat dibedakan menjadi tiga kategori yaitu rumah layak huni, rumah hampir tidak layak huni, dan rumah tidak layak huni. Rumah layak huni adalah rumah yang memenuhi semua kriteria ketahanan bangunan, luas lantai per kapita, akses air minum layak, dan akses sanitasi layak.

Gambar 6.1 Persentase Penduduk Lansia yang Tinggal di Rumah Layak Huni, 2014-2019



Sumber: BPS, Susenas Maret 2014-2019

Berdasarkan Gambar 6.1, dapat dilihat bahwa terdapat peningkatan kualitas perumahan lansia, dimana persentase lansia dengan tempat tinggal layak huni selama kurun waktu tahun 2014 sampai dengan 2019 cenderung mengalami peningkatan. Di tahun 2019, persentase penduduk lansia yang tinggal di rumah layak huni sebesar 89,53 persen. Angka tersebut cukup besar dibandingkan persentase penduduk lansia yang tinggal di rumah layak huni pada tahun 2014, yaitu sebesar 82,51 persen.

Tabel 6.2 menunjukkan bahwa kelayakan rumah tinggal bagi lansia di perkotaan terlihat lebih baik dibandingkan lansia yang tinggal di perdesaan. Hal ini terlihat dari tingginya persentase lansia di perkotaan yang tinggal di rumah layak huni (93,45 persen) dibandingkan lansia di perdesaan (85,15 persen). Jika dilihat menurut jenis kelamin, lansia laki-laki lebih banyak yang tinggal di rumah layak huni dibandingkan lansia perempuan (90,37 persen berbanding 88,76 persen).

Tabel 6.2 Persentase Penduduk Lansia Menurut Status Kelayakan Rumah Tempat Tinggal, 2019

Karakteristik Demografi	Status Kelayakan Rumah Tempat Tinggal			
	Rumah layak huni	Hampir tidak layak huni	Tidak layak huni	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Total	89,53	8,02	2,45	100,00
Tipe Daerah				
Perkotaan	93,45	5,24	1,31	100,00
Perdesaan	85,15	11,13	3,72	100,00
Jenis Kelamin				
Laki-Laki	90,37	7,41	2,22	100,00
Perempuan	88,76	8,58	2,66	100,00

Sumber: BPS, Susenas Maret 2019

Status Ekonomi Lansia

Secara ekonomi, kondisi penduduk lansia di Indonesia masih cukup mengkhawatirkan. Hal tersebut tercermin dari besarnya penduduk lansia di Indonesia yang berada di rumah tangga dengan kelompok pengeluaran 40 persen terbawah (43,84 persen). Sementara itu, penduduk lansia yang tinggal pada rumah tangga dengan kelompok pengeluaran 20 persen teratas persentasenya sebesar 18,91 persen.

Berdasarkan daerah tempat tinggal seperti yang tersaji pada Tabel 6.3, secara umum terdapat pola yang sama baik di perkotaan maupun di perdesaan dimana persentase tertinggi adalah lansia yang tinggal di rumah tangga dengan kelompok pengeluaran 40 persen terbawah. Hal yang sama juga terlihat pada persentase lansia menurut jenis kelamin. Sekitar 4 dari 10 lansia baik laki-laki (41,97 persen) maupun perempuan (45,54 persen) berada pada rumah tangga dengan kelompok pengeluaran 40 persen terbawah.

Tabel 6.3 Persentase Lansia Menurut Kelompok Pengeluaran, 2019

Karakteristik Demografi	Kelompok Pengeluaran Rumah Tangga			
	40% Terbawah	40% Menengah	20% Teratas	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Total	43,84	37,25	18,91	100,00
Tipe Daerah				
Perkotaan	42,84	36,98	20,18	100,00
Perdesaan	43,46	38,17	18,37	100,00
Jenis Kelamin				
Laki-Laki	41,97	38,36	19,67	100,00
Perempuan	45,54	36,24	18,22	100,00

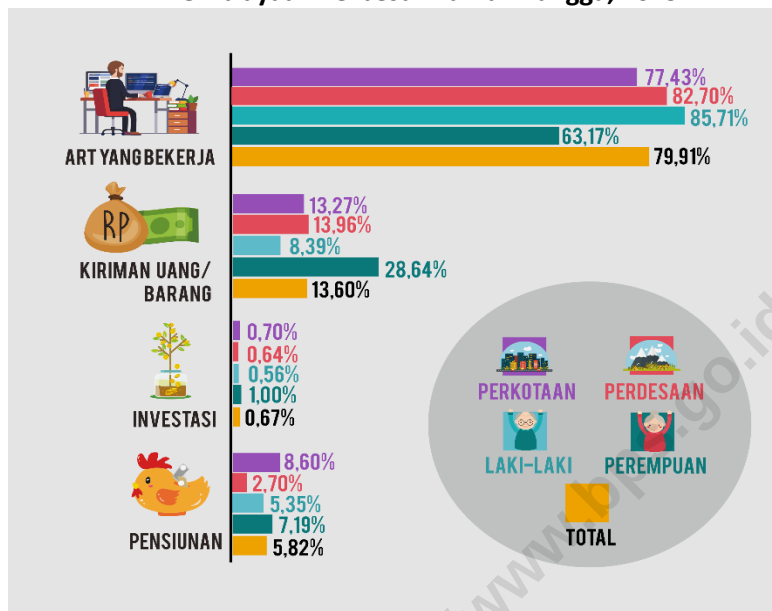
Sumber: BPS, Susenas Maret 2019

Transisi menuju lansia dapat diartikan sebagai transisi dari masa bekerja menuju masa pensiun yang cenderung tidak memiliki penghasilan sendiri. Apabila lansia bekerja, produktivitas yang dihasilkan lebih rendah dibandingkan penduduk berusia muda. Akibatnya, upah yang diperoleh lansia juga rendah. Selain itu, lansia memerlukan biaya untuk perawatan kesehatan. Seluruh faktor tersebut mengakibatkan lansia rentan hidup dalam kemiskinan. Oleh karena itu, untuk mencukupi kebutuhan hidup terkadang lansia mendapat bantuan dari anak-anak atau keluarga. Bantuan tersebut berupa uang atau kebutuhan-kebutuhan lain seperti makanan, pakaian, dan kesehatan.

Sekitar 79,91 persen rumah tangga lansia di Indonesia memiliki sumber pembiayaan terbesar dari anggota rumah tangga (ART) yang bekerja. Jika dilihat menurut tipe daerah, rumah tangga lansia di perdesaan (82,70 persen) lebih banyak yang dibiayai ART bekerja dibandingkan dengan rumah tangga lansia di perkotaan (77,43 persen). Kurang dari 1 persen lansia yang sumber pembiayaan rumah tangganya berasal dari investasi. Hal tersebut memberikan gambaran bahwa lansia di Indonesia kurang siap dalam menghadapi masa tuanya. Akan lebih baik jika selama masih muda seseorang memiliki investasi

sehingga pada saat masa tua tinggal menikmati hasil kerja kerasnya.

Gambar 6.2 Persentase Rumah Tangga Lansia Menurut Sumber Pembiayaan Terbesar Rumah Tangga, 2019

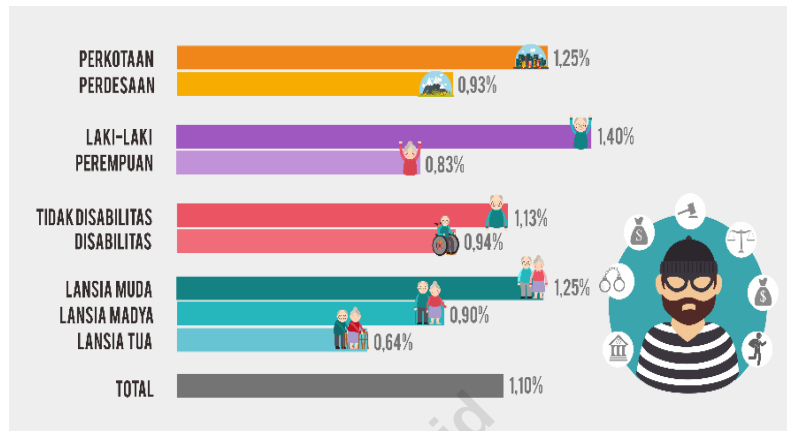


Sumber: BPS, Susenas Maret 2019

Lansia Korban Kejahatan

Aspek sosial-ekonomi lain yang perlu diberi perhatian adalah tindak kriminalitas pada penduduk lansia. Lansia merupakan kelompok penduduk yang rentan ketika mengalami tindak kejahatan. Kondisi fisik lemah mengakibatkan lansia tidak mampu melindungi atau melarikan diri jika terjadi situasi yang mengancam (Das, 2009). Faktor ini dianggap sebagai peluang bagi para pelaku kejahatan untuk melakukan kejahatan, karena para pelaku kejahatan berpikir para lansia tersebut tidak bisa berbuat apa-apa jika menjadi korbannya. Ketika lansia menjadi korban kejahatan, dapat menimbulkan dampak yang besar. Hal ini dikarenakan lansia cenderung lebih mudah cedera jika terjadi tindak kejahatan.

Gambar 6.3 Persentase Lansia yang Pernah Menjadi Korban Kejahatan, 2019



Sumber: BPS, Susenas Maret 2019

Berdasarkan Gambar 6.3, terlihat bahwa 1,10 persen lansia pernah menjadi korban kejahatan dalam setahun terakhir. Meskipun persentase tersebut terbilang kecil, namun seharusnya lansia perlu waspada terhadap kondisi lingkungan sekitarnya. Hal ini dikarenakan masih adanya kemungkinan bahwa lansia menjadi korban dalam suatu tindak kejahatan.

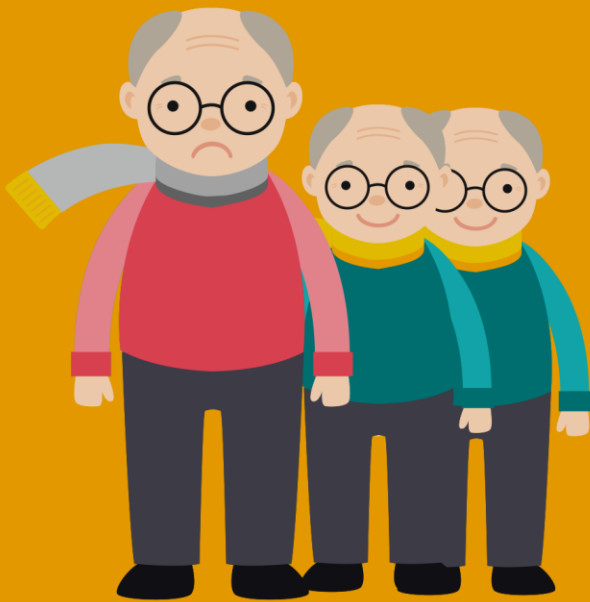
Persentase lansia yang menjadi korban kejahatan di perkotaan lebih tinggi daripada lansia di perdesaan (1,25 persen berbanding 0,93 persen). Hal ini menunjukkan bahwa tingkat keamanan di perkotaan maupun di perdesaan tidak jauh berbeda bagi lansia. Jika dilihat dari jenis kelamin, persentase lansia laki-laki yang mengalami tindak kejahatan selama setahun terakhir lebih tinggi dibandingkan lansia perempuan (1,40 persen berbanding 0,83 persen).

Tabel 6.4 Persentase Lansia yang Menjadi Korban Kejahatan Menurut Jenis Kejahatan, 2019

Karakteristik Demografi	Jenis Kejahatan				
	Pencurian	Penganiayaan	Pencurian dengan Kekerasan	Pelecehan Seksual	Kejahatan Lainnya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total	89,52	1,94	1,64	0,98	12,16
Tipe Daerah					
Perkotaan	89,12	1,60	1,92	0,83	12,52
Perdesaan	90,12	2,46	1,22	1,20	11,62
Jenis Kelamin					
Laki-Laki	89,92	2,03	1,42	0,90	12,17
Perempuan	88,90	1,81	1,97	1,10	12,14
Kelompok Umur					
Lansia Muda (60-69)	90,77	1,94	1,47	0,91	10,44
Lansia Madya (70-79)	86,05	1,51	1,64	0,64	14,65
Lansia Tua (80+)	87,21	3,93	4,10	3,57	25,89
Status Disabilitas					
Disabilitas	90,15	2,48	4,07	1,98	13,93
Non Disabilitas	89,43	1,87	1,29	0,84	11,91

Sumber: BPS, Susenas Maret 2019

Jenis kejahatan yang paling sering dialami oleh lansia adalah pencurian. Berdasarkan Tabel 6.4, terlihat bahwa dari seluruh lansia yang menjadi korban kejahatan, sebesar 89,52 persen mengalami tindak kejahatan pencurian. Pola yang sama juga terjadi baik di perkotaan (89,12 persen) maupun di perdesaan (90,12 persen). Selain pencurian, jenis kejahatan lainnya yang pernah dialami yaitu penganiayaan, pencurian dengan kekerasan, pelecehan seksual, serta kejahatan lainnya.

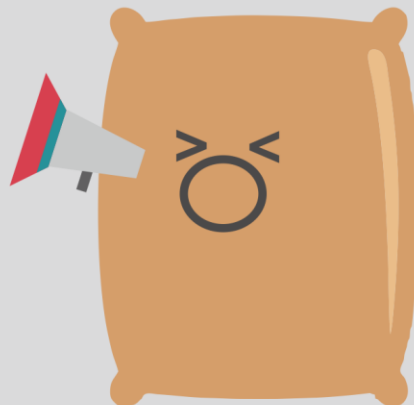


SATU DARI TIGA
PENDUDUK LANJUT USIA
TIDAK MEMILIKI
JAMINAN KESEHATAN

PERLINDUNGAN SOSIAL

7

PROGRAM BPNT (BANTUAN PANGAN NON TUNAI)
SECARA BERTAHAP MULAI
MENGANTIKAN PROGRAM
BANSOS RASTRA SEJAK TAHUN 2017



Pembangunan kesejahteraan sosial merupakan perwujudan dari upaya mencapai tujuan bangsa yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. UUD 45 mengamanatkan negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Permasalahan kesejahteraan sosial yang berkembang dewasa ini menunjukkan bahwa ada warga negara yang belum terpenuhi hak atas kebutuhan dasarnya secara layak karena belum memperoleh pelayanan sosial dari negara. Akibatnya, masih ada warga negara yang mengalami hambatan pelaksanaan fungsi sosial sehingga tidak dapat menjalani kehidupan secara layak dan bermartabat.

Seiring dengan bertambahnya usia, penduduk lansia memiliki kerfentanan sosial maupun ekonomi yang lebih tinggi dibandingkan dengan penduduk yang lebih muda sehingga perlu mendapatkan perlindungan dan perhatian khusus. Indonesia saat ini berada dalam struktur penduduk yang mengarah ke struktur tua (ageing population). Oleh sebab itu, hal-hal yang terkait perlindungan lansia serta sarana dan prasarana yang ramah lansia harus disiapkan dari sekarang. UU no. 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial mengamanatkan kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Bab ini akan membahas beberapa program terkait perlindungan sosial yang ditujukan kepada penduduk lansia, baik yang berupa bantuan sosial maupun jaminan sosial.

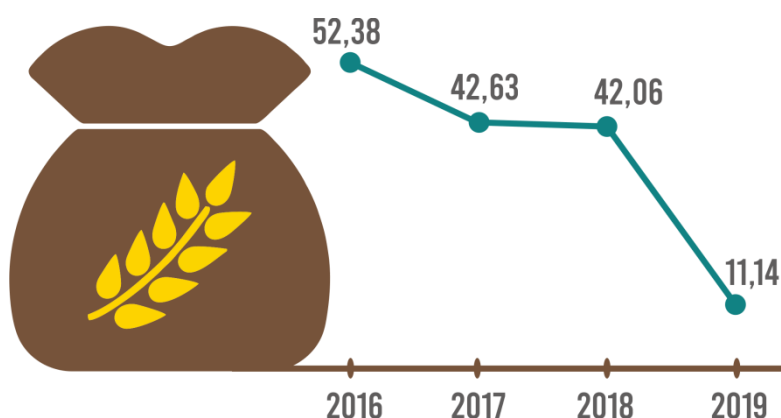
Bantuan Sosial Lansia

Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang merupakan transformasi dari program sebelumnya (program subsidi beras sejahtera/rastra) telah dimulai secara bertahap sejak tahun 2017. Perubahan program ini dilakukan sebagai upaya pemerintah dalam memperbaiki mekanisme pelaksanaan penyaluran bantuan pangan untuk keluarga miskin dengan

harapan dapat memenuhi prinsip 6 (enam) T, yaitu: tepat sasaran, tepat jumlah, tepat harga, tepat waktu, tepat kualitas, dan tepat administrasi. Dalam waktu tiga tahun, program BPNT dinyatakan berhasil karena memiliki banyak manfaat dan kelebihan, serta capaian yang memuaskan. Dalam hasil studi *microsave* tentang pelaksanaan BPNT pada akhir 2018, mereka menyampaikan jika 96 persen Keluarga Penerima Manfaat (KPM) merasa puas dengan program ini.

Sebesar 11,14 persen rumah tangga lansia menerima Bansos Rastra pada tahun 2019. Angka ini mengalami penurunan jika dibandingkan tahun-tahun sebelumnya (Gambar 7.1). Penurunan ini terjadi karena adanya program penyaluran Bantuan Sosial Pangan dalam bentuk nontunai atau yang lebih dikenal dengan istilah Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). BPNT merupakan bantuan dari pemerintah kepada KPM untuk membeli kebutuhan pangan berupa beras/telur di warung elektronik gotong royong (*e-waroeng*). Bantuan tersebut dapat dicairkan setiap bulannya dengan menggunakan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).

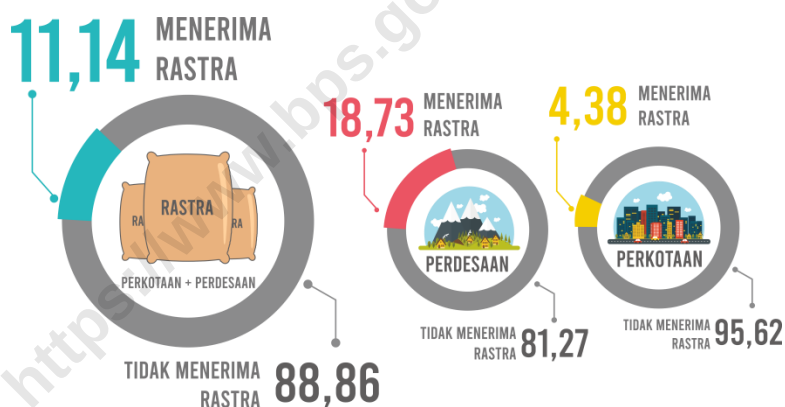
Gambar 7.1 Persentase Rumah Tangga Lansia yang Menerima Bansos Rastra, 2016-2019



Sumber : BPS, Susenas Maret 2016-2019

Sejak tahun 2019 pemerintah RI melalui Kementerian Sosial secara bertahap mengubah penyaluran beras (Bansos Rastra) menjadi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Program BPNT ini akan menggantikan penyaluran beras langsung menjadi uang dalam kartu yang diberikan pemerintah. Melalui uang itu, mereka dibebaskan dapat membeli kebutuhan pokoknya mulai dari beras, minyak goreng, telur hingga daging. Gambar 7.2 menunjukkan bahwa persentase rumah tangga lansia yang menerima Bansos Rastra di perdesaan empat kali lebih tinggi dibanding perkotaan (4,38 persen dibanding 18,73 persen).

Gambar 7.2 Persentase Rumah Tangga Lansia yang Menerima Bansos Rastra Menurut Tipe Daerah, 2019



Sumber : BPS, Susenas Maret 2019

Jika sebelumnya pemerintah menetapkan rumah tangga lansia menerima subsidi Rastra sebanyak 15 kg per bulan dengan harga/biaya tebus 1.600 rupiah per kg, melalui perubahan pola subsidi menjadi pola bantuan sosial, mulai 2019 ini rumah tangga lansia menerima Bansos Rastra sejumlah 10 kg dengan kualitas medium dan disalurkan setiap bulan dengan dikenakan harga/biaya tebus sebesar hanya sekitar hampir 400 rupiah per kg. Biaya sebesar itu semata-mata hanya untuk mengganti biaya pengangkutan & pengepakan rastra sampai ke rumah penerima manfaat. Namun, Tabel 7.1 menunjukkan bahwa rata-rata besaran (kg) Bansos Rastra yang diterima oleh rumah tangga lansia masih lebih rendah dari yang telah ditetapkan pemerintah.

Baik di perkotaan maupun di perdesaan, tiap rumah tangga lansia hanya menerima sekitar 6-7 kg dari target 10 kg yang ditetapkan pemerintah.

Bansos Rastra yang harusnya diterima rumah tangga lansia secara cuma-cuma juga belum terlaksana sepenuhnya. Setiap rumah tangga lansia masih harus membayar sekitar hampir 400 rupiah per kg, namun harga tersebut sudah jauh lebih murah dibandingkan sebelum adanya peraturan pemerintah, dimana sebelumnya harga per kg Rastra mencapai Rp. 1.900,-.

Tabel 7.1 Karakteristik Penyaluran Bantuan Sosial Beras Sejahtera (Bansos Rastra) kepada Rumah Tangga Lansia, 2019

	Rata-rata Banyaknya (kg) Bansos Rastra yang Diterima per Bulan	Rata-Rata Harga (rupiah) Bansos Rastra yang Dibeli per Bulan
(1)	(2)	(3)
Total	6,85	393,95
Tipe Daerah		
Perkotaan	6,77	630,98
Perdesaan	6,87	331,62

Sumber: BPS, Susenas Maret 2019

Bansos Rastra merupakan bagian dari kebijakan pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan. Namun kenyataannya, masih ada sekitar 2,93 persen rumah tangga lansia kelompok pengeluaran 20 persen teratas yang menerima Bansos Rastra. Sementara itu, rumah tangga lansia kelompok 40 persen terbawah yang seharusnya lebih berhak menerima Bansos Rastra, tercatat hanya 15,22 persen yang menerima Bansos Rastra. Ketidaktepatan sasaran dalam penyaluran Bansos Rastra lebih terlihat jelas di perdesaan, dimana persentase rumah tangga lansia kelompok 20 persen teratas yang menerima Rastra mencapai 16 kali lebih besar dibandingkan perkotaan (12,78 persen dibanding 0,78 persen).



Bansos Rastra
berupa beras
kualitas medium
diberikan sebanyak
10kg/kpm setiap
bulan

Tabel 7.2 Persentase Rumah Tangga Lansia yang Menerima Bansos Rastra Menurut Tipe Daerah dan Kelompok Pengeluaran, 2019

Karakteristik	Tipe Daerah		Total
	Perkotaan	Perdesaan	
(1)	(2)	(3)	(4)
Total	4,38	18,73	11,14
Kelompok Pengeluaran			
40% terbawah	7,25	20,95	15,22
40% menengah	3,12	19,27	10,73
20% teratas	0,78	12,78	2,93

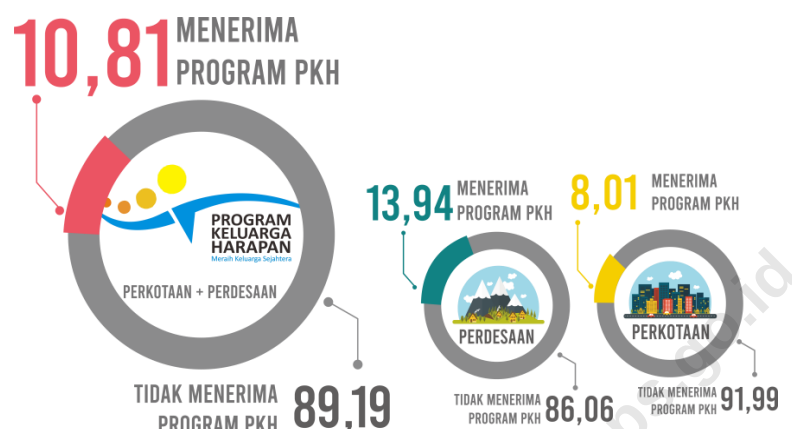
Sumber: BPS, Susenas Maret 2019

Selain Bantuan Sosial Pangan, pemerintah secara khusus menetapkan penduduk lansia sebagai penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) dalam komponen kesejahteraan sosial. PKH itu sendiri adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH. Merujuk pada Surat Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Nomor 26/ LJS/12/2016 tanggal 27 Desember 2016 tentang Indeks dan Komponen Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan Tahun 2017, nilai bantuan lanjut usia adalah sebesar 2.000.000 rupiah. Adanya Bansos PKH ini dengan bantuan sosial dan program subsidi lainnya diharapkan berdampak signifikan dalam percepatan penanganan kemiskinan di Indonesia.

Gambar 7.3 menunjukkan bahwa sekitar 10,81 persen rumah tangga lansia memiliki kartu PKH, dengan persentase di perdesaan lebih besar dibanding perkotaan (13,94 persen dibanding 8,01 persen). Sementara itu, persentase rumah tangga lansia yang masih tercatat menjadi penerima PKH sebesar 10,81 persen. Hal ini berarti tidak semua rumah tangga lansia yang memiliki kartu PKH menerima bantuan PKH. Padahal

idealnya, rumah tangga yang memiliki kartu PKH juga menerima bantuan PKH tersebut.

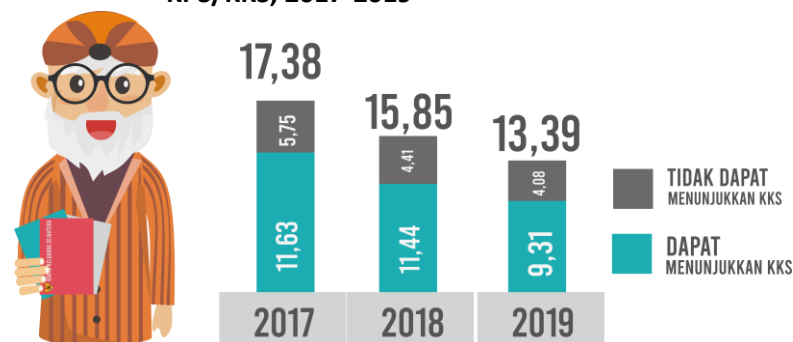
Gambar 7.3 Persentase Rumah Tangga Lansia yang Memiliki Kartu PKH dan yang Masih Tercatat/Menjadi Penerima PKH Menurut Tipe Daerah, 2019



Sumber: BPS, Susenas Maret 2019

Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) diterbitkan pemerintah untuk menyalurkan Bansos dan subsidi. KKS sebagai penanda keluarga kurang mampu dan pengganti Kartu Perlindungan Sosial (KPS). KKS/ KPS mempunyai fungsi ganda, yaitu menjadi tabungan dan dompet (*e-wallet*). Fungsi tabungan sebagai wadah menyalurkan bantuan sosial PKH dan bantuan tabungan lainnya, sedangkan fungsi dompet (*e-wallet*) sebagai wadah menyalurkan Bantuan Pangan Non Tunai dan bantuan barang lainnya.

Gambar 7.4 Persentase Rumah Tangga Lansia yang Memiliki KPS/KKS, 2017-2019



Sumber: BPS, Susenas Maret 2019



**KKS bukan
Kartu untuk
Keluarga
Sejahtera**

Pada Gambar 7.4 terlihat persentase rumah tangga lansia yang memiliki KPS/KKS tahun 2019 (13,39 persen) mengalami penurunan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini berbanding lurus dengan kondisi data kemiskinan di Indonesia, dimana persentase penduduk miskin tahun 2019 (9,41 persen) mengalami penurunan dibandingkan tahun 2017 (10,64 persen) dan 2018 (9,82 persen).

Gambar 7.5 Persentase Rumah Tangga Lansia yang Memiliki KPS/KKS, Menurut Tipe Daerah dan Kelompok Pengeluaran, 2019



Sumber : BPS, Susenas Maret 2019

Jika dilihat lebih rinci, tercatat persentase rumah tangga lansia yang memiliki KPS/KKS dan dapat menunjukkan kartu sebesar 9,31 persen. Berdasarkan tipe daerah, terlihat persentase rumah tangga lansia di perdesaan yang memiliki KPS/ KKS lebih tinggi dibandingkan di perkotaan (Gambar 7.5).

Sementara itu, berdasarkan status ekonomi terlihat bahwa masih ada rumah tangga lansia pada kelompok pengeluaran 20 persen teratas yang memiliki KPS/KKS yaitu sebesar 4,08 persen. Kemudian, jika dilihat menurut provinsi (Lampiran 7.6), persentase tertinggi rumah tangga lansia yang memiliki KPS/KKS adalah DI Yogyakarta (24,44 persen), dimana DI Yogyakarta merupakan provinsi dengan persentase penduduk lansia tertinggi.

Persentase penduduk lansia yang terus meningkat jika tidak segera diantisipasi dapat menimbulkan masalah kelanjutusiaan. Untuk itu, diperlukan suatu program pemberdayaan bagi para lanjut usia, sehingga para penduduk lansia tersebut tidak menjadi beban generasi muda dan negara. Salah satu jenis upaya yang dilakukan Kementerian Sosial adalah pemberian bantuan usaha bagi lansia potensial, yang secara khusus disebut dalam program Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia.

Tabel 7.3 Persentase Rumah Tangga Lansia yang Menerima Kredit Pengembangan Usaha Menurut Tipe Kredit dan Tipe Daerah, 2019

Karakteristik	Tipe Daerah		Total
	Perkotaan	Perdesaan	
(1)	(2)	(3)	(4)
Rumah tangga lansia yang pernah menerima kredit pengembangan usaha	20,68	19,97	20,35
Jenis kredit pengembangan usaha			
Kredit Usaha Rakyat (KUR)	4,04	5,03	4,51
Bank umum selain KUR	4,92	4,04	4,51
Bank Perkreditan Rakyat	1,28	1,17	1,23
Koperasi	3,56	3,83	3,69
Perorangan dengan bunga	1,53	1,40	1,47
Kredit pegadaian	0,73	0,64	0,68
Perusahaan <i>leasing</i>	3,85	1,60	2,79
Kelompok Usaha Bersama (KUBE)	0,40	0,56	0,47
Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)	0,30	0,60	0,44
Lainnya	3,33	3,81	3,56

Sumber: BPS, Susenas Maret 2019

Tabel 7.3 menunjukkan bahwa 20,35 persen rumah tangga lansia pernah menerima kredit pengembangan usaha. Tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada penyaluran bantuan jika dilihat menurut tipe daerah, dimana persentase di perkotaan sedikit lebih tinggi daripada perdesaan (20,68 persen dibanding 19,97 persen). Berdasarkan jenis kredit usaha yang diterima, tercatat rumah tangga lansia di perdesaan paling banyak menerima KUR (5,03 persen), sementara rumah tangga lansia di perkotaan paling banyak menerima Kredit Bank Umum selain KUR (4,92 persen).

Jaminan Sosial Lansia

Jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak (UU RI No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional). Jaminan sosial hanya diberikan kepada peserta jaminan sosial, yakni setiap orang yang telah membayar iuran. Salah satu jaminan sosial yang sangat penting yakni jaminan kesehatan. Jaminan kesehatan diselenggarakan dengan tujuan menjamin agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan.

Penerima Bantuan Iuran (PBI) adalah peserta jaminan kesehatan bagi fakir miskin dan orang tidak mampu yang iurannya dibayar oleh pemerintah sebagai peserta program Jaminan Kesehatan. Program ini merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan akses terhadap pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dan rentan serta memberikan perlindungan keuangan atas pengeluaran kesehatan akibat sakit. Sayangnya, program tersebut tidak sepenuhnya tepat sasaran karena pada kenyataannya masih ada 1 dari 5 lansia dengan status ekonomi 20% teratas yang menerima PBI (21,54 persen). Sementara itu, tercatat baru sekitar 48,88 persen lansia dengan status ekonomi 40% terbawah yang menerima PBI atau masih kurang dari

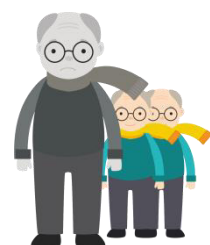
setengahnya. Padahal, mereka lah yang seharusnya lebih berhak menerima PBI.

Tabel 7.4 Persentase Penduduk Lansia yang Menerima Jaminan Kesehatan Menurut Jenis Jaminan Kesehatan, 2019

Karakteristik	Memiliki Jaminan Kesehatan	Jenis Jaminan Kesehatan				
		PBI	Non PBI	Jamkesda	Asuransi Swasta	Perusahaan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Total	69,69	39,64	22,75	10,76	0,56	0,93
Tipe Daerah						
Perkotaan	75,86	36.39	32.42	10.63	0.95	1.48
Perdesaan	62,79	43.27	11.93	10.91	0.13	0.32
Jenis Kelamin						
Laki-laki	70,16	39.13	23.80	10.63	0.63	1.03
Perempuan	69,27	40.11	21.79	10.88	0.50	0.84
Status Disabilitas						
Disabilitas	68.65	43,15	18,63	10.62	0.30	0,47
Non Disabilitas	69.87	39,05	23.44	10.79	0.60	1,01
Kelompok Pengeluaran						
40% Terbawah	64.81	48.88	8.87	10.24	0.08	0.23
40% Menengah	69.07	37.96	23.75	11.39	0.24	0.84
20% Teratas	82.23	21.54	52.92	10.73	2.32	2.76

Sumber: BPS, Susenas Maret 2019

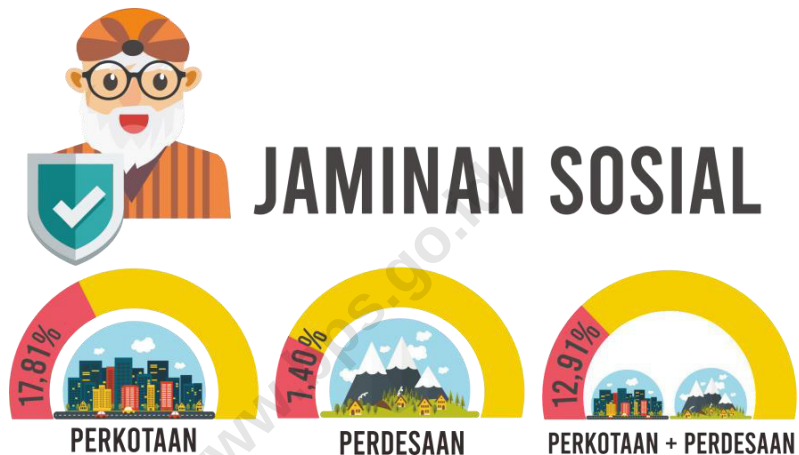
Dengan bertambahnya usia, fungsi fisiologis mengalami penurunan akibat proses degeneratif (penuaan), sehingga penyakit tidak menular banyak muncul pada lanjut usia. Selain itu proses degeneratif menurunkan daya tahan tubuh sehingga rentan terkena infeksi penyakit menular (Kemenkes, Profil Kesehatan 2016). Kondisi demikian membuat jaminan kesehatan menjadi hal penting bagi para lansia. Sayangnya, jaminan kesehatan belum menjangkau seluruh lansia. Terlihat pada Tabel 7.4 bahwa dari tiga penduduk lansia, satu di antaranya tidak memiliki jaminan kesehatan. Jaminan kesehatan



Satu dari tiga penduduk lansia tidak memiliki jaminan kesehatan

nampaknya lebih merata di perkotaan dibandingkan perdesaan. Hal ini terlihat dari persentase lansia di perkotaan yang memiliki jaminan kesehatan lebih tinggi dibandingkan di perdesaan (75,86 persen dibanding 67,79 persen).

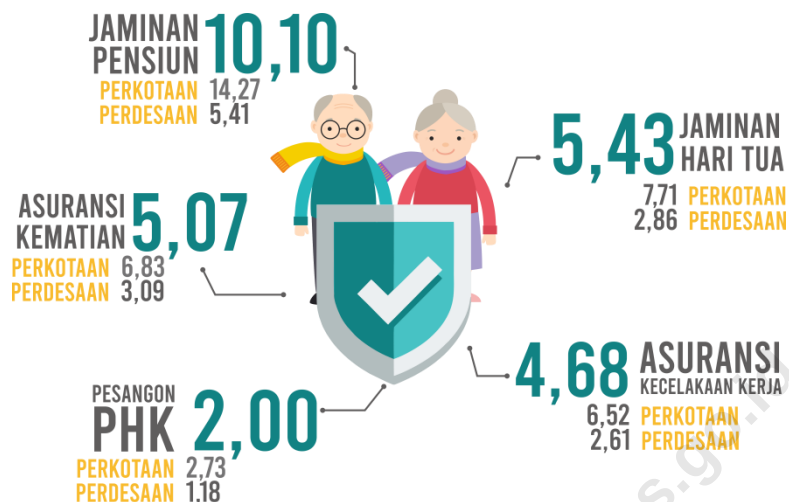
Gambar 7.6 Persentase Rumah Tangga Lansia yang Memiliki Jaminan Sosial Menurut Tipe Daerah, 2019



Sumber: BPS, Susenas Maret 2019

Selain jaminan kesehatan, jaminan sosial yang juga diterapkan di Indonesia adalah jaminan pensiun, jaminan hari tua, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan pesangon Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Sekitar 12 dari 100 rumah tangga lansia di Indonesia memiliki jaminan sosial (Gambar 7.6) dengan persentase di perkotaan lebih dari dua kali perdesaan (17,81 persen dibanding 7,40 persen). Hal ini kemungkinan karena akses dan fasilitas di perkotaan yang lebih baik membuat para lansia lebih mudah untuk mendapatkan jaminan sosial dibandingkan mereka yang tinggal di perdesaan.

Gambar 7.7 Persentase Rumah Tangga Lansia yang Memiliki Jaminan Sosial Menurut Tipe Daerah dan Jenis Jaminan Sosial, 2019



Sumber: BPS, Susenas Maret 2019

Jika dilihat menurut jenisnya, pada Gambar 7.7 terlihat bahwa jaminan sosial yang paling banyak dimiliki oleh rumah tangga lansia adalah jaminan pensiun/veteran (10,10 persen) dengan persentase di perkotaan mencapai lebih dari dua kali perdesaan (14,27 persen berbanding 5,41 persen). Sementara itu, pesangon PHK merupakan jaminan yang paling sedikit dimiliki oleh rumah tangga lansia, yakni hanya 2 persen.



PROGRAM PRO LANSIA

8



PROGRES LU*

**ADALAH SALAH SATU
PROGRAM ANDALAN
PENDAMPINGAN SOSIAL LANSIA**

***PROGRES LU: PROGRAM REHABILITASI SOSIAL LANJUT USIA**



Undang-undang No. 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Elderly Welfare), pemerintah bertugas mengarahkan, membimbing, dan menciptakan suasana yang menunjang bagi terlaksananya upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia. Kemudian diperkuat lagi dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial yang menegaskan perlunya pemberian jaminan dan kesejahteraan bagi lansia, khususnya lansia terlantar. Jumlah lansia yang semakin meningkat dari tahun ke tahun (bentuk piramida mengarah ke struktur tua/ageing population) menjadi indikator keberhasilan pembangunan sekaligus juga tantangan. Peningkatan jumlah lansia akan berdampak terhadap kondisi sosial ekonomi dalam kehidupan keluarga, masyarakat, maupun dalam pemerintahan. Penduduk lansia lebih rentan dibandingkan dengan penduduk yang lebih muda sehingga perlu mendapatkan perlindungan dan perhatian khusus.

Kebijakan Umum Pelayanan Kesejahteraan Lansia

Menurut Permensos RI No. 9 tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di daerah Provinsi dan di daerah Kabupaten/Kota, bahwa lansia terlantar merupakan salah satu penerima sasaran. Dalam RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) 2015-2019 mengamanatkan arah kebijakan kelanjutusiaan melalui dua hal pokok, yaitu : 1. Peningkatan pemenuhan hak dasar dan inklusivitas, serta 2. Penguatan skema perlindungan sosial bagi lansia. Selain itu *SDGs* target 1.3 menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua (termasuk kelompok yang paling miskin) yang salah satu sarannya adalah penduduk lansia.

Program Pelayanan Lansia

Permensos RI Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelayanan Sosial Lansia menyebutkan bahwa pelayanan sosial lansia adalah upaya yang ditujukan untuk membantu lansia dalam memulihkan dan mengembangkan fungsi sosialnya. Secara garis besar program-program pelayanan dan perbendaharaan lansia dari Kementerian Sosial antara lain sebagai berikut :

1. Asistensi Sosial Lanjut Usia (ASLU)

ASLU adalah bagian rehabilitasi sosial untuk membantu lansia non potensial agar mereka dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak. Target sasaran lansia yang mendapatkan program tahun 2019 adalah 30.000 orang dengan nilai bantuan adalah Rp 200.000 × 12 bulan per lanjut usia.

2. *Home Care*

Target sasaran untuk program ini selama tahun 2019 adalah 20.000 orang dengan bantuan senilai Rp. 1.200.000,- per lansia. *Home Care* atau disebut juga Program Pendampingan Sosial Lansia Non Potensial melalui perawatan di rumah sebagai wujud perhatian terhadap lansia dengan mengutamakan peran masyarakat berbasis keluarga. Secara khusus, tujuan yang diharapkan dari Pendampingan dan Perawatan lanjut usia di rumah (Stanhope & Lancaster, 1996) adalah :

- a. Meningkatnya kemampuan lanjut usia untuk menyesuaikan diri terhadap proses perubahan dirinya secara fisik, mental, dan sosial.
- b. Terpenuhinya kebutuhan dan hak-hak lansia agar mampu berperan dan berfungsi di masyarakat secara wajar.

- c. Meningkatnya peran serta keluarga dan masyarakat dalam pendampingan dan perawatan lansia di rumah.
- d. Terciptanya rasa aman, nyaman dan tentram bagi lansia baik di rumah maupun di lingkungan sekitarnya.

3. *Family Support*

Family Support adalah setiap upaya yang ditujukan kepada lansia potensial guna memperkuat keberfungsian fisik, psikologis, sosial, dan spiritual maupun ekonomi dengan dukungan dan penyertaan keluarga lansia. Tujuannya adalah memberikan bantuan dan dukungan kepada lansia potensial agar mereka terlindungi dari risiko sosial, sehingga dapat memperbaiki dan meningkatkan kesejahteraannya. Adapun target sasaran program ini tahun 2019 sebanyak 7.000 orang.

4. Asistensi Sosial melalui Lembaga Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (LKS-LU)

Target sasaran Asistensi Sosial melalui Lembaga Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia Potensial maupun Non Potensial tahun 2019 adalah 2.655 orang.

5. Lansia yang memperoleh pelayanan sosial melalui Respon Kasus Sasaran target lansia potensial maupun non potensial pada tahun 2019 adalah 8.390 orang.

6. Dukungan Kegiatan Lainnya, antara lain :

- a. Pengembangan Kawasan Ramah Lansia
- b. Asistensi perubahan UU No. 13 tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia
- c. *Day Care*
- d. Penguatan dan Pengembangan mitra
- e. Peningkatan Akreditasi Lembaga

- f. HLUN (Hari Lanjut Usia Nasional)
- g. Rekrutmen dan pengembangan pendamping sosial lanjut usia
- h. Penghargaan Kesejahteraan Sosial
- i. NSPK (Norma, Standar, Prosedur, & Kriteria)
- j. Monev (Monitoring & Evaluasi) Terpadu

7. Progres LU

Program Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia adalah upaya yang ditujukan untuk membantu lansia dalam memulihkan dan mengembangkan keberfungsian sosialnya. Progres LU terdiri dari :

- a. Bantu LU (Bantuan Bertujuan Lanjut Usia), berupa bantuan sosial non tunai sebesar Rp. 200.000 per orang per bulan.
- b. Perawatan Sosial Dalam Keluarga/Balai, berupa bantuan sosial sebesar Rp. 1.200.000 per orang / tahun melalui LKS LU.
- c. Dukungan Keluarga yang mengurus lanjut usia, berupa bantuan sosial non tunai sebesar Rp. 3.000.000 per orang per tahun.
- d. Terapi, berupa bantuan sosial sebesar Rp. 1.350.000 per orang per tahun melalui LKS LU.

8. Pendamping Sosial Profesional Lanjut Usia

Pemberdayaan tenaga kesejahteraan sosial yang berasal dari masyarakat yang melakukan koordinasi dan pendampingan pada semua program rehabilitasi sosial lanjut usia serta ditempatkan di daerah (Pusat, Provinsi, kabupaten/Kota, Balai/Loka Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia). Program Pendamping Sosial terdiri dari :

- a. Respon Kasus, berupa penjangkauan kasus dalam rangka *assesment* dan intervensi kedaruratan lanjut usia
 - b. Manajemen Kasus, berupa pelaksanaan koordinasi melalui pertemuan antar institusi/ahli terkait permasalahan lanjut usia
 - c. Honor, berupa pembayaran imbalan kepada Pendamping Sosial Lanjut Usia yang bersifat mengikat sebesar Rp. 2.500.000 per orang per bulan.
 - d. Tali Asih, berupa pembayaran imbalan kepada Pendamping Sosial Lanjut Usia yang bersifat tidak mengikat, sesuai dengan karakteristik kegiatan.
9. Dukungan Teknis Lanjut Usia
- Komponen kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung kegiatan utama program rehabilitasi sosial lanjut usia, yang terdiri dari :
- a. Rapat Koordinasi
 - b. Bimbingan & Terpadu
 - c. Monitoring Terpadu, berupa monitoring terintegrasi antarkegiatan
 - d. Evaluasi Terpadu, berupa evaluasi terintegrasi antar kegiatan
10. Dukungan Aksesibilitas Lanjut Usia
- Bantuan Sosial yang diberikan kepada lanjut usia potensial dan non potensial dalam bentuk pemenuhan hak hidup layak dan aksesibilitas, yang terdiri dari :
- a. Pemenuhan Hak Hidup Layak, berupa bantuan sosial bagi lanjut usia yang berada dalam situasi darurat dengan nilai sebesar Rp. 750.000 per orang

- b. Bimbingan dan Dukungan Aksesibilitas, berupa bantuan sosial bagi lanjut usia yang mengalami hambatan mobilitas dan aksesibilitas dengan nilai sebesar Rp. 750.000 per orang.

Sedangkan program-program dari Kementerian Kesehatan ditujukan untuk peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan bagi lansia di fasyankes primer dan rujukan serta pemberdayaan potensi lansia di masyarakat. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan derajat kesehatan lansia untuk mencapai Lansia yang sehat, mandiri, aktif, produktif dan berdayaguna bagi keluarga dan masyarakat, atau dapat disingkat dengan Lansia SMART (Sehat, Mandiri, Aktif, Produktif). Program yang dikembangkan oleh Kementerian Kesehatan untuk mewujudkan lansia SMART adalah program yang dikembangkan oleh Kementerian Kesehatan untuk mewujudkan lansia SMART adalah :

1. Pengembangan dan Penguatan Pelayanan dasar, melalui Pengembangan Puskesmas yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan Santun Lansia. Santun Lansia dilaksanakan secara komprehensif meliputi upaya promotif, preventif kuratif, rehabilitatif dan rujukan kepada Lanjut Usia, yang dilakukan secara proaktif, baik, sopan, memberikan kemudahan dan dukungan bagi lansia.
2. Pengembangan Pelayanan Rujukan, melalui Pengembangan Rumah Sakit yang mempunyai pelayanan Geriatri Terpadu.
3. Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat melalui pelaksanaan kegiatan di Posyandu Lansia. Kegiatan dilakukan oleh kader dengan pendampingan dari tenaga kesehatan Puskesmas/sektor terkait. Kegiatan ini menitik beratkan pada upaya promotif dan preventif serta deteksi dini.

Lansia
SMART
adalah Lansia
Sehat, Mandiri,
Aktif, pRodukTif

4. Peningkatan Pemberdayaan Lansia dalam keluarga/ masyarakat. Proses pemberian informasi, kemampuan dan motivasi bagi lansia agar mereka berperilaku sehat, berperan dalam mengembangkan perilaku sehat dan mampu memberi solusi apabila ada permasalahan kesehatan dalam keluarga dan masyarakat.
5. Peningkatan Pelayanan *Home Care* yang terintegrasi dalam perawatan kesehatan masyarakat. Ditujukan bagi Lansia yang tidak mampu secara fungsional untuk mandiri di rumah namun tidak ada indikasi untuk dirawat di RS dan secara teknis sulit untuk berobat jalan.
6. Pengembangan pelayanan *Long Term Care* / Perawatan Jangka Panjang (PJP). PJP dikembangkan dengan memperhatikan aspek budaya yang masih mempertahankan model keluarga besar.
7. Peningkatan pelayanan integrasi dengan Lintas Program melalui pendekatan siklus hidup. Lansia sehat, aktif dan mandiri dapat dipersiapkan sejak dini sebagai pendekatan siklus hidup. Hal tersebut dapat diusahakan melalui perilaku hidup sehat mulai ketika ibu mengalami kehamilan, masa bayi, remaja sampai lanjut usia; Identifikasi faktor risiko (lingkungan dan perilaku) yang diikuti tindakan pencegahan; Pencegahan penyakit dengan imunisasi, deteksi dini faktor risiko serta pengendalian lingkungan; Pendekatan yang dilakukan berhubungan dengan kesehatan fisik, kejiwaan dan psiko-sosial; Pencegahan dan intervensi dini dapat mengantisipasi kecacatan akibat berbagai hal dapat ditunda sampai selanjut mungkin. Pelayanan kepada lanjut usia dilakukan secara terintegrasi yang melibatkan lintas program.
8. Peningkatan kemitraan dengan LS, Toma, Toga, LSM, Ormas, Swasta, dll. Peningkatan kemitraan disesuaikan dengan bidang dan kemampuan masing-masing dengan prinsip kesetaraan dan keterbukaan. Di tingkat kecamatan dapat

dibentuk kelompok kerja pembinaan lanjut usia yang terdiri dari unsur lintas sektor, LSM, generasi muda, tokoh masyarakat, kader dsb, untuk:

- a. Melakukan koordinasi dalam upaya pembinaan lanjut usia.
- b. Mendorong terbentuknya kelompok/posyandu lanjut usia di masyarakat.
- c. Memantau permasalahan lanjut usia di masyarakat dan memberi masukan kepada pelaksana program sektor terkait.

Sedangkan di tingkat desa/kelurahan dapat dibentuk tim pelaksana pembinaan lansia.

Beberapa program terkait lansia yang sudah dilaksanakan pada beberapa wilayah di Indonesia pada tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Provinsi NTT

Pada dasarnya belum ada program khusus bagi para lansia dari Pemprov NTT. Program yang sudah berjalan selama ini merupakan turunan dari pusat, baik berupa PKH, ASLUT dan program pusat lainnya. Untuk ASLUT 2019 sebanyak 1.450 lansia penerima bantuan tersebut dengan anggaran sebesar 2,9 M, dengan 23 orang koordinator dan 130 orang pendamping.

Sampai dengan kondisi tahun 2019, data lansia terlantar belum diperbaharui, data terakhir masih pada kondisi tahun 2015. Data tersebut akan diperbaharui oleh 309 orang TKSK. Untuk program yang berasal dari pendanaan APBD hanya fokus pada pembinaan dua panti lansia milik pemerintah dengan besar alokasi anggaran sebesar 1,5 M/tahun untuk masing-masing panti, dua panti tersebut yaitu : Panti Lansia Budi Agung di Kupang dan Panti Paduan Maumere di Sika. Dana ini diperuntukkan bagi masing-masing panti dengan jumlah lansia yang ditanggung sebanyak 85 orang.

Provinsi Bengkulu

Program terkait lansia di provinsi ini juga masih berupa program-program turunan dari pusat. Meskipun ada program BPJS namun tidak semua lansia yang mendapatkan BPJS, oleh karena itu pemerintah setempat dengan menggunakan dana desa memberikan jaminan sosial *home care* serta santunan lansia bagi para lansia yang tidak mampu.

Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional di Provinsi Bengkulu dimulai dari tahun 2016 dan tercapai tahun 2018. Program-program terkait kesehatan antara lain: program jiwa, gizi, kesehatan keluarga, dan kesehatan lingkungan. Tujuannya adalah agar lansia hidup sehat, produktif, angka harapan hidup meningkat, serta lansia yang *smart*. Adapun selama tahun 2016-2019, program yang mencakup pembinaan kesehatan lansia yaitu: puskesmas yang menyelenggarakan pelayanan santun lansia, rumah sakit yang menyelenggarakan layanan geriatri terpadu, posyandu lansia yang aktif di setiap desa, pelaksanaan *home care* lansia dari puskesmas setempat.

Kota Malang

Dinas Sosial Kota Malang mengalokasikan dana APBD untuk lansia telantar dan tidak potensial dengan memberikan bantuan pangan berupa : makanan pokok beras 10kg selama 10 kali dalam setahun, biskuit, dan susu. Dinsos Kota Malang biasanya mendapatkan informasi/laporan dari RT/Lurah ketika ada lansia telantar di lingkungannya. Setelah mendapat laporan, akan dilakukan visitas untuk mengidentifikasi apakah memang lansia tersebut telantar atau tidak. Jika benar telantar, maka akan difasilitasi. Misalnya, jika lansia tersebut sakit akan dibawa ke Rumah Sakit, jika lansia korban KDRT akan diamankan dengan dibawa ke penampungan milik Dinsos. Untuk kriteria lansia telantar sendiri dibedakan menjadi dua, yaitu secara fisik dan secara ekonomi. Secara fisik jika terpisah dari keluarganya,

sedangkan secara ekonomi jika ada keluarga tetapi tidak mampu.

Bantuan lainnya yang bersumber dari dana APBN, diantaranya :

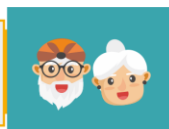
- a. PKH,
- b. *Family Support*, berupa bantuan modal usaha untuk lansia potensial sebesar Rp. 3.000.000,- per orang.
- c. dan Bantu LU. Untuk keluarga dengan sasaran lansia telantar dan tidak potensial yang diberi uang tunai sebesar 2,4 juta per tahun atau 200 ribu per bulan. Untuk program ini, akan ditunjuk pendamping/wali lansia yang akan mengelola uang tersebut. Pendamping/wali adalah mereka yang merawat lansia sehari-hari dan bertugas untuk membuat laporan terkait penggunaan uang bantuan. Nama pendamping biasanya diajukan oleh dinas setempat untuk dimunculkan dalam SK yang berasal dari pusat.



DAFTAR PUSTAKA



DAFTAR PUSTAKA



- Affandi. 2009. Faktor-faktor yang mempengaruhi penduduk lanjut usia memilih untuk bekerja. *Journal of Indonesian Applied Economics*, 3 (2).
- Allman, et al. 2006. The UAB Study Of Aging: Background and Insights into Life-Space Mobility among Older Americans in Rural and Urban Settings. *Aging Health Journal*, Vol. 2(3).
- Anker et al. 2002. Measuring Decent Work with Statistical Indicators. Working Paper No 2: ILO.
- Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. 2014. Lansia Tangguh dengan Tujuh Dimensi. Jakarta: Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.
- Badan Pusat Statistik. 2018. Indikator Strategis Nasional. Diakses pada tanggal 24 September 2018 melalui <https://www.bps.go.id/QuickMap?id=0000000000>.
- Badan Pusat Statistik. 2018. Statistik Penduduk Lanjut Usia 2018. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik. 2018. Indikator Pekerjaan Layak di Indonesia 2018. Jakarta: BPS.
- Blackman, T., F. Evason, M. McLaugh dan R. Woods. 1989. Housing and Health: A Case Study of Two Areas of West Belfast. *Journal of Social Policy*, Vol.1.
- Glies et al. 2011. The Labor Supply and Retirement Behavior of China's Older Workers and Elderly In Comparative Perspective. Policy Research Working Paper : The World Bank.
- Howell, F. & Priebe, J. 2013. Asistensi Sosial untuk Usia Lanjut di Indonesia, Kajian Empiris Program ASLUT. TNP2K dan Australia AID.
- Iliffe, S. et al. 1992. Are Elderly People Living Alone an at Risk Group? *British Medical Journal*, Vol. 305, No. 6860, 1001-1004.
- International Labour Office. 2011. Profil Pekerjaan yang Layak Indonesia. Geneva: ILO.
- International Labour Organization. 2013. Decent Work Indicators: Guidelines For Producers And Users Of Statistical And Legal Framework Indicators. Geneva: ILO.
- International Labour Organization. 2014. Indonesia: Labour and Social Trends Update August 2014. Jakarta: ILO.
- International Labour Organization. 2015. Indonesia: Labour and Social Trends Update November 2015. Jakarta: ILO.
- Kaplan, H. I., Sadock, B. J., Grebb, J. A. 2010. Sinopsis Psikiatri: Ilmu Pengetahuan Perilaku Psikiatri Klinis Jilid Satu. Jakarta: Bina Rupa Aksara.

- Kementerian Sosial RI. 2018. Pedoman Bahagia Sejahtera Lanjut Usia (Bahtera Lansia). Jakarta: Kementerian Sosial Republik Indonesia.
- Kementerian Sosial RI. 2018. Pedoman Penyelenggaraan Nursing Care. Jakarta: Direktorat Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia, Kementerian Sosial RI.
- Kementerian Sosial RI. 2018. Pedoman Dukungan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia dalam Keluarga (Family Support). Jakarta: Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial, Kementerian Sosial RI.
- Melchiorre, M. G., et al. (2013). Social Support, Socio-Economic Status, Health and Abuse among Older People in Seven European Countries. PLoS ONE, Vol. 8 (1).
- Mulyati. 2012. Thesis: Dukungan Sosial dan Ekonomi Keluarga Terhadap Kualitas Hidup dan Kesejahteraan Lansia di Kota Bogor. Bogor: Sekolah Pasca Sarjana IPB.
- Ni Luh Putu . 11 Desember 2017 00:31. Dampak Peningkatan Angka Harapan Hidup Masyarakat Lanjut Usia di Indonesia <https://www.kompasiana.com/niluhputri/5a2d6f6f5e13737588217553/dampak-peningkatan-angka-harapan-hidup-masyarakat-lanjut-usia-di-indonesia?page=all>
- Newman, A.B., Cauley, J. A. 2012. The epidemiology of aging. Springer Science, Business Media Dordrecht 2012. Pittsburgh: University of Pittsburgh. Diakses melalui 10.1007/978-94-007-5061-6_1.
- Nugroho W. 2000. Keperawatan Gerontik. Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran EGC.
- Osman, A., Jane, L., Courtney. 2012. The depression unxiety stress scales-21 (DASS-21): further examnination of dimentions, skill reliability, and correlates. Journal Of Clinical Psikologi , 68 (12). Diakses di online library.Wiley.com
- Peraturan Menteri Kesehatan No. 25 tentang Rencana Aksi Nasional Kesehatan Lanjut Usia Tahun 2016-2019.
- Permensos RI Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota.
- Permensos RI Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelayanan Sosial Lansia. Pusdatin Kemenkes. 2016. Situasi Lanjut Usia (Lansia) di Indonesia. Jakarta : Depkes.
- Ravallion, Martin and Chen, Shaohua. 2007. China's (uneven) progress against poverty. Journal of Development Economics. Elsevier: USA.
- Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia Tahun 2015-2019.
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019.
- Rosenbloom, S. 1988. The Mobility Needs of The Elderly. Transportation in an Aging Society: Improving Mobility and Safety for Older Persons, Vol. 2.

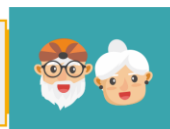
- Suhartinah, Florentia. 1998. Social welfare services for the elderly independent indonesia. Population Aging independent Asia (ASEAN Population Studies). New York: United Nation.
- Sustainable Development Goals (SDGs) target 1.3. Tampubolon, Sabrina Evelin. 2007. Rumah Tinggal Sebagai Lingkungan Therapeutic Bagi Lanjut Usia. Depok: Fakultas Teknik Universitas Indonesia.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 nomor 23.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- United Nations. 2017. World Population Prospects the 2017 Revision, Key Findings and Advance tables. Newyork : UNited Nation.
- Wang J., Zhao. 2012. Family functioning and social support for older patients with depression in an urban area of shanghai, china. Arch Gerontol Geriatr. 55 (3): 574-9.
- WHO . 1977. Prevention of Mental Disorders in the Elderly. WorldHealth Organization. Copenhagen.
- WHO Waspadai Ledakan Jumlah Lansia", <https://lifestyle.kompas.com/read/2012/10/02/14100581/WHO.Waspadai.Ledakan.Jumlah.Lansia>. Kompas.com - 02/10/2012, 14:10 WIB
- Wirakartakusumah, M. Djuhari, Hisar Sirait, dan Zainul Hidayat. 1996. Pelibatan Penduduk Usia Lanjut dalam Keluarga. Jakarta: Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Yin, Peter. (1985). Victimization and the Aged. Springfield, IL: Thomas.



CATATAN TEKNIS



<https://www.bps.go.id>



Penduduk Lanjut Usia adalah penduduk berumur 60 tahun ke atas (Undang- Undang No. 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia).

Angka Harapan Hidup (e0) adalah perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur.

Tipe Daerah menggambarkan kelompok desa/kelurahan yang termasuk daerah perkotaan atau perdesaan. Penentuan suatu desa/kelurahan termasuk perkotaan atau perdesaan menggunakan suatu indikator komposit (indikator gabungan) yang skor atau nilainya didasarkan pada skor atau nilai-nilai tiga buah variabel: kepadatan penduduk, persentase rumah tangga pertanian, dan akses ke fasilitas umum.

Blok Sensus adalah bagian dari desa/kelurahan yang merupakan daerah kerja dari seorang petugas pencacah survei/sensus dengan pendekatan rumah tangga yang dilaksanakan BPS.

Rumah Tangga Biasa adalah seorang atau sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan fisik atau sensus, dan biasanya tinggal bersama serta makan dari satu dapur. Rumah tangga biasa umumnya terdiri dari ibu, bapak, dan anak. Yang dimaksud satu dapur adalah jika pengurusan kebutuhan sehari-hari dikelola menjadi satu. Beberapa orang yang bersama-sama mendiami satu kamar dalam satu bangunan sensus walaupun mengurus makannya sendiri-sendiri dianggap satu rumah tangga biasa.

Rumah Tangga Khusus adalah orang yang tinggal di asrama seperti asrama perawat, asrama mahasiswa dan asrama TNI/Polisi, panti asuhan, panti jompo, dan sekelompok orang yang mondok dengan makan (indekos) berjumlah 10 orang atau lebih.

Rumah Tangga Lansia adalah rumah tangga yang minimal salah satu anggota rumah tangganya berumur 60 tahun ke atas.

Kepala Rumah Tangga (KRT) adalah adalah seorang dari sekelompok anggota rumah tangga yang bertanggung jawab atas kebutuhan sehari-hari rumah tangga.

Anggota Rumah Tangga (ART) adalah semua orang yang biasanya bertempat tinggal di suatu rumah tangga (kepala rumah tangga, suami/istri, anak, menantu, cucu, orang tua/mertua, famili lain, pembantu rumah tangga atau anggota rumah tangga lainnya). Tidak Termasuk Anggota Rumah Tangga yaitu orang yang telah bepergian selama 6 bulan atau lebih, atau kurang dari 6 bulan tetapi dengan tujuan pindah (akan meninggalkan rumah selama 6 bulan atau lebih). Di sisi lain, orang yang telah 6 bulan atau lebih tinggal di rumah tangga yang sedang dicacah atau yang telah tinggal kurang dari 6 bulan tetapi berniat menetap dianggap sebagai anggota rumah tangga dari rumah tangga yang sedang dicacah tersebut.

Rasio Ketergantungan Penduduk Lansia adalah perbandingan antara jumlah penduduk lansia (60 tahun ke atas) dengan jumlah penduduk usia produktif (15-59 tahun). Menggambarkan seberapa besar beban yang harus ditanggung penduduk usia produktif untuk membiayai hidup penduduk lansia.

Kawin adalah seseorang yang pada saat pencacahan hidup sebagai suami atau istri berdasarkan peraturan hukum/adat/ajaran agama. Baik yang mendapatkan surat nikah ataupun tidak, namun sah menurut hukum/adat/ajaran agama. Termasuk kategori kawin adalah mereka yang mempunyai pasangan perempuan (bagi laki-laki) atau pasangan laki-laki (bagi perempuan) tanpa terikat dalam perkawinan yang sah secara hukum (adat, agama, negara) namun memiliki hubungan layaknya pasangan suami istri, baik tinggal bersama dalam satu rumah maupun tidak.

Cerai Hidup adalah seseorang yang pada saat pencacahan telah berpisah sebagai suami-istri karena bercerai dan belum kawin lagi. Termasuk kategori ini adalah mereka yang mengaku cerai walaupun belum resmi secara hukum, mereka yang pernah hidup bersama tetapi pada saat pencacahan sudah berpisah (tidak hidup bersama lagi), serta perempuan yang mengaku belum pernah menikah/kawin/hidup bersama tetapi mempunyai anak termasuk yang sudah meninggal. Sebaliknya tidak termasuk mereka yang hanya hidup terpisah tetapi masih berstatus kawin, misalnya suami/istri ditinggalkan oleh istri/suami ke tempat lain karena sekolah, bekerja, mencari pekerjaan, atau untuk keperluan lain.

Cerai Mati adalah seseorang ditinggal mati oleh suami atau istrinya dan belum kawin lagi.

Dapat Membaca dan Menulis adalah kemampuan seseorang untuk bisa membaca dan menulis kata-kata/kalimat sederhana dalam huruf tertentu.

Buta Huruf atau Buta Aksara adalah tidak bisa membaca dan menulis kalimat sederhana dengan suatu aksara, termasuk huruf Braille. Orang cacat yang pernah dapat membaca dan menulis digolongkan tidak buta huruf.

Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan adalah jenjang pendidikan tertinggi yang sudah ditamatkan oleh seseorang yang sudah tidak sekolah lagi atau jenjang pendidikan tertinggi yang pernah diduduki dan ditamatkan oleh seseorang yang masih bersekolah.

Tidak/Belum Pernah Sekolah adalah tidak atau belum pernah terdaftar dan aktif mengikuti pendidikan formal, termasuk mereka yang tamat/belum tamat Taman Kanak-kanak dan tidak melanjutkan ke Sekolah Dasar.

Tidak Tamat SD adalah pernah/ sedang bersekolah di SD atau yang sederajat tetapi tidak/belum tamat.

SD/sederajat meliputi Sekolah Dasar, Madrasah Ibtidaiyah dan sederajat.

SMP/sederajat meliputi jenjang pendidikan SMP Umum, Madrasah Tsanawiyah, SMP Kejuruan dan sederajat.

SM/sederajat meliputi tamat jenjang pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Madrasah Aliyah, dan yang sederajat.

PT meliputi tamat pendidikan program DI/DII/DIII atau mendapatkan gelar sarjana muda pada suatu akademi/ perguruan tinggi yang menyelenggarakan program diploma/mengeluarkan gelar sarjana muda, program pendidikan diploma IV, sarjana pada suatu perguruan tinggi, program pendidikan pasca sarjana (master atau doktor), spesialis 1 atau 2 pada suatu perguruan tinggi.

Keluhan Kesehatan adalah keadaan seseorang yang mengalami gangguan kesehatan atau kejiwaan baik karena penyakit, kecelakaan, kriminal dll.

Sakit adalah menderita penyakit baik akut/kronis maupun mengalami gangguan kesehatan lainnya yang menyebabkan aktivitas kerja sehari-harinya menjadi terganggu. Orang yang mempunyai keluhan kesehatan ringan (misalnya masuk angin atau pilek) yang tidak mengganggu kegiatan sehari-harinya dianggap tidak sakit.

Angkatan Kerja Penduduk Lansia adalah penduduk berumur 60 tahun ke atas yang selama seminggu sebelum pencacahan sedang bekerja, sementara tidak bekerja, mencari pekerjaan, atau mempersiapkan suatu usaha.

Bekerja adalah kegiatan melakukan pekerjaan dengan maksud memperoleh/membantu memperoleh penghasilan atau keuntungan paling sedikit selama satu jam dalam seminggu sebelum pencacahan. Bekerja selama satu jam tersebut harus dilakukan berturut-turut dan tidak terputus (termasuk pekerja keluarga tanpa upah, yang membantu dalam kegiatan usaha/ekonomi).

Mencari Pekerjaan adalah kegiatan dari mereka yang bekerja tetapi karena suatu hal masih mencari pekerjaan; atau mereka yang dibebastugaskan dan akan dipanggil kembali tetapi sedang berusaha untuk mendapatkan pekerjaan; atau mereka yang pernah bekerja dan sedang berusaha mendapatkan pekerjaan; atau mereka yang belum pernah bekerja dan sedang berusaha mendapatkan pekerjaan.

Mempersiapkan Suatu Usaha adalah suatu kegiatan yang dilakukan seseorang dalam rangka mempersiapkan suatu usaha yang baru, yang bertujuan untuk memperoleh penghasilan/keuntungan atas risiko sendiri, dengan atau tanpa mempekerjakan buruh/karyawan/ pegawai dibayar maupun tak dibayar. Mempersiapkan suatu usaha yang dimaksud adalah apabila seseorang telah/sedang melakukan tindakan nyata seperti mengumpulkan modal atau alat, mencari lokasi, mengurus surat ijin usaha, dsb.

Pengangguran adalah penduduk yang tidak bekerja, mencari pekerjaan/mempersiapkan usaha, mereka yang putus asa mencari pekerjaan dan tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, serta mereka yang punya pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. Sedangkan bukan angkatan kerja terdiri dari penduduk yang pada periode rujukan tidak mempunyai/melakukan aktivitas ekonomi, baik karena sekolah, mengurus rumah tangga atau lainnya (pensiun, penerima transfer/ kiriman, penerima deposito/bunga bank, jompo atau alasan yang lain).

Bukan Angkatan Kerja Penduduk Lansia adalah penduduk berumur 60 tahun ke atas yang selama seminggu sebelum pencacahan hanya mengurus rumah tangga, atau melakukan kegiatan lainnya. Termasuk penduduk umur 60 tahun ke atas yang tidak melakukan kegiatan bekerja, sementara tidak bekerja, atau mencari pekerjaan.

Lapangan Usaha adalah bidang kegiatan dari pekerjaan/usaha/perusahaan/kantor/instansi tempat seseorang bekerja.

Status/Kedudukan Pekerjaan adalah jenis kedudukan seseorang dalam pekerjaannya, yang mencakup berusaha sendiri tanpa bantuan orang lain, berusaha dibantu buruh tidak dibayar, berusaha dibantu buruh dibayar, atau sebagai buruh/karyawan/pegawai.

Jam Kerja adalah jumlah waktu (dalam jam) yang digunakan untuk bekerja.

Precarious Employment adalah bekerja sebagai pekerja bebas, buruh dengan kontrak kerja jangka waktu tertentu, dan buruh dengan kontrak kerja lisan

Upah Rendah adalah pendapatan/upah/gaji kurang dari 2/3 median pendapatan/upah/gaji.

Jam Kerja Layak adalah jam kerja melebihi ambang batas 48 jam per minggu.

Rumah Layak Huni adalah rumah yang memenuhi 4 kriteria yaitu ketahanan bangunan (atap: beton, genteng, seng, kayu/sirap; dinding: tembok, plesteran anyaman bambu/kawat, kayu/papan, batang kayu; lantai: marmer/granit, keramik, parket/vinil/karpet, ubin/tegel/teraso, kayu/papan, semen/bata merah), luas lantai per kapita (lebih dari sama dengan 7,2 m²); Akses air minum layak, dan akses sanitasi layak.

Korban Kejahatan adalah seseorang atau harta bendanya yang selama setahun terakhir mengalami atau terkena tindak kejahatan atau usaha/percobaan tindak kejahatan.

Pencurian adalah perbuatan mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Penipuan adalah perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu barang kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.

Beras Sejahtera (Rastra) adalah salah satu program pemerintah untuk rakyat miskin yang diselenggarakan oleh BULOG dengan menjual beras dengan harga murah bersubsidi.

Jamkesmas (Jaminan Kesehatan Masyarakat) adalah program bantuan sosial untuk pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin di seluruh Indonesia. Sasaran dari program Jamkesmas adalah masyarakat sangat miskin, miskin, dan mendekati miskin/tidak mampu. Pengelola Jamkesmas adalah Kementerian Kesehatan RI dan PT Askes (Persero), sedangkan yang memberikan pelayanan kesehatan adalah puskesmas dan jaringannya, rumah sakit, dan sarana pelayanan kesehatan lainnya yang ditunjuk. Jamkesmas merupakan pengganti Askeskin (Asuransi Kesehatan Keluarga Miskin). Pemegang kartu Jamkesmas dibebaskan dari biaya pengobatan dan rawat inap di puskesmas atau di rumah sakit pemerintah atau rumah sakit swasta yang ditunjuk.

Jamkesda (Jaminan Kesehatan Daerah) adalah program jaminan bantuan pembayaran biaya pelayanan kesehatan yang diberikan pemerintah daerah kepada masyarakat daerah. Sasaran Program Jamkesda adalah seluruh masyarakat yang belum memiliki jaminan kesehatan berupa Jamkesmas, Akes dan asuransi kesehatan lainnya.

JPk PNS/Veteran/Pensiun (Askes) adalah jaminan pemeliharaan kesehatan bagi PNS/Veteran/Pensiunan yang ditandai dengan memiliki kartu kepesertaan yang dikelola PT Askes (Persero).

JPk Jamsostek adalah jaminan pemeliharaan kesehatan untuk tenaga kerja swasta di sektor formal yang ditandai dengan memiliki kartu kepesertaan yang dikelola PT Jamsostek.

Kredit Usaha adalah sejumlah dana yang bersifat pinjaman yang diterima untuk membantu menjalankan atau memperbesar kegiatan usaha. Pada dasarnya jenis kredit usaha terdiri dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri dan program pemerintah lainnya.



LAMPIRAN TABEL

<https://www.bps.go.id>

Tabel 2.1.1 Distribusi Penduduk Lansia Menurut Provinsi dan Kelompok Umur, 2019

Provinsi	Kelompok Umur (Tahun)				Perkotaan
	Lansia Muda (60-69)	Lansia Madya (70-79)	Lansia Tua (80+)	Lansia (60+)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
Aceh	66,96	24,13	8,91	6,57	
Sumatera Utara	69,29	24,17	6,54	7,68	
Sumatera Barat	65,70	26,89	7,42	9,16	
Riau	70,91	24,48	4,60	5,56	
Jambi	68,45	23,61	7,94	7,63	
Sumatera Selatan	68,25	24,39	7,37	7,78	
Bengkulu	67,73	21,02	11,25	6,46	
Lampung	65,04	27,75	7,21	8,22	
Kepulauan Bangka Belitung	70,21	23,14	6,64	8,02	
Kepulauan Riau	71,60	23,87	4,53	4,29	
DKI Jakarta	70,69	24,89	4,43	7,79	
Jawa Barat	64,53	28,14	7,34	8,58	
Jawa Tengah	60,01	30,12	9,87	12,74	
DI Yogyakarta	57,25	29,54	13,21	12,77	
Jawa Timur	62,99	28,05	8,96	12,09	
Banten	70,54	24,07	5,39	5,74	
Bali	62,18	29,43	8,39	10,09	
Nusa Tenggara Barat	63,95	29,09	6,96	8,33	
Nusa Tenggara Timur	64,73	27,20	8,07	7,09	
Kalimantan Barat	67,45	26,47	6,07	8,28	
Kalimantan Tengah	71,33	23,81	4,85	5,79	
Kalimantan Selatan	68,02	26,34	5,65	7,12	
Kalimantan Timur	71,52	22,84	5,64	6,04	
Kalimantan Utara	72,19	21,30	6,51	6,16	
Sulawesi Utara	66,60	24,69	8,71	10,66	
Sulawesi Tengah	66,58	27,87	5,55	7,48	
Sulawesi Selatan	62,70	29,15	8,15	8,58	
Sulawesi Tenggara	64,29	25,87	9,84	6,01	
Gorontalo	67,34	26,40	6,26	8,03	
Sulawesi Barat	62,80	27,09	10,11	7,39	
Maluku	66,10	25,71	8,19	6,98	
Maluku Utara	71,71	23,89	4,40	5,94	
Papua Barat	75,66	20,35	3,99	4,61	
Papua	72,10	24,14	3,76	4,98	
Indonesia	64,59	27,52	7,89	9,07	

Sumber: BPS, Susenas Maret 2019

Tabel 2.1.2 Distribusi Penduduk Lansia Menurut Provinsi dan Kelompok Umur, 2019

Provinsi	Kelompok Umur (Tahun)				Perdesaan
	Lansia Muda (60-69)	Lansia Madya (70-79)	Lansia Tua (80+)	Lansia (60+)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
Aceh	65,00	26,75	8,25	7,31	
Sumatera Utara	67,36	25,22	7,42	8,09	
Sumatera Barat	64,60	25,98	9,43	10,36	
Riau	69,48	23,54	6,98	5,82	
Jambi	66,86	25,42	7,72	7,57	
Sumatera Selatan	66,12	25,90	7,99	8,11	
Bengkulu	66,69	25,25	8,05	7,95	
Lampung	64,45	25,85	9,70	9,18	
Kepulauan Bangka Belitung	69,06	24,14	6,80	7,49	
Kepulauan Riau	69,40	25,17	5,44	8,37	
DKI Jakarta	-	-	-	-	
Jawa Barat	62,74	28,48	8,78	11,44	
Jawa Tengah	59,00	30,05	10,95	14,00	
DI Yogyakarta	57,33	28,41	14,27	19,16	
Jawa Timur	61,73	28,83	9,44	13,95	
Banten	68,58	24,32	7,10	7,63	
Bali	58,94	31,19	9,87	13,97	
Nusa Tenggara Barat	64,04	26,19	9,77	8,67	
Nusa Tenggara Timur	62,16	28,96	8,87	8,38	
Kalimantan Barat	67,92	25,15	6,92	7,64	
Kalimantan Tengah	69,86	24,04	6,10	6,13	
Kalimantan Selatan	67,17	26,03	6,81	7,80	
Kalimantan Timur	70,13	23,28	6,59	6,67	
Kalimantan Utara	71,20	24,39	4,41	6,94	
Sulawesi Utara	64,29	26,52	9,19	11,67	
Sulawesi Tengah	64,32	27,02	8,66	8,42	
Sulawesi Selatan	59,99	30,75	9,26	10,48	
Sulawesi Tenggara	62,62	28,33	9,05	7,44	
Gorontalo	66,61	26,08	7,31	8,06	
Sulawesi Barat	63,08	28,09	8,83	6,62	
Maluku	65,51	25,68	8,81	7,48	
Maluku Utara	66,66	27,26	6,08	6,51	
Papua Barat	74,94	19,75	5,31	4,76	
Papua	80,73	15,65	3,62	2,82	
Indonesia	62,95	27,87	9,18	10,27	

Sumber: BPS, Susenas Maret 2019

Tabel 2.1.3 Distribusi Penduduk Lansia Menurut Provinsi dan Kelompok Umur, 2019

Provinsi	Kelompok Umur (Tahun)			
	Lansia Muda (60-69)	Lansia Madya (70-79)	Lansia Tua (80+)	Lansia (60+)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Aceh	69,13	24,10	6,77	6,61
Sumatera Utara	71,42	23,35	5,23	7,23
Sumatera Barat	68,52	24,99	6,49	9,00
Riau	71,93	23,69	4,38	5,65
Jambi	69,50	22,39	8,11	7,49
Sumatera Selatan	70,35	22,91	6,74	7,67
Bengkulu	70,85	22,82	6,33	7,36
Lampung	66,99	25,47	7,54	8,76
Kepulauan Bangka Belitung	72,11	23,03	4,86	7,45
Kepulauan Riau	72,68	23,02	4,30	4,60
DKI Jakarta	72,11	23,32	4,57	7,48
Jawa Barat	66,70	26,57	6,73	8,89
Jawa Tengah	62,46	28,65	8,89	12,62
DI Yogyakarta	60,50	27,24	12,26	13,35
Jawa Timur	65,98	26,95	7,08	12,20
Banten	72,91	21,66	5,44	6,13
Bali	62,76	30,16	7,08	10,56
Nusa Tenggara Barat	65,53	26,63	7,84	8,20
Nusa Tenggara Timur	63,43	28,42	8,15	7,68
Kalimantan Barat	69,24	24,86	5,90	7,65
Kalimantan Tengah	71,86	23,50	4,64	5,97
Kalimantan Selatan	71,17	24,87	3,96	7,03
Kalimantan Timur	73,30	21,04	5,66	6,43
Kalimantan Utara	72,94	22,66	4,40	6,63
Sulawesi Utara	68,43	24,74	6,82	10,43
Sulawesi Tengah	66,89	26,39	6,72	7,92
Sulawesi Selatan	63,77	28,72	7,51	8,65
Sulawesi Tenggara	65,56	25,95	8,50	6,45
Gorontalo	69,41	24,56	6,03	7,48
Sulawesi Barat	65,48	25,75	8,77	6,35
Maluku	67,33	25,74	6,93	6,94
Maluku Utara	69,96	25,18	4,87	6,30
Papua Barat	76,03	19,09	4,88	4,84
Papua	77,63	18,94	3,43	3,79
Indonesia	66,71	26,20	7,08	9,10

Sumber: BPS, Susenas Maret 2019

Tabel 2.1.4 Distribusi Penduduk Lansia Menurut Provinsi dan Kelompok Umur, 2019

Provinsi	Kelompok Umur (Tahun)			
	Lansia Muda	Lansia Madya	Lansia	Lansia
	(60-69)	(70-79)	Tua (80+)	(60+)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Aceh	62,50	27,59	9,91	7,53
Sumatera Utara	65,81	25,78	8,41	8,51
Sumatera Barat	62,18	27,54	10,28	10,59
Riau	68,11	24,13	7,76	5,78
Jambi	65,23	27,30	7,47	7,69
Sumatera Selatan	63,60	27,67	8,73	8,31
Bengkulu	63,07	25,28	11,66	7,55
Lampung	62,20	27,33	10,47	9,00
Kepulauan Bangka Belitung	67,34	24,11	8,54	8,15
Kepulauan Riau	69,73	25,18	5,09	4,80
DKI Jakarta	69,37	26,33	4,29	8,11
Jawa Barat	61,44	29,83	8,74	9,63
Jawa Tengah	56,88	31,35	11,77	14,08
DI Yogyakarta	54,56	30,73	14,71	15,62
Jawa Timur	59,21	29,74	11,05	13,70
Banten	66,83	26,64	6,53	6,43
Bali	59,30	30,06	10,64	12,06
Nusa Tenggara Barat	62,65	28,39	8,96	8,79
Nusa Tenggara Timur	62,04	28,75	9,20	8,45
Kalimantan Barat	66,29	26,40	7,31	8,09
Kalimantan Tengah	68,89	24,44	6,67	6,03
Kalimantan Selatan	64,25	27,35	8,40	7,95
Kalimantan Timur	68,39	25,26	6,34	6,05
Kalimantan Utara	70,40	22,51	7,09	6,28
Sulawesi Utara	62,70	26,40	10,90	11,89
Sulawesi Tengah	63,02	28,10	8,88	8,37
Sulawesi Selatan	58,91	31,24	9,85	10,62
Sulawesi Tenggara	61,08	28,86	10,05	7,31
Gorontalo	64,74	27,66	7,60	8,62
Sulawesi Barat	60,83	29,66	9,51	7,25
Maluku	64,29	25,65	10,06	7,59
Maluku Utara	66,02	27,57	6,41	6,40
Papua Barat	74,31	21,07	4,63	4,54
Papua	76,51	19,48	4,01	3,06
Indonesia	61,18	29,03	9,79	10,10

Sumber: BPS, Susenas Maret 2019

Tabel 2.1.5 Distribusi Penduduk Lansia Menurut Provinsi dan Kelompok Umur, 2019

Perkotaan + Perdesaan, Laki-Laki + Perempuan				
Provinsi	Kelompok Umur (Tahun)			
	Lansia Muda (60-69)	Lansia Madya (70-79)	Lansia Tua (80+)	Lansia (60+)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Aceh	65,59	25,96	8,45	7,07
Sumatera Utara	68,38	24,66	6,95	7,87
Sumatera Barat	65,08	26,38	8,54	9,80
Riau	70,04	23,91	6,05	5,71
Jambi	67,38	24,83	7,79	7,59
Sumatera Selatan	66,89	25,35	7,76	7,99
Bengkulu	66,99	24,04	8,97	7,46
Lampung	64,62	26,39	8,99	8,88
Kepulauan Bangka Belitung	69,71	23,57	6,71	7,78
Kepulauan Riau	71,20	24,10	4,69	4,70
DKI Jakarta	70,69	24,89	4,43	7,79
Jawa Barat	64,01	28,24	7,76	9,25
Jawa Tengah	59,49	30,08	10,42	13,36
DI Yogyakarta	57,27	29,14	13,59	14,50
Jawa Timur	62,36	28,44	9,20	12,96
Banten	69,86	24,15	5,99	6,28
Bali	60,93	30,11	8,96	11,30
Nusa Tenggara Barat	64,00	27,56	8,44	8,50
Nusa Tenggara Timur	62,70	28,60	8,71	8,07
Kalimantan Barat	67,75	25,64	6,61	7,87
Kalimantan Tengah	70,43	23,95	5,62	5,99
Kalimantan Selatan	67,55	26,17	6,28	7,48
Kalimantan Timur	71,04	22,99	5,97	6,25
Kalimantan Utara	71,77	22,59	5,63	6,47
Sulawesi Utara	65,44	25,61	8,95	11,15
Sulawesi Tengah	64,94	27,25	7,81	8,14
Sulawesi Selatan	61,04	30,14	8,83	9,66
Sulawesi Tenggara	63,19	27,49	9,32	6,88
Gorontalo	66,92	26,22	6,87	8,05
Sulawesi Barat	63,01	27,83	9,16	6,80
Maluku	65,76	25,69	8,55	7,26
Maluku Utara	68,01	26,36	5,63	6,35
Papua Barat	75,24	20,00	4,77	4,70
Papua	77,16	19,16	3,68	3,44
Indonesia	63,82	27,68	8,50	9,60

Sumber: BPS, Susenas Maret 2019

Tabel 2.2 Persentase Rumah Tangga Lansia Menurut Provinsi dan Tipe Daerah, 2019

Provinsi	Tipe Daerah		Total
	Perkotaan	Perdesaan	
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	21,14	24,85	23,64
Sumatera Utara	24,81	25,53	25,14
Sumatera Barat	29,15	32,16	30,75
Riau	17,53	18,68	18,21
Jambi	22,96	22,07	22,35
Sumatera Selatan	25,35	23,88	24,40
Bengkulu	20,07	22,82	21,92
Lampung	25,41	26,29	26,03
Kepulauan Bangka Belitung	22,50	21,34	21,98
Kepulauan Riau	12,14	23,90	13,34
DKI Jakarta	21,81	-	21,81
Jawa Barat	24,57	29,98	25,92
Jawa Tengah	35,56	37,92	36,73
DI Yogyakarta	29,44	47,70	33,97
Jawa Timur	33,35	38,13	35,58
Banten	18,12	25,18	20,07
Bali	26,79	37,31	30,02
Nusa Tenggara Barat	23,47	23,27	23,36
Nusa Tenggara Timur	23,39	29,82	28,27
Kalimantan Barat	26,79	24,70	25,43
Kalimantan Tengah	17,66	18,36	18,09
Kalimantan Selatan	20,71	22,61	21,71
Kalimantan Timur	18,83	21,08	19,55
Kalimantan Utara	19,73	22,19	20,66
Sulawesi Utara	30,35	33,23	31,72
Sulawesi Tengah	23,13	26,08	25,21
Sulawesi Selatan	28,33	33,37	31,22
Sulawesi Tenggara	21,02	24,67	23,28
Gorontalo	24,90	25,09	25,01
Sulawesi Barat	24,76	21,95	22,60
Maluku	24,35	27,58	26,13
Maluku Utara	21,21	23,15	22,58
Papua Barat	17,10	15,85	16,37
Papua	16,03	8,49	10,50
Indonesia	26,33	29,84	27,88

Sumber: BPS, Susenas Maret 2019

Tabel 2.3 Rasio Ketergantungan Penduduk Lansia Menurut Provinsi, Tipe Daerah dan Jenis Kelamin, 2019

Provinsi	Tipe Daerah		Jenis Kelamin		Total
	Perkotaan	Perdesaan	Laki-Laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	10,31	11,86	10,63	12,06	11,35
Sumatera Utara	12,18	13,82	11,86	13,94	12,90
Sumatera Barat	14,66	17,54	14,85	17,44	16,15
Riau	8,54	9,19	8,80	9,06	8,92
Jambi	11,55	11,61	11,43	11,76	11,59
Sumatera Selatan	11,96	12,87	12,00	13,07	12,53
Bengkulu	9,78	12,45	11,37	11,73	11,54
Lampung	12,71	14,57	13,81	14,17	13,99
Kepulauan Bangka Belitung	12,21	11,51	11,24	12,64	11,90
Kepulauan Riau	6,57	13,39	7,04	7,43	7,23
DKI Jakarta	11,54	-	11,11	11,97	11,54
Jawa Barat	13,14	18,30	13,74	14,91	14,31
Jawa Tengah	19,96	22,48	20,04	22,28	21,17
DI Yogyakarta	19,43	32,08	20,73	24,50	22,62
Jawa Timur	18,43	21,82	18,82	21,12	19,99
Banten	8,51	12,23	9,30	9,74	9,51
Bali	15,13	22,22	16,02	18,53	17,25
Nusa Tenggara Barat	13,19	14,06	13,40	13,84	13,63
Nusa Tenggara Timur	11,40	14,88	13,41	14,55	13,99
Kalimantan Barat	12,93	12,13	12,07	12,77	12,42
Kalimantan Tengah	8,61	9,32	8,87	9,20	9,03
Kalimantan Selatan	10,87	12,23	10,84	12,33	11,57
Kalimantan Timur	9,02	10,20	9,62	9,16	9,40
Kalimantan Utara	9,59	11,01	10,29	9,96	10,14
Sulawesi Utara	16,36	18,67	16,12	18,85	17,44
Sulawesi Tengah	11,33	13,46	12,44	13,18	12,80
Sulawesi Selatan	13,39	17,14	13,93	16,94	15,47
Sulawesi Tenggara	9,63	12,69	10,76	12,13	11,44
Gorontalo	12,25	12,65	11,54	13,43	12,48
Sulawesi Barat	11,92	10,69	10,25	11,71	10,98
Maluku	11,06	12,94	11,58	12,60	12,08
Maluku Utara	9,26	10,94	10,42	10,45	10,43
Papua Barat	6,99	7,47	7,41	7,10	7,26
Papua	7,39	4,28	5,69	4,62	5,19
Indonesia	13,90	16,48	14,23	15,81	15,01

Sumber: BPS, Susenas Maret 2019

Tabel 2.4.1 Persentase Penduduk Lansia Menurut Provinsi dan Status Keanggotaan Rumah Tangga, 2019

Provinsi	Status Keanggotaan Rumah Tangga				Total
	Kepala Rumah	Istri/	Mertua/	Lainnya	
	Tangga (KRT)	Suami	Orang Tua		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	68,16	19,95	10,02	1,87	100,00
Sumatera Utara	64,76	20,49	12,73	2,02	100,00
Sumatera Barat	60,60	18,63	18,60	2,16	100,00
Riau	63,61	19,44	14,98	1,96	100,00
Jambi	62,73	20,43	15,53	1,31	100,00
Sumatera Selatan	58,51	19,20	19,37	2,93	100,00
Bengkulu	62,73	17,09	17,43	2,75	100,00
Lampung	60,58	19,41	18,91	1,10	100,00
Kepulauan Bangka Belitung	63,01	20,90	13,15	2,94	100,00
Kepulauan Riau	56,78	16,73	23,28	3,21	100,00
DKI Jakarta	70,37	19,23	8,26	2,14	100,00
Jawa Barat	65,36	20,08	12,98	1,59	100,00
Jawa Tengah	60,76	21,81	15,35	2,09	100,00
DI Yogyakarta	59,73	23,74	14,32	2,21	100,00
Jawa Timur	59,73	19,11	18,04	3,12	100,00
Banten	67,88	19,16	12,18	0,78	100,00
Bali	39,26	17,31	38,93	4,50	100,00
Nusa Tenggara Barat	59,94	18,97	18,95	2,14	100,00
Nusa Tenggara Timur	60,66	22,79	12,76	3,79	100,00
Kalimantan Barat	63,44	20,43	12,97	3,17	100,00
Kalimantan Tengah	60,52	19,16	19,10	1,22	100,00
Kalimantan Selatan	67,33	16,15	14,24	2,29	100,00
Kalimantan Timur	67,36	18,14	12,53	1,97	100,00
Kalimantan Utara	65,38	19,86	11,82	2,94	100,00
Sulawesi Utara	58,87	23,10	15,12	2,91	100,00
Sulawesi Tengah	58,33	22,45	14,65	4,58	100,00
Sulawesi Selatan	61,89	18,16	14,38	5,58	100,00
Sulawesi Tenggara	66,76	17,49	12,57	3,19	100,00
Gorontalo	53,41	19,25	22,87	4,47	100,00
Sulawesi Barat	63,77	17,46	14,48	4,28	100,00
Maluku	60,09	22,64	13,75	3,52	100,00
Maluku Utara	62,91	16,41	17,58	3,10	100,00
Papua Barat	72,65	16,80	8,96	1,58	100,00
Papua	66,86	18,20	11,23	3,71	100,00
Indonesia	62,46	19,97	15,23	2,33	100,00

Sumber: BPS, Susenas Maret 2019

Tabel 2.4.2 Persentase Penduduk Lansia Menurut Provinsi dan Status Keanggotaan Rumah Tangga, 2019

Provinsi	Status Keanggotaan Rumah Tangga				Perdesaan
	Kepala Rumah Tangga (KRT)	Istri/Suami	Mertua/Orang Tua	Lainnya	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	73,50	16,79	8,82	0,89	100,00
Sumatera Utara	66,04	21,92	11,19	0,85	100,00
Sumatera Barat	60,40	20,46	17,04	2,11	100,00
Riau	64,96	19,23	13,53	2,27	100,00
Jambi	63,51	20,56	15,15	0,79	100,00
Sumatera Selatan	60,04	21,78	16,81	1,37	100,00
Bengkulu	60,92	21,57	16,90	0,61	100,00
Lampung	62,02	19,99	16,87	1,12	100,00
Kepulauan Bangka Belitung	64,96	23,08	11,02	0,94	100,00
Kepulauan Riau	72,43	19,21	7,05	1,32	100,00
DKI Jakarta	-	-	-	-	-
Jawa Barat	66,34	20,35	12,00	1,31	100,00
Jawa Tengah	59,12	21,54	17,17	2,18	100,00
DI Yogyakarta	52,32	23,92	20,31	3,44	100,00
Jawa Timur	57,95	18,97	20,05	3,03	100,00
Banten	68,42	19,86	11,27	0,44	100,00
Bali	47,60	21,45	26,86	4,10	100,00
Nusa Tenggara Barat	64,34	19,89	13,78	2,00	100,00
Nusa Tenggara Timur	60,02	18,54	17,21	4,24	100,00
Kalimantan Barat	56,81	19,38	21,62	2,20	100,00
Kalimantan Tengah	64,34	18,20	16,23	1,23	100,00
Kalimantan Selatan	66,01	17,13	14,88	1,98	100,00
Kalimantan Timur	65,21	17,67	15,29	1,83	100,00
Kalimantan Utara	57,71	23,82	15,44	3,03	100,00
Sulawesi Utara	54,38	23,35	18,96	3,31	100,00
Sulawesi Tengah	58,33	19,79	18,32	3,56	100,00
Sulawesi Selatan	58,63	19,45	17,29	4,62	100,00
Sulawesi Tenggara	63,75	18,25	14,95	3,05	100,00
Gorontalo	57,23	20,67	19,02	3,09	100,00
Sulawesi Barat	64,28	16,88	14,66	4,17	100,00
Maluku	58,85	22,44	14,41	4,30	100,00
Maluku Utara	58,28	21,69	17,52	2,51	100,00
Papua Barat	64,52	20,12	13,19	2,17	100,00
Papua	71,51	18,81	8,56	1,13	100,00
Indonesia	60,95	20,19	16,58	2,29	100,00

Sumber: BPS, Susenas Maret 2019

Tabel 2.4.3 Persentase Penduduk Lansia Menurut Provinsi dan Status Keanggotaan Rumah Tangga, 2019

Provinsi	Status Keanggotaan Rumah Tangga				Laki-laki
	Kepala Rumah Tangga (KRT)	Istri/Suami	Mertua/Orang Tua	Lainnya	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	95,92	0,37	2,92	0,79	100,00
Sumatera Utara	92,85	0,26	5,85	1,03	100,00
Sumatera Barat	90,27	0,20	7,86	1,66	100,00
Riau	92,89	0,22	5,41	1,48	100,00
Jambi	93,14	0,29	5,83	0,75	100,00
Sumatera Selatan	91,93	0,12	6,63	1,31	100,00
Bengkulu	90,91	0,15	7,80	1,14	100,00
Lampung	92,27	0,24	6,76	0,74	100,00
Kepulauan Bangka Belitung	91,50	0,00	6,01	2,48	100,00
Kepulauan Riau	87,00	0,00	11,22	1,78	100,00
DKI Jakarta	94,66	0,10	4,02	1,21	100,00
Jawa Barat	93,52	0,45	5,06	0,97	100,00
Jawa Tengah	91,65	0,50	6,61	1,24	100,00
DI Yogyakarta	89,72	0,65	7,96	1,67	100,00
Jawa Timur	89,31	0,87	8,14	1,68	100,00
Banten	95,89	0,15	3,39	0,57	100,00
Bali	72,34	0,29	25,24	2,14	100,00
Nusa Tenggara Barat	88,99	0,38	9,28	1,35	100,00
Nusa Tenggara Timur	90,83	0,03	7,29	1,85	100,00
Kalimantan Barat	89,46	0,21	8,66	1,67	100,00
Kalimantan Tengah	89,78	0,71	9,13	0,38	100,00
Kalimantan Selatan	92,02	0,51	6,16	1,30	100,00
Kalimantan Timur	91,25	0,51	7,19	1,05	100,00
Kalimantan Utara	93,53	0,84	4,44	1,19	100,00
Sulawesi Utara	87,70	0,19	9,72	2,39	100,00
Sulawesi Tengah	88,19	0,14	8,86	2,81	100,00
Sulawesi Selatan	90,44	0,38	6,53	2,66	100,00
Sulawesi Tenggara	91,82	0,07	6,02	2,08	100,00
Gorontalo	85,98	1,08	10,18	2,76	100,00
Sulawesi Barat	93,32	0,01	4,01	2,66	100,00
Maluku	89,78	0,24	6,60	3,38	100,00
Maluku Utara	87,03	0,05	10,46	2,46	100,00
Papua Barat	93,05	0,05	5,36	1,54	100,00
Papua	93,85	0,02	4,74	1,39	100,00
Indonesia	91,25	0,46	6,91	1,38	100,00

Sumber: BPS, Susenas Maret 2019

Tabel 2.4.4 Persentase Penduduk Lansia Menurut Provinsi dan Status Keanggotaan Rumah Tangga, 2019

Perempuan					
Provinsi	Status Keanggotaan Rumah Tangga				Total
	Kepala Rumah Tangga (KRT)	Istri/ Suami	Mertua/ Orang Tua	Lainnya	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	50,85	32,95	14,67	1,53	100,00
Sumatera Utara	42,10	38,85	17,22	1,84	100,00
Sumatera Barat	35,36	36,07	26,04	2,52	100,00
Riau	35,19	38,94	23,03	2,84	100,00
Jambi	32,99	41,01	24,84	1,17	100,00
Sumatera Selatan	28,59	40,56	28,31	2,54	100,00
Bengkulu	31,42	40,80	26,47	1,31	100,00
Lampung	30,32	39,81	28,37	1,50	100,00
Kepulauan Bangka Belitung	36,52	43,42	18,39	1,67	100,00
Kepulauan Riau	32,29	34,29	29,47	3,96	100,00
DKI Jakarta	47,84	36,96	12,19	3,01	100,00
Jawa Barat	39,07	38,94	19,97	2,02	100,00
Jawa Tengah	31,92	40,34	24,81	2,93	100,00
DI Yogyakarta	29,63	43,28	23,62	3,47	100,00
Jawa Timur	32,37	34,83	28,52	4,28	100,00
Banten	40,42	38,55	20,28	0,75	100,00
Bali	15,84	35,51	42,34	6,31	100,00
Nusa Tenggara Barat	38,71	36,25	22,35	2,69	100,00
Nusa Tenggara Timur	32,82	36,70	24,29	6,19	100,00
Kalimantan Barat	29,68	38,92	27,98	3,42	100,00
Kalimantan Tengah	33,69	37,92	26,24	2,14	100,00
Kalimantan Selatan	43,48	31,40	22,26	2,87	100,00
Kalimantan Timur	37,77	38,42	20,86	2,95	100,00
Kalimantan Utara	25,12	45,95	23,84	5,09	100,00
Sulawesi Utara	28,22	44,28	23,73	3,77	100,00
Sulawesi Tengah	28,87	40,63	25,65	4,86	100,00
Sulawesi Selatan	36,11	33,41	23,68	6,81	100,00
Sulawesi Tenggara	40,67	33,97	21,36	4,01	100,00
Gorontalo	29,19	36,60	29,76	4,46	100,00
Sulawesi Barat	38,48	32,01	23,95	5,56	100,00
Maluku	30,92	43,37	21,18	4,53	100,00
Maluku Utara	31,30	41,02	24,80	2,89	100,00
Papua Barat	38,23	40,78	18,61	2,38	100,00
Papua	36,17	44,07	16,44	3,31	100,00
Indonesia	34,89	37,93	24,02	3,16	100,00

Sumber: BPS, Susenas Maret 2019

Tabel 2.4.5 Persentase Penduduk Lansia Menurut Provinsi dan Status Keanggotaan Rumah Tangga, 2019

Perkotaan + Perdesaan, Laki-laki + Perempuan

Provinsi	Status Keanggotaan Rumah Tangga				Total
	Kepala Rumah Tangga (KRT)	Istri/Suami	Mertua/Orang Tua	Lainnya	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	71,89	17,74	9,18	1,18	100,00
Sumatera Utara	65,36	21,16	12,01	1,47	100,00
Sumatera Barat	60,49	19,66	17,72	2,13	100,00
Riau	64,43	19,32	14,10	2,15	100,00
Jambi	63,25	20,52	15,27	0,96	100,00
Sumatera Selatan	59,48	20,84	17,74	1,94	100,00
Bengkulu	61,44	20,29	17,05	1,22	100,00
Lampung	61,61	19,82	17,45	1,12	100,00
Kepulauan Bangka Belitung	63,85	21,84	12,23	2,08	100,00
Kepulauan Riau	59,59	17,18	20,36	2,87	100,00
DKI Jakarta	70,37	19,23	8,26	2,14	100,00
Jawa Barat	65,64	20,16	12,69	1,51	100,00
Jawa Tengah	59,92	21,67	16,28	2,14	100,00
DI Yogyakarta	57,08	23,80	16,46	2,65	100,00
Jawa Timur	58,84	19,04	19,04	3,07	100,00
Banten	68,07	19,41	11,86	0,66	100,00
Bali	42,47	18,91	34,28	4,34	100,00
Nusa Tenggara Barat	62,25	19,45	16,23	2,06	100,00
Nusa Tenggara Timur	60,15	19,42	16,28	4,14	100,00
Kalimantan Barat	59,26	19,76	18,42	2,56	100,00
Kalimantan Tengah	62,86	18,57	17,34	1,23	100,00
Kalimantan Selatan	66,60	16,69	14,59	2,12	100,00
Kalimantan Timur	66,61	17,97	13,49	1,93	100,00
Kalimantan Utara	62,17	21,52	13,33	2,98	100,00
Sulawesi Utara	56,63	23,22	17,04	3,11	100,00
Sulawesi Tengah	58,33	20,52	17,31	3,84	100,00
Sulawesi Selatan	59,89	18,95	16,17	4,99	100,00
Sulawesi Tenggara	64,78	17,99	14,13	3,10	100,00
Gorontalo	55,62	20,07	20,64	3,67	100,00
Sulawesi Barat	64,15	17,03	14,61	4,20	100,00
Maluku	59,37	22,52	14,13	3,97	100,00
Maluku Utara	59,52	20,27	17,53	2,67	100,00
Papua Barat	67,88	18,75	11,45	1,93	100,00
Papua	69,59	18,56	9,66	2,20	100,00
Indonesia	61,75	20,07	15,87	2,31	100,00

Sumber: BPS, Susenas Maret 2019

Tabel 2.5.1 Persentase Penduduk Lansia Menurut Provinsi dan Status Perkawinan, 2019

Perkotaan					
Provinsi	Status Perkawinan				Total
	Belum Kawin	Kawin	Cerai Hidup	Cerai Mati	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	1,18	62,49	2,45	33,88	100,00
Sumatera Utara	1,79	57,44	1,24	39,53	100,00
Sumatera Barat	0,62	58,54	4,10	36,74	100,00
Riau	1,40	61,82	2,25	34,53	100,00
Jambi	1,07	60,64	3,22	35,08	100,00
Sumatera Selatan	2,20	59,08	2,03	36,69	100,00
Bengkulu	1,61	57,29	3,05	38,05	100,00
Lampung	0,84	64,90	2,08	32,17	100,00
Kepulauan Bangka Belitung	3,43	59,56	3,55	33,47	100,00
Kepulauan Riau	1,43	61,92	2,55	34,11	100,00
DKI Jakarta	1,13	59,19	2,43	37,25	100,00
Jawa Barat	0,63	60,76	2,75	35,87	100,00
Jawa Tengah	1,01	61,96	1,96	35,08	100,00
DI Yogyakarta	2,09	61,69	2,17	34,05	100,00
Jawa Timur	0,94	58,91	2,49	37,67	100,00
Banten	0,27	61,00	2,43	36,29	100,00
Bali	2,73	64,60	1,61	31,06	100,00
Nusa Tenggara Barat	1,06	58,16	5,26	35,52	100,00
Nusa Tenggara Timur	3,01	65,72	1,71	29,56	100,00
Kalimantan Barat	1,47	60,44	1,52	36,57	100,00
Kalimantan Tengah	0,11	62,34	3,53	34,02	100,00
Kalimantan Selatan	1,19	55,80	2,10	40,91	100,00
Kalimantan Timur	1,93	61,34	2,89	33,84	100,00
Kalimantan Utara	1,01	67,20	2,30	29,48	100,00
Sulawesi Utara	2,11	61,11	3,24	33,54	100,00
Sulawesi Tengah	1,90	65,45	2,48	30,17	100,00
Sulawesi Selatan	6,25	52,76	3,86	37,13	100,00
Sulawesi Tenggara	1,59	58,96	3,47	35,99	100,00
Gorontalo	2,22	54,48	3,49	39,81	100,00
Sulawesi Barat	4,94	50,32	2,41	42,33	100,00
Maluku	1,79	60,54	1,92	35,75	100,00
Maluku Utara	2,86	56,26	0,70	40,18	100,00
Papua Barat	1,91	59,18	1,74	37,17	100,00
Papua	1,52	63,81	2,03	32,64	100,00
Indonesia	1,21	60,25	2,46	36,07	100,00

Sumber: BPS, Susenas Maret 2019

Tabel 2.5.2 Persentase Penduduk Lansia Menurut Provinsi dan Status Perkawinan, 2019

Perdesaan					
Provinsi	Status Perkawinan				Total
	Belum Kawin	Kawin	Cerai Hidup	Cerai Mati	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	0,53	57,40	2,57	39,50	100,00
Sumatera Utara	0,51	59,54	1,18	38,77	100,00
Sumatera Barat	0,28	61,12	3,49	35,11	100,00
Riau	0,55	61,14	2,30	36,01	100,00
Jambi	0,59	64,33	1,33	33,75	100,00
Sumatera Selatan	0,59	64,38	1,56	33,47	100,00
Bengkulu	0,20	67,06	1,97	30,77	100,00
Lampung	0,25	65,21	1,89	32,65	100,00
Kepulauan Bangka Belitung	1,85	63,17	1,87	33,12	100,00
Kepulauan Riau	4,12	61,21	2,77	31,91	100,00
DKI Jakarta	-	-	-	-	-
Jawa Barat	0,15	62,49	2,28	35,08	100,00
Jawa Tengah	0,55	63,17	1,76	34,52	100,00
DI Yogyakarta	1,73	64,52	3,45	30,30	100,00
Jawa Timur	0,54	59,01	2,07	38,38	100,00
Banten	0,00	63,44	2,01	34,56	100,00
Bali	3,10	64,81	0,67	31,42	100,00
Nusa Tenggara Barat	1,20	61,66	3,97	33,16	100,00
Nusa Tenggara Timur	3,32	58,37	1,73	36,58	100,00
Kalimantan Barat	1,95	59,61	2,08	36,36	100,00
Kalimantan Tengah	0,72	59,92	2,29	37,07	100,00
Kalimantan Selatan	0,86	55,67	4,70	38,78	100,00
Kalimantan Timur	1,89	59,63	1,80	36,67	100,00
Kalimantan Utara	1,69	72,94	2,57	22,79	100,00
Sulawesi Utara	2,20	62,53	1,99	33,28	100,00
Sulawesi Tengah	1,09	63,25	3,04	32,63	100,00
Sulawesi Selatan	3,61	55,78	2,75	37,85	100,00
Sulawesi Tenggara	1,10	57,61	3,34	37,95	100,00
Gorontalo	1,09	60,49	2,29	36,13	100,00
Sulawesi Barat	2,65	56,00	4,25	37,10	100,00
Maluku	1,80	64,28	2,65	31,27	100,00
Maluku Utara	0,93	62,68	1,45	34,93	100,00
Papua Barat	0,79	64,10	1,07	34,04	100,00
Papua	0,79	65,86	1,57	31,78	100,00
Indonesia	0,86	61,28	2,13	35,73	100,00

Sumber: BPS, Susenas Maret 2019

Tabel 2.5.3 Persentase Penduduk Lansia Menurut Provinsi dan Status Perkawinan, 2019

Provinsi	Status Perkawinan				Total
	Belum Kawin	Kawin	Cerai Hidup	Cerai Mati	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Aceh	0,93	86,97	1,55	10,55	100,00
Sumatera Utara	0,75	79,37	1,19	18,68	100,00
Sumatera Barat	0,45	83,58	2,52	13,44	100,00
Riau	0,95	80,95	2,02	16,08	100,00
Jambi	0,73	82,15	1,78	15,34	100,00
Sumatera Selatan	0,95	82,60	1,30	15,15	100,00
Bengkulu	0,53	84,27	1,70	13,50	100,00
Lampung	0,44	87,00	1,53	11,03	100,00
Kepulauan Bangka Belitung	3,22	76,74	2,88	17,15	100,00
Kepulauan Riau	2,44	82,04	2,55	12,98	100,00
DKI Jakarta	1,03	79,71	2,21	17,05	100,00
Jawa Barat	0,56	82,45	1,88	15,11	100,00
Jawa Tengah	0,56	83,55	1,08	14,81	100,00
DI Yogyakarta	1,86	81,97	1,53	14,63	100,00
Jawa Timur	0,56	82,17	1,55	15,72	100,00
Banten	0,28	83,40	1,62	14,71	100,00
Bali	1,17	81,43	0,94	16,46	100,00
Nusa Tenggara Barat	0,53	83,10	2,13	14,24	100,00
Nusa Tenggara Timur	1,45	80,02	1,20	17,33	100,00
Kalimantan Barat	1,96	78,14	1,34	18,56	100,00
Kalimantan Tengah	0,54	78,89	1,92	18,64	100,00
Kalimantan Selatan	0,57	80,76	2,08	16,60	100,00
Kalimantan Timur	1,46	77,39	1,57	19,58	100,00
Kalimantan Utara	0,75	86,63	1,74	10,88	100,00
Sulawesi Utara	2,07	76,55	2,67	18,71	100,00
Sulawesi Tengah	1,12	81,73	2,74	14,40	100,00
Sulawesi Selatan	2,18	78,51	2,21	17,10	100,00
Sulawesi Tenggara	1,47	81,35	2,13	15,06	100,00
Gorontalo	0,63	77,73	3,09	18,55	100,00
Sulawesi Barat	1,29	77,69	1,52	19,50	100,00
Maluku	1,65	78,58	2,05	17,71	100,00
Maluku Utara	1,07	74,67	1,02	23,24	100,00
Papua Barat	1,78	75,49	1,10	21,63	100,00
Papua	1,19	77,97	1,75	19,10	100,00
Indonesia	0,79	82,05	1,62	15,53	100,00

Sumber: BPS, Susenas Maret 2019

Tabel 2.5.4 Persentase Penduduk Lansia Menurut Provinsi dan Status Perkawinan, 2019

Provinsi	Status Perkawinan				Total
	Belum Kawin	Kawin	Cerai Hidup	Cerai Mati	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Aceh	0,55	34,40	3,39	61,66	100,00
Sumatera Utara	1,56	40,69	1,23	56,51	100,00
Sumatera Barat	0,41	40,09	4,80	54,70	100,00
Riau	0,81	41,33	2,55	55,31	100,00
Jambi	0,77	43,86	2,12	53,26	100,00
Sumatera Selatan	1,40	43,27	2,14	53,19	100,00
Bengkulu	0,69	43,88	2,87	52,56	100,00
Lampung	0,39	42,80	2,37	54,45	100,00
Kepulauan Bangka Belitung	2,28	45,66	2,77	49,29	100,00
Kepulauan Riau	1,38	41,62	2,63	54,36	100,00
DKI Jakarta	1,22	40,17	2,64	55,98	100,00
Jawa Barat	0,42	41,06	3,31	55,21	100,00
Jawa Tengah	0,96	44,08	2,53	52,43	100,00
DI Yogyakarta	2,04	46,49	3,55	47,91	100,00
Jawa Timur	0,89	38,80	2,91	57,41	100,00
Banten	0,08	40,42	2,95	56,55	100,00
Bali	4,40	49,75	1,52	44,34	100,00
Nusa Tenggara Barat	1,67	39,67	6,74	51,93	100,00
Nusa Tenggara Timur	4,87	41,97	2,19	50,97	100,00
Kalimantan Barat	1,58	42,07	2,40	53,95	100,00
Kalimantan Tengah	0,41	41,33	3,69	54,57	100,00
Kalimantan Selatan	1,41	32,95	4,85	60,79	100,00
Kalimantan Timur	2,45	41,27	3,60	52,67	100,00
Kalimantan Utara	1,94	49,50	3,22	45,34	100,00
Sulawesi Utara	2,23	48,37	2,56	46,84	100,00
Sulawesi Tengah	1,49	46,20	3,03	49,28	100,00
Sulawesi Selatan	6,53	36,02	3,94	53,51	100,00
Sulawesi Tenggara	1,09	37,32	4,50	57,08	100,00
Gorontalo	2,38	40,75	2,54	54,33	100,00
Sulawesi Barat	4,95	34,17	5,76	55,12	100,00
Maluku	1,93	47,87	2,63	47,57	100,00
Maluku Utara	1,84	46,89	1,49	49,78	100,00
Papua Barat	0,63	46,26	1,63	51,48	100,00
Papua	0,97	47,16	1,78	50,09	100,00
Indonesia	1,28	41,33	2,93	54,46	100,00

Sumber: BPS, Susenas Maret 2019

Tabel 2.5.5 Persentase Penduduk Lansia Menurut Provinsi dan Status Perkawinan, 2019

Perkotaan + Perdesaan, Laki-laki + Perempuan					
Provinsi	Status Perkawinan				Total
	Belum Kawin	Kawin	Cerai Hidup	Cerai Mati	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	0,73	58,94	2,53	37,80	100,00
Sumatera Utara	1,19	58,42	1,21	39,17	100,00
Sumatera Barat	0,43	59,99	3,76	35,82	100,00
Riau	0,88	61,41	2,28	35,43	100,00
Jambi	0,75	63,12	1,95	34,18	100,00
Sumatera Selatan	1,18	62,45	1,73	34,64	100,00
Bengkulu	0,61	64,26	2,28	32,85	100,00
Lampung	0,42	65,12	1,95	32,51	100,00
Kepulauan Bangka Belitung	2,75	61,11	2,82	33,32	100,00
Kepulauan Riau	1,91	61,79	2,59	33,71	100,00
DKI Jakarta	1,13	59,19	2,43	37,25	100,00
Jawa Barat	0,49	61,26	2,61	35,64	100,00
Jawa Tengah	0,77	62,58	1,85	34,80	100,00
DI Yogyakarta	1,96	62,70	2,63	32,71	100,00
Jawa Timur	0,74	58,96	2,28	38,03	100,00
Banten	0,18	61,84	2,29	35,69	100,00
Bali	2,87	64,68	1,25	31,20	100,00
Nusa Tenggara Barat	1,14	60,01	4,58	34,28	100,00
Nusa Tenggara Timur	3,26	59,90	1,72	35,12	100,00
Kalimantan Barat	1,77	59,92	1,87	36,44	100,00
Kalimantan Tengah	0,48	60,86	2,77	35,89	100,00
Kalimantan Selatan	1,01	55,73	3,53	39,74	100,00
Kalimantan Timur	1,92	60,75	2,51	34,83	100,00
Kalimantan Utara	1,30	69,61	2,42	26,68	100,00
Sulawesi Utara	2,15	61,82	2,62	33,41	100,00
Sulawesi Tengah	1,31	63,85	2,89	31,95	100,00
Sulawesi Selatan	4,63	54,62	3,18	37,57	100,00
Sulawesi Tenggara	1,27	58,07	3,38	37,28	100,00
Gorontalo	1,57	57,96	2,80	37,68	100,00
Sulawesi Barat	3,24	54,54	3,77	38,45	100,00
Maluku	1,79	62,72	2,35	33,14	100,00
Maluku Utara	1,45	60,96	1,25	36,34	100,00
Papua Barat	1,25	62,07	1,34	35,33	100,00
Papua	1,09	65,01	1,76	32,14	100,00
Indonesia	1,05	60,73	2,31	35,91	100,00

Sumber: BPS, Susenas Maret 2019

Tabel 2.6.1 Persentase Penduduk Lansia Menurut Provinsi dan Status Tinggal Bersama, 2019

Provinsi	Status Kepemilikan Tempat Tinggal					Total
	Tinggal Sendiri	Bersama Pasangan	Bersama Keluarga	Tiga Generasi	Lainnya	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Perkotaan						
Aceh	8,03	15,43	37,04	37,50	2,00	100,00
Sumatera Utara	8,78	17,05	29,49	41,70	2,98	100,00
Sumatera Barat	7,27	13,41	28,55	48,42	2,37	100,00
Riau	5,24	12,50	33,38	46,60	2,28	100,00
Jambi	6,68	17,93	37,58	36,18	1,63	100,00
Sumatera Selatan	4,79	15,52	27,70	49,02	2,97	100,00
Bengkulu	7,92	15,59	32,63	40,05	3,81	100,00
Lampung	5,92	18,90	36,30	37,23	1,65	100,00
Kep. Bangka Belitung	9,49	12,20	37,12	37,77	3,42	100,00
Kepulauan Riau	5,69	18,79	33,09	38,79	3,65	100,00
DKI Jakarta	7,91	15,51	42,11	31,15	3,33	100,00
Jawa Barat	10,53	22,40	31,60	33,65	1,81	100,00
Jawa Tengah	9,27	22,24	25,81	40,16	2,52	100,00
DI Yogyakarta	10,95	19,52	31,12	35,82	2,59	100,00
Jawa Timur	9,56	19,21	26,58	41,19	3,46	100,00
Banten	5,77	11,92	36,52	44,66	1,12	100,00
Bali	4,91	13,87	19,57	56,79	4,87	100,00
Nusa Tenggara Barat	8,25	17,79	25,98	44,63	3,35	100,00
Nusa Tenggara Timur	3,06	11,01	30,52	51,46	3,95	100,00
Kalimantan Barat	5,59	13,51	34,37	43,17	3,36	100,00
Kalimantan Tengah	6,23	14,50	36,33	41,52	1,42	100,00
Kalimantan Selatan	11,29	17,56	31,98	35,97	3,20	100,00
Kalimantan Timur	7,64	17,43	29,17	42,78	2,98	100,00
Kalimantan Utara	8,82	14,46	31,63	41,13	3,96	100,00
Sulawesi Utara	6,88	18,58	29,22	41,03	4,30	100,00
Sulawesi Tengah	4,27	16,51	25,38	48,76	5,08	100,00
Sulawesi Selatan	5,59	11,71	28,57	47,15	6,98	100,00
Sulawesi Tenggara	5,49	9,96	25,66	55,26	3,63	100,00
Gorontalo	6,48	16,15	19,78	51,55	6,03	100,00
Sulawesi Barat	5,61	10,25	32,44	45,04	6,66	100,00
Maluku	3,53	10,43	22,94	58,54	4,56	100,00
Maluku Utara	3,01	4,70	26,15	60,89	5,24	100,00
Papua Barat	7,09	10,56	31,49	49,28	1,58	100,00
Papua	7,51	9,34	41,69	37,38	4,08	100,00
Indonesia	8,74	18,84	29,97	39,63	2,81	100,00

Sumber: BPS, Susenas Maret 2019

Tabel 2.6.2 Persentase Penduduk Lansia Menurut Provinsi dan Status Tinggal Bersama, 2019

Provinsi	Status Kepemilikan Tempat Tinggal					Total
	Tinggal Sendiri	Bersama Pasangan	Bersama Keluarga	Tiga Generasi	Lainnya	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	12,40	14,16	37,34	34,96	1,15	100,00
Sumatera Utara	13,15	23,69	27,86	34,50	0,80	100,00
Sumatera Barat	10,73	19,93	27,30	39,56	2,47	100,00
Riau	8,11	16,26	33,11	40,19	2,33	100,00
Jambi	9,57	24,13	30,71	34,62	0,98	100,00
Sumatera Selatan	7,27	22,48	26,11	42,62	1,52	100,00
Bengkulu	9,86	25,43	27,65	36,15	0,91	100,00
Lampung	7,73	21,37	27,83	41,94	1,14	100,00
Kep. Bangka Belitung	9,02	25,73	37,20	26,85	1,19	100,00
Kepulauan Riau	11,66	22,24	23,27	40,88	1,95	100,00
DKI Jakarta	-	-	-	-	-	-
Jawa Barat	14,59	30,78	23,40	30,03	1,20	100,00
Jawa Tengah	10,20	23,58	19,92	44,07	2,23	100,00
DI Yogyakarta	7,18	22,88	23,50	42,81	3,64	100,00
Jawa Timur	10,22	20,10	21,41	45,11	3,17	100,00
Banten	10,36	16,58	28,27	44,29	0,49	100,00
Bali	7,82	24,77	18,18	44,67	4,56	100,00
Nusa Tenggara Barat	9,51	22,25	22,84	42,97	2,42	100,00
Nusa Tenggara Timur	6,73	10,71	25,17	52,01	5,39	100,00
Kalimantan Barat	7,21	15,13	24,55	50,53	2,60	100,00
Kalimantan Tengah	11,22	19,75	33,44	34,06	1,53	100,00
Kalimantan Selatan	14,20	20,90	28,69	33,66	2,56	100,00
Kalimantan Timur	11,02	19,19	33,60	33,95	2,24	100,00
Kalimantan Utara	3,99	19,69	33,94	39,33	3,05	100,00
Sulawesi Utara	7,61	22,61	21,32	44,83	3,64	100,00
Sulawesi Tengah	5,87	16,90	27,77	45,54	3,91	100,00
Sulawesi Selatan	7,22	12,69	26,25	48,30	5,54	100,00
Sulawesi Tenggara	9,37	18,13	24,52	44,29	3,69	100,00
Gorontalo	6,80	21,25	23,12	45,36	3,46	100,00
Sulawesi Barat	7,90	13,76	31,28	42,40	4,66	100,00
Maluku	4,70	8,77	26,93	54,58	5,02	100,00
Maluku Utara	4,55	8,20	25,61	59,17	2,47	100,00
Papua Barat	8,25	14,06	33,16	42,60	1,92	100,00
Papua	12,61	21,15	43,06	21,45	1,73	100,00
Indonesia	10,10	21,35	24,31	41,76	2,48	100,00

Sumber: BPS, Susenas Maret 2019

Tabel 2.6.3 Persentase Penduduk Lansia Menurut Provinsi dan Status Tinggal Bersama, 2019

Provinsi	Status Kepemilikan Tempat Tinggal					Total
	Tinggal Sendiri	Bersama Pasangan	Bersama Keluarga	Tiga Generasi	Lainnya	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	3,40	19,38	46,21	30,18	0,83	100,00
Sumatera Utara	5,89	25,49	33,52	33,75	1,35	100,00
Sumatera Barat	4,96	22,08	34,06	37,12	1,78	100,00
Riau	5,22	17,54	40,37	35,54	1,33	100,00
Jambi	5,88	27,08	39,01	27,47	0,56	100,00
Sumatera Selatan	3,90	24,29	31,80	38,83	1,17	100,00
Bengkulu	5,95	26,91	33,53	32,36	1,26	100,00
Lampung	3,33	25,44	35,73	34,58	0,92	100,00
Kep. Bangka Belitung	5,67	21,46	39,47	30,67	2,73	100,00
Kepulauan Riau	6,30	24,71	35,13	31,22	2,64	100,00
DKI Jakarta	5,49	19,07	46,92	27,11	1,42	100,00
Jawa Barat	6,08	30,66	35,43	27,08	0,75	100,00
Jawa Tengah	4,67	28,64	26,80	38,65	1,24	100,00
DI Yogyakarta	6,46	24,95	31,57	35,32	1,70	100,00
Jawa Timur	4,81	26,11	28,23	39,15	1,69	100,00
Banten	4,09	16,87	39,08	39,34	0,62	100,00
Bali	3,47	22,11	22,25	49,58	2,59	100,00
Nusa Tenggara Barat	3,59	27,30	29,82	37,75	1,54	100,00
Nusa Tenggara Timur	3,74	13,23	33,05	47,71	2,28	100,00
Kalimantan Barat	5,25	18,43	30,74	43,73	1,85	100,00
Kalimantan Tengah	5,80	21,20	37,16	35,15	0,70	100,00
Kalimantan Selatan	5,43	26,42	35,22	30,92	2,02	100,00
Kalimantan Timur	6,62	21,24	32,76	37,89	1,50	100,00
Kalimantan Utara	4,34	19,17	38,01	36,30	2,19	100,00
Sulawesi Utara	5,21	24,15	27,56	40,21	2,87	100,00
Sulawesi Tengah	3,91	21,17	29,83	42,27	2,82	100,00
Sulawesi Selatan	3,55	17,21	31,94	43,91	3,40	100,00
Sulawesi Tenggara	3,40	19,79	31,91	42,47	2,44	100,00
Gorontalo	4,15	24,45	25,40	42,69	3,30	100,00
Sulawesi Barat	5,65	17,06	40,40	34,62	2,27	100,00
Maluku	3,46	11,27	30,99	50,23	4,06	100,00
Maluku Utara	2,74	7,85	28,53	58,53	2,35	100,00
Papua Barat	5,93	15,04	39,17	38,65	1,21	100,00
Papua	8,73	18,21	47,24	24,09	1,73	100,00
Indonesia	4,98	25,28	32,25	36,04	1,45	100,00

Sumber: BPS, Susenas Maret 2019

Tabel 2.6.4 Persentase Penduduk Lansia Menurut Provinsi dan Status Tinggal Bersama, 2019

Provinsi	Status Kepemilikan Tempat Tinggal					Perempuan
	Tinggal Sendiri	Bersama Pasangan	Bersama Keluarga	Tiga Generasi	Lainnya	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aceh	17,80	10,31	29,40	40,58	1,91	100,00
Sumatera Utara	15,03	15,66	24,67	42,18	2,46	100,00
Sumatera Barat	12,80	12,83	22,61	48,79	2,97	100,00
Riau	8,80	11,95	25,86	50,08	3,31	100,00
Jambi	11,41	17,07	26,82	42,87	1,83	100,00
Sumatera Selatan	8,72	15,81	21,83	50,76	2,88	100,00
Bengkulu	12,73	18,22	24,54	42,28	2,23	100,00
Lampung	11,18	15,79	24,65	46,73	1,65	100,00
Kep. Bangka Belitung	12,86	14,65	34,86	35,42	2,20	100,00
Kepulauan Riau	7,22	14,13	27,53	47,08	4,04	100,00
DKI Jakarta	10,16	12,21	37,65	34,89	5,10	100,00
Jawa Barat	17,08	19,28	23,30	37,87	2,48	100,00
Jawa Tengah	14,22	17,88	19,28	45,25	3,38	100,00
DI Yogyakarta	12,25	17,17	25,73	40,83	4,02	100,00
Jawa Timur	14,31	14,05	20,30	46,62	4,72	100,00
Banten	10,63	10,22	28,26	49,70	1,19	100,00
Bali	8,31	14,47	16,17	54,38	6,67	100,00
Nusa Tenggara Barat	13,60	13,83	19,49	49,05	4,02	100,00
Nusa Tenggara Timur	7,95	8,58	20,27	55,62	7,59	100,00
Kalimantan Barat	7,95	10,70	25,66	51,81	3,89	100,00
Kalimantan Tengah	13,06	13,93	31,76	38,91	2,35	100,00
Kalimantan Selatan	19,68	13,01	25,57	38,13	3,60	100,00
Kalimantan Timur	11,38	14,30	28,31	41,85	4,16	100,00
Kalimantan Utara	9,71	13,67	26,21	45,20	5,22	100,00
Sulawesi Utara	9,11	17,34	23,17	45,41	4,97	100,00
Sulawesi Tengah	6,94	12,48	24,44	50,52	5,62	100,00
Sulawesi Selatan	8,96	8,50	23,41	50,93	8,19	100,00
Sulawesi Tenggara	12,18	11,37	18,68	53,01	4,76	100,00
Gorontalo	8,86	14,45	18,51	52,56	5,63	100,00
Sulawesi Barat	8,77	9,17	23,81	50,52	7,73	100,00
Maluku	4,92	7,79	19,90	61,86	5,54	100,00
Maluku Utara	5,56	6,66	22,92	60,76	4,10	100,00
Papua Barat	9,94	9,76	24,58	53,26	2,45	100,00
Papua	12,94	13,58	35,97	33,48	4,03	100,00
Indonesia	13,39	15,24	22,79	44,82	3,76	100,00

Sumber: BPS, Susenas Maret 2019

Tabel 2.6.5 Persentase Penduduk Lansia Menurut Provinsi dan Status Tinggal Bersama, 2019

Perkotaan + Perdesaan, Laki-laki + Perempuan

Provinsi	Status Kepemilikan Tempat Tinggal					Total
	Tinggal Sendiri	Bersama Pasangan	Bersama Keluarga	Tiga Generasi	Lainnya	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aceh	11,08	14,54	37,25	35,73	1,41	100,00
Sumatera Utara	10,84	20,17	28,72	38,32	1,95	100,00
Sumatera Barat	9,21	17,07	27,85	43,45	2,43	100,00
Riau	6,99	14,78	33,21	42,71	2,31	100,00
Jambi	8,63	22,11	32,95	35,13	1,19	100,00
Sumatera Selatan	6,37	19,95	26,69	44,94	2,05	100,00
Bengkulu	9,31	22,61	29,08	37,27	1,74	100,00
Lampung	7,22	20,67	30,24	40,59	1,28	100,00
Kep. Bangka Belitung	9,29	18,04	37,15	33,06	2,46	100,00
Kepulauan Riau	6,76	19,41	31,32	39,16	3,34	100,00
DKI Jakarta	7,91	15,51	42,11	31,15	3,33	100,00
Jawa Barat	11,71	24,84	29,22	32,60	1,63	100,00
Jawa Tengah	9,74	22,92	22,80	42,16	2,37	100,00
DI Yogyakarta	9,60	20,72	28,40	38,32	2,96	100,00
Jawa Timur	9,89	19,65	23,99	43,15	3,31	100,00
Banten	7,37	13,54	33,65	44,53	0,90	100,00
Bali	6,03	18,07	19,03	52,12	4,75	100,00
Nusa Tenggara Barat	8,91	20,14	24,33	43,76	2,86	100,00
Nusa Tenggara Timur	5,96	10,77	26,29	51,89	5,09	100,00
Kalimantan Barat	6,61	14,53	28,17	47,81	2,88	100,00
Kalimantan Tengah	9,28	17,71	34,56	36,96	1,49	100,00
Kalimantan Selatan	12,89	19,40	30,17	34,70	2,85	100,00
Kalimantan Timur	8,81	18,04	30,71	39,72	2,72	100,00
Kalimantan Utara	6,80	16,65	32,60	40,38	3,58	100,00
Sulawesi Utara	7,24	20,60	25,27	42,93	3,97	100,00
Sulawesi Tengah	5,44	16,79	27,12	46,43	4,23	100,00
Sulawesi Selatan	6,59	12,31	27,14	47,86	6,09	100,00
Sulawesi Tenggara	8,04	15,34	24,91	48,04	3,67	100,00
Gorontalo	6,67	19,11	21,72	47,97	4,54	100,00
Sulawesi Barat	7,31	12,86	31,58	43,08	5,17	100,00
Maluku	4,21	9,47	25,26	56,24	4,83	100,00
Maluku Utara	4,13	7,26	25,76	59,63	3,21	100,00
Papua Barat	7,77	12,62	32,47	45,36	1,78	100,00
Papua	10,50	16,26	42,50	28,04	2,70	100,00
Indonesia	9,38	20,03	27,30	40,64	2,66	100,00

Sumber: BPS, Susenas Maret 2019

Tabel 3.1.1 Angka Melek Huruf Penduduk Lanjut Usia Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2019

Provinsi	Jenis Kelamin		Perkotaan
	Laki-laki	Perempuan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	98,57	91,27	94,80
Sumatera Utara	99,00	95,45	97,12
Sumatera Barat	97,92	96,16	96,98
Riau	96,99	92,41	94,75
Jambi	98,42	84,79	91,63
Sumatera Selatan	98,19	96,40	97,26
Bengkulu	96,82	86,23	91,59
Lampung	96,39	83,79	90,10
Kepulauan Bangka Belitung	97,27	85,91	91,62
Kepulauan Riau	94,70	89,52	92,09
DKI Jakarta	99,30	96,74	97,97
Jawa Barat	94,30	86,20	90,21
Jawa Tengah	87,84	71,37	79,21
DI Yogyakarta	93,98	74,01	83,25
Jawa Timur	88,29	73,39	80,49
Banten	94,81	78,61	86,85
Bali	90,29	73,69	81,68
Nusa Tenggara Barat	66,47	42,76	53,99
Nusa Tenggara Timur	94,56	86,65	90,39
Kalimantan Barat	89,00	71,51	80,11
Kalimantan Tengah	97,42	89,60	93,74
Kalimantan Selatan	96,33	92,71	94,47
Kalimantan Timur	96,95	90,67	94,05
Kalimantan Utara	96,73	81,24	89,50
Sulawesi Utara	99,42	99,84	99,64
Sulawesi Tengah	98,83	94,19	96,47
Sulawesi Selatan	92,28	81,98	86,54
Sulawesi Tenggara	92,26	74,45	82,99
Gorontalo	96,50	98,64	97,66
Sulawesi Barat	86,46	76,90	81,24
Maluku	98,70	97,51	98,08
Maluku Utara	98,94	93,05	95,94
Papua Barat	96,28	96,26	96,27
Papua	96,96	96,02	96,55
Indonesia	92,50	81,27	86,71

Sumber: BPS, Susenas Maret 2019

Tabel 3.1.2 Angka Melek Huruf Penduduk Lanjut Usia Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2019

Provinsi	Jenis Kelamin		Perdesaan
	Laki-laki	Perempuan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	89,83	75,83	82,27
Sumatera Utara	96,30	90,19	92,91
Sumatera Barat	96,12	92,37	94,06
Riau	93,81	84,18	89,04
Jambi	90,97	72,54	81,82
Sumatera Selatan	92,96	85,64	89,23
Bengkulu	91,35	68,83	80,18
Lampung	88,98	69,46	79,35
Kepulauan Bangka Belitung	91,59	80,53	85,95
Kepulauan Riau	86,07	84,86	85,48
DKI Jakarta	-	-	-
Jawa Barat	92,64	82,11	87,05
Jawa Tengah	80,89	56,45	67,73
DI Yogyakarta	85,47	54,30	68,23
Jawa Timur	73,35	49,20	60,15
Banten	90,15	72,84	81,14
Bali	77,53	47,68	61,30
Nusa Tenggara Barat	64,92	35,04	48,89
Nusa Tenggara Timur	78,88	64,44	71,24
Kalimantan Barat	77,98	48,08	62,93
Kalimantan Tengah	93,53	86,45	90,09
Kalimantan Selatan	93,81	74,13	83,32
Kalimantan Timur	88,02	83,62	86,00
Kalimantan Utara	73,97	50,59	63,52
Sulawesi Utara	98,87	99,15	99,02
Sulawesi Tengah	88,73	82,20	85,46
Sulawesi Selatan	69,53	54,71	61,15
Sulawesi Tenggara	81,96	54,47	67,31
Gorontalo	94,93	88,51	91,54
Sulawesi Barat	75,45	61,57	68,13
Maluku	98,19	97,85	98,02
Maluku Utara	92,17	81,05	86,74
Papua Barat	86,19	75,19	81,19
Papua	64,52	56,76	61,35
Indonesia	83,41	64,87	73,55

Sumber: BPS, Susenas Maret 2019

Tabel 3.1.3 Angka Melek Huruf Penduduk Lanjut Usia Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2019

Provinsi	Jenis Kelamin		Total
	Laki-Laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	92,56	80,34	86,05
Sumatera Utara	97,77	92,92	95,14
Sumatera Barat	96,92	94,01	95,34
Riau	95,07	87,39	91,28
Jambi	93,40	76,55	85,03
Sumatera Selatan	94,84	89,59	92,15
Bengkulu	92,92	73,80	83,45
Lampung	91,08	73,58	82,42
Kepulauan Bangka Belitung	94,85	83,55	89,17
Kepulauan Riau	93,10	88,71	90,90
DKI Jakarta	99,30	96,74	97,97
Jawa Barat	93,84	84,97	89,29
Jawa Tengah	84,34	63,64	73,35
DI Yogyakarta	91,01	66,85	77,89
Jawa Timur	80,99	61,01	70,30
Banten	93,26	76,53	84,87
Bali	85,53	63,38	73,82
Nusa Tenggara Barat	65,66	38,66	51,30
Nusa Tenggara Timur	82,16	69,06	75,23
Kalimantan Barat	82,02	56,79	69,28
Kalimantan Tengah	95,07	87,65	91,51
Kalimantan Selatan	94,97	82,30	88,33
Kalimantan Timur	93,84	88,23	91,25
Kalimantan Utara	87,00	68,73	78,62
Sulawesi Utara	99,14	99,49	99,33
Sulawesi Tengah	91,47	85,53	88,48
Sulawesi Selatan	78,40	65,13	70,94
Sulawesi Tenggara	85,55	61,21	72,68
Gorontalo	95,58	92,85	94,12
Sulawesi Barat	78,19	65,61	71,50
Maluku	98,40	97,71	98,05
Maluku Utara	93,93	84,38	89,21
Papua Barat	90,31	84,00	87,42
Papua	77,52	73,70	75,91
Indonesia	88,29	73,40	80,49

Sumber: BPS, Susenas Maret 2019

Tabel 3.2.1 Persentase Penduduk Lansia Menurut Provinsi dan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, 2019

Provinsi	Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan					
	Tidak Pernah Sekolah	Tidak tamat SD	SD/ sederajat	SMP/ sederajat	SM/ sederajat	PT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aceh	2,80	21,38	36,48	15,64	11,03	12,67
Sumatera Utara	2,25	21,55	30,39	16,75	22,04	7,02
Sumatera Barat	3,14	34,64	25,00	12,60	16,92	7,69
Riau	5,69	20,85	32,21	15,21	19,28	6,76
Jambi	7,78	19,16	31,59	11,87	19,37	10,23
Sumatera Selatan	4,34	25,70	30,88	12,37	17,70	9,01
Bengkulu	6,22	30,38	24,55	12,19	17,46	9,20
Lampung	9,92	35,66	25,45	7,66	14,86	6,45
Kepulauan Bangka Belitung	6,56	32,08	31,74	12,80	14,67	2,15
Kepulauan Riau	10,65	31,17	30,01	13,43	7,53	7,21
DKI Jakarta	3,49	10,82	27,39	17,28	26,56	14,46
Jawa Barat	8,76	29,10	37,86	8,09	10,06	6,13
Jawa Tengah	15,94	31,49	28,11	9,34	9,87	5,25
DI Yogyakarta	15,78	26,70	24,81	10,82	10,49	11,40
Jawa Timur	14,23	31,83	31,44	9,66	7,22	5,62
Banten	15,04	24,39	30,66	9,39	13,51	7,01
Bali	17,43	26,67	33,34	7,80	8,30	6,47
Nusa Tenggara Barat	36,48	32,15	15,13	4,37	6,20	5,67
Nusa Tenggara Timur	9,01	21,85	23,54	10,64	21,81	13,15
Kalimantan Barat	17,51	26,84	25,23	8,81	16,01	5,60
Kalimantan Tengah	6,16	21,69	33,01	10,89	18,04	10,21
Kalimantan Selatan	5,21	31,12	25,83	12,30	15,30	10,24
Kalimantan Timur	7,99	22,74	29,36	13,50	17,27	9,15
Kalimantan Utara	5,59	27,39	26,97	17,71	18,00	4,34
Sulawesi Utara	0,23	25,22	22,68	16,59	25,91	9,38
Sulawesi Tengah	2,43	14,82	39,91	12,60	20,62	9,63
Sulawesi Selatan	9,56	23,10	25,35	10,73	19,15	12,11
Sulawesi Tenggara	14,09	25,79	17,40	9,48	21,34	11,89
Gorontalo	1,38	40,03	26,05	7,99	19,08	5,48
Sulawesi Barat	13,75	30,36	19,99	7,77	12,54	15,59
Maluku	1,35	16,33	27,29	15,88	28,36	10,79
Maluku Utara	3,79	14,86	32,28	12,08	23,82	13,18
Papua Barat	3,35	14,07	36,72	15,12	24,73	6,02
Papua	4,50	10,02	28,92	12,72	31,29	12,55
Indonesia	11,05	27,70	31,00	10,39	12,66	7,20

Sumber: BPS, Susenas Maret 2019

Tabel 3.2.2 Persentase Penduduk Lansia Menurut Provinsi dan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, 2019

Provinsi	Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan					
	Tidak Pernah Sekolah	Tidak tamat SD	SD /sederajat	SMP/ sederajat	SM/ sederajat	PT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aceh	10,42	34,98	39,56	8,26	4,69	2,09
Sumatera Utara	7,16	38,86	33,24	11,91	7,28	1,55
Sumatera Barat	5,98	51,03	24,73	8,57	7,00	2,69
Riau	13,22	43,13	32,10	7,04	3,29	1,23
Jambi	15,06	45,34	30,00	3,88	3,97	1,74
Sumatera Selatan	11,27	44,82	35,85	4,73	2,64	0,69
Bengkulu	16,48	45,05	25,16	5,90	5,56	1,84
Lampung	12,63	52,42	28,42	3,48	2,45	0,61
Kepulauan Bangka Belitung	25,86	47,63	20,68	3,66	1,87	0,30
Kepulauan Riau	25,62	40,70	29,21	2,31	2,13	0,03
DKI Jakarta	-	-	-	-	-	-
Jawa Barat	13,77	34,52	45,38	3,01	1,92	1,40
Jawa Tengah	21,94	42,39	28,57	3,07	2,64	1,40
DI Yogyakarta	25,96	29,84	30,08	7,83	3,10	3,18
Jawa Timur	29,95	36,19	27,61	3,24	1,86	1,14
Banten	14,90	46,75	30,82	3,10	3,24	1,19
Bali	33,43	32,98	24,13	2,97	3,89	2,61
Nusa Tenggara Barat	38,45	37,72	16,65	2,67	2,36	2,15
Nusa Tenggara Timur	20,76	40,08	30,54	3,15	3,93	1,55
Kalimantan Barat	34,72	39,76	18,64	2,52	2,89	1,47
Kalimantan Tengah	11,75	36,39	38,85	5,99	4,02	3,01
Kalimantan Selatan	12,39	50,55	27,60	3,52	3,95	1,99
Kalimantan Timur	12,03	36,35	39,06	4,54	5,10	2,92
Kalimantan Utara	30,37	34,88	22,09	5,87	5,14	1,66
Sulawesi Utara	1,55	40,73	32,32	11,67	10,31	3,41
Sulawesi Tengah	10,97	27,56	44,54	7,94	6,47	2,53
Sulawesi Selatan	29,11	36,67	22,76	5,11	4,08	2,27
Sulawesi Tenggara	26,54	35,26	25,56	5,11	4,94	2,58
Gorontalo	4,99	52,55	29,52	5,12	4,19	3,64
Sulawesi Barat	23,69	34,17	30,71	5,12	3,72	2,60
Maluku	6,98	26,96	45,76	9,51	6,87	3,93
Maluku Utara	11,43	40,89	35,58	5,82	4,99	1,28
Papua Barat	21,58	25,49	31,24	7,08	11,98	2,64
Papua	39,01	22,86	25,86	6,56	4,75	0,96
Indonesia	20,55	39,49	30,75	4,42	3,24	1,55

Sumber: BPS, Susenas Maret 2019

Tabel 3.2.3 Persentase Penduduk Lansia Menurut Provinsi dan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, 2019

Laki-laki

Provinsi	Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan					
	Tidak Pernah Sekolah	Tidak tamat SD	SD /sederajat	SMP/ sederajat	SM/ sederajat	PT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aceh	4,42	24,72	39,66	13,74	11,08	6,38
Sumatera Utara	2,46	22,88	31,32	18,04	19,63	5,67
Sumatera Barat	2,51	37,34	26,70	11,02	16,85	5,58
Riau	5,65	31,80	35,80	11,38	11,77	3,59
Jambi	6,18	33,04	35,05	8,47	11,29	5,98
Sumatera Selatan	4,70	32,04	37,25	9,23	12,36	4,42
Bengkulu	5,00	36,13	30,07	9,84	13,20	5,76
Lampung	5,29	43,55	33,50	6,40	8,41	2,85
Kepulauan Bangka Belitung	9,11	31,98	32,39	12,96	11,92	1,64
Kepulauan Riau	8,10	32,80	25,87	14,08	11,01	8,13
DKI Jakarta	1,95	7,89	23,11	16,56	31,11	19,38
Jawa Barat	6,34	26,78	42,05	7,94	10,47	6,42
Jawa Tengah	10,10	35,09	33,95	8,00	8,20	4,66
DI Yogyakarta	6,64	28,29	28,83	12,88	11,59	11,77
Jawa Timur	13,31	32,87	34,20	8,13	6,62	4,88
Banten	7,10	30,35	35,03	8,71	12,45	6,36
Bali	12,45	28,44	33,49	8,92	9,61	7,10
Nusa Tenggara Barat	25,60	36,52	20,44	4,52	6,81	6,11
Nusa Tenggara Timur	12,30	34,10	30,26	6,17	10,87	6,29
Kalimantan Barat	17,89	34,54	25,94	6,76	10,18	4,68
Kalimantan Tengah	6,36	25,86	38,20	8,67	12,59	8,31
Kalimantan Selatan	5,39	34,01	29,19	10,59	12,29	8,53
Kalimantan Timur	5,97	23,36	32,67	12,27	17,50	8,23
Kalimantan Utara	10,44	28,56	24,70	14,92	16,27	5,11
Sulawesi Utara	0,46	30,07	26,38	15,51	20,13	7,44
Sulawesi Tengah	5,87	22,59	40,89	11,89	12,33	6,43
Sulawesi Selatan	14,45	28,45	24,36	8,98	14,69	9,06
Sulawesi Tenggara	11,17	30,97	26,27	7,91	15,05	8,64
Gorontalo	2,24	48,21	26,49	6,58	11,06	5,41
Sulawesi Barat	16,62	29,54	28,72	8,36	8,41	8,34
Maluku	2,76	21,11	37,01	14,13	17,60	7,39
Maluku Utara	4,38	30,79	35,28	9,05	13,96	6,53
Papua Barat	11,81	19,95	29,85	11,95	21,74	4,70
Papua	23,88	17,71	24,05	8,59	18,30	7,46
Indonesia	8,94	30,49	33,99	9,29	11,08	6,20

Sumber: BPS, Susenas Maret 2019

Tabel 3.2.4 Persentase Penduduk Lansia Menurut Provinsi dan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, 2019

Provinsi	Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan					
	Tidak Pernah Sekolah	Tidak tamat SD	SD /sederajat	SMP/ sederajat	SM/ sederajat	PT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aceh	11,35	36,28	37,73	7,64	2,68	4,32
Sumatera Utara	6,33	35,45	32,07	11,45	11,29	3,41
Sumatera Barat	6,61	49,31	23,29	9,77	6,72	4,30
Riau	15,00	37,01	28,38	9,09	7,32	3,20
Jambi	19,27	40,60	25,93	4,49	6,69	3,02
Sumatera Selatan	12,61	43,40	31,00	5,87	4,08	3,04
Bengkulu	22,24	45,66	19,82	5,53	4,66	2,10
Lampung	18,56	51,81	21,51	2,90	3,53	1,69
Kepulauan Bangka Belitung	20,59	45,52	21,61	4,80	6,41	1,07
Kepulauan Riau	18,56	32,96	33,85	8,79	2,12	3,72
DKI Jakarta	4,91	13,55	31,36	17,94	22,35	9,90
Jawa Barat	13,91	34,38	38,14	5,35	5,05	3,17
Jawa Tengah	26,86	38,80	23,40	4,49	4,38	2,07
DI Yogyakarta	30,16	27,42	24,88	7,13	4,71	5,69
Jawa Timur	29,74	35,01	25,46	4,98	2,73	2,07
Banten	22,83	33,96	26,43	5,71	7,43	3,63
Bali	33,53	29,69	26,49	3,29	3,91	3,09
Nusa Tenggara Barat	48,01	33,82	11,96	2,55	1,86	1,80
Nusa Tenggara Timur	23,65	38,21	28,02	3,41	4,81	1,90
Kalimantan Barat	38,63	35,42	16,31	2,96	5,34	1,34
Kalimantan Tengah	13,06	35,90	34,84	7,04	6,07	3,09
Kalimantan Selatan	12,60	48,91	24,63	4,63	6,11	3,12
Kalimantan Timur	13,40	32,28	32,79	8,18	7,82	5,53
Kalimantan Utara	22,49	32,85	25,19	10,19	8,31	0,97
Sulawesi Utara	1,29	35,64	28,53	12,87	16,25	5,43
Sulawesi Tengah	11,35	25,52	45,61	6,58	8,39	2,55
Sulawesi Selatan	27,13	33,76	23,29	5,95	6,15	3,73
Sulawesi Tenggara	32,19	32,96	19,64	5,45	6,55	3,21
Gorontalo	4,54	46,46	29,42	6,11	9,93	3,54
Sulawesi Barat	25,10	36,41	27,29	3,54	3,84	3,81
Maluku	6,36	23,83	38,99	10,35	14,23	6,24
Maluku Utara	14,50	37,09	34,09	5,91	6,03	2,37
Papua Barat	16,69	21,74	37,80	8,57	11,95	3,25
Papua	25,89	17,32	31,37	9,82	12,19	3,41
Indonesia	21,53	35,78	28,05	6,01	5,60	3,02

Sumber: BPS, Susenas Maret 2019

Tabel 3.2.5 Persentase Penduduk Lansia Menurut Provinsi dan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, 2019

Perkotaan + Perdesaan, Laki-laki + Perempuan

Provinsi	Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan					
	Tidak Pernah Sekolah	Tidak tamat SD	SD / sederajat	SMP/ sederajat	SM/ sederajat	PT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aceh	8,12	30,88	38,63	10,49	6,60	5,28
Sumatera Utara	4,56	29,68	31,73	14,47	15,11	4,45
Sumatera Barat	4,74	43,84	24,85	10,34	11,35	4,89
Riau	10,26	34,37	32,14	10,25	9,57	3,40
Jambi	12,68	36,79	30,52	6,49	9,00	4,51
Sumatera Selatan	8,75	37,86	34,04	7,51	8,12	3,72
Bengkulu	13,54	40,85	24,99	7,70	8,97	3,95
Lampung	11,86	47,64	27,57	4,67	5,99	2,28
Kepulauan Bangka Belitung	14,89	38,79	26,97	8,86	9,15	1,35
Kepulauan Riau	13,34	32,88	29,87	11,43	6,56	5,92
DKI Jakarta	3,49	10,82	27,39	17,28	26,56	14,46
Jawa Barat	10,21	30,67	40,05	6,61	7,70	4,75
Jawa Tengah	19,00	37,06	28,35	6,13	6,17	3,28
DI Yogyakarta	19,42	27,82	26,69	9,76	7,85	8,47
Jawa Timur	22,11	34,01	29,52	6,44	4,54	3,38
Banten	14,99	32,16	30,72	7,21	9,94	4,99
Bali	23,59	29,10	29,79	5,94	6,60	4,98
Nusa Tenggara Barat	37,52	35,08	15,93	3,47	4,18	3,82
Nusa Tenggara Timur	18,30	36,28	29,08	4,71	7,66	3,97
Kalimantan Barat	28,36	34,99	21,07	4,84	7,74	3,00
Kalimantan Tengah	9,58	30,68	36,58	7,89	9,46	5,80
Kalimantan Selatan	9,17	41,81	26,80	7,47	9,05	5,70
Kalimantan Timur	9,39	27,47	32,73	10,38	13,04	6,98
Kalimantan Utara	15,96	30,52	24,93	12,75	12,62	3,22
Sulawesi Utara	0,89	32,98	27,50	14,13	18,10	6,39
Sulawesi Tengah	8,63	24,06	43,27	9,22	10,35	4,48
Sulawesi Selatan	21,58	31,44	23,76	7,28	9,89	6,06
Sulawesi Tenggara	22,28	32,02	22,77	6,61	10,56	5,77
Gorontalo	3,47	47,28	28,06	6,33	10,46	4,41
Sulawesi Barat	21,13	33,19	27,96	5,80	5,98	5,93
Maluku	4,62	22,52	38,03	12,17	15,86	6,79
Maluku Utara	9,38	33,90	34,69	7,50	10,05	4,48
Papua Barat	14,05	20,77	33,50	10,40	17,24	4,04
Papua	24,73	17,55	27,13	9,11	15,73	5,76
Indonesia	15,53	33,26	30,88	7,58	8,21	4,54

Sumber: BPS, Susenas Maret 2019

Tabel 3.3 Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Lanjut Usia Menurut Provinsi, Tipe Daerah, dan Jenis Kelamin, 2019

Provinsi	Tipe Daerah		Jenis Kelamin		Total
	Perkotaan	Perdesaan	Laki-Laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	7,52	4,77	6,61	4,71	5,60
Sumatera Utara	7,67	5,08	7,43	5,63	6,46
Sumatera Barat	6,81	4,77	6,51	4,95	5,66
Riau	7,17	4,07	5,94	4,61	5,29
Jambi	7,31	3,80	5,90	3,97	4,94
Sumatera Selatan	7,13	3,93	5,99	4,24	5,09
Bengkulu	6,90	3,90	6,05	3,44	4,76
Lampung	5,93	3,53	5,16	3,25	4,22
Kepulauan Bangka Belitung	5,95	2,75	5,60	3,55	4,57
Kepulauan Riau	5,96	3,05	6,33	4,55	5,44
DKI Jakarta	9,09	-	10,09	8,15	9,09
Jawa Barat	5,89	4,13	6,19	4,60	5,38
Jawa Tengah	5,21	3,36	5,27	3,38	4,27
DI Yogyakarta	6,41	4,11	7,13	4,30	5,59
Jawa Timur	5,33	3,08	5,17	3,36	4,20
Banten	6,01	3,58	6,14	4,20	5,17
Bali	5,31	3,21	5,76	3,38	4,50
Nusa Tenggara Barat	3,06	2,07	3,54	1,66	2,54
Nusa Tenggara Timur	7,62	3,71	5,49	3,67	4,52
Kalimantan Barat	5,65	2,66	4,85	2,69	3,76
Kalimantan Tengah	7,31	4,57	6,56	4,63	5,63
Kalimantan Selatan	6,93	3,80	6,40	4,12	5,21
Kalimantan Timur	7,07	4,57	7,06	5,20	6,20
Kalimantan Utara	6,75	3,38	6,29	4,22	5,34
Sulawesi Utara	8,32	6,01	7,62	6,74	7,16
Sulawesi Tengah	8,04	5,27	6,67	5,40	6,03
Sulawesi Selatan	7,27	3,36	6,10	3,91	4,87
Sulawesi Tenggara	6,98	3,66	6,14	3,60	4,80
Gorontalo	6,49	4,53	5,50	5,23	5,36
Sulawesi Barat	6,56	3,86	5,45	3,77	4,56
Maluku	8,51	5,70	7,32	6,46	6,88
Maluku Utara	8,47	4,35	6,39	4,49	5,46
Papua Barat	7,94	4,99	6,84	5,47	6,21
Papua	9,03	3,32	6,04	5,20	5,68
Indonesia	6,13	3,68	5,94	4,10	4,98

Sumber: BPS, Susenas Maret 2019

Tabel 3.4 Persentase Penduduk Lansia Menurut Akses Teknologi Informasi dan Komunikasi, 2019

Provinsi	Akses Teknologi dan Informasi		
	Menggunakan HP	Menggunakan Komputer	Menggunakan Internet
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	42,36	0,96	5,76
Sumatera Utara	68,08	1,84	7,72
Sumatera Barat	63,74	1,07	5,61
Riau	60,74	1,46	5,59
Jambi	47,42	0,95	5,09
Sumatera Selatan	50,07	1,10	5,70
Bengkulu	45,72	1,16	4,36
Lampung	50,87	0,37	4,99
Kepulauan Bangka Belitung	50,05	0,92	6,14
Kepulauan Riau	69,09	3,99	11,95
DKI Jakarta	63,67	7,57	34,98
Jawa Barat	37,90	2,02	10,44
Jawa Tengah	33,44	0,92	5,74
DI Yogyakarta	35,25	2,10	11,93
Jawa Timur	36,91	1,07	6,35
Banten	33,05	1,74	11,76
Bali	35,37	1,69	7,02
Nusa Tenggara Barat	44,62	0,66	3,48
Nusa Tenggara Timur	47,44	0,87	3,05
Kalimantan Barat	42,75	0,73	6,59
Kalimantan Tengah	53,92	1,41	6,00
Kalimantan Selatan	50,54	1,88	6,53
Kalimantan Timur	65,62	1,96	8,89
Kalimantan Utara	66,15	0,67	6,91
Sulawesi Utara	56,80	2,21	7,37
Sulawesi Tengah	46,11	1,19	4,01
Sulawesi Selatan	57,62	1,17	4,55
Sulawesi Tenggara	55,92	1,86	3,25
Gorontalo	53,39	1,35	3,96
Sulawesi Barat	49,64	0,88	1,95
Maluku	59,03	1,81	4,37
Maluku Utara	43,83	1,55	3,52
Papua Barat	57,98	1,69	7,83
Papua	50,08	3,54	6,89
Indonesia	43,08	1,55	7,94

Sumber: BPS, Susenas Maret 2019

Tabel 4.1 Persentase Penduduk Lansia yang Mengalami Keluhan Kesehatan Selama Sebulan Terakhir Menurut Provinsi, Tipe Daerah dan Jenis Kelamin, 2019

Provinsi	Tipe Daerah		Jenis Kelamin		Total
	Perkotaan	Perdesaan	Laki-Laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	54,29	57,80	55,04	58,23	56,74
Sumatera Utara	45,26	50,21	45,98	48,94	47,58
Sumatera Barat	50,55	49,02	48,58	50,63	49,69
Riau	41,89	49,29	47,32	45,41	46,38
Jambi	36,76	39,79	38,76	38,84	38,80
Sumatera Selatan	51,95	51,49	51,32	51,98	51,66
Bengkulu	54,58	48,31	48,33	51,92	50,11
Lampung	46,44	52,30	47,66	53,66	50,63
Kepulauan Bangka Belitung	56,21	52,75	52,68	56,73	54,72
Kepulauan Riau	37,56	51,09	38,85	41,12	39,99
DKI Jakarta	46,24	-	41,58	50,57	46,24
Jawa Barat	51,25	58,95	51,25	55,63	53,49
Jawa Tengah	53,69	54,28	53,22	54,67	53,99
DI Yogyakarta	53,05	49,44	50,03	53,22	51,76
Jawa Timur	48,68	49,29	48,33	49,55	48,98
Banten	51,90	62,52	52,17	58,99	55,59
Bali	39,93	47,44	43,63	42,10	42,82
Nusa Tenggara Barat	60,25	63,61	63,51	60,71	62,02
Nusa Tenggara Timur	54,10	59,58	57,96	58,85	58,43
Kalimantan Barat	46,99	49,60	49,77	47,51	48,63
Kalimantan Tengah	45,61	45,35	44,26	46,73	45,45
Kalimantan Selatan	54,90	56,06	49,68	60,87	55,54
Kalimantan Timur	48,99	45,32	44,69	51,25	47,71
Kalimantan Utara	43,72	55,51	51,01	45,88	48,66
Sulawesi Utara	42,69	46,92	43,23	46,25	44,81
Sulawesi Tengah	51,70	53,20	53,08	52,50	52,79
Sulawesi Selatan	52,57	48,74	48,86	51,26	50,21
Sulawesi Tenggara	45,46	48,34	46,38	48,22	47,36
Gorontalo	58,78	62,41	58,26	63,16	60,88
Sulawesi Barat	40,31	53,89	51,95	49,04	50,40
Maluku	27,77	36,74	31,90	34,01	32,99
Maluku Utara	38,62	39,44	39,76	38,66	39,22
Papua Barat	40,08	49,13	46,50	44,09	45,39
Papua	30,59	34,36	32,51	33,21	32,80
Indonesia	49,92	52,39	49,74	52,31	51,08

Sumber: BPS, Susenas Maret 2019

Tabel 4.2 Angka Kesakitan Penduduk Lansia Menurut Provinsi, Tipe Daerah dan Jenis Kelamin, 2019

Provinsi	Tipe Daerah		Jenis Kelamin		Total
	Perkotaan	Perdesaan	Laki-Laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	31,83	39,23	36,29	37,62	37,00
Sumatera Utara	20,03	28,82	23,46	24,74	24,16
Sumatera Barat	24,38	26,64	24,80	26,37	25,65
Riau	19,43	27,60	23,74	25,05	24,39
Jambi	17,81	25,32	21,99	23,76	22,87
Sumatera Selatan	19,25	25,43	24,23	22,19	23,18
Bengkulu	21,76	27,37	25,74	25,79	25,76
Lampung	21,02	28,66	24,36	28,63	26,48
Kepulauan Bangka Belitung	18,31	24,87	21,27	21,02	21,14
Kepulauan Riau	21,10	33,95	24,55	22,26	23,41
DKI Jakarta	20,13	-	18,75	21,40	20,13
Jawa Barat	26,04	33,03	27,27	28,84	28,07
Jawa Tengah	25,39	26,83	27,25	25,13	26,12
DI Yogyakarta	23,01	29,51	24,44	26,09	25,33
Jawa Timur	22,11	26,07	24,38	23,85	24,09
Banten	31,17	39,66	32,47	35,77	34,12
Bali	23,45	31,28	26,39	26,54	26,47
Nusa Tenggara Barat	32,85	36,58	35,79	33,95	34,81
Nusa Tenggara Timur	26,17	35,78	33,70	33,84	33,78
Kalimantan Barat	19,11	29,11	25,46	25,37	25,41
Kalimantan Tengah	22,72	25,78	22,58	26,77	24,59
Kalimantan Selatan	22,79	26,78	23,17	26,64	24,99
Kalimantan Timur	22,27	22,13	21,71	22,82	22,22
Kalimantan Utara	22,20	37,57	29,32	27,82	28,63
Sulawesi Utara	20,61	29,84	25,09	25,36	25,23
Sulawesi Tengah	27,72	33,03	30,75	32,39	31,58
Sulawesi Selatan	22,88	25,31	24,79	24,05	24,37
Sulawesi Tenggara	21,48	30,02	28,06	26,23	27,09
Gorontalo	35,10	41,02	36,66	40,14	38,52
Sulawesi Barat	22,31	32,80	32,15	28,31	30,11
Maluku	13,28	23,84	20,46	18,45	19,42
Maluku Utara	25,51	26,63	27,36	25,27	26,33
Papua Barat	20,65	21,93	21,27	21,56	21,40
Papua	14,97	20,19	17,60	18,63	18,03
Indonesia	23,93	28,73	26,08	26,30	26,20

Sumber: BPS, Susenas Maret 2019

Tabel 4.3 Persentase Penduduk Lansia yang Mengalami Keluhan Kesehatan Selama Sebulan Terakhir dan Mengobati Sendiri Menurut Provinsi, Tipe Daerah, dan Jenis Kelamin, 2019

Provinsi	Tipe Daerah		Jenis Kelamin		Total
	Perkotaan	Perdesaan	Laki-Laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	69,35	67,11	66,24	69,01	67,76
Sumatera Utara	78,57	76,98	80,05	75,98	77,79
Sumatera Barat	56,59	61,37	58,69	59,68	59,24
Riau	67,77	77,11	75,29	72,20	73,79
Jambi	60,03	75,37	71,18	70,05	70,62
Sumatera Selatan	77,87	85,75	81,47	84,17	82,87
Bengkulu	73,52	78,38	77,12	76,62	76,86
Lampung	74,84	74,50	76,98	72,42	74,59
Kepulauan Bangka Belitung	75,06	82,02	79,52	76,51	77,95
Kepulauan Riau	59,85	60,28	60,46	59,47	59,95
DKI Jakarta	69,37	-	70,21	68,72	69,37
Jawa Barat	72,38	79,20	75,63	73,63	74,57
Jawa Tengah	68,15	71,12	69,90	69,48	69,68
DI Yogyakarta	58,97	50,73	57,36	55,21	56,16
Jawa Timur	70,32	73,49	72,86	71,12	71,92
Banten	78,25	82,78	80,20	79,86	80,02
Bali	58,34	52,83	56,82	55,22	55,99
Nusa Tenggara Barat	74,06	75,48	72,93	76,58	74,83
Nusa Tenggara Timur	58,12	61,35	60,80	60,66	60,73
Kalimantan Barat	73,91	81,48	80,51	77,00	78,78
Kalimantan Tengah	76,00	78,89	79,56	75,91	77,76
Kalimantan Selatan	84,24	85,20	85,34	84,36	84,78
Kalimantan Timur	62,49	73,98	67,92	64,62	66,28
Kalimantan Utara	51,97	54,97	54,04	52,56	53,40
Sulawesi Utara	64,31	54,90	63,52	55,84	59,38
Sulawesi Tengah	79,61	72,35	72,71	75,89	74,30
Sulawesi Selatan	71,42	72,90	71,41	72,97	72,31
Sulawesi Tenggara	73,17	74,49	76,11	72,30	74,06
Gorontalo	71,58	73,70	75,83	70,43	72,83
Sulawesi Barat	56,85	65,27	68,12	59,28	63,54
Maluku	71,74	76,63	74,48	75,29	74,91
Maluku Utara	59,43	76,31	74,14	69,42	71,85
Papua Barat	65,50	66,65	69,06	62,73	66,23
Papua	52,48	65,24	59,36	61,60	60,32
Indonesia	70,43	73,36	72,55	71,24	71,85

Sumber: BPS, Susenas Maret 2019

Tabel 4.4 Persentase Penduduk Lansia yang Mengalami Keluhan Kesehatan Selama Sebulan Terakhir dan Berobat Jalan Menurut Provinsi, Tipe Daerah, dan Jenis Kelamin, 2019

Provinsi	Tipe Daerah		Jenis Kelamin		Total
	Perkotaan	Perdesaan	Laki-Laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	74,40	75,03	78,22	72,06	74,85
Sumatera Utara	48,58	54,39	50,32	52,37	51,46
Sumatera Barat	69,37	68,34	69,74	68,04	68,80
Riau	59,65	45,95	49,33	52,39	50,81
Jambi	62,49	48,47	54,52	51,07	52,81
Sumatera Selatan	57,72	45,07	49,27	50,10	49,70
Bengkulu	50,95	45,06	44,65	49,03	46,90
Lampung	56,80	52,07	49,94	56,36	53,31
Kepulauan Bangka Belitung	58,78	57,39	57,31	59,02	58,20
Kepulauan Riau	59,39	61,76	61,21	58,73	59,93
DKI Jakarta	64,55	-	59,41	68,47	64,55
Jawa Barat	60,71	50,78	56,29	58,62	57,53
Jawa Tengah	58,86	54,01	55,58	57,04	56,37
DI Yogyakarta	62,43	60,73	61,54	62,10	61,85
Jawa Timur	57,67	55,95	56,23	57,29	56,80
Banten	56,46	45,33	51,00	53,08	52,11
Bali	73,10	73,21	73,58	72,75	73,15
Nusa Tenggara Barat	58,84	60,85	59,84	60,00	59,92
Nusa Tenggara Timur	50,86	55,99	57,18	53,09	55,00
Kalimantan Barat	51,34	51,21	51,80	50,69	51,25
Kalimantan Tengah	49,44	44,09	41,82	50,64	46,17
Kalimantan Selatan	44,34	44,55	45,07	44,01	44,46
Kalimantan Timur	57,02	59,76	57,71	58,14	57,92
Kalimantan Utara	64,59	63,04	60,41	68,37	63,85
Sulawesi Utara	61,15	66,77	64,23	63,97	64,09
Sulawesi Tengah	44,59	48,28	45,63	48,93	47,28
Sulawesi Selatan	49,62	48,40	51,10	47,26	48,89
Sulawesi Tenggara	43,77	42,01	43,73	41,60	42,59
Gorontalo	62,30	60,54	58,70	63,31	61,26
Sulawesi Barat	67,79	49,38	47,22	58,71	53,17
Maluku	41,08	43,44	45,72	39,88	42,61
Maluku Utara	57,87	49,37	53,69	49,43	51,62
Papua Barat	52,50	50,28	47,88	55,07	51,09
Papua	60,52	59,23	59,06	60,63	59,73
Indonesia	58,80	53,99	55,73	57,12	56,47

Sumber: BPS, Susenas Maret 2019

Tabel 4.5 Persentase Penduduk Lansia yang Berobat Jalan Menurut Provinsi dan Tempat Berobat, 2019

Provinsi	RS Peme- rintah	RS Swasta	Praktik dokter /bidan	Klinik/ dokter bersama	UKBM	Puskes- mas/ Pustu	Praktik pengo- batan tradisio- nal/alter- natif	Lain- nya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Aceh	28,11	5,91	30,95	10,93	5,21	43,41	4,61	0,52
Sumatera Utara	12,87	11,74	47,00	12,16	2,17	21,82	5,97	1,00
Sumatera Barat	18,57	7,83	39,28	5,90	3,87	29,95	4,94	0,16
Riau	18,80	15,72	29,04	19,37	2,93	24,50	3,93	0,65
Jambi	16,28	7,37	37,42	11,11	1,29	36,34	1,67	0,53
Sumatera Selatan	11,44	9,53	47,93	10,10	4,42	23,65	3,49	1,43
Bengkulu	12,45	4,32	50,35	10,07	3,78	24,28	2,58	1,11
Lampung	5,60	9,51	48,96	10,39	2,74	28,03	3,36	2,38
Kep. Bangka Belitung	11,22	14,34	37,44	11,51	5,50	31,54	2,24	1,65
Kepulauan Riau	15,67	12,86	22,33	17,08	5,23	29,61	1,72	2,08
DKI Jakarta	25,41	12,62	4,96	24,86	,21	40,63	2,17	0,54
Jawa Barat	12,69	11,40	34,14	19,83	2,03	29,14	2,38	0,94
Jawa Tengah	10,71	9,91	47,55	10,23	3,49	24,62	2,21	1,45
DI Yogyakarta	9,20	22,50	29,62	12,64	1,87	31,49	1,28	1,10
Jawa Timur	9,19	9,75	51,20	9,60	5,63	22,48	2,84	1,32
Banten	12,09	14,13	32,89	28,42	0,62	28,58	1,94	0,86
Bali	12,82	7,57	55,60	7,92	0,64	25,22	1,28	0,57
Nusa Tenggara Barat	7,82	3,24	46,79	9,39	6,07	34,22	5,68	6,11
Nusa Tenggara Timur	6,08	4,24	17,55	6,91	11,84	62,06	0,70	0,61
Kalimantan Barat	9,86	5,42	32,95	8,14	9,82	39,38	3,12	1,90
Kalimantan Tengah	19,70	2,87	28,82	6,69	5,24	44,93	2,87	1,64
Kalimantan Selatan	21,81	1,81	34,75	7,76	7,13	39,68	2,76	3,26
Kalimantan Timur	16,76	13,89	12,77	14,07	2,16	49,51	0,62	1,34
Kalimantan Utara	24,94	1,46	31,26	5,92	2,88	51,08	0,67	0,00
Sulawesi Utara	13,00	7,17	35,62	8,50	4,60	43,38	0,49	1,26
Sulawesi Tengah	15,51	1,76	23,53	5,03	14,16	48,37	2,33	1,03
Sulawesi Selatan	13,16	6,55	28,87	9,66	2,11	47,26	1,50	1,70
Sulawesi Tenggara	17,96	2,47	20,82	5,12	3,48	54,25	3,11	2,65
Gorontalo	8,89	1,11	40,78	10,98	2,98	44,76	0,98	0,55
Sulawesi Barat	13,99	1,43	20,90	6,22	1,50	65,70	1,83	3,27
Maluku	11,82	5,10	33,61	4,00	5,47	50,96	0,48	0,94
Maluku Utara	21,90	1,42	22,13	3,55	3,65	51,48	1,21	0,19
Papua Barat	11,97	5,05	12,34	7,77	3,22	60,92	1,57	3,99
Papua	24,83	3,98	7,12	4,91	0,25	64,75	1,18	0,07
Indonesia	12,35	9,84	39,90	12,84	3,70	29,90	2,65	1,30

Sumber: BPS, Susenas Maret 2019

Tabel 4.6 Persentase Penduduk Lansia yang Tidak Berobat Jalan Menurut Provinsi dan Alasan Utama Tidak Berobat Jalan, 2019

Provinsi	Alasan Utama Tidak Berobat Jalan				Total
	Tidak ada biaya	Mengobati sendiri	Merasa tidak perlu	Lainnya	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	2,12	56,09	29,89	11,90	100,00
Sumatera Utara	5,33	61,67	29,15	3,84	100,00
Sumatera Barat	6,99	46,92	40,10	6,00	100,00
Riau	6,77	54,10	35,92	3,21	100,00
Jambi	8,42	49,76	36,98	4,84	100,00
Sumatera Selatan	5,23	59,92	31,81	3,04	100,00
Bengkulu	8,90	54,22	31,85	5,03	100,00
Lampung	4,09	53,90	39,35	2,66	100,00
Kep. Bangka Belitung	4,62	69,77	24,44	1,17	100,00
Kepulauan Riau	2,17	49,80	45,08	2,96	100,00
DKI Jakarta	0,21	58,23	35,09	6,47	100,00
Jawa Barat	4,35	56,69	35,34	3,62	100,00
Jawa Tengah	1,19	60,16	34,75	3,90	100,00
DI Yogyakarta	0,55	66,97	29,43	3,06	100,00
Jawa Timur	2,14	62,13	31,62	4,12	100,00
Banten	5,23	51,19	40,54	3,03	100,00
Bali	1,63	57,32	36,26	4,79	100,00
Nusa Tenggara Barat	2,58	61,08	32,34	4,00	100,00
Nusa Tenggara Timur	4,78	68,52	22,06	4,64	100,00
Kalimantan Barat	4,38	59,91	32,03	3,68	100,00
Kalimantan Tengah	4,10	69,72	24,72	1,46	100,00
Kalimantan Selatan	2,73	79,30	16,06	1,91	100,00
Kalimantan Timur	4,03	46,66	39,61	9,70	100,00
Kalimantan Utara	2,31	57,33	36,90	3,47	100,00
Sulawesi Utara	2,35	54,49	40,77	2,39	100,00
Sulawesi Tengah	4,64	63,19	29,37	2,79	100,00
Sulawesi Selatan	1,22	59,32	35,41	4,04	100,00
Sulawesi Tenggara	2,39	66,34	28,33	2,94	100,00
Gorontalo	0,00	80,60	17,32	2,08	100,00
Sulawesi Barat	4,16	55,45	36,44	3,94	100,00
Maluku	6,10	61,49	26,66	5,76	100,00
Maluku Utara	5,90	57,67	34,32	2,11	100,00
Papua Barat	2,49	46,11	45,44	5,97	100,00
Papua	4,40	55,81	29,84	9,95	100,00
Indonesia	3,12	59,55	33,39	3,94	100,00

Sumber: BPS, Susenas Maret 2019

Tabel 4.7 Persentase Penduduk Lansia Berobat Jalan yang Menggunakan Jaminan Kesehatan untuk Berobat Jalan, 2019

Provinsi	Berobat Jalan	Jaminan Kesehatan				Perusahaan/ kantor
		PBI	Non PBI	Jamkesda	Asuransi Swasta	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aceh	70,86	84,88	13,54	2,23	0,11	0,19
Sumatera Utara	39,69	47,34	48,12	3,14	0,43	1,47
Sumatera Barat	50,74	47,76	47,73	3,53	0,00	1,41
Riau	46,27	45,85	44,64	8,90	0,24	0,70
Jambi	51,29	41,21	53,24	4,77	0,00	1,26
Sumatera Selatan	38,85	45,42	41,97	10,65	0,00	2,98
Bengkulu	46,80	46,47	51,80	1,74	0,00	0,00
Lampung	34,42	57,84	32,38	8,16	0,30	1,32
Kep. Bangka Belitung	50,15	42,18	57,46	0,00	0,36	0,00
Kepulauan Riau	60,18	41,77	51,03	5,30	0,00	1,90
DKI Jakarta	76,61	62,59	32,70	1,19	1,01	2,51
Jawa Barat	45,57	49,58	43,55	4,45	0,26	2,74
Jawa Tengah	44,41	54,98	38,07	6,20	0,22	0,88
DI Yogyakarta	55,47	61,37	37,17	0,42	0,22	1,02
Jawa Timur	34,88	47,17	42,62	9,45	0,00	1,83
Banten	43,13	56,40	29,61	10,05	1,41	3,42
Bali	42,96	50,28	44,59	4,78	0,00	0,36
Nusa Tenggara Barat	32,81	68,78	27,28	4,36	0,00	1,30
Nusa Tenggara Timur	69,44	73,59	16,67	9,88	0,00	0,00
Kalimantan Barat	39,95	49,74	40,94	8,26	0,27	0,79
Kalimantan Tengah	49,15	48,30	50,69	1,02	0,00	0,00
Kalimantan Selatan	59,23	32,56	47,92	20,90	0,00	0,42
Kalimantan Timur	72,03	39,74	55,24	2,20	1,48	1,99
Kalimantan Utara	81,65	55,75	37,91	7,48	0,00	2,42
Sulawesi Utara	70,19	53,51	44,12	1,90	0,47	0,00
Sulawesi Tengah	61,50	57,69	36,66	5,40	0,00	0,25
Sulawesi Selatan	67,27	62,55	34,61	1,94	0,37	1,16
Sulawesi Tenggara	65,82	70,00	25,77	3,93	0,00	0,30
Gorontalo	59,41	79,62	19,77	0,17	0,00	0,43
Sulawesi Barat	72,74	61,04	25,45	20,82	0,00	0,00
Maluku	59,21	58,14	32,96	9,44	0,00	0,00
Maluku Utara	69,10	49,16	28,60	25,11	0,00	0,85
Papua Barat	72,28	81,16	11,38	8,16	0,47	0,00
Papua	90,65	46,01	17,08	42,40	0,82	0,00
Indonesia	46,64	54,17	38,59	6,07	0,27	1,53

Sumber: BPS, Susenas Maret 2019

Tabel 4.8 Persentase Penduduk Lansia yang Mengalami Keluhan Kesehatan Selama Sebulan Terakhir dan Berobat Jalan Menurut Provinsi, Tipe Daerah, dan Jenis Kelamin, 2019

Provinsi	Tipe Daerah		Jenis Kelamin		Total
	Perkotaan	Perdesaan	Laki-Laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	15,08	18,46	18,81	16,23	17,44
Sumatera Utara	9,61	7,47	8,93	8,34	8,61
Sumatera Barat	9,56	6,59	9,54	6,51	7,90
Riau	9,73	8,65	9,28	8,86	9,08
Jambi	11,34	8,72	10,38	8,75	9,57
Sumatera Selatan	8,79	6,63	8,15	6,72	7,41
Bengkulu	12,08	8,03	10,18	8,18	9,19
Lampung	8,71	7,82	8,67	7,47	8,08
Kepulauan Bangka Belitung	8,85	9,05	8,85	9,02	8,94
Kepulauan Riau	8,60	7,03	8,10	8,53	8,32
DKI Jakarta	10,10	-	10,52	9,71	10,10
Jawa Barat	9,44	7,90	9,77	8,25	8,99
Jawa Tengah	10,39	8,74	10,70	8,53	9,55
DI Yogyakarta	9,27	7,35	9,74	7,62	8,59
Jawa Timur	9,12	7,36	9,13	7,47	8,24
Banten	9,70	5,19	6,83	9,43	8,13
Bali	5,60	5,78	5,78	5,57	5,67
Nusa Tenggara Barat	10,77	10,25	9,97	10,95	10,49
Nusa Tenggara Timur	8,70	5,40	7,59	4,74	6,09
Kalimantan Barat	6,27	5,59	5,86	5,82	5,84
Kalimantan Tengah	8,77	8,27	9,30	7,56	8,47
Kalimantan Selatan	11,53	7,30	9,67	8,78	9,20
Kalimantan Timur	9,66	8,39	9,58	8,80	9,22
Kalimantan Utara	9,33	11,37	11,04	9,17	10,18
Sulawesi Utara	10,33	11,43	12,00	9,86	10,88
Sulawesi Tengah	18,25	9,64	12,09	11,92	12,00
Sulawesi Selatan	11,44	9,15	11,65	8,78	10,03
Sulawesi Tenggara	8,69	6,09	8,75	5,41	6,98
Gorontalo	11,77	8,08	9,56	9,70	9,63
Sulawesi Barat	10,85	9,32	12,06	7,66	9,72
Maluku	9,24	3,90	7,55	4,81	6,14
Maluku Utara	15,11	6,51	10,94	6,65	8,82
Papua Barat	9,88	8,00	9,24	8,24	8,78
Papua	11,94	5,66	9,29	6,84	8,26
Indonesia	9,67	8,00	9,66	8,18	8,89

Sumber: BPS, Susenas Maret 2019

Tabel 4.9 Rata-rata Lama Rawat Inap (dalam hari) Lansia yang Pernah Dirawat Inap Setahun Terakhir Menurut Provinsi, Tipe Daerah, dan Jenis Kelamin, 2019

Provinsi	Tipe Daerah		Jenis Kelamin		Total
	Perkotaan	Perdesaan	Laki-Laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	7,62	5,99	6,78	6,04	6,42
Sumatera Utara	7,85	6,14	7,12	7,18	7,15
Sumatera Barat	8,06	6,77	7,65	7,22	7,46
Riau	7,06	4,72	4,98	6,49	5,70
Jambi	5,60	7,59	8,38	4,96	6,82
Sumatera Selatan	6,31	5,17	6,04	5,23	5,66
Bengkulu	4,71	4,42	4,42	4,67	4,53
Lampung	5,25	4,99	5,25	4,85	5,07
Kepulauan Bangka Belitung	4,73	5,39	4,48	5,54	5,02
Kepulauan Riau	6,03	5,55	6,37	5,56	5,95
DKI Jakarta	6,86	-	6,60	7,13	6,86
Jawa Barat	5,60	5,01	5,69	5,19	5,45
Jawa Tengah	6,61	6,00	6,28	6,37	6,32
DI Yogyakarta	6,62	5,64	5,82	6,86	6,32
Jawa Timur	6,39	6,20	6,41	6,19	6,30
Banten	5,84	4,65	5,76	5,44	5,58
Bali	6,84	6,59	6,98	6,52	6,74
Nusa Tenggara Barat	5,20	6,73	6,67	5,44	5,99
Nusa Tenggara Timur	8,21	5,90	6,54	6,66	6,59
Kalimantan Barat	6,47	7,20	7,46	6,37	6,91
Kalimantan Tengah	7,17	6,57	6,12	7,72	6,81
Kalimantan Selatan	6,13	6,13	6,43	5,84	6,13
Kalimantan Timur	7,29	6,23	8,21	5,35	6,95
Kalimantan Utara	7,73	6,39	7,24	6,91	7,10
Sulawesi Utara	9,65	7,54	9,06	7,97	8,54
Sulawesi Tengah	6,14	6,73	7,65	5,32	6,49
Sulawesi Selatan	7,15	7,06	7,84	6,34	7,10
Sulawesi Tenggara	7,19	5,11	5,86	6,19	6,00
Gorontalo	7,05	6,13	7,73	5,64	6,60
Sulawesi Barat	5,62	7,54	8,64	4,70	6,99
Maluku	7,57	7,19	7,15	7,83	7,43
Maluku Utara	10,21	8,37	9,96	7,96	9,22
Papua Barat	5,94	5,41	5,72	5,58	5,66
Papua	8,04	7,42	7,99	7,41	7,79
Indonesia	6,43	6,00	6,41	6,07	6,25

Sumber: BPS, Susenas Maret 2019

Tabel 4.10 Persentase Penduduk Lansia yang Pernah Dirawat Inap Setahun Terakhir Menurut Provinsi, Tipe Daerah, dan Jenis Kelamin, 2019

Provinsi	Lama Rawat Inap (hari)				Total
	1-3	4-7	8-14	14+	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	32,19	43,83	17,93	6,05	100,00
Sumatera Utara	31,00	43,47	16,07	9,45	100,00
Sumatera Barat	28,09	45,08	16,51	10,31	100,00
Riau	41,58	42,23	7,24	8,96	100,00
Jambi	36,07	44,01	12,78	7,14	100,00
Sumatera Selatan	36,40	48,20	10,89	4,50	100,00
Bengkulu	50,43	40,58	5,85	3,14	100,00
Lampung	43,97	42,58	10,77	2,68	100,00
Kepulauan Bangka Belitung	56,32	30,29	6,28	7,11	100,00
Kepulauan Riau	34,15	51,45	9,25	5,16	100,00
DKI Jakarta	24,74	53,08	17,95	4,23	100,00
Jawa Barat	40,84	43,67	10,25	5,23	100,00
Jawa Tengah	32,52	48,87	12,31	6,30	100,00
DI Yogyakarta	25,57	50,83	18,75	4,85	100,00
Jawa Timur	32,99	46,04	15,22	5,75	100,00
Banten	32,76	50,91	12,65	3,69	100,00
Bali	28,47	43,84	18,50	9,19	100,00
Nusa Tenggara Barat	43,78	39,35	11,69	5,17	100,00
Nusa Tenggara Timur	43,68	39,63	11,48	5,21	100,00
Kalimantan Barat	37,20	38,09	13,23	11,48	100,00
Kalimantan Tengah	30,91	46,89	13,27	8,93	100,00
Kalimantan Selatan	40,58	37,47	14,17	7,78	100,00
Kalimantan Timur	39,86	33,42	12,81	13,92	100,00
Kalimantan Utara	25,05	50,31	17,79	6,85	100,00
Sulawesi Utara	24,98	44,01	19,10	11,91	100,00
Sulawesi Tengah	37,86	44,96	9,31	7,87	100,00
Sulawesi Selatan	34,03	43,64	12,24	10,08	100,00
Sulawesi Tenggara	35,26	42,26	18,11	4,38	100,00
Gorontalo	24,12	52,99	18,27	4,62	100,00
Sulawesi Barat	39,19	40,60	11,98	8,23	100,00
Maluku	19,76	48,16	28,33	3,75	100,00
Maluku Utara	19,18	49,75	16,63	14,45	100,00
Papua Barat	42,09	44,90	12,01	1,00	100,00
Papua	32,14	37,11	17,27	13,48	100,00
Indonesia	34,78	45,56	13,31	6,35	100,00

Sumber: BPS, Susenas Maret 2019

Tabel 4.11 Persentase Penduduk Lansia yang Rawat Inap Menurut Provinsi dan Tempat Rawat Inap, 2019

Provinsi	RS Peme- rintah	RS Swasta	Praktik dokter /bidan	Klinik/ dokter bersama	Puskes- mas/ Pustu	Praktik pengo- batan tradisio- nal/alter- natif	Lainnya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Aceh	69,78	17,29	1,13	1,36	15,82	0,29	0,00
Sumatera Utara	34,18	57,97	3,45	3,93	2,03	0,05	0,28
Sumatera Barat	66,54	24,54	1,61	0,82	7,37	0,09	0,00
Riau	46,82	40,10	2,30	3,71	9,75	0,00	1,01
Jambi	55,34	29,01	1,57	7,92	12,84	0,42	0,00
Sumatera Selatan	47,34	31,57	4,19	6,80	11,92	1,61	1,57
Bengkulu	60,96	23,26	0,00	9,16	8,99	0,02	0,00
Lampung	24,20	48,09	5,88	12,46	13,42	0,93	0,51
Kep. Bangka Belitung	52,28	44,21	0,00	0,67	7,63	1,44	0,00
Kepulauan Riau	51,62	48,26	0,00	0,85	0,96	0,00	0,00
DKI Jakarta	63,72	35,88	0,00	0,54	1,15	0,00	0,75
Jawa Barat	46,32	36,90	2,23	7,78	9,59	0,28	0,46
Jawa Tengah	39,12	44,85	1,35	4,01	12,99	0,33	0,03
DI Yogyakarta	31,26	62,01	0,98	5,76	4,34	0,00	0,00
Jawa Timur	39,67	39,17	0,73	3,84	21,13	0,52	0,04
Banten	42,77	46,79	2,98	3,57	7,72	0,00	0,00
Bali	60,82	39,35	0,00	0,00	1,48	0,00	0,00
Nusa Tenggara Barat	43,25	12,57	0,86	9,58	36,88	2,34	0,30
Nusa Tenggara Timur	55,75	26,32	0,08	0,81	20,96	0,27	0,00
Kalimantan Barat	61,58	34,86	0,00	0,04	14,55	0,00	0,21
Kalimantan Tengah	76,97	6,45	0,57	2,30	14,40	0,00	0,66
Kalimantan Selatan	73,96	17,82	0,00	1,55	10,56	0,00	0,00
Kalimantan Timur	60,08	29,65	0,00	7,02	6,78	0,00	0,60
Kalimantan Utara	90,70	1,47	0,00	0,00	7,85	0,00	0,00
Sulawesi Utara	55,40	38,31	1,97	0,47	9,66	0,00	0,00
Sulawesi Tengah	70,37	11,77	0,20	0,00	19,94	0,00	0,00
Sulawesi Selatan	60,86	19,31	0,32	1,34	22,26	0,00	0,26
Sulawesi Tenggara	80,34	8,99	0,45	0,21	10,16	0,00	0,00
Gorontalo	74,95	10,45	0,76	0,00	15,72	0,00	0,00
Sulawesi Barat	76,05	6,16	2,62	2,96	20,68	0,00	0,00
Maluku	69,74	22,17	0,00	2,78	5,66	0,00	0,00
Maluku Utara	81,26	13,77	0,00	0,00	8,50	0,00	0,00
Papua Barat	64,44	11,71	0,00	0,00	20,79	0,00	4,65
Papua	69,17	14,55	0,51	4,23	12,04	0,00	0,00
Indonesia	46,98	37,10	1,50	4,44	13,22	0,34	0,23

Sumber: BPS, Susenas Maret 2019

Tabel 4.12 Persentase Penduduk Lansia Rawat Inap yang Menggunakan Jaminan Kesehatan untuk Rawat Inap, 2019

Provinsi	Rawat Inap	Jaminan Kesehatan				
		PBI	Non PBI	Jamkesda	Asuransi Swasta	Perusahaan/kantor
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aceh	97,70	84,22	14,06	1,90	0,19	0,12
Sumatera Utara	74,63	40,22	54,08	1,01	2,42	2,87
Sumatera Barat	85,58	46,53	49,83	0,83	0,00	3,04
Riau	61,13	33,46	56,03	8,33	0,47	1,71
Jambi	69,80	37,42	58,90	2,28	0,00	1,98
Sumatera Selatan	66,12	38,03	45,10	13,96	0,00	2,91
Bengkulu	76,65	45,04	54,79	0,16	0,00	0,00
Lampung	65,39	52,40	42,74	2,76	0,32	1,78
Kep. Bangka Belitung	90,99	46,67	51,14	0,00	2,19	0,00
Kepulauan Riau	75,57	34,25	55,37	2,91	0,00	7,60
DKI Jakarta	85,17	58,40	29,99	1,97	6,41	3,91
Jawa Barat	67,85	42,47	50,34	4,35	0,32	3,32
Jawa Tengah	72,11	55,68	40,37	3,66	0,00	0,49
DI Yogyakarta	80,46	54,65	43,77	1,09	0,00	0,48
Jawa Timur	63,38	46,20	47,91	5,57	0,03	1,09
Banten	70,15	48,29	40,74	7,07	2,39	3,08
Bali	75,15	48,94	42,92	7,13	1,02	0,00
Nusa Tenggara Barat	61,39	68,12	30,56	1,44	0,00	1,32
Nusa Tenggara Timur	84,96	61,88	30,21	7,90	0,00	0,00
Kalimantan Barat	62,69	39,37	56,75	2,56	0,00	1,33
Kalimantan Tengah	74,02	62,19	37,01	0,28	0,52	0,00
Kalimantan Selatan	72,02	38,74	53,62	7,74	0,00	0,92
Kalimantan Timur	84,47	41,66	51,57	1,51	4,80	0,46
Kalimantan Utara	97,19	61,99	31,70	6,19	0,00	1,60
Sulawesi Utara	88,38	50,68	45,74	1,18	1,44	0,95
Sulawesi Tengah	83,30	46,34	47,82	5,30	0,00	0,53
Sulawesi Selatan	86,86	57,40	41,75	1,14	0,00	0,12
Sulawesi Tenggara	87,76	50,36	47,65	1,99	0,00	0,00
Gorontalo	96,60	69,28	30,72	0,00	0,00	0,00
Sulawesi Barat	87,80	50,35	45,39	7,30	0,00	0,00
Maluku	81,47	48,35	49,76	1,89	0,00	0,00
Maluku Utara	80,35	41,30	44,35	10,55	0,94	3,01
Papua Barat	80,13	92,17	7,23	0,69	1,12	0,00
Papua	86,62	56,43	23,66	20,57	0,00	0,00
Indonesia	72,39	50,52	43,79	4,01	0,64	1,56

Sumber: BPS, Susenas Maret 2019

Tabel 4.13 Persentase Penduduk Lansia Menurut Provinsi dan Kebiasaan Merokok, 2019

Provinsi	Merokok			Tidak Merokok
	Setiap Hari	Tidak Setiap Hari	Total	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Aceh	19,69	2,41	22,10	77,90
Sumatera Utara	20,97	1,41	22,37	77,63
Sumatera Barat	22,42	1,84	24,26	75,74
Riau	22,48	1,39	23,87	76,13
Jambi	20,17	1,73	21,90	78,10
Sumatera Selatan	22,63	2,25	24,88	75,12
Bengkulu	27,81	1,93	29,74	70,26
Lampung	28,72	2,31	31,03	68,97
Kepulauan Bangka Belitung	20,29	1,02	21,32	78,68
Kepulauan Riau	18,39	1,97	20,36	79,64
DKI Jakarta	14,22	1,65	15,87	84,13
Jawa Barat	27,10	2,65	29,75	70,25
Jawa Tengah	21,88	2,05	23,93	76,07
DI Yogyakarta	16,88	1,32	18,21	81,79
Jawa Timur	22,25	1,91	24,16	75,84
Banten	25,00	2,75	27,76	72,24
Bali	10,21	1,50	11,71	88,29
Nusa Tenggara Barat	25,31	1,79	27,10	72,90
Nusa Tenggara Timur	15,63	4,40	20,03	79,97
Kalimantan Barat	21,14	1,96	23,10	76,90
Kalimantan Tengah	23,34	1,46	24,80	75,20
Kalimantan Selatan	15,84	1,40	17,24	82,76
Kalimantan Timur	17,12	1,43	18,55	81,45
Kalimantan Utara	17,49	1,38	18,86	81,14
Sulawesi Utara	17,98	4,05	22,03	77,97
Sulawesi Tengah	23,48	2,26	25,74	74,26
Sulawesi Selatan	17,09	1,50	18,58	81,42
Sulawesi Tenggara	20,92	1,54	22,46	77,54
Gorontalo	24,45	3,49	27,94	72,06
Sulawesi Barat	22,05	1,90	23,95	76,05
Maluku	18,23	4,91	23,13	76,87
Maluku Utara	20,13	6,66	26,78	73,22
Papua Barat	19,50	3,71	23,21	76,79
Papua	16,93	5,94	22,87	77,13
Indonesia	22,15	2,15	24,30	75,70

Sumber: BPS, Susenas Maret 2019

Tabel 5.1.1 Persentase Penduduk Lanjut Usia Menurut Provinsi dan Jenis Kegiatan dalam Seminggu Terakhir, 2019

Jenis Kegiatan dalam Seminggu Terakhir					Perkotaan
Provinsi	Bekerja	Pengangguran	Mengurus Rumah Tangga	Lainnya	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	33,31	0,20	41,11	25,39	100,00
Sumatera Utara	42,78	0,36	36,99	19,87	100,00
Sumatera Barat	45,09	0,30	36,37	18,24	100,00
Riau	33,37	0,75	41,13	24,75	100,00
Jambi	43,62	0,00	35,15	21,23	100,00
Sumatera Selatan	35,53	0,19	39,17	25,10	100,00
Bengkulu	45,04	0,06	31,12	23,78	100,00
Lampung	48,64	0,02	37,18	14,16	100,00
Kepulauan Bangka Belitung	41,96	0,39	40,62	17,04	100,00
Kepulauan Riau	34,67	0,46	42,19	22,67	100,00
DKI Jakarta	32,08	0,51	41,93	25,49	100,00
Jawa Barat	41,55	0,50	38,20	19,75	100,00
Jawa Tengah	47,30	0,57	34,02	18,11	100,00
DI Yogyakarta	50,97	0,44	35,05	13,54	100,00
JawaTimur	48,98	0,31	34,57	16,14	100,00
Banten	33,57	0,68	40,61	25,14	100,00
Bali	49,07	0,00	37,39	13,54	100,00
Nusa Tenggara Barat	46,80	0,10	33,95	19,15	100,00
Nusa Tenggara Timur	40,19	0,22	40,71	18,88	100,00
Kalimantan Barat	34,29	0,70	40,38	24,63	100,00
Kalimantan Tengah	43,87	1,74	39,68	14,71	100,00
Kalimantan Selatan	39,04	0,81	44,59	15,56	100,00
Kalimantan Timur	40,14	0,56	38,17	21,13	100,00
Kalimantan Utara	38,96	0,56	38,86	21,62	100,00
Sulawesi Utara	40,77	0,25	37,79	21,19	100,00
Sulawesi Tengah	39,23	0,24	33,76	26,76	100,00
Sulawesi Selatan	34,14	0,40	47,00	18,46	100,00
Sulawesi Tenggara	35,49	0,49	46,21	17,80	100,00
Gorontalo	43,67	0,00	38,58	17,74	100,00
Sulawesi Barat	36,59	0,00	30,61	32,80	100,00
Maluku	35,37	0,73	44,28	19,63	100,00
Maluku Utara	37,65	0,00	37,82	24,52	100,00
Papua Barat	38,08	0,41	45,90	15,62	100,00
Papua	38,65	3,69	31,82	25,84	100,00
Indonesia	43,06	0,45	37,28	19,21	100,00

Sumber: BPS, Sakernas Agustus 2019

Tabel 5.1.2 Persentase Penduduk Lanjut Usia Menurut Provinsi dan Jenis Kegiatan dalam Seminggu Terakhir, 2019

Provinsi	Jenis Kegiatan dalam Seminggu Terakhir				Total
	Bekerja	Pengangguran	Mengurus Rumah Tangga	Lainnya	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Aceh	46,01	0,22	32,29	21,48	100,00
Sumatera Utara	59,80	0,09	23,42	16,70	100,00
Sumatera Barat	56,09	0,14	27,62	16,14	100,00
Riau	47,57	0,27	33,64	18,53	100,00
Jambi	49,38	0,12	30,21	20,29	100,00
Sumatera Selatan	54,98	0,00	27,97	17,05	100,00
Bengkulu	58,35	1,00	26,33	14,32	100,00
Lampung	58,77	0,18	27,58	13,47	100,00
Kepulauan Bangka Belitung	56,41	1,54	31,56	10,49	100,00
Kepulauan Riau	49,05	0,13	33,13	17,69	100,00
DKI Jakarta	-	-	-	-	-
Jawa Barat	52,66	0,19	30,94	16,22	100,00
Jawa Tengah	56,52	0,04	27,35	16,09	100,00
DI Yogyakarta	71,70	0,04	16,71	11,54	100,00
Jawa Timur	61,88	0,11	24,60	13,40	100,00
Banten	44,21	2,13	36,30	17,36	100,00
Bali	62,83	0,06	27,60	9,50	100,00
Nusa Tenggara Barat	51,13	0,15	27,88	20,84	100,00
Nusa Tenggara Timur	60,78	0,03	21,16	18,03	100,00
Kalimantan Barat	56,66	0,18	23,35	19,81	100,00
Kalimantan Tengah	55,05	0,93	29,76	14,26	100,00
Kalimantan Selatan	56,75	0,21	30,30	12,75	100,00
Kalimantan Timur	53,68	0,30	24,68	21,35	100,00
Kalimantan Utara	52,42	0,00	28,91	18,67	100,00
Sulawesi Utara	55,48	0,05	31,31	13,16	100,00
Sulawesi Tengah	53,93	0,45	27,30	18,31	100,00
Sulawesi Selatan	45,88	0,16	35,40	18,57	100,00
Sulawesi Tenggara	57,34	0,05	27,85	14,76	100,00
Gorontalo	55,83	0,00	28,27	15,90	100,00
Sulawesi Barat	56,83	0,11	27,32	15,74	100,00
Maluku	56,41	0,09	24,77	18,73	100,00
Maluku Utara	53,84	0,34	26,03	19,78	100,00
Papua Barat	63,38	0,17	21,66	14,79	100,00
Papua	68,25	2,06	16,45	13,24	100,00
Indonesia	56,51	0,20	27,46	15,83	100,00

Sumber: BPS, Sakernas Agustus 2019

Tabel 5.1.3 Persentase Penduduk Lanjut Usia Menurut Provinsi dan Jenis Kegiatan dalam Seminggu Terakhir, 2019

Laki-laki					
Provinsi	Jenis Kegiatan dalam Seminggu Terakhir				Total
	Bekerja	Pengangguran	Mengurus Rumah Tangga	Lainnya	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	61,66	0,11	9,39	28,84	100,00
Sumatera Utara	63,27	0,40	13,50	22,83	100,00
Sumatera Barat	68,23	0,20	11,10	20,46	100,00
Riau	59,83	0,71	16,37	23,09	100,00
Jambi	65,53	0,17	11,08	23,22	100,00
Sumatera Selatan	62,83	0,12	12,09	24,96	100,00
Bengkulu	70,29	0,67	10,00	19,03	100,00
Lampung	72,90	0,17	11,22	15,71	100,00
Kepulauan Bangka Belitung	63,95	0,73	18,16	17,17	100,00
Kepulauan Riau	56,05	0,82	12,92	30,21	100,00
DKI Jakarta	41,81	0,89	19,84	37,47	100,00
Jawa Barat	61,37	0,44	13,75	24,43	100,00
Jawa Tengah	67,18	0,26	13,62	18,93	100,00
DI Yogyakarta	68,39	0,63	16,14	14,85	100,00
Jawa Timur	70,53	0,35	12,52	16,60	100,00
Banten	51,88	1,68	17,99	28,46	100,00
Bali	62,93	0,00	23,67	13,40	100,00
Nusa Tenggara Barat	65,11	0,14	10,67	24,08	100,00
Nusa Tenggara Timur	69,00	0,16	10,69	20,16	100,00
Kalimantan Barat	61,68	0,34	11,31	26,67	100,00
Kalimantan Tengah	63,70	0,83	17,09	18,39	100,00
Kalimantan Selatan	62,33	0,49	20,29	16,88	100,00
Kalimantan Timur	58,51	0,87	17,14	23,47	100,00
Kalimantan Utara	61,87	0,60	13,68	23,86	100,00
Sulawesi Utara	66,39	0,16	11,81	21,64	100,00
Sulawesi Tengah	66,41	0,69	9,51	23,39	100,00
Sulawesi Selatan	60,84	0,40	14,93	23,83	100,00
Sulawesi Tenggara	65,48	0,38	17,42	16,73	100,00
Gorontalo	68,41	0,00	10,51	21,07	100,00
Sulawesi Barat	71,45	0,00	8,99	19,56	100,00
Maluku	60,45	0,33	18,02	21,19	100,00
Maluku Utara	64,98	0,43	9,35	25,25	100,00
Papua Barat	59,39	0,24	19,57	20,81	100,00
Papua	63,35	1,64	11,47	23,54	100,00
Indonesia	64,47	0,42	13,79	21,31	100,00

Sumber: BPS, Sakernas Agustus 2019

Tabel 5.1.4 Persentase Penduduk Lanjut Usia Menurut Provinsi dan Jenis Kegiatan dalam Seminggu Terakhir, 2019

Provinsi	Jenis Kegiatan dalam Seminggu Terakhir				Total
	Bekerja	Pengangguran	Mengurus Rumah Tangga	Lainnya	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Aceh	25,09	0,30	57,38	17,22	100,00
Sumatera Utara	40,09	0,08	45,22	14,61	100,00
Sumatera Barat	36,74	0,22	48,84	14,20	100,00
Riau	23,81	0,19	57,32	18,68	100,00
Jambi	29,21	0,00	52,86	17,93	100,00
Sumatera Selatan	33,78	0,02	51,00	15,21	100,00
Bengkulu	38,57	0,79	45,74	14,90	100,00
Lampung	38,49	0,10	49,83	11,58	100,00
Kepulauan Bangka Belitung	32,48	1,04	55,19	11,29	100,00
Kepulauan Riau	18,22	0,00	68,28	13,50	100,00
DKI Jakarta	23,11	0,15	62,32	14,43	100,00
Jawa Barat	28,96	0,38	57,32	13,35	100,00
Jawa Tengah	38,71	0,32	45,53	15,43	100,00
DI Yogyakarta	49,72	0,03	39,08	11,17	100,00
Jawa Timur	42,26	0,09	44,46	13,19	100,00
Banten	22,74	0,70	60,14	16,42	100,00
Bali	46,67	0,04	42,52	10,77	100,00
Nusa Tenggara Barat	35,06	0,11	48,33	16,51	100,00
Nusa Tenggara Timur	45,29	0,00	38,23	16,48	100,00
Kalimantan Barat	35,47	0,40	47,59	16,55	100,00
Kalimantan Tengah	36,53	1,70	51,64	10,13	100,00
Kalimantan Selatan	36,31	0,47	51,83	11,40	100,00
Kalimantan Timur	28,80	0,00	52,63	18,58	100,00
Kalimantan Utara	24,11	0,00	59,61	16,27	100,00
Sulawesi Utara	31,09	0,14	55,62	13,15	100,00
Sulawesi Tengah	33,48	0,10	48,50	17,92	100,00
Sulawesi Selatan	26,06	0,14	59,42	14,38	100,00
Sulawesi Tenggara	37,69	0,00	47,62	14,70	100,00
Gorontalo	35,17	0,00	51,99	12,85	100,00
Sulawesi Barat	35,58	0,16	44,91	19,34	100,00
Maluku	35,64	0,38	46,79	17,19	100,00
Maluku Utara	33,90	0,08	49,25	16,77	100,00
Papua Barat	45,68	0,30	45,66	8,36	100,00
Papua	46,15	4,24	38,33	11,29	100,00
Indonesia	35,66	0,25	49,82	14,26	100,00

Sumber: BPS, Sakernas Agustus 2019

Tabel 5.1.5 Persentase Penduduk Lanjut Usia Menurut Provinsi dan Jenis Kegiatan dalam Seminggu Terakhir, 2019

Perkotaan + Perdesaan, Laki-laki + Perempuan

Provinsi	Jenis Kegiatan dalam Seminggu Terakhir				Total
	Bekerja	Pengangguran	Mengurus Rumah Tangga	Lainnya	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	42,18	0,22	34,95	22,65	100,00
Sumatera Utara	50,74	0,23	30,64	18,39	100,00
Sumatera Barat	51,20	0,21	31,52	17,07	100,00
Riau	42,11	0,45	36,52	20,92	100,00
Jambi	47,51	0,08	31,81	20,60	100,00
Sumatera Selatan	47,95	0,07	32,02	19,96	100,00
Bengkulu	54,60	0,73	27,68	16,99	100,00
Lampung	55,87	0,14	30,33	13,66	100,00
Kepulauan Bangka Belitung	48,17	0,88	36,72	14,22	100,00
Kepulauan Riau	37,09	0,41	40,67	21,83	100,00
DKI Jakarta	32,08	0,51	41,93	25,49	100,00
Jawa Barat	44,73	0,41	36,12	18,74	100,00
Jawa Tengah	52,04	0,30	30,59	17,07	100,00
DI Yogyakarta	58,22	0,30	28,64	12,84	100,00
Jawa Timur	55,41	0,21	29,60	14,78	100,00
Banten	37,28	1,19	39,11	22,42	100,00
Bali	54,30	0,02	33,67	12,01	100,00
Nusa Tenggara Barat	49,08	0,12	30,76	20,04	100,00
Nusa Tenggara Timur	56,44	0,07	25,29	18,21	100,00
Kalimantan Barat	48,48	0,37	29,58	21,57	100,00
Kalimantan Tengah	50,71	1,25	33,61	14,44	100,00
Kalimantan Selatan	48,75	0,48	36,76	14,02	100,00
Kalimantan Timur	44,75	0,47	33,57	21,21	100,00
Kalimantan Utara	44,59	0,32	34,70	20,39	100,00
Sulawesi Utara	48,03	0,15	34,59	17,23	100,00
Sulawesi Tengah	49,88	0,39	29,08	20,64	100,00
Sulawesi Selatan	41,32	0,25	39,90	18,53	100,00
Sulawesi Tenggara	50,89	0,18	33,26	15,66	100,00
Gorontalo	50,68	0,00	32,64	16,68	100,00
Sulawesi Barat	52,44	0,09	28,03	19,44	100,00
Maluku	47,54	0,36	33,00	19,11	100,00
Maluku Utara	49,55	0,25	29,15	21,04	100,00
Papua Barat	53,13	0,27	31,48	15,12	100,00
Papua	56,13	2,73	22,74	18,40	100,00
Indonesia	49,39	0,33	32,66	17,62	100,00

Sumber: BPS, Sakernas Agustus 2019

Tabel 5.2 Persentase Penduduk Lanjut Usia Bekerja Menurut Provinsi dan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, 2019

Provinsi	Jenis Kegiatan dalam Seminggu Terakhir					Total
	Tidak Tamat SD	Tamat SD	Tamat SMP	Tamat SM	Tamat PT	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aceh	34,40	39,91	12,11	9,99	3,59	100,00
Sumatera Utara	33,06	31,23	18,46	12,84	4,41	100,00
Sumatera Barat	47,25	24,88	13,37	10,06	4,44	100,00
Riau	44,21	34,30	11,40	8,50	1,60	100,00
Jambi	43,33	36,71	9,73	6,95	3,28	100,00
Sumatera Selatan	41,69	39,88	8,81	7,15	2,47	100,00
Bengkulu	47,56	29,85	10,39	9,30	2,89	100,00
Lampung	53,47	31,79	7,77	4,78	2,20	100,00
Kepulauan Bangka Belitung	51,55	31,08	9,30	6,21	1,87	100,00
Kepulauan Riau	43,81	30,64	6,07	10,88	8,60	100,00
DKI Jakarta	15,04	26,68	21,07	23,53	13,67	100,00
Jawa Barat	40,29	42,10	7,14	7,08	3,39	100,00
Jawa Tengah	52,42	33,29	7,01	4,81	2,48	100,00
DI Yogyakarta	44,25	30,77	11,01	9,48	4,50	100,00
Jawa Timur	52,56	33,30	6,59	4,86	2,69	100,00
Banten	40,99	35,49	8,78	8,86	5,88	100,00
Bali	51,31	31,44	6,62	5,47	5,15	100,00
Nusa Tenggara Barat	67,70	19,31	5,17	5,30	2,51	100,00
Nusa Tenggara Timur	54,71	31,34	5,43	5,65	2,87	100,00
Kalimantan Barat	62,41	25,36	6,10	3,91	2,23	100,00
Kalimantan Tengah	36,35	39,83	11,87	9,14	2,81	100,00
Kalimantan Selatan	47,67	33,04	10,25	5,97	3,07	100,00
Kalimantan Timur	38,13	31,77	10,88	13,86	5,35	100,00
Kalimantan Utara	44,82	27,44	12,73	10,03	4,98	100,00
Sulawesi Utara	27,30	30,73	20,33	15,74	5,90	100,00
Sulawesi Tengah	33,70	42,28	12,07	8,70	3,24	100,00
Sulawesi Selatan	51,69	24,60	8,63	9,62	5,45	100,00
Sulawesi Tenggara	49,97	25,95	10,03	10,02	4,03	100,00
Gorontalo	50,58	30,80	9,70	7,78	1,14	100,00
Sulawesi Barat	54,26	27,88	6,60	8,13	3,13	100,00
Maluku	29,22	40,21	12,39	11,32	6,86	100,00
Maluku Utara	37,11	36,75	15,14	9,72	1,27	100,00
Papua Barat	37,86	30,46	13,86	10,53	7,29	100,00
Papua	47,98	27,17	10,53	9,79	4,53	100,00
Indonesia	46,93	33,83	8,67	7,11	3,46	100,00

Sumber: BPS, Sakernas Agustus 2019

Tabel 5.3 Persentase Penduduk Lanjut Usia Bekerja Menurut Provinsi dan Lapangan Pekerjaan Utama, 2019

Provinsi	Lapangan Pekerjaan Utama			Total
	Pertanian	Industri	Jasa	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Aceh	62,42	12,96	24,62	100,00
Sumatera Utara	56,65	11,01	32,34	100,00
Sumatera Barat	58,22	11,14	30,64	100,00
Riau	60,81	10,21	28,98	100,00
Jambi	66,15	8,54	25,31	100,00
Sumatera Selatan	63,76	7,64	28,61	100,00
Bengkulu	66,98	10,87	22,15	100,00
Lampung	61,43	12,14	26,43	100,00
Kepulauan Bangka Belitung	48,65	21,23	30,12	100,00
Kepulauan Riau	34,86	16,79	48,35	100,00
DKI Jakarta	1,09	14,52	84,39	100,00
Jawa Barat	38,15	18,11	43,75	100,00
Jawa Tengah	54,82	17,56	27,63	100,00
DI Yogyakarta	51,37	17,90	30,73	100,00
Jawa Timur	58,09	11,94	29,97	100,00
Banten	39,89	15,03	45,08	100,00
Bali	46,23	24,26	29,51	100,00
Nusa Tenggara Barat	53,48	16,77	29,75	100,00
Nusa Tenggara Timur	72,72	15,42	11,86	100,00
Kalimantan Barat	73,71	8,19	18,09	100,00
Kalimantan Tengah	60,22	14,76	25,01	100,00
Kalimantan Selatan	51,46	14,34	34,20	100,00
Kalimantan Timur	37,72	12,40	49,88	100,00
Kalimantan Utara	46,82	15,60	37,58	100,00
Sulawesi Utara	50,57	15,05	34,38	100,00
Sulawesi Tengah	65,69	14,12	20,19	100,00
Sulawesi Selatan	60,09	11,21	28,70	100,00
Sulawesi Tenggara	62,03	13,85	24,11	100,00
Gorontalo	51,29	14,38	34,33	100,00
Sulawesi Barat	72,05	9,78	18,17	100,00
Maluku	56,21	17,32	26,47	100,00
Maluku Utara	64,46	11,71	23,83	100,00
Papua Barat	54,09	10,44	35,47	100,00
Papua	68,38	5,69	25,92	100,00
Indonesia	52,86	14,56	32,58	100,00

Sumber: BPS, Sakernas Agustus 2019

Tabel 5.4 Persentase Penduduk Lanjut Usia Bekerja Menurut Provinsi dan Status Pekerjaan Utama, 2019

Provinsi	Status Pekerjaan Utama					
	Berusaha Sendiri	Berusaha Dibantu Buruh Tidak Dibayar	Berusaha Dibantu Buruh Dibayar	Buruh/ Karyawan	Pekerja Bebas	Pekerja Keluarga/ Tidak Dibayar
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aceh	35,83	33,96	5,93	10,49	5,67	8,12
Sumatera Utara	34,62	28,61	7,40	12,47	5,51	11,39
Sumatera Barat	32,91	33,38	5,91	7,42	8,64	11,75
Riau	40,24	23,52	9,62	10,20	8,70	7,72
Jambi	35,46	27,59	7,54	13,48	7,69	8,25
Sumatera Selatan	32,87	32,31	4,97	11,09	4,45	14,32
Bengkulu	29,39	37,04	7,78	5,51	6,81	13,48
Lampung	30,94	38,71	3,20	7,34	6,93	12,87
Kepulauan Bangka Belitung	38,95	21,01	7,28	19,17	5,92	7,67
Kepulauan Riau	52,67	7,70	4,30	26,00	3,41	5,92
DKI Jakarta	40,70	11,09	12,37	26,68	3,10	6,06
Jawa Barat	30,90	27,51	4,78	13,60	14,76	8,44
Jawa Tengah	26,25	34,41	4,15	9,74	11,92	13,52
DI Yogyakarta	24,14	34,83	3,68	11,38	7,27	18,69
Jawa Timur	25,04	34,55	4,92	9,09	13,03	13,38
Banten	33,42	23,04	5,18	16,38	13,49	8,49
Bali	28,84	34,93	3,55	8,97	6,03	17,70
Nusa Tenggara Barat	26,97	43,20	3,09	6,24	11,38	9,11
Nusa Tenggara Timur	27,78	50,63	2,17	3,32	1,81	14,30
Kalimantan Barat	35,62	34,75	3,77	7,84	2,93	15,10
Kalimantan Tengah	39,05	29,22	3,87	14,31	3,89	9,67
Kalimantan Selatan	38,71	31,97	3,90	10,89	4,75	9,78
Kalimantan Timur	38,52	19,65	6,97	20,15	5,42	9,30
Kalimantan Utara	33,07	27,14	8,20	17,24	4,83	9,52
Sulawesi Utara	42,52	17,89	7,06	12,87	9,79	9,88
Sulawesi Tengah	36,44	35,20	5,02	5,86	5,51	11,98
Sulawesi Selatan	36,35	35,85	4,62	9,54	3,30	10,34
Sulawesi Tenggara	32,39	42,28	4,05	5,49	2,82	12,97
Gorontalo	35,17	33,15	4,81	11,37	7,22	8,29
Sulawesi Barat	28,46	52,30	1,18	3,63	2,91	11,52
Maluku	38,37	29,75	1,89	12,83	2,30	14,85
Maluku Utara	35,95	37,92	4,79	6,01	3,58	11,74
Papua Barat	35,74	35,51	3,06	13,20	2,33	10,16
Papua	34,50	36,52	1,71	9,14	1,25	16,89
Indonesia	46,93	33,83	8,67	7,11	3,46	11,92

Sumber: BPS, Sakernas Agustus 2019

Tabel 5.5 Persentase Penduduk Lanjut Usia yang Termasuk *Precarious Work* Menurut Provinsi dan Tipe Daerah, 2019

Provinsi	Tipe Daerah		Total
	Perkotaan	Perdesaan	
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	5,30	5,78	5,67
Sumatera Utara	5,72	5,35	5,51
Sumatera Barat	7,05	9,66	8,64
Riau	7,77	9,11	8,70
Jambi	7,96	7,57	7,69
Sumatera Selatan	4,55	4,41	4,45
Bengkulu	4,31	7,57	6,81
Lampung	4,37	7,78	6,93
Kepulauan Bangka Belitung	4,94	6,89	5,92
Kepulauan Riau	3,22	4,09	3,41
DKI Jakarta	3,10	-	3,10
Jawa Barat	13,28	17,69	14,76
Jawa Tengah	11,67	12,12	11,92
DI Yogyakarta	8,39	5,78	7,27
Jawa Timur	12,10	13,77	13,03
Banten	9,82	18,69	13,49
Bali	5,03	7,29	6,03
Nusa Tenggara Barat	9,22	13,17	11,38
Nusa Tenggara Timur	3,43	1,52	1,81
Kalimantan Barat	2,54	3,06	2,93
Kalimantan Tengah	2,64	4,52	3,89
Kalimantan Selatan	4,03	5,16	4,75
Kalimantan Timur	7,22	2,81	5,42
Kalimantan Utara	7,75	1,81	4,83
Sulawesi Utara	8,47	10,78	9,79
Sulawesi Tengah	1,92	6,50	5,51
Sulawesi Selatan	3,46	3,22	3,30
Sulawesi Tenggara	0,38	3,45	2,82
Gorontalo	4,61	8,71	7,22
Sulawesi Barat	0,92	3,26	2,91
Maluku	2,70	2,12	2,30
Maluku Utara	10,16	1,92	3,58
Papua Barat	1,66	2,60	2,33
Papua	3,10	0,52	1,25
Indonesia	9,91	10,32	10,13

Sumber: BPS, Sakernas Agustus 2019

Tabel 5.6 Persentase Penduduk Lanjut Usia yang Bekerja di Sektor Informal Menurut Provinsi dan Tipe Daerah, 2019

Provinsi	Tipe Daerah		Jenis Kelamin		Total
	Perkotaan	Perdesaan	Laki-Laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	74.65	86.36	81.79	87.43	83.58
Sumatera Utara	71.43	87.23	73.73	88.73	80.13
Sumatera Barat	81.12	90.25	84.62	89.92	86.68
Riau	72.50	83.55	75.57	92.14	80.18
Jambi	71.17	82.29	75.19	87.63	78.98
Sumatera Selatan	74.64	87.35	80.94	89.27	83.94
Bengkulu	82.23	88.07	84.61	90.63	86.71
Lampung	84.48	91.11	88.11	92.07	89.46
Kepulauan Bangka Belitung	65.76	81.22	69.25	81.96	73.54
Kepulauan Riau	65.10	85.78	66.67	78.97	69.70
DKI Jakarta	60.95	-	57.83	66.16	60.95
Jawa Barat	77.50	89.71	77.87	89.13	81.61
Jawa Tengah	79.16	91.59	84.67	88.28	86.10
DI Yogyakarta	82.17	88.60	82.43	87.82	84.94
Jawa Timur	79.97	90.79	83.55	89.54	86.00
Banten	69.45	91.17	75.04	86.17	78.44
Bali	84.03	91.89	83.66	92.05	87.49
Nusa Tenggara Barat	87.30	93.46	88.88	93.59	90.68
Nusa Tenggara Timur	81.20	96.87	91.99	97.93	94.51
Kalimantan Barat	75.19	93.00	85.74	92.95	88.40
Kalimantan Tengah	74.61	85.46	76.15	92.58	81.81
Kalimantan Selatan	73.34	91.94	80.47	92.66	85.21
Kalimantan Timur	66.53	82.08	66.52	87.90	72.89
Kalimantan Utara	66.03	83.37	71.75	83.09	74.56
Sulawesi Utara	74.31	84.42	77.69	84.77	80.07
Sulawesi Tengah	77.55	92.33	87.37	92.58	89.12
Sulawesi Selatan	71.95	92.41	83.51	90.09	85.84
Sulawesi Tenggara	82.80	92.44	88.22	93.98	90.46
Gorontalo	74.54	89.16	84.31	82.98	83.82
Sulawesi Barat	82.55	97.45	93.79	97.68	95.19
Maluku	68.91	92.75	78.51	95.84	85.27
Maluku Utara	81.50	91.14	86.74	93.96	89.20
Papua Barat	71.90	88.59	79.14	90.87	83.74
Papua	75.73	94.42	86.80	93.61	89.15
Indonesia	77.12	90.42	81.36	89.10	84.29

Sumber: BPS, Sakernas Agustus 2019

Tabel 5.7 Rata-rata dan Persentase Jumlah Jam Kerja dalam Seminggu dari Penduduk Lansia Bekerja Menurut Provinsi, 2019

Provinsi	Rata-rata Jumlah Jam Kerja	Jumlah Jam Kerja dalam Seminggu				
		0 Jam	1-14 Jam	15-34 Jam	35-45 Jam	49 Jam atau Lebih
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aceh	29,57	4,95	19,77	35,41	25,08	14,79
Sumatera Utara	33,47	4,07	13,50	33,90	28,85	19,68
Sumatera Barat	31,30	5,62	18,41	32,31	24,52	19,15
Riau	31,72	3,85	17,83	36,59	22,89	18,84
Jambi	32,41	3,14	10,96	41,38	28,41	16,11
Sumatera Selatan	33,08	4,37	11,09	37,72	26,81	20,01
Bengkulu	29,33	7,27	14,64	38,34	27,68	12,08
Lampung	29,46	5,84	18,58	36,61	23,25	15,72
Kepulauan Bangka Belitung	34,91	5,75	11,88	30,57	28,75	23,05
Kepulauan Riau	37,11	5,46	13,14	27,73	24,95	28,71
DKI Jakarta	41,59	0,99	11,63	20,26	32,58	34,54
Jawa Barat	36,55	5,26	10,64	28,97	28,78	26,34
Jawa Tengah	34,72	4,02	13,03	30,67	29,58	22,70
DI Yogyakarta	32,14	1,81	20,04	33,54	26,16	18,45
Jawa Timur	34,99	3,08	13,33	32,98	26,29	24,31
Banten	37,63	2,86	9,59	30,50	31,09	25,97
Bali	35,07	1,89	13,26	33,23	28,40	23,22
Nusa Tenggara Barat	31,88	4,87	17,66	32,56	22,89	22,02
Nusa Tenggara Timur	29,72	5,13	16,66	39,70	25,17	13,33
Kalimantan Barat	31,06	4,51	14,41	40,11	23,69	17,28
Kalimantan Tengah	34,07	3,34	13,08	35,60	28,12	19,86
Kalimantan Selatan	31,44	7,03	16,25	33,31	25,48	17,92
Kalimantan Timur	38,72	3,55	8,73	27,98	29,40	30,34
Kalimantan Utara	36,34	4,82	8,09	37,18	23,75	26,16
Sulawesi Utara	37,32	3,45	8,56	28,90	34,23	24,86
Sulawesi Tengah	31,01	5,64	16,14	34,56	28,12	15,54
Sulawesi Selatan	31,78	4,51	18,69	33,59	24,16	19,05
Sulawesi Tenggara	30,73	6,40	18,03	33,03	23,01	19,52
Gorontalo	33,56	9,19	10,93	30,73	23,34	25,81
Sulawesi Barat	27,11	7,15	21,70	39,10	18,86	13,19
Maluku	32,69	5,11	11,93	36,94	28,91	17,11
Maluku Utara	33,75	4,58	14,04	29,09	34,91	17,39
Papua Barat	35,32	7,10	8,65	33,67	26,74	23,85
Papua	31,21	2,16	16,86	41,14	26,73	13,11
Indonesia	34,34	4,10	13,56	32,30	27,50	22,53

Sumber: BPS, Sakernas Agustus 2019

Tabel 5.8 Rata-rata dan Persentase Pendapatan/Upah/Gaji dari Penduduk Lansia Bekerja Menurut Provinsi, 2019

Provinsi	Rata-rata Jumlah Pendapata/ Upah/Gaji (000 rupiah)	Pendapatan/Upah/Gaji (Rupiah)			
		Kurang dari 1.000.000	1.000.000 s.d. 1.999.999	2.000.000 s.d. 2.999.999	Lebih dari 3.000.000
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	1 478	44,67	30,30	12,42	12,62
Sumatera Utara	1 558	42,00	30,94	14,31	12,76
Sumatera Barat	1 476	44,21	31,85	14,22	9,71
Riau	1 711	33,26	33,35	17,80	15,60
Jambi	1 674	32,88	38,86	15,17	13,09
Sumatera Selatan	1 329	46,02	32,79	12,02	9,17
Bengkulu	1 240	52,86	27,68	10,81	8,65
Lampung	1 311	51,60	30,75	10,25	7,39
Kepulauan Bangka Belitung	1 630	30,53	35,97	22,58	10,93
Kepulauan Riau	2 644	29,15	24,14	10,22	36,50
DKI Jakarta	3 610	16,51	17,11	21,16	45,22
Jawa Barat	1 668	42,02	30,04	14,28	13,66
Jawa Tengah	1 235	51,95	31,34	10,52	6,20
DI Yogyakarta	1 200	53,79	32,68	7,21	6,32
Jawa Timur	1 372	53,43	28,12	10,32	8,13
Banten	2 230	29,38	29,91	18,96	21,75
Bali	1 497	46,20	25,14	16,42	12,24
Nusa Tenggara Barat	1 190	57,38	25,53	9,21	7,89
Nusa Tenggara Timur	984	69,16	18,33	5,68	6,83
Kalimantan Barat	1 293	52,89	24,69	14,04	8,38
Kalimantan Tengah	1 663	38,47	31,13	16,87	13,54
Kalimantan Selatan	1 693	44,94	29,23	12,67	13,16
Kalimantan Timur	2 484	28,96	25,43	19,50	26,11
Kalimantan Utara	2 098	23,46	33,88	25,97	16,70
Sulawesi Utara	2 149	28,47	32,85	18,35	20,33
Sulawesi Tengah	1 558	51,52	25,79	10,27	12,41
Sulawesi Selatan	1 691	46,62	26,75	12,47	14,16
Sulawesi Tenggara	1 240	59,49	21,11	8,73	10,67
Gorontalo	1 515	47,13	28,82	13,87	10,17
Sulawesi Barat	1 243	65,88	15,45	6,08	12,58
Maluku	1 673	49,50	19,94	13,16	17,40
Maluku Utara	1 526	43,53	33,16	9,07	14,24
Papua Barat	2 258	20,01	29,76	25,08	25,15
Papua	2 924	28,69	17,70	15,82	37,80
Indonesia	1 560	46,22	29,16	12,70	11,92

Sumber: BPS, Sakernas Agustus 2019

Tabel 5.9 Persentase Penduduk Lanjut Usia yang Bekerja sebagai Buruh dan Memperoleh Upah Rendah Menurut Provinsi, Tipe Daerah, dan Jenis Kelamin, 2019

Provinsi	Tipe Daerah		Jenis Kelamin		Total
	Perkotaan	Perdesaan	Laki-laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	53,72	63,59	52,41	80,32	60,91
Sumatera Utara	49,47	71,22	48,27	75,96	59,43
Sumatera Barat	53,33	68,94	54,16	75,58	62,28
Riau	42,46	53,02	44,46	63,92	49,74
Jambi	39,11	61,19	48,24	66,60	54,15
Sumatera Selatan	54,02	69,33	56,86	76,46	63,53
Bengkulu	57,27	68,39	57,44	81,39	65,38
Lampung	62,27	73,21	66,11	76,63	69,66
Kepulauan Bangka Belitung	45,72	55,36	40,71	70,46	50,43
Kepulauan Riau	35,74	63,21	37,21	58,03	41,87
DKI Jakarta	22,21	-	16,16	32,17	22,21
Jawa Barat	54,70	71,39	53,00	71,34	58,93
Jawa Tengah	66,14	70,24	59,83	80,15	68,08
DI Yogyakarta	65,16	79,46	59,21	81,87	69,54
Jawa Timur	64,23	74,62	60,25	81,41	69,15
Banten	35,52	66,83	40,53	58,65	45,63
Bali	51,78	69,85	46,58	73,15	59,29
Nusa Tenggara Barat	69,49	73,46	63,86	80,42	71,48
Nusa Tenggara Timur	68,57	83,84	70,81	90,30	79,93
Kalimantan Barat	54,84	74,41	57,91	82,41	67,26
Kalimantan Tengah	49,54	59,78	47,17	73,86	56,40
Kalimantan Selatan	47,84	64,84	45,25	76,13	57,50
Kalimantan Timur	42,58	40,96	34,71	61,33	42,07
Kalimantan Utara	39,21	54,17	38,96	65,50	45,06
Sulawesi Utara	38,26	52,47	39,33	58,63	45,58
Sulawesi Tengah	56,03	69,28	59,18	78,25	65,53
Sulawesi Selatan	53,96	64,48	51,04	78,41	60,30
Sulawesi Tenggara	57,06	76,15	66,71	75,94	70,74
Gorontalo	56,43	69,38	54,26	76,07	63,34
Sulawesi Barat	81,58	75,04	68,37	89,95	76,67
Maluku	43,26	71,20	51,81	72,57	59,24
Maluku Utara	48,94	66,09	58,65	68,17	61,84
Papua Barat	25,01	40,05	26,03	47,27	34,42
Papua	29,30	49,14	34,73	50,09	40,50
Indonesia	55,45	69,99	53,82	75,44	61,95

Sumber: BPS, Sakernas Agustus 2019

Tabel 6.1.1 Persentase Penduduk Lansia Menurut Provinsi dan Status Kepemilikan Tempat Tinggal, 2019

Provinsi	Status Kepemilikan Tempat Tinggal					Perkotaan
	Milik Sendiri	Kontrak/ Sewa	Bebas Sewa	Dinas	Lainnya	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aceh	90,58	2,84	5,36	0,92	0,30	100,00
Sumatera Utara	83,73	8,01	7,84	0,34	0,08	100,00
Sumatera Barat	85,82	6,15	7,96	0,05	0,02	100,00
Riau	86,59	6,90	5,72	0,79	0,00	100,00
Jambi	89,38	5,51	4,99	0,11	0,00	100,00
Sumatera Selatan	83,38	7,44	8,72	0,38	0,08	100,00
Bengkulu	88,76	6,75	4,49	0,00	0,00	100,00
Lampung	94,22	2,67	3,11	0,00	0,00	100,00
Kep. Bangka Belitung	91,98	1,89	5,94	0,02	0,17	100,00
Kepulauan Riau	85,86	9,56	3,95	0,58	0,05	100,00
DKI Jakarta	81,84	9,75	7,09	1,01	0,32	100,00
Jawa Barat	90,28	3,22	6,03	0,21	0,26	100,00
Jawa Tengah	92,37	1,54	5,82	0,11	0,16	100,00
DI Yogyakarta	92,10	2,23	5,67	0,00	0,00	100,00
Jawa Timur	92,64	2,57	4,55	0,18	0,05	100,00
Banten	91,18	4,82	3,34	0,35	0,32	100,00
Bali	92,26	3,85	3,88	0,00	0,00	100,00
Nusa Tenggara Barat	92,67	0,61	6,59	0,13	0,00	100,00
Nusa Tenggara Timur	96,35	0,43	2,79	0,39	0,04	100,00
Kalimantan Barat	90,39	2,73	6,51	0,36	0,00	100,00
Kalimantan Tengah	86,88	7,43	5,02	0,58	0,10	100,00
Kalimantan Selatan	87,09	5,20	7,18	0,33	0,21	100,00
Kalimantan Timur	86,24	6,63	6,12	0,81	0,20	100,00
Kalimantan Utara	93,65	2,81	3,02	0,52	0,00	100,00
Sulawesi Utara	84,67	2,78	11,53	0,91	0,11	100,00
Sulawesi Tengah	88,98	3,85	6,94	0,23	0,00	100,00
Sulawesi Selatan	90,52	3,08	5,89	0,32	0,19	100,00
Sulawesi Tenggara	90,44	2,99	6,57	0,00	0,00	100,00
Gorontalo	91,93	1,35	6,72	0,00	0,00	100,00
Sulawesi Barat	95,39	0,00	4,61	0,00	0,00	100,00
Maluku	87,90	1,39	8,29	2,16	0,26	100,00
Maluku Utara	92,10	0,53	7,03	0,34	0,00	100,00
Papua Barat	87,85	4,27	6,86	1,02	0,00	100,00
Papua	83,36	5,98	5,16	5,50	0,00	100,00
Indonesia	90,10	3,69	5,76	0,29	0,15	100,00

Sumber: BPS, Susenas Maret 2019

Tabel 6.1.2 Persentase Penduduk Lansia Menurut Provinsi dan Status Kepemilikan Tempat Tinggal, 2019

Provinsi	Status Kepemilikan Tempat Tinggal					Total
	Milik Sendiri	Kontrak/ Sewa	Bebas Sewa	Dinas	Lainnya	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aceh	96,01	0,37	3,24	0,28	0,09	100,00
Sumatera Utara	91,63	1,26	6,33	0,56	0,21	100,00
Sumatera Barat	93,11	0,50	6,00	0,24	0,15	100,00
Riau	95,89	1,29	2,40	0,42	0,00	100,00
Jambi	95,44	0,66	3,35	0,55	0,00	100,00
Sumatera Selatan	96,20	0,28	3,28	0,24	0,00	100,00
Bengkulu	96,57	0,11	3,13	0,12	0,07	100,00
Lampung	95,91	0,97	2,95	0,07	0,10	100,00
Kep. Bangka Belitung	97,73	0,40	1,87	0,00	0,00	100,00
Kepulauan Riau	97,05	1,28	1,14	0,27	0,25	100,00
DKI Jakarta	-	-	-	-	-	-
Jawa Barat	95,16	0,50	3,92	0,02	0,40	100,00
Jawa Tengah	96,35	0,08	3,40	0,00	0,17	100,00
DI Yogyakarta	98,15	0,00	1,85	0,00	0,00	100,00
Jawa Timur	96,81	0,21	2,63	0,33	0,03	100,00
Banten	95,18	0,49	4,11	0,00	0,22	100,00
Bali	97,14	0,19	2,67	0,00	0,00	100,00
Nusa Tenggara Barat	95,89	0,03	4,09	0,00	0,00	100,00
Nusa Tenggara Timur	96,66	0,07	2,92	0,08	0,28	100,00
Kalimantan Barat	97,96	0,27	1,73	0,04	0,00	100,00
Kalimantan Tengah	94,41	0,19	4,58	0,64	0,19	100,00
Kalimantan Selatan	95,43	0,45	3,84	0,27	0,00	100,00
Kalimantan Timur	91,09	1,14	7,51	0,26	0,00	100,00
Kalimantan Utara	91,15	2,75	6,09	0,01	0,00	100,00
Sulawesi Utara	92,68	0,35	6,63	0,26	0,08	100,00
Sulawesi Tengah	97,07	0,10	2,67	0,16	0,00	100,00
Sulawesi Selatan	94,95	0,23	3,86	0,00	0,97	100,00
Sulawesi Tenggara	97,58	0,04	2,35	0,00	0,03	100,00
Gorontalo	93,96	0,72	5,32	0,00	0,00	100,00
Sulawesi Barat	97,95	0,10	1,17	0,74	0,04	100,00
Maluku	96,26	0,28	3,34	0,08	0,04	100,00
Maluku Utara	95,78	0,05	4,17	0,00	0,00	100,00
Papua Barat	95,41	0,85	2,85	0,89	0,00	100,00
Papua	96,25	0,84	2,21	0,66	0,04	100,00
Indonesia	95,87	0,36	3,45	0,17	0,16	100,00

Sumber: BPS, Susenas Maret 2019

Tabel 6.1.3 Persentase Penduduk Lansia Menurut Provinsi dan Status Kepemilikan Tempat Tinggal, 2019

						Laki-laki
Provinsi	Status Kepemilikan Tempat Tinggal					Total
	Milik Sendiri	Kontrak/ Sewa	Bebas Sewa	Dinas	Lainnya	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aceh	94,76	1,19	3,13	0,70	0,22	100,00
Sumatera Utara	87,82	5,16	6,43	0,58	0,01	100,00
Sumatera Barat	89,42	3,42	6,85	0,20	0,11	100,00
Riau	92,57	3,17	3,55	0,71	0,00	100,00
Jambi	93,88	2,37	3,40	0,34	0,00	100,00
Sumatera Selatan	93,49	2,14	4,03	0,35	0,00	100,00
Bengkulu	95,98	1,57	2,30	0,15	0,00	100,00
Lampung	96,72	1,37	1,81	0,10	0,00	100,00
Kep. Bangka Belitung	94,61	1,74	3,65	0,00	0,00	100,00
Kepulauan Riau	89,00	7,58	3,23	0,10	0,09	100,00
DKI Jakarta	81,12	10,45	6,87	1,22	0,33	100,00
Jawa Barat	92,44	2,52	4,53	0,24	0,26	100,00
Jawa Tengah	95,32	0,71	3,76	0,07	0,14	100,00
DI Yogyakarta	95,27	1,62	3,11	0,00	0,00	100,00
Jawa Timur	95,01	1,59	3,06	0,28	0,06	100,00
Banten	92,10	3,72	3,51	0,35	0,31	100,00
Bali	94,37	2,39	3,24	0,00	0,00	100,00
Nusa Tenggara Barat	96,35	0,31	3,21	0,14	0,00	100,00
Nusa Tenggara Timur	97,43	0,22	1,93	0,11	0,31	100,00
Kalimantan Barat	94,99	1,25	3,53	0,23	0,00	100,00
Kalimantan Tengah	92,07	3,78	3,34	0,74	0,07	100,00
Kalimantan Selatan	92,01	2,64	4,88	0,27	0,19	100,00
Kalimantan Timur	88,78	4,30	5,99	0,81	0,12	100,00
Kalimantan Utara	92,79	2,53	4,12	0,56	0,00	100,00
Sulawesi Utara	89,50	1,12	8,25	1,12	0,02	100,00
Sulawesi Tengah	95,43	1,18	3,16	0,23	0,00	100,00
Sulawesi Selatan	93,95	1,46	4,05	0,02	0,53	100,00
Sulawesi Tenggara	95,91	0,32	3,78	0,00	0,00	100,00
Gorontalo	93,76	1,14	5,10	0,00	0,00	100,00
Sulawesi Barat	96,65	0,08	2,53	0,74	0,00	100,00
Maluku	92,61	0,78	5,72	0,63	0,26	100,00
Maluku Utara	95,19	0,20	4,61	0,00	0,00	100,00
Papua Barat	93,06	2,62	3,64	0,68	0,00	100,00
Papua	92,81	2,46	3,15	1,59	0,00	100,00
Indonesia	93,39	2,20	3,98	0,29	0,14	100,00

Sumber: BPS, Susenas Maret 2019

Tabel 6.1.4 Persentase Penduduk Lansia Menurut Provinsi dan Status Kepemilikan Tempat Tinggal, 2019

						Perempuan
Provinsi	Status Kepemilikan Tempat Tinggal					Total
	Milik Sendiri	Kontrak/ Sewa	Bebas Sewa	Dinas	Lainnya	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aceh	94,04	1,06	4,53	0,28	0,10	100,00
Sumatera Utara	87,12	4,57	7,73	0,33	0,25	100,00
Sumatera Barat	90,32	2,61	6,87	0,12	0,07	100,00
Riau	91,90	3,83	3,87	0,41	0,00	100,00
Jambi	93,05	2,11	4,38	0,47	0,00	100,00
Sumatera Selatan	89,68	3,59	6,43	0,24	0,06	100,00
Bengkulu	92,66	2,46	4,76	0,02	0,10	100,00
Lampung	94,10	1,55	4,21	0,00	0,14	100,00
Kep. Bangka Belitung	94,32	0,76	4,71	0,02	0,19	100,00
Kepulauan Riau	86,75	8,56	3,66	0,95	0,08	100,00
DKI Jakarta	82,50	9,09	7,30	0,80	0,31	100,00
Jawa Barat	90,99	2,35	6,27	0,07	0,33	100,00
Jawa Tengah	93,60	0,87	5,31	0,04	0,18	100,00
DI Yogyakarta	93,41	1,28	5,31	0,00	0,00	100,00
Jawa Timur	94,48	1,22	4,04	0,23	0,02	100,00
Banten	93,03	2,91	3,70	0,12	0,25	100,00
Bali	93,94	2,49	3,57	0,00	0,00	100,00
Nusa Tenggara Barat	92,62	0,30	7,09	0,00	0,00	100,00
Nusa Tenggara Timur	95,85	0,08	3,75	0,17	0,16	100,00
Kalimantan Barat	95,34	1,11	3,46	0,08	0,00	100,00
Kalimantan Tengah	90,85	2,15	6,27	0,48	0,24	100,00
Kalimantan Selatan	91,38	2,54	5,76	0,32	0,00	100,00
Kalimantan Timur	86,92	5,22	7,32	0,39	0,14	100,00
Kalimantan Utara	92,38	3,09	4,53	0,00	0,00	100,00
Sulawesi Utara	87,93	1,97	9,84	0,10	0,16	100,00
Sulawesi Tengah	94,28	1,09	4,52	0,12	0,00	100,00
Sulawesi Selatan	92,69	1,23	5,10	0,20	0,78	100,00
Sulawesi Tenggara	94,44	1,70	3,82	0,00	0,04	100,00
Gorontalo	92,53	0,86	6,61	0,00	0,00	100,00
Sulawesi Barat	97,86	0,07	1,64	0,38	0,06	100,00
Maluku	92,91	0,72	5,12	1,24	0,01	100,00
Maluku Utara	94,38	0,16	5,28	0,18	0,00	100,00
Papua Barat	91,38	1,85	5,52	1,25	0,00	100,00
Papua	88,32	3,67	3,82	4,13	0,06	100,00
Indonesia	92,31	2,04	5,30	0,19	0,17	100,00

Sumber: BPS, Susenas Maret 2019

Tabel 6.1.5 Persentase Penduduk Lansia Menurut Provinsi dan Status Kepemilikan Tempat Tinggal, 2019

Perkotaan + Perdesaan, Laki-laki + Perempuan

Provinsi	Status Kepemilikan Tempat Tinggal					Total
	Milik Sendiri	Kontrak/ Sewa	Bebas Sewa	Dinas	Lainnya	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aceh	94,38	1,06	3,88	0,48	0,15	100,00
Sumatera Utara	87,44	4,57	7,13	0,44	0,14	100,00
Sumatera Barat	89,91	2,61	6,86	0,16	0,09	100,00
Riau	92,24	3,83	3,71	0,56	0,00	100,00
Jambi	93,47	2,11	3,89	0,40	0,00	100,00
Sumatera Selatan	91,54	3,59	5,26	0,29	0,03	100,00
Bengkulu	94,33	2,46	3,52	0,08	0,05	100,00
Lampung	95,43	1,55	2,99	0,05	0,07	100,00
Kep. Bangka Belitung	94,46	0,76	4,19	0,01	0,09	100,00
Kepulauan Riau	87,87	8,56	3,45	0,52	0,09	100,00
DKI Jakarta	81,84	9,09	7,09	1,01	0,32	100,00
Jawa Barat	91,70	2,35	5,42	0,15	0,30	100,00
Jawa Tengah	94,40	0,87	4,58	0,05	0,16	100,00
DI Yogyakarta	94,26	1,28	4,31	0,00	0,00	100,00
Jawa Timur	94,73	1,22	3,58	0,26	0,04	100,00
Banten	92,57	2,91	3,61	0,23	0,28	100,00
Bali	94,14	2,49	3,42	0,00	0,00	100,00
Nusa Tenggara Barat	94,36	0,30	5,27	0,06	0,00	100,00
Nusa Tenggara Timur	96,59	0,08	2,89	0,14	0,23	100,00
Kalimantan Barat	95,17	1,11	3,50	0,15	0,00	100,00
Kalimantan Tengah	1,12	1,12	4,75	0,61	0,15	100,00
Kalimantan Selatan	4,84	4,84	5,34	0,30	0,09	100,00
Kalimantan Timur	2,98	2,98	6,60	0,62	0,13	100,00
Kalimantan Utara	3,50	3,50	4,31	0,30	0,00	100,00
Sulawesi Utara	2,24	2,24	9,08	0,59	0,09	100,00
Sulawesi Tengah	2,88	2,88	3,84	0,18	0,00	100,00
Sulawesi Selatan	2,01	2,01	4,64	0,12	0,67	100,00
Sulawesi Tenggara	1,46	1,46	3,80	0,00	0,02	100,00
Gorontalo	1,25	1,25	5,91	0,00	0,00	100,00
Sulawesi Barat	8,07	8,07	2,06	0,55	0,03	100,00
Maluku	9,75	9,75	5,41	0,95	0,13	100,00
Maluku Utara	2,43	2,43	4,94	0,09	0,00	100,00
Papua Barat	0,79	0,79	4,50	0,94	0,00	100,00
Papua	1,43	1,43	3,43	2,66	0,02	100,00
Indonesia	92,82	2,12	4,67	0,23	0,16	100,00

Sumber: BPS, Susenas Maret 2019

Tabel 6.2.1 Persentase Penduduk Lansia Menurut Provinsi dan Status Kelayakan Tempat Tinggal, 2019

Provinsi	Status Kelayakan Rumah Tempat Tinggal			Perkotaan
	Tidak Layak Huni	Hampir Tidak Layak Huni	Rumah Layak Huni	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Aceh	1,07	2,96	95,97	100,00
Sumatera Utara	0,62	2,72	96,66	100,00
Sumatera Barat	0,22	4,16	95,62	100,00
Riau	0,05	1,92	98,03	100,00
Jambi	0,00	0,59	99,41	100,00
Sumatera Selatan	0,77	2,61	96,62	100,00
Bengkulu	0,26	1,56	98,18	100,00
Lampung	1,02	2,47	96,51	100,00
Kepulauan Bangka Belitung	0,00	2,83	97,17	100,00
Kepulauan Riau	0,58	1,11	98,31	100,00
DKI Jakarta	0,28	4,67	95,05	100,00
Jawa Barat	1,99	7,25	90,77	100,00
Jawa Tengah	1,05	5,55	93,40	100,00
DI Yogyakarta	1,29	5,58	93,13	100,00
Jawa Timur	1,90	5,47	92,63	100,00
Banten	1,03	5,05	93,93	100,00
Bali	0,27	2,49	97,24	100,00
Nusa Tenggara Barat	3,36	9,16	87,48	100,00
Nusa Tenggara Timur	3,60	10,61	85,78	100,00
Kalimantan Barat	0,00	0,44	99,56	100,00
Kalimantan Tengah	0,10	0,78	99,13	100,00
Kalimantan Selatan	0,07	2,46	97,47	100,00
Kalimantan Timur	0,00	0,66	99,34	100,00
Kalimantan Utara	0,00	0,12	99,88	100,00
Sulawesi Utara	0,59	4,55	94,86	100,00
Sulawesi Tengah	0,61	2,19	97,21	100,00
Sulawesi Selatan	1,38	4,93	93,69	100,00
Sulawesi Tenggara	0,16	2,28	97,56	100,00
Gorontalo	0,52	6,90	92,59	100,00
Sulawesi Barat	2,01	8,52	89,47	100,00
Maluku	1,44	5,05	93,52	100,00
Maluku Utara	0,07	2,99	96,94	100,00
Papua Barat	0,00	2,82	97,18	100,00
Papua	0,28	2,22	97,50	100,00
Indonesia	1,31	5,24	93,45	100,00

Sumber: BPS, Susenas Maret 2019

Tabel 6.2.2 Persentase Penduduk Lansia Menurut Provinsi dan Status Kelayakan Tempat Tinggal, 2019

Provinsi	Status Kelayakan Rumah Tempat Tinggal			Perdesaan
	Tidak Layak Huni	Hampir Tidak Layak Huni	Rumah Layak Huni	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Aceh	3,27	13,58	83,15	100,00
Sumatera Utara	3,16	6,49	90,35	100,00
Sumatera Barat	1,06	7,38	91,56	100,00
Riau	0,99	6,70	92,31	100,00
Jambi	0,10	5,70	94,20	100,00
Sumatera Selatan	2,27	9,94	87,79	100,00
Bengkulu	2,10	8,28	89,62	100,00
Lampung	1,84	5,26	92,90	100,00
Kepulauan Bangka Belitung	0,73	5,59	93,68	100,00
Kepulauan Riau	0,00	2,26	97,74	100,00
DKI Jakarta	-	-	-	-
Jawa Barat	5,42	18,48	76,10	100,00
Jawa Tengah	2,51	9,75	87,74	100,00
DI Yogyakarta	1,10	4,28	94,62	100,00
Jawa Timur	4,30	12,23	83,47	100,00
Banten	5,25	17,43	77,32	100,00
Bali	0,83	4,44	94,73	100,00
Nusa Tenggara Barat	6,74	18,58	74,68	100,00
Nusa Tenggara Timur	20,17	20,21	59,62	100,00
Kalimantan Barat	1,88	8,95	89,16	100,00
Kalimantan Tengah	0,71	7,87	91,42	100,00
Kalimantan Selatan	1,05	6,06	92,90	100,00
Kalimantan Timur	0,41	3,61	95,99	100,00
Kalimantan Utara	0,00	0,69	99,31	100,00
Sulawesi Utara	1,34	6,23	92,43	100,00
Sulawesi Tengah	3,89	9,94	86,17	100,00
Sulawesi Selatan	0,96	9,09	89,95	100,00
Sulawesi Tenggara	1,58	7,33	91,09	100,00
Gorontalo	4,06	19,70	76,23	100,00
Sulawesi Barat	3,66	13,22	83,12	100,00
Maluku	6,36	11,87	81,77	100,00
Maluku Utara	5,38	13,02	81,60	100,00
Papua Barat	3,39	13,07	83,54	100,00
Papua	21,73	15,83	62,44	100,00
Indonesia	3,72	11,13	85,15	100,00

Sumber: BPS, Susenas Maret 2019

Tabel 6.2.3 Persentase Penduduk Lansia Menurut Provinsi dan Status Kelayakan Tempat Tinggal, 2019

Laki-laki				
Provinsi	Status Kelayakan Rumah Tempat Tinggal			Total
	Tidak Layak Huni	Hampir Tidak Layak Huni	Rumah Layak Huni	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Aceh	2,54	9,95	87,51	100,00
Sumatera Utara	1,81	4,06	94,13	100,00
Sumatera Barat	0,72	5,98	93,30	100,00
Riau	0,37	4,58	95,05	100,00
Jambi	0,00	4,70	95,30	100,00
Sumatera Selatan	1,53	6,37	92,09	100,00
Bengkulu	1,80	5,83	92,38	100,00
Lampung	1,09	4,43	94,48	100,00
Kepulauan Bangka Belitung	0,29	4,23	95,48	100,00
Kepulauan Riau	0,95	1,78	97,27	100,00
DKI Jakarta	0,35	4,78	94,87	100,00
Jawa Barat	2,89	9,20	87,90	100,00
Jawa Tengah	1,40	6,91	91,68	100,00
DI Yogyakarta	1,07	4,57	94,36	100,00
Jawa Timur	2,61	8,29	89,10	100,00
Banten	2,13	8,42	89,45	100,00
Bali	0,35	3,26	96,40	100,00
Nusa Tenggara Barat	4,25	12,20	83,55	100,00
Nusa Tenggara Timur	16,39	18,63	64,99	100,00
Kalimantan Barat	1,10	6,72	92,18	100,00
Kalimantan Tengah	0,85	5,55	93,60	100,00
Kalimantan Selatan	0,62	3,57	95,81	100,00
Kalimantan Timur	0,04	1,87	98,09	100,00
Kalimantan Utara	0,00	0,66	99,34	100,00
Sulawesi Utara	0,87	5,52	93,61	100,00
Sulawesi Tengah	3,23	7,09	89,68	100,00
Sulawesi Selatan	1,00	7,12	91,88	100,00
Sulawesi Tenggara	0,94	5,36	93,70	100,00
Gorontalo	2,04	13,49	84,46	100,00
Sulawesi Barat	3,68	11,77	84,56	100,00
Maluku	4,52	9,40	86,08	100,00
Maluku Utara	4,77	10,89	84,34	100,00
Papua Barat	1,96	8,12	89,92	100,00
Papua	15,12	10,65	74,23	100,00
Indonesia	2,22	7,41	90,37	100,00

Sumber: BPS, Susenas Maret 2019

Tabel 6.2.4 Persentase Penduduk Lansia Menurut Provinsi dan Status Kelayakan Tempat Tinggal, 2019

Provinsi	Status Kelayakan Rumah Tempat Tinggal			Perempuan
	Tidak Layak Huni	Hampir Tidak Layak Huni	Rumah Layak Huni	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Aceh	2,67	10,74	86,59	100,00
Sumatera Utara	1,82	4,86	93,32	100,00
Sumatera Barat	0,66	5,96	93,38	100,00
Riau	0,88	5,07	94,05	100,00
Jambi	0,14	3,35	96,51	100,00
Sumatera Selatan	1,91	8,13	89,96	100,00
Bengkulu	1,34	6,90	91,76	100,00
Lampung	2,13	4,50	93,37	100,00
Kepulauan Bangka Belitung	0,34	3,81	95,85	100,00
Kepulauan Riau	0,00	0,85	99,15	100,00
DKI Jakarta	0,22	4,56	95,22	100,00
Jawa Barat	3,07	11,76	85,17	100,00
Jawa Tengah	2,15	8,38	89,47	100,00
DI Yogyakarta	1,36	5,57	93,07	100,00
Jawa Timur	3,53	9,35	87,11	100,00
Banten	2,86	10,27	86,87	100,00
Bali	0,61	3,23	96,16	100,00
Nusa Tenggara Barat	5,93	15,81	78,26	100,00
Nusa Tenggara Timur	17,01	17,83	65,17	100,00
Kalimantan Barat	1,28	4,91	93,81	100,00
Kalimantan Tengah	0,07	4,64	95,29	100,00
Kalimantan Selatan	0,60	5,23	94,17	100,00
Kalimantan Timur	0,27	1,46	98,27	100,00
Kalimantan Utara	0,00	0,00	100,00	100,00
Sulawesi Utara	1,05	5,27	93,69	100,00
Sulawesi Tengah	2,75	8,52	88,72	100,00
Sulawesi Selatan	1,22	7,77	91,00	100,00
Sulawesi Tenggara	1,23	5,82	92,95	100,00
Gorontalo	3,03	15,02	81,95	100,00
Sulawesi Barat	2,84	12,24	84,92	100,00
Maluku	4,10	8,66	87,24	100,00
Maluku Utara	3,12	9,74	87,14	100,00
Papua Barat	2,03	9,68	88,29	100,00
Papua	9,74	9,58	80,68	100,00
Indonesia	2,66	8,58	88,76	100,00

Sumber: BPS, Susenas Maret 2019

Tabel 6.2.5 Persentase Penduduk Lansia Menurut Provinsi dan Status Kelayakan Tempat Tinggal, 2019

Perkotaan + Perdesaan, Laki-laki + Perempuan

Provinsi	Status Kelayakan Rumah Tempat Tinggal			Total
	Tidak Layak Huni	Hampir Tidak Layak Huni	Rumah Layak Huni	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Aceh	2,61	10,37	87,02	100,00
Sumatera Utara	1,82	4,49	93,69	100,00
Sumatera Barat	0,69	5,97	93,34	100,00
Riau	0,62	4,82	94,56	100,00
Jambi	0,07	4,03	95,90	100,00
Sumatera Selatan	1,72	7,27	91,00	100,00
Bengkulu	1,57	6,36	92,07	100,00
Lampung	1,61	4,46	93,93	100,00
Kepulauan Bangka Belitung	0,31	4,02	95,67	100,00
Kepulauan Riau	0,47	1,32	98,21	100,00
DKI Jakarta	0,28	4,67	95,05	100,00
Jawa Barat	2,98	10,51	86,50	100,00
Jawa Tengah	1,80	7,69	90,51	100,00
DI Yogyakarta	1,23	5,11	93,66	100,00
Jawa Timur	3,10	8,86	88,04	100,00
Banten	2,49	9,35	88,15	100,00
Bali	0,49	3,24	96,27	100,00
Nusa Tenggara Barat	5,14	14,12	80,74	100,00
Nusa Tenggara Timur	16,71	18,20	65,08	100,00
Kalimantan Barat	1,19	5,81	93,00	100,00
Kalimantan Tengah	0,47	5,12	94,41	100,00
Kalimantan Selatan	0,61	4,44	94,96	100,00
Kalimantan Timur	0,14	1,68	98,17	100,00
Kalimantan Utara	0,00	0,35	99,65	100,00
Sulawesi Utara	0,96	5,39	93,65	100,00
Sulawesi Tengah	2,99	7,81	89,20	100,00
Sulawesi Selatan	1,12	7,49	91,39	100,00
Sulawesi Tenggara	1,09	5,60	93,31	100,00
Gorontalo	2,57	14,31	83,12	100,00
Sulawesi Barat	3,23	12,02	84,75	100,00
Maluku	4,30	9,02	86,68	100,00
Maluku Utara	3,96	10,32	85,72	100,00
Papua Barat	1,99	8,84	89,17	100,00
Papua	12,85	10,20	76,95	100,00
Indonesia	2,45	8,02	89,53	100,00

Sumber: BPS, Susenas Maret 2019

Tabel 6.3.1 Persentase Penduduk Lansia Menurut Provinsi dan Status Ekonomi Rumah Tangga, 2019

Provinsi	Status Ekonomi Rumah Tangga			Perkotaan
	40% Ekonomi Terbawah	40% Ekonomi Menengah	20% Ekonomi Teratas	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Aceh	35,76	43,15	21,09	100,00
Sumatera Utara	30,57	40,50	28,93	100,00
Sumatera Barat	37,31	42,98	19,71	100,00
Riau	32,64	40,49	26,87	100,00
Jambi	31,92	38,84	29,24	100,00
Sumatera Selatan	31,36	42,44	26,20	100,00
Bengkulu	43,42	38,80	17,78	100,00
Lampung	40,29	38,60	21,12	100,00
Kepulauan Bangka Belitung	38,77	41,75	19,48	100,00
Kepulauan Riau	41,15	34,14	24,71	100,00
DKI Jakarta	26,43	39,49	34,08	100,00
Jawa Barat	41,18	38,93	19,89	100,00
Jawa Tengah	42,70	37,23	20,07	100,00
DI Yogyakarta	51,03	32,39	16,58	100,00
Jawa Timur	46,33	35,95	17,72	100,00
Banten	41,30	39,03	19,67	100,00
Bali	49,54	36,13	14,32	100,00
Nusa Tenggara Barat	44,71	35,33	19,96	100,00
Nusa Tenggara Timur	33,95	46,00	20,06	100,00
Kalimantan Barat	36,40	40,43	23,18	100,00
Kalimantan Tengah	33,82	43,24	22,94	100,00
Kalimantan Selatan	35,10	44,99	19,91	100,00
Kalimantan Timur	42,02	35,39	22,59	100,00
Kalimantan Utara	29,82	45,55	24,64	100,00
Sulawesi Utara	35,63	39,28	25,08	100,00
Sulawesi Tengah	40,63	39,56	19,82	100,00
Sulawesi Selatan	37,31	40,88	21,82	100,00
Sulawesi Tenggara	39,96	41,68	18,36	100,00
Gorontalo	35,57	41,54	22,89	100,00
Sulawesi Barat	33,29	47,25	19,46	100,00
Maluku	39,25	38,52	22,23	100,00
Maluku Utara	41,47	37,25	21,28	100,00
Papua Barat	34,88	34,19	30,94	100,00
Papua	35,07	39,38	25,55	100,00
Indonesia	42,84	36,98	20,18	100,00

Sumber: BPS, Susenas Maret 2019

Tabel 6.3.2 Persentase Penduduk Lansia Menurut Provinsi dan Status Ekonomi Rumah Tangga, 2019

Provinsi	Status Ekonomi Rumah Tangga			Total
	40% Ekonomi	40% Ekonomi	20% Ekonomi	
	Terbawah	Menengah	Teratas	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Aceh	34,84	40,72	24,44	100,00
Sumatera Utara	31,64	42,25	26,12	100,00
Sumatera Barat	37,08	39,92	23,00	100,00
Riau	41,57	35,88	22,55	100,00
Jambi	39,65	39,15	21,21	100,00
Sumatera Selatan	37,03	40,22	22,75	100,00
Bengkulu	41,37	39,51	19,12	100,00
Lampung	41,05	39,72	19,23	100,00
Kepulauan Bangka Belitung	44,59	37,74	17,67	100,00
Kepulauan Riau	43,59	37,83	18,57	100,00
DKI Jakarta	-	-	-	-
Jawa Barat	43,00	39,37	17,63	100,00
Jawa Tengah	44,75	37,55	17,70	100,00
DI Yogyakarta	45,34	39,45	15,21	100,00
Jawa Timur	47,48	36,71	15,82	100,00
Banten	41,91	43,05	15,04	100,00
Bali	40,61	41,61	17,78	100,00
Nusa Tenggara Barat	43,86	39,98	16,16	100,00
Nusa Tenggara Timur	35,64	39,11	25,25	100,00
Kalimantan Barat	41,92	37,57	20,52	100,00
Kalimantan Tengah	39,69	37,50	22,81	100,00
Kalimantan Selatan	41,19	41,57	17,23	100,00
Kalimantan Timur	39,19	37,31	23,50	100,00
Kalimantan Utara	42,99	39,23	17,78	100,00
Sulawesi Utara	31,94	43,33	24,74	100,00
Sulawesi Tengah	36,98	40,95	22,07	100,00
Sulawesi Selatan	41,43	38,31	20,26	100,00
Sulawesi Tenggara	38,27	42,99	18,74	100,00
Gorontalo	35,46	39,84	24,70	100,00
Sulawesi Barat	36,73	43,19	20,08	100,00
Maluku	33,96	37,74	28,30	100,00
Maluku Utara	36,23	42,66	21,12	100,00
Papua Barat	34,48	48,15	17,37	100,00
Papua	28,07	40,89	31,03	100,00
Indonesia	43,46	38,17	18,37	100,00

Sumber: BPS, Susenas Maret 2019

Tabel 6.3.3 Persentase Penduduk Lansia Menurut Provinsi dan Status Ekonomi Rumah Tangga, 2019

Provinsi	Status Ekonomi Rumah Tangga			Laki-laki
	40% Ekonomi Terbawah	40% Ekonomi Menengah	20% Ekonomi Teratas	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Aceh	32,02	45,10	22,88	100,00
Sumatera Utara	28,80	42,22	28,99	100,00
Sumatera Barat	34,37	43,45	22,18	100,00
Riau	35,67	39,28	25,06	100,00
Jambi	35,46	39,11	25,42	100,00
Sumatera Selatan	33,26	42,89	23,84	100,00
Bengkulu	37,87	45,20	16,92	100,00
Lampung	41,09	38,50	20,41	100,00
Kepulauan Bangka Belitung	41,24	39,73	19,02	100,00
Kepulauan Riau	42,33	36,07	21,60	100,00
DKI Jakarta	26,30	40,41	33,29	100,00
Jawa Barat	40,29	40,70	19,02	100,00
Jawa Tengah	42,93	38,38	18,70	100,00
DI Yogyakarta	48,86	37,38	13,76	100,00
Jawa Timur	45,82	36,40	17,77	100,00
Banten	42,25	38,42	19,33	100,00
Bali	46,96	37,82	15,22	100,00
Nusa Tenggara Barat	42,86	39,04	18,11	100,00
Nusa Tenggara Timur	34,41	41,96	23,63	100,00
Kalimantan Barat	37,32	41,65	21,03	100,00
Kalimantan Tengah	36,00	39,99	24,01	100,00
Kalimantan Selatan	38,49	41,15	20,36	100,00
Kalimantan Timur	40,99	37,18	21,83	100,00
Kalimantan Utara	35,27	42,57	22,16	100,00
Sulawesi Utara	34,28	42,09	23,63	100,00
Sulawesi Tengah	36,64	41,53	21,83	100,00
Sulawesi Selatan	38,29	39,72	21,99	100,00
Sulawesi Tenggara	37,78	43,24	18,97	100,00
Gorontalo	34,66	40,72	24,62	100,00
Sulawesi Barat	35,16	43,35	21,49	100,00
Maluku	34,28	45,12	20,59	100,00
Maluku Utara	39,26	41,89	18,85	100,00
Papua Barat	35,18	41,40	23,42	100,00
Papua	29,95	40,91	29,14	100,00
Indonesia	41,97	38,36	19,67	100,00

Sumber: BPS, Susenas Maret 2019

Tabel 6.3.4 Persentase Penduduk Lansia Menurut Provinsi dan Status Ekonomi Rumah Tangga, 2019

Provinsi	Status Ekonomi Rumah Tangga			Total
	40% Ekonomi	40% Ekonomi	20% Ekonomi	
	Terbawah	Menengah	Teratas	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Aceh	35,91	43,28	20,81	100,00
Sumatera Utara	33,74	40,65	25,61	100,00
Sumatera Barat	39,95	39,67	20,38	100,00
Riau	40,58	35,74	23,68	100,00
Jambi	41,72	37,38	20,90	100,00
Sumatera Selatan	38,02	38,03	23,96	100,00
Bengkulu	45,74	38,78	15,48	100,00
Lampung	42,76	37,71	19,53	100,00
Kepulauan Bangka Belitung	41,91	40,44	17,65	100,00
Kepulauan Riau	43,83	34,89	21,28	100,00
DKI Jakarta	26,55	38,65	34,80	100,00
Jawa Barat	45,08	36,49	18,43	100,00
Jawa Tengah	45,60	36,19	18,20	100,00
DI Yogyakarta	51,65	34,58	13,77	100,00
Jawa Timur	48,56	35,60	15,84	100,00
Banten	42,71	40,10	17,19	100,00
Bali	49,54	38,10	12,36	100,00
Nusa Tenggara Barat	45,54	38,31	16,15	100,00
Nusa Tenggara Timur	37,86	39,65	22,50	100,00
Kalimantan Barat	41,87	37,14	20,99	100,00
Kalimantan Tengah	38,11	37,86	24,03	100,00
Kalimantan Selatan	41,31	39,31	19,38	100,00
Kalimantan Timur	40,82	40,39	18,80	100,00
Kalimantan Utara	36,10	41,17	22,73	100,00
Sulawesi Utara	34,93	42,82	22,25	100,00
Sulawesi Tengah	36,33	45,03	18,64	100,00
Sulawesi Selatan	43,56	36,76	19,68	100,00
Sulawesi Tenggara	42,57	40,47	16,97	100,00
Gorontalo	36,31	39,48	24,21	100,00
Sulawesi Barat	34,15	46,40	19,45	100,00
Maluku	36,26	42,33	21,41	100,00
Maluku Utara	38,36	42,18	19,46	100,00
Papua Barat	40,20	37,36	22,44	100,00
Papua	26,92	42,82	30,26	100,00
Indonesia	45,54	36,24	18,22	100,00

Sumber: BPS, Susenas Maret 2019

Tabel 6.3.5 Persentase Penduduk Lansia Menurut Provinsi dan Status Ekonomi Rumah Tangga, 2019

Perkotaan + Perdesaan, Laki-laki + Perempuan

Provinsi	Status Ekonomi Rumah Tangga			Total
	40% Ekonomi Terbawah	40% Ekonomi Menengah	20% Ekonomi Teratas	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Aceh	34,09	44,13	21,78	100,00
Sumatera Utara	31,47	41,37	27,16	100,00
Sumatera Barat	37,40	41,40	21,20	100,00
Riau	38,09	37,53	24,38	100,00
Jambi	38,57	38,25	23,17	100,00
Sumatera Selatan	35,70	40,40	23,90	100,00
Bengkulu	41,77	42,02	16,21	100,00
Lampung	41,92	38,11	19,97	100,00
Kepulauan Bangka Belitung	41,58	40,09	18,33	100,00
Kepulauan Riau	43,08	35,48	21,44	100,00
DKI Jakarta	26,43	39,49	34,08	100,00
Jawa Barat	42,74	38,55	18,71	100,00
Jawa Tengah	44,35	37,22	18,44	100,00
DI Yogyakarta	50,38	35,86	13,77	100,00
Jawa Timur	47,29	35,97	16,74	100,00
Banten	42,48	39,26	18,26	100,00
Bali	48,33	37,97	13,71	100,00
Nusa Tenggara Barat	44,28	38,65	17,07	100,00
Nusa Tenggara Timur	36,23	40,74	23,03	100,00
Kalimantan Barat	39,62	39,37	21,01	100,00
Kalimantan Tengah	37,01	38,97	24,02	100,00
Kalimantan Selatan	39,97	40,18	19,85	100,00
Kalimantan Timur	40,91	38,66	20,43	100,00
Kalimantan Utara	35,65	41,93	22,42	100,00
Sulawesi Utara	34,62	42,47	22,91	100,00
Sulawesi Tengah	36,48	43,29	20,23	100,00
Sulawesi Selatan	41,25	38,05	20,69	100,00
Sulawesi Tenggara	40,31	41,78	17,91	100,00
Gorontalo	35,54	40,06	24,40	100,00
Sulawesi Barat	34,62	44,97	20,40	100,00
Maluku	35,30	43,68	21,02	100,00
Maluku Utara	38,82	42,03	19,15	100,00
Papua Barat	37,48	39,54	22,97	100,00
Papua	28,67	41,72	29,61	100,00
Indonesia	43,84	37,25	18,91	100,00

Sumber: BPS, Susenas Maret 2019

Tabel 6.4 Persentase Penduduk Lansia yang Pernah Menjadi Korban Kejahatan Setahun Terakhir Menurut Provinsi dan Tipe Daerah, 2019

Provinsi	Tipe Daerah		Total
	Perkotaan	Perdesaan	
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	1,13	1,27	1,23
Sumatera Utara	1,66	1,06	1,38
Sumatera Barat	2,35	1,14	1,67
Riau	1,26	0,72	0,93
Jambi	0,60	1,21	1,01
Sumatera Selatan	2,22	1,32	1,65
Bengkulu	3,34	1,37	1,94
Lampung	2,38	1,43	1,70
Kepulauan Bangka Belitung	1,87	0,52	1,29
Kepulauan Riau	0,55	0,27	0,50
DKI Jakarta	0,40	-	0,40
Jawa Barat	1,32	1,09	1,25
Jawa Tengah	1,05	0,64	0,84
DI Yogyakarta	1,46	0,47	1,11
Jawa Timur	1,14	0,66	0,90
Banten	0,92	1,23	1,03
Bali	0,53	0,29	0,44
Nusa Tenggara Barat	1,68	1,12	1,39
Nusa Tenggara Timur	1,07	1,79	1,64
Kalimantan Barat	0,57	0,50	0,53
Kalimantan Tengah	1,79	0,67	1,10
Kalimantan Selatan	1,29	0,52	0,87
Kalimantan Timur	1,59	1,07	1,41
Kalimantan Utara	1,77	2,13	1,93
Sulawesi Utara	1,64	1,56	1,60
Sulawesi Tengah	2,62	1,26	1,63
Sulawesi Selatan	1,69	1,10	1,33
Sulawesi Tenggara	2,11	1,26	1,55
Gorontalo	1,24	1,00	1,10
Sulawesi Barat	0,43	1,24	1,03
Maluku	1,13	0,97	1,03
Maluku Utara	0,37	1,72	1,36
Papua Barat	7,33	1,31	3,79
Papua	2,60	2,76	2,70
Indonesia	1,25	0,93	1,10

Sumber: BPS, Susenas Maret 2019

Tabel 7.1 Persentase Rumah Tangga Lansia yang Membeli/Menerima Bantuan Sosial Beras Sejahtera (Bansos Rastra) dalam Empat Bulan Terakhir Menurut Provinsi dan Tipe Daerah, 2019

Provinsi	Tipe Daerah		Total
	Perkotaan	Perdesaan	
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	29,53	59,79	50,98
Sumatera Utara	5,79	25,51	15,06
Sumatera Barat	7,99	23,47	16,62
Riau	10,96	23,60	18,65
Jambi	7,48	26,36	20,18
Sumatera Selatan	6,22	31,64	22,32
Bengkulu	7,56	32,41	24,91
Lampung	10,55	36,72	29,18
Kepulauan Bangka Belitung	5,12	15,54	9,63
Kepulauan Riau	4,14	19,27	6,91
DKI Jakarta	0,59	-	0,59
Jawa Barat	3,58	7,80	4,80
Jawa Tengah	1,71	1,61	1,66
DI Yogyakarta	0,00	0,00	0,00
Jawa Timur	2,09	9,04	5,57
Banten	4,71	51,24	20,86
Bali	9,61	9,97	9,75
Nusa Tenggara Barat	29,67	51,19	40,90
Nusa Tenggara Timur	11,41	48,56	41,14
Kalimantan Barat	5,45	31,42	21,89
Kalimantan Tengah	5,38	15,50	11,64
Kalimantan Selatan	6,63	19,27	13,56
Kalimantan Timur	3,15	21,69	9,60
Kalimantan Utara	3,16	25,43	12,24
Sulawesi Utara	11,20	30,42	20,81
Sulawesi Tengah	9,76	44,57	35,15
Sulawesi Selatan	4,72	20,86	14,62
Sulawesi Tenggara	9,18	40,94	29,99
Gorontalo	5,30	18,27	12,72
Sulawesi Barat	28,46	49,32	44,05
Maluku	15,65	41,66	30,76
Maluku Utara	6,25	26,51	20,89
Papua Barat	8,29	61,01	38,33
Papua	11,63	46,18	32,12
Indonesia	4,38	18,73	11,14

Sumber: BPS, Susenas Maret 2019

Tabel 7.2 Rata-rata Banyaknya (kg) Beras Sejahtera yang Dibeli/Diterima Rumah Tangga Lansia Menurut Provinsi dan Tipe Daerah, 2019

Provinsi	Tipe Daerah		Total
	Perkotaan	Perdesaan	
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	5,37	5,29	5,31
Sumatera Utara	6,34	6,86	6,76
Sumatera Barat	9,24	8,96	9,02
Riau	8,60	7,30	7,60
Jambi	6,27	7,68	7,51
Sumatera Selatan	8,62	7,39	7,52
Bengkulu	7,77	9,03	8,91
Lampung	6,75	5,81	5,91
Kepulauan Bangka Belitung	8,80	9,84	9,53
Kepulauan Riau	7,11	6,51	6,80
DKI Jakarta	5,26	-	5,26
Jawa Barat	5,93	4,20	5,12
Jawa Tengah	5,29	5,19	5,24
DI Yogyakarta	0,00	0,00	0,00
Jawa Timur	7,49	6,68	6,83
Banten	4,75	4,34	4,40
Bali	9,90	9,74	9,84
Nusa Tenggara Barat	4,18	4,21	4,20
Nusa Tenggara Timur	9,33	9,78	9,76
Kalimantan Barat	10,96	6,03	6,48
Kalimantan Tengah	10,15	6,60	7,22
Kalimantan Selatan	6,25	7,20	6,99
Kalimantan Timur	7,28	8,05	7,88
Kalimantan Utara	11,89	10,08	10,36
Sulawesi Utara	7,87	7,52	7,61
Sulawesi Tengah	8,54	7,78	7,84
Sulawesi Selatan	9,04	8,73	8,77
Sulawesi Tenggara	8,52	8,18	8,21
Gorontalo	9,36	9,74	9,67
Sulawesi Barat	4,50	5,29	5,16
Maluku	9,99	10,44	10,34
Maluku Utara	9,22	8,37	8,44
Papua Barat	11,35	10,45	10,53
Papua	11,18	10,46	10,57
Indonesia	6,77	6,87	6,85

Sumber: BPS, Susenas Maret 2019

Tabel 7.3 Rata-rata Harga per kg (rupiah) Beras Sejahtera yang Dibeli/Diterima Rumah Tangga Lansia Menurut Provinsi dan Tipe Daerah, 2019

Provinsi	Tipe Daerah		Total
	Perkotaan	Perdesaan	
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	424,97	267,31	293,87
Sumatera Utara	1 172,37	731,53	821,45
Sumatera Barat	406,09	213,36	254,32
Riau	81,94	279,14	233,77
Jambi	373,85	444,89	436,27
Sumatera Selatan	686,03	319,99	357,42
Bengkulu	24,66	89,43	83,49
Lampung	334,21	309,63	312,19
Kepulauan Bangka Belitung	0,00	125,95	88,01
Kepulauan Riau	221,57	75,25	147,01
DKI Jakarta	624,03	-	624,03
Jawa Barat	1 170,82	663,03	932,76
Jawa Tengah	1 343,20	1 140,61	1 242,61
DI Yogyakarta			
Jawa Timur	700,21	357,48	421,68
Banten	15,36	53,58	47,94
Bali	77,79	151,58	106,61
Nusa Tenggara Barat	161,44	108,77	127,03
Nusa Tenggara Timur	288,73	81,82	93,29
Kalimantan Barat	368,52	1 116,77	1 048,36
Kalimantan Tengah	977,80	911,73	923,40
Kalimantan Selatan	390,38	212,55	251,77
Kalimantan Timur	535,55	84,47	181,06
Kalimantan Utara	405,11	271,66	292,08
Sulawesi Utara	749,53	171,74	327,32
Sulawesi Tengah	12,74	80,56	75,46
Sulawesi Selatan	110,64	79,86	83,70
Sulawesi Tenggara	12,80	129,97	117,59
Gorontalo	40,91	36,79	37,52
Sulawesi Barat	20,21	241,14	205,09
Maluku	1 186,11	460,22	615,00
Maluku Utara	1 076,10	626,18	663,53
Papua Barat	229,48	529,38	501,49
Papua	1 144,12	808,53	858,00
Indonesia	630,98	331,62	393,95

Sumber: BPS, Susenas Maret 2019

Tabel 7.4 Persentase Rumah Tangga Lansia yang Memiliki Kartu PKH Menurut Provinsi dan Tipe Daerah, 2019

Provinsi	Tipe Daerah		Total
	Perkotaan	Perdesaan	
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	10,75	20,37	17,57
Sumatera Utara	4,79	6,74	5,71
Sumatera Barat	6,87	12,87	10,21
Riau	6,28	8,89	7,87
Jambi	4,25	7,08	6,15
Sumatera Selatan	6,28	8,55	7,72
Bengkulu	7,34	12,26	10,77
Lampung	9,11	16,38	14,29
Kepulauan Bangka Belitung	2,85	5,56	4,03
Kepulauan Riau	5,92	4,13	5,59
DKI Jakarta	0,95	-	0,95
Jawa Barat	8,08	10,91	8,89
Jawa Tengah	11,07	14,91	13,03
DI Yogyakarta	19,38	31,19	23,49
Jawa Timur	9,65	16,20	12,93
Banten	5,22	11,04	7,24
Bali	5,03	5,54	5,23
Nusa Tenggara Barat	13,97	18,24	16,20
Nusa Tenggara Timur	11,79	32,25	28,17
Kalimantan Barat	4,35	10,48	8,23
Kalimantan Tengah	2,35	4,39	3,61
Kalimantan Selatan	4,66	7,91	6,45
Kalimantan Timur	3,08	8,08	4,82
Kalimantan Utara	1,67	7,36	3,99
Sulawesi Utara	8,51	10,73	9,62
Sulawesi Tengah	4,31	14,92	12,04
Sulawesi Selatan	5,19	14,43	10,86
Sulawesi Tenggara	8,65	18,43	15,06
Gorontalo	11,98	19,84	16,47
Sulawesi Barat	7,06	16,26	13,94
Maluku	9,00	21,58	16,31
Maluku Utara	2,87	7,93	6,53
Papua Barat	7,36	5,63	6,37
Papua	3,70	2,95	3,25
Indonesia	8,12	14,12	10,94

Sumber: BPS, Susenas Maret 2019

Tabel 7.5 Persentase Rumah Tangga Lansia yang Masih Tercatat/Menjadi Penerima PKH Menurut Provinsi dan Tipe Daerah, 2019

Provinsi	Tipe Daerah		Total
	Perkotaan	Perdesaan	
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	10,61	20,56	17,66
Sumatera Utara	4,67	6,61	5,58
Sumatera Barat	7,05	12,72	10,21
Riau	6,28	8,60	7,69
Jambi	3,94	7,52	6,35
Sumatera Selatan	5,82	8,24	7,35
Bengkulu	7,34	12,65	11,05
Lampung	8,94	15,85	13,86
Kepulauan Bangka Belitung	2,95	5,14	3,90
Kepulauan Riau	5,92	4,29	5,62
DKI Jakarta	0,95	-	0,95
Jawa Barat	7,96	10,21	8,61
Jawa Tengah	11,04	15,00	13,07
DI Yogyakarta	19,23	32,31	23,79
Jawa Timur	9,44	15,97	12,71
Banten	5,17	11,09	7,22
Bali	4,93	5,13	5,00
Nusa Tenggara Barat	14,38	18,20	16,37
Nusa Tenggara Timur	11,92	31,60	27,67
Kalimantan Barat	4,14	9,93	7,80
Kalimantan Tengah	2,21	5,04	3,96
Kalimantan Selatan	3,84	7,46	5,82
Kalimantan Timur	3,08	8,16	4,85
Kalimantan Utara	1,83	6,49	3,73
Sulawesi Utara	8,52	10,72	9,62
Sulawesi Tengah	4,13	14,39	11,61
Sulawesi Selatan	5,31	13,99	10,64
Sulawesi Tenggara	8,65	18,75	15,26
Gorontalo	11,52	19,84	16,28
Sulawesi Barat	7,12	16,13	13,86
Maluku	9,85	23,71	17,90
Maluku Utara	2,87	7,51	6,22
Papua Barat	6,71	5,83	6,21
Papua	2,65	2,49	2,55
Indonesia	8,01	13,94	10,81

Sumber: BPS, Susenas Maret 2019

Tabel 7.6.1 Persentase Rumah Tangga Lansia Menurut Provinsi dan Kepemilikan Kartu Perlindungan Sosial (KPS)/Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), 2019

Perkotaan				
Provinsi	Kepemilikan KPS/KKS			Total
	Memiliki, Dapat Ditunjukkan	Memiliki, Tidak Dapat Ditunjukkan	Tidak Memiliki	
	(1)	(2)	(3)	
Aceh	7,31	3,47	89,22	100,00
Sumatera Utara	5,47	2,51	92,02	100,00
Sumatera Barat	4,42	6,63	88,95	100,00
Riau	6,03	2,75	91,22	100,00
Jambi	4,62	2,41	92,97	100,00
Sumatera Selatan	4,71	4,19	91,10	100,00
Bengkulu	5,59	2,80	91,61	100,00
Lampung	8,41	3,36	88,23	100,00
Kepulauan Bangka Belitung	5,59	1,77	92,64	100,00
Kepulauan Riau	5,29	2,76	91,95	100,00
DKI Jakarta	4,59	1,66	93,75	100,00
Jawa Barat	8,52	4,40	87,09	100,00
Jawa Tengah	10,05	3,20	86,75	100,00
DI Yogyakarta	12,97	6,02	81,02	100,00
Jawa Timur	8,55	3,17	88,28	100,00
Banten	3,66	3,84	92,50	100,00
Bali	4,60	2,19	93,22	100,00
Nusa Tenggara Barat	14,68	6,92	78,40	100,00
Nusa Tenggara Timur	6,26	1,74	92,01	100,00
Kalimantan Barat	4,36	4,14	91,50	100,00
Kalimantan Tengah	1,75	1,86	96,39	100,00
Kalimantan Selatan	5,20	3,41	91,40	100,00
Kalimantan Timur	3,20	1,36	95,44	100,00
Kalimantan Utara	2,97	5,44	91,59	100,00
Sulawesi Utara	5,95	4,57	89,48	100,00
Sulawesi Tengah	3,63	4,28	92,09	100,00
Sulawesi Selatan	5,89	2,61	91,50	100,00
Sulawesi Tenggara	3,83	2,86	93,31	100,00
Gorontalo	5,20	5,41	89,40	100,00
Sulawesi Barat	3,54	5,52	90,95	100,00
Maluku	5,02	1,88	93,10	100,00
Maluku Utara	3,08	5,51	91,41	100,00
Papua Barat	9,52	4,85	85,63	100,00
Papua	2,17	1,87	95,96	100,00
Indonesia	7,67	3,54	88,79	100,00

Sumber: BPS, Susenas Maret 2019

Tabel 7.6.2 Persentase Rumah Tangga Lansia Menurut Provinsi dan Kepemilikan Kartu Perlindungan Sosial (KPS)/Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), 2019

Provinsi	Kepemilikan KPS/KKS			Total
	Memiliki, Dapat Ditunjukkan	Memiliki, Tidak Dapat Ditunjukkan	Tidak Memiliki	
	(2)	(3)	(4)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Aceh	10,99	5,40	83,61	100,00
Sumatera Utara	7,42	3,00	89,58	100,00
Sumatera Barat	9,72	3,34	86,94	100,00
Riau	4,94	3,77	91,29	100,00
Jambi	7,51	5,05	87,44	100,00
Sumatera Selatan	6,47	3,03	90,50	100,00
Bengkulu	8,13	3,26	88,62	100,00
Lampung	11,20	4,65	84,16	100,00
Kepulauan Bangka Belitung	6,39	3,59	90,02	100,00
Kepulauan Riau	4,80	1,64	93,56	100,00
DKI Jakarta	-	-	-	-
Jawa Barat	10,83	4,90	84,26	100,00
Jawa Tengah	11,92	5,03	83,05	100,00
DI Yogyakarta	27,38	7,25	65,37	100,00
Jawa Timur	12,42	5,00	82,57	100,00
Banten	8,16	4,97	86,87	100,00
Bali	8,16	3,22	88,62	100,00
Nusa Tenggara Barat	13,48	4,47	82,06	100,00
Nusa Tenggara Timur	19,47	6,65	73,88	100,00
Kalimantan Barat	5,99	3,07	90,94	100,00
Kalimantan Tengah	5,07	2,47	92,46	100,00
Kalimantan Selatan	9,39	2,99	87,62	100,00
Kalimantan Timur	6,07	2,00	91,93	100,00
Kalimantan Utara	8,51	1,51	89,98	100,00
Sulawesi Utara	9,62	3,87	86,51	100,00
Sulawesi Tengah	12,15	4,40	83,45	100,00
Sulawesi Selatan	12,43	5,29	82,28	100,00
Sulawesi Tenggara	13,78	4,38	81,84	100,00
Gorontalo	12,61	6,40	81,00	100,00
Sulawesi Barat	13,63	6,44	79,93	100,00
Maluku	12,62	5,05	82,33	100,00
Maluku Utara	8,13	3,01	88,86	100,00
Papua Barat	8,60	5,72	85,68	100,00
Papua	2,96	11,87	85,16	100,00
Indonesia	11,15	4,70	84,15	100,00

Sumber: BPS, Susenas Maret 2019

Tabel 7.6.3 Persentase Rumah Tangga Lansia Menurut Provinsi dan Kepemilikan Kartu Perlindungan Sosial (KPS)/Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), 2019

Perkotaan + Perdesaan

Provinsi	Kepemilikan KPS/KKS			Total
	Memiliki, Dapat Ditunjukkan	Memiliki, Tidak Dapat Ditunjukkan	Tidak Memiliki	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Aceh	9,92	4,84	85,24	100,00
Sumatera Utara	6,38	2,74	90,87	100,00
Sumatera Barat	7,38	4,79	87,83	100,00
Riau	5,37	3,37	91,27	100,00
Jambi	6,56	4,18	89,25	100,00
Sumatera Selatan	5,82	3,46	90,72	100,00
Bengkulu	7,36	3,12	89,52	100,00
Lampung	10,40	4,28	85,33	100,00
Kepulauan Bangka Belitung	5,94	2,56	91,51	100,00
Kepulauan Riau	5,20	2,56	92,24	100,00
DKI Jakarta	4,59	1,66	93,75	100,00
Jawa Barat	9,18	4,54	86,27	100,00
Jawa Tengah	11,00	4,13	84,86	100,00
DI Yogyakarta	17,99	6,45	75,56	100,00
Jawa Timur	10,49	4,09	85,42	100,00
Banten	5,22	4,24	90,54	100,00
Bali	5,96	2,58	91,46	100,00
Nusa Tenggara Barat	14,05	5,64	80,31	100,00
Nusa Tenggara Timur	16,83	5,67	77,50	100,00
Kalimantan Barat	5,39	3,46	91,15	100,00
Kalimantan Tengah	3,80	2,24	93,96	100,00
Kalimantan Selatan	7,50	3,18	89,33	100,00
Kalimantan Timur	4,20	1,58	94,22	100,00
Kalimantan Utara	5,23	3,84	90,94	100,00
Sulawesi Utara	7,78	4,22	88,00	100,00
Sulawesi Tengah	9,84	4,37	85,79	100,00
Sulawesi Selatan	9,91	4,25	85,84	100,00
Sulawesi Tenggara	10,35	3,86	85,80	100,00
Gorontalo	9,43	5,97	84,59	100,00
Sulawesi Barat	11,08	6,21	82,71	100,00
Maluku	9,44	3,72	86,84	100,00
Maluku Utara	6,73	3,71	89,56	100,00
Papua Barat	9,00	5,35	85,66	100,00
Papua	2,64	7,80	89,56	100,00
Indonesia	9,31	4,08	86,61	100,00

Sumber: BPS, Susenas Maret 2019

Tabel 7.7 Persentase Penduduk Lansia yang Memiliki Jaminan Kesehatan Menurut Provinsi, Tipe Daerah, dan Jenis Kelamin, 2019

Provinsi	Tipe Daerah		Jenis Kelamin		Total
	Perkotaan	Perdesaan	Laki-Laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	98,06	97,14	98,05	96,87	97,42
Sumatera Utara	71,90	53,75	64,54	62,39	63,37
Sumatera Barat	77,60	68,10	74,21	70,63	72,27
Riau	73,87	55,01	64,36	60,42	62,42
Jambi	74,62	52,75	59,28	60,51	59,89
Sumatera Selatan	72,16	55,20	61,39	61,35	61,37
Bengkulu	73,46	61,61	66,85	63,12	65,00
Lampung	76,16	50,42	58,57	56,95	57,76
Kepulauan Bangka Belitung	80,60	63,04	71,10	74,93	73,02
Kepulauan Riau	72,89	71,93	74,84	70,60	72,71
DKI Jakarta	92,24	-	92,23	92,24	92,24
Jawa Barat	73,49	56,89	68,75	68,59	68,67
Jawa Tengah	78,18	69,40	73,56	73,81	73,69
DI Yogyakarta	87,63	84,06	86,44	86,28	86,35
Jawa Timur	68,05	55,51	61,81	61,73	61,77
Banten	70,88	50,49	66,62	60,99	63,79
Bali	79,14	71,88	77,58	75,23	76,34
Nusa Tenggara Barat	69,74	55,22	64,85	59,66	62,09
Nusa Tenggara Timur	77,14	70,76	75,41	69,13	72,09
Kalimantan Barat	73,14	49,02	58,71	57,17	57,93
Kalimantan Tengah	70,40	57,79	64,47	60,74	62,68
Kalimantan Selatan	85,77	73,83	79,80	78,65	79,20
Kalimantan Timur	84,50	76,49	82,58	80,71	81,72
Kalimantan Utara	88,42	90,91	89,91	88,94	89,46
Sulawesi Utara	87,73	77,50	83,12	82,14	82,61
Sulawesi Tengah	81,38	63,77	70,58	66,65	68,60
Sulawesi Selatan	83,34	76,29	79,71	78,46	79,01
Sulawesi Tenggara	74,38	71,08	73,26	71,27	72,21
Gorontalo	85,25	82,09	84,96	82,08	83,42
Sulawesi Barat	96,45	83,83	87,20	86,96	87,07
Maluku	76,56	60,98	69,42	65,70	67,49
Maluku Utara	78,69	70,16	73,30	71,58	72,45
Papua Barat	85,30	84,78	86,86	82,80	84,99
Papua	85,80	88,86	87,89	87,18	87,59
Indonesia	75,86	62,79	70,16	69,27	69,69

Sumber: BPS, Susenas Maret 2019

Tabel 7.8 Persentase Penduduk Lansia yang Memiliki Jaminan Kesehatan Menurut Provinsi dan Jenis Jaminan Kesehatan, 2019

Provinsi	Jenis Jaminan Kesehatan				
	Penerima Bantuan Iuran (PBI)	Non PBI	Jamkesda	Asuransi Swasta	Perusahaan/Kantor
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	81,49	13,55	11,54	0,13	0,46
Sumatera Utara	29,98	28,70	8,23	1,12	1,40
Sumatera Barat	35,71	28,49	15,73	0,14	0,59
Riau	29,70	22,92	15,43	0,11	0,92
Jambi	23,87	29,86	6,49	0,42	1,10
Sumatera Selatan	24,60	19,49	20,41	0,97	1,36
Bengkulu	36,75	27,35	1,05	0,00	0,22
Lampung	34,19	15,78	9,08	0,49	0,95
Kepulauan Bangka Belitung	37,69	34,82	0,06	1,02	0,26
Kepulauan Riau	31,90	35,40	3,42	1,02	2,51
DKI Jakarta	49,30	39,47	0,98	3,35	2,01
Jawa Barat	37,05	24,72	8,72	,057	1,78
Jawa Tengah	45,38	20,06	13,28	0,21	0,51
DI Yogyakarta	58,97	25,28	5,54	0,57	1,03
Jawa Timur	35,13	18,27	12,35	0,38	0,60
Banten	35,28	23,17	12,99	1,12	1,61
Bali	41,20	27,13	10,72	1,20	0,63
Nusa Tenggara Barat	47,08	12,20	11,21	0,15	0,33
Nusa Tenggara Timur	50,97	13,53	9,25	0,22	0,00
Kalimantan Barat	27,20	22,93	11,06	0,96	0,64
Kalimantan Tengah	34,44	26,69	2,22	0,37	0,13
Kalimantan Selatan	28,25	28,46	32,60	0,07	0,34
Kalimantan Timur	31,72	46,11	1,97	1,18	2,09
Kalimantan Utara	44,57	39,41	23,05	0,19	1,16
Sulawesi Utara	42,20	38,30	1,55	0,44	0,66
Sulawesi Tengah	40,42	24,46	3,55	0,34	0,13
Sulawesi Selatan	50,96	25,90	2,23	0,31	0,41
Sulawesi Tenggara	44,84	19,98	7,74	0,18	0,06
Gorontalo	66,02	16,75	0,58	0,08	0,14
Sulawesi Barat	48,52	21,32	39,96	0,00	0,11
Maluku	40,03	22,58	5,36	0,00	0,64
Maluku Utara	33,44	18,41	22,40	0,13	0,21
Papua Barat	68,13	11,27	8,08	0,08	0,05
Papua	46,74	13,97	34,50	0,50	0,43
Indonesia	39,64	22,75	10,76	0,56	0,93

Sumber: BPS, Susenas Maret 2019

Tabel 7.9 Persentase Rumah Tangga Lansia yang Memiliki Jaminan Sosial Menurut Provinsi dan Tipe Daerah, 2019

Provinsi	Tipe Daerah		Total
	Perkotaan	Perdesaan	
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	31,18	7,94	14,70
Sumatera Utara	17,91	9,21	13,82
Sumatera Barat	27,11	8,80	16,90
Riau	17,05	5,15	9,81
Jambi	21,42	5,80	10,92
Sumatera Selatan	22,71	4,70	11,31
Bengkulu	25,71	7,01	12,66
Lampung	14,42	3,88	6,91
Kepulauan Bangka Belitung	13,71	5,77	10,27
Kepulauan Riau	18,40	1,85	15,38
DKI Jakarta	15,47	-	15,47
Jawa Barat	15,69	8,30	13,56
Jawa Tengah	17,16	7,32	12,13
DI Yogyakarta	28,47	26,89	27,92
Jawa Timur	14,63	5,01	9,82
Banten	12,59	7,04	10,67
Bali	19,20	9,73	15,58
Nusa Tenggara Barat	14,24	6,08	9,98
Nusa Tenggara Timur	36,51	7,01	12,90
Kalimantan Barat	19,24	6,64	11,27
Kalimantan Tengah	29,91	12,33	19,04
Kalimantan Selatan	29,47	11,06	19,37
Kalimantan Timur	26,37	16,90	23,08
Kalimantan Utara	18,54	7,81	14,16
Sulawesi Utara	18,94	12,34	15,64
Sulawesi Tengah	27,15	8,20	13,33
Sulawesi Selatan	28,90	9,55	17,03
Sulawesi Tenggara	32,70	8,86	17,09
Gorontalo	19,29	10,42	14,21
Sulawesi Barat	23,79	7,11	11,33
Maluku	26,80	11,71	18,03
Maluku Utara	40,10	5,69	15,24
Papua Barat	25,57	12,51	18,13
Papua	39,02	6,73	19,88
Indonesia	17,81	7,40	12,91

Sumber: BPS, Susenas Maret 2019

Tabel 7.10 Persentase Rumah Tangga Lansia yang Memiliki/Menerima Jaminan Sosial Menurut Provinsi dan Jenis Jaminan Sosial, 2019

Provinsi	Jenis Jaminan Sosial				
	Jaminan Pensiun/ Veteran	Jaminan Hari Tua	Asuransi Kecelakaan Kerja	Jaminan Asuransi/ Kematian	Pesango n PHK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	13,46	9,32	8,07	9,08	3,46
Sumatera Utara	11,86	5,76	4,18	5,44	2,07
Sumatera Barat	14,82	10,19	9,15	10,33	2,57
Riau	7,08	4,55	4,61	4,10	1,94
Jambi	9,41	4,34	3,64	3,79	2,23
Sumatera Selatan	9,44	4,50	4,62	4,20	2,29
Bengkulu	11,02	6,60	6,26	6,64	3,53
Lampung	5,55	1,86	1,80	1,17	0,59
Kepulauan Bangka Belitung	6,72	5,16	6,03	4,93	2,36
Kepulauan Riau	10,96	8,52	7,56	5,23	2,24
DKI Jakarta	12,60	5,26	3,44	3,39	1,36
Jawa Barat	10,13	5,22	4,38	4,51	2,16
Jawa Tengah	8,63	4,57	4,58	5,01	1,70
DI Yogyakarta	18,43	12,22	9,83	17,45	1,88
Jawa Timur	7,71	3,70	3,44	3,27	1,64
Banten	8,23	4,20	3,03	2,32	1,74
Bali	12,16	8,07	7,39	6,97	3,71
Nusa Tenggara Barat	8,34	5,88	5,46	5,97	1,98
Nusa Tenggara Timur	11,27	5,77	3,85	5,31	1,61
Kalimantan Barat	8,56	5,04	2,74	4,13	1,69
Kalimantan Tengah	14,94	7,93	5,90	8,01	3,21
Kalimantan Selatan	16,62	10,95	10,13	10,58	4,11
Kalimantan Timur	17,26	13,06	13,84	12,04	7,39
Kalimantan Utara	9,88	8,60	9,94	6,90	2,79
Sulawesi Utara	13,83	6,16	4,67	5,43	2,31
Sulawesi Tengah	11,16	8,19	6,99	6,69	2,03
Sulawesi Selatan	14,75	7,88	4,91	7,43	2,23
Sulawesi Tenggara	15,45	9,25	7,83	8,38	2,49
Gorontalo	12,04	10,04	7,73	8,42	1,69
Sulawesi Barat	10,41	4,32	2,41	4,80	0,76
Maluku	16,78	6,38	5,13	5,55	0,74
Maluku Utara	13,14	8,51	7,05	7,26	3,64
Papua Barat	16,04	6,56	5,65	5,55	1,59
Papua	17,55	7,92	5,26	4,91	1,85
Indonesia	10,10	5,43	4,68	5,07	2,00

Sumber: BPS, Susenas Maret 2019



PENGHITUNGAN *SAMPLING ERROR* (RELATIVE STANDARD ERROR)





Nilai-nilai indikator yang diestimasi dari hasil Susenas MSBP 2018 dipengaruhi oleh dua jenis kesalahan (error), yaitu non sampling error dan sampling error. Non sampling error adalah kesalahan yang terjadi ketika proses pengumpulan maupun pengolahan data. Misalnya kesalahan dalam menginterpretasikan pertanyaan-pertanyaan di kuesioner, maupun kesalahan dalam melakukan input data ke komputer.

Sampling error adalah kesalahan yang terjadi sebagai akibat dari penggunaan teknik sampling tertentu dalam suatu survei. Secara statistik, besarnya sampling error hasil Susenas 2016 ditunjukkan oleh nilai standard error (galat baku) dari suatu ukuran statistik (rata-rata, persentase, atau jumlah). Untuk mengukur presisi suatu indikator digunakan nilai relative standard error (RSE), yaitu perbandingan nilai standard error terhadap estimasi indikatornya, yang dinyatakan dalam persen. Standard error juga digunakan untuk menghitung besaran selang kepercayaan (confidence interval), yaitu interval nilai yang dapat menggambarkan populasi. Dengan tingkat kepercayaan 95 persen, dapat disajikan selang kepercayaan (interval estimation) dengan batas bawah sebesar nilai estimasi dikurangi dua standard error dan batas atas sebesar nilai estimasi ditambah dua standard error. Semakin rendah nilai RSE atau semakin pendek selang kepercayaan menunjukkan nilai indikator yang semakin baik.

Menurut Aryago Mulia dkk (2008), kualitas hasil estimasi suatu survei bisa diamati dari RSE yang dihasilkan dimana keputusan mengenai keakuratan suatu estimasi bisa diamati dari hasil penghitungan RSE tersebut. Kesalahan sampling dari beberapa estimasi harus digunakan secara hati-hati. Untuk estimasi yang berdasarkan jumlah kasus yang kecil, kesalahan relatif adalah sangat besar. Secara umum, besaran SE meningkat seiring dengan meningkatnya besaran estimasi. Sebaliknya, RSE menurun jika ukuran estimasi tersebut meningkat. Estimasi yang sangat kecil dengan demikian akan menghasilkan RSE yang tinggi sehingga nilainya menjadi tidak akurat. Nilai estimasi dengan $RSE \leq 25\%$ dianggap akurat, sedangkan nilai estimasi dengan $RSE > 25\%$ tetapi $\leq 50\%$ perlu hati-hati jika ingin digunakan, dan estimasi dengan $RSE > 50\%$ dianggap sangat tidak akurat dan seharusnya digabungkan dengan estimasi yang lain untuk memberikan estimasi dengan $RSE \leq 25\%$.

Penghitungan tingkat sampling error untuk indikator-indikator yang disajikan dalam publikasi Statistik Penduduk Lanjut Usia 2018 menggunakan software STATA 14.0 for Windows. Dalam publikasi ini penghitungan RSE menggunakan metode Taylor Linearization

untuk mengestimasi nilai total maupun rata-ratanya. Namun tidak semua variabel hasil pendataan dihitung SE dan RSE, hanya beberapa variabel penting saja yang dihitung.

<https://www.bps.go.id>

Tabel A.1 Sampling Error Persentase Penduduk Lansia Menurut Provinsi, 2019

Provinsi	Nilai Estimasi	Standard Error	Relative Standard Error (RSE)	Selang Kepercayaan		Efek Rancangan Sampling	Jumlah Sampel
				Batas Atas	Batas Bawah		
				(5)	(6)	(7)	(8)
Aceh	6,57	0,36	5,49	5,86	7,27	1,67	14 169
Sumatera Utara	7,68	0,26	3,38	7,17	8,19	3,39	34 329
Sumatera Barat	9,16	0,42	4,55	8,34	9,98	2,41	17 948
Riau	5,56	0,28	5,00	5,01	6,10	1,86	11 217
Jambi	7,63	0,49	6,47	6,66	8,59	1,83	6 566
Sumatera Selatan	7,78	0,34	4,41	7,11	8,45	2,34	12 460
Bengkulu	6,46	0,41	6,34	5,66	7,26	0,83	5 882
Lampung	8,22	0,38	4,60	7,48	8,96	2,23	9 245
Kep. Bangka Belitung	8,02	0,52	6,43	7,01	9,03	1,33	6 638
Kepulauan Riau	4,29	0,32	7,52	3,66	4,92	2,25	10 300
DKI Jakarta	7,79	0,28	3,60	7,25	8,34	5,21	18 298
Jawa Barat	8,58	0,19	2,20	8,21	8,95	7,74	55 066
Jawa Tengah	12,74	0,22	1,75	12,30	13,18	3,60	52 152
DI Yogyakarta	12,77	0,52	4,04	11,76	13,78	3,02	8 057
Jawa Timur	12,09	0,22	1,85	11,66	12,53	4,52	54 762
Banten	5,74	0,26	4,49	5,23	6,24	5,10	16 777
Bali	10,09	0,40	3,96	9,31	10,88	2,37	13 362
Nusa Tenggara Barat	8,33	0,40	4,85	7,53	9,12	2,36	10 061
Nusa Tenggara Timur	7,09	0,45	6,41	6,20	7,98	1,83	8 617
Kalimantan Barat	8,28	0,47	5,63	7,37	9,20	2,30	9 131
Kalimantan Tengah	5,79	0,34	5,84	5,13	6,45	1,03	8 933
Kalimantan Selatan	7,12	0,33	4,69	6,47	7,78	1,53	10 422
Kalimantan Timur	6,04	0,34	5,57	5,38	6,70	2,26	12 323
Kalimantan Utara	6,16	0,53	8,60	5,13	7,20	0,99	4 546
Sulawesi Utara	10,66	0,46	4,35	9,76	11,57	1,34	11 747
Sulawesi Tengah	7,48	0,57	7,56	6,37	8,59	1,90	5 972
Sulawesi Selatan	8,58	0,35	4,04	7,90	9,26	2,65	19 415
Sulawesi Tenggara	6,01	0,38	6,32	5,27	6,76	1,22	7 515
Gorontalo	8,03	0,57	7,14	6,91	9,16	1,02	4 071
Sulawesi Barat	7,39	0,68	9,24	6,05	8,73	1,00	2 609
Maluku	6,98	0,45	6,42	6,10	7,86	1,10	8 201
Maluku Utara	5,94	0,49	8,33	4,97	6,91	0,71	4 895
Papua Barat	4,61	0,41	8,82	3,81	5,40	0,68	5 924
Papua	4,98	0,36	7,22	4,27	5,68	1,19	10 488
Indonesia	9,07	0,07	0,83	8,92	9,21	4,59	49 2098

Sumber: BPS – Susenas Maret 2019

Tabel A.2 Sampling Error Persentase Penduduk Lansia Menurut Provinsi, 2019

Provinsi	Nilai Estimasi	Standard Error	Relative Standard Error (RSE)	Selang Kepercayaan		Efek Rancangan Sampling	Jumlah Sampel
				Batas Atas	Batas Bawah		
				(5)	(6)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Aceh	7,31	0,20	2,73	6,92	7,70	0,96	34 107
Sumatera Utara	8,09	0,22	2,69	7,67	8,52	1,92	44 346
Sumatera Barat	10,36	0,30	2,87	9,78	10,94	1,24	24 163
Riau	5,82	0,25	4,35	5,32	6,31	2,19	18 755
Jambi	7,57	0,27	3,63	7,03	8,11	1,19	16 807
Sumatera Selatan	8,11	0,25	3,12	7,62	8,61	2,05	26 336
Bengkulu	7,95	0,33	4,09	7,31	8,59	0,87	13 644
Lampung	9,18	0,23	2,50	8,73	9,62	1,66	26 214
Kep. Bangka Belitung	7,49	0,45	6,06	6,60	8,38	0,89	6 820
Kepulauan Riau	8,37	0,69	8,29	7,01	9,73	0,62	4 014
DKI Jakarta	-	-	-	-	-	-	-
Jawa Barat	11,44	0,26	2,31	10,92	11,96	3,62	27 844
Jawa Tengah	14,00	0,22	1,55	13,58	14,43	3,01	45 268
DI Yogyakarta	19,16	0,84	4,37	17,52	20,81	2,12	4 079
Jawa Timur	13,95	0,20	1,43	13,56	14,34	2,78	48 983
Banten	7,63	0,39	5,05	6,88	8,39	3,51	9 165
Bali	13,97	0,60	4,29	12,79	15,14	1,83	8 296
Nusa Tenggara Barat	8,67	0,34	3,91	8,00	9,33	1,72	12 770
Nusa Tenggara Timur	8,38	0,18	2,15	8,02	8,73	0,79	43 137
Kalimantan Barat	7,64	0,23	3,00	7,19	8,09	1,11	23 004
Kalimantan Tengah	6,13	0,29	4,73	5,56	6,70	1,07	17 972
Kalimantan Selatan	7,80	0,27	3,49	7,27	8,34	1,04	15 918
Kalimantan Timur	6,67	0,43	6,39	5,83	7,50	1,59	9 182
Kalimantan Utara	6,94	0,59	8,48	5,78	8,09	0,70	5 737
Sulawesi Utara	11,67	0,38	3,25	10,93	12,42	0,75	18 446
Sulawesi Tengah	8,42	0,27	3,15	7,90	8,94	0,88	22 115
Sulawesi Selatan	10,48	0,23	2,20	10,03	10,93	1,28	37 403
Sulawesi Tenggara	7,44	0,23	3,10	6,98	7,89	0,57	28 645
Gorontalo	8,06	0,43	5,38	7,21	8,91	0,80	8 500
Sulawesi Barat	6,62	0,34	5,10	5,96	7,28	0,88	10 786
Maluku	7,48	0,31	4,16	6,87	8,09	0,64	18 619
Maluku Utara	6,51	0,27	4,11	5,99	7,04	0,47	17 268
Papua Barat	4,76	0,28	5,85	4,21	5,31	0,43	20 775
Papua	2,82	0,19	6,84	2,45	3,20	1,48	43 250
Indonesia	10,27	0,06	0,61	10,14	10,39	2,24	712 368

Sumber: BPS – Susenas Maret 2019

Tabel A.3 Sampling Error Persentase Penduduk Lansia Menurut Provinsi, 2019

							Laki-laki
Provinsi	Nilai Estimasi	Standard Error	Relative Standard Error (RSE)	Selang Kepercayaan		Efek Rancangan Sampling	Jumlah Sampel
				Batas Atas	Batas Bawah		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Aceh	6,61	0,20	3,08	6,21	7,01	0,81	23 957
Sumatera Utara	7,23	0,19	2,68	6,85	7,61	1,84	38 881
Sumatera Barat	9,00	0,26	2,93	8,48	9,52	1,04	20 942
Riau	5,65	0,21	3,72	5,24	6,06	1,33	15 187
Jambi	7,49	0,28	3,77	6,94	8,04	0,96	11 866
Sumatera Selatan	7,67	0,23	3,04	7,21	8,13	1,49	19 477
Bengkulu	7,36	0,30	4,14	6,77	7,96	0,62	9 867
Lampung	8,76	0,24	2,71	8,30	9,23	1,38	18 104
Kep. Bangka Belitung	7,45	0,38	5,11	6,70	8,19	0,73	6 882
Kepulauan Riau	4,60	0,33	7,22	3,95	5,26	1,26	7 229
DKI Jakarta	7,48	0,32	4,25	6,86	8,11	3,49	9 142
Jawa Barat	8,89	0,18	2,07	8,53	9,25	4,73	41 750
Jawa Tengah	12,62	0,18	1,42	12,27	12,98	2,28	48 082
DI Yogyakarta	13,35	0,52	3,88	12,34	14,37	1,99	5 901
Jawa Timur	12,20	0,18	1,44	11,86	12,55	2,54	51 142
Banten	6,13	0,25	4,05	5,65	6,62	3,18	13 205
Bali	10,56	0,35	3,36	9,86	11,25	1,31	10 878
Nusa Tenggara Barat	8,20	0,32	3,95	7,57	8,83	1,55	11 227
Nusa Tenggara Timur	7,68	0,20	2,60	7,29	8,07	0,68	25 672
Kalimantan Barat	7,65	0,26	3,36	7,15	8,16	1,09	16 388
Kalimantan Tengah	5,97	0,25	4,20	5,48	6,46	0,71	13 795
Kalimantan Selatan	7,03	0,25	3,52	6,54	7,51	0,91	13 329
Kalimantan Timur	6,43	0,32	4,96	5,80	7,05	1,48	11 086
Kalimantan Utara	6,63	0,44	6,60	5,77	7,49	0,54	5 277
Sulawesi Utara	10,43	0,33	3,16	9,78	11,07	0,67	15 392
Sulawesi Tengah	7,92	0,29	3,67	7,35	8,49	0,82	14 223
Sulawesi Selatan	8,65	0,22	2,57	8,21	9,08	1,22	27 846
Sulawesi Tenggara	6,45	0,24	3,78	5,97	6,93	0,60	17 778
Gorontalo	7,48	0,41	5,54	6,67	8,29	0,67	6 385
Sulawesi Barat	6,35	0,36	5,68	5,64	7,06	0,68	6 682
Maluku	6,94	0,30	4,32	6,35	7,53	0,57	13 491
Maluku Utara	6,30	0,27	4,36	5,76	6,84	0,37	11 214
Papua Barat	4,84	0,28	5,83	4,28	5,39	0,39	13 549
Papua	3,79	0,20	5,41	3,38	4,19	0,92	28 229
Indonesia	9,10	0,06	0,63	8,98	9,21	2,44	604 055

Sumber: BPS – Susenas Maret 2019

Tabel A.4 *Sampling Error* Persentase Penduduk Lansia Menurut Provinsi, 2019

Provinsi	Nilai Estimasi	Standard Error	Relative Standard Error (RSE)	Selang Kepercayaan		Efek Rancangan Sampling	Jumlah Sampel
				Batas Atas	Batas Bawah		
				(5)	(6)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Aceh	7,53	0,22	2,96	7,09	7,96	0,86	24 319
Sumatera Utara	8,51	0,21	2,47	8,10	8,92	1,87	39 794
Sumatera Barat	10,59	0,31	2,91	9,99	11,19	1,24	21 169
Riau	5,78	0,24	4,17	5,31	6,25	1,63	14 785
Jambi	7,69	0,29	3,78	7,12	8,26	0,95	11 507
Sumatera Selatan	8,31	0,25	2,98	7,83	8,80	1,52	19 319
Bengkulu	7,55	0,31	4,15	6,94	8,17	0,62	9 659
Lampung	9,00	0,25	2,82	8,51	9,50	1,46	17 355
Kep. Bangka Belitung	8,15	0,42	5,21	7,32	8,98	0,77	6 576
Kepulauan Riau	4,80	0,39	8,02	4,05	5,56	1,57	7 085
DKI Jakarta	8,11	0,35	4,30	7,42	8,79	3,88	9 156
Jawa Barat	9,63	0,19	1,97	9,26	10,00	4,53	41 160
Jawa Tengah	14,08	0,19	1,37	13,70	14,45	2,43	49 338
DI Yogyakarta	15,62	0,55	3,54	14,54	16,71	2,03	6 235
Jawa Timur	13,70	0,19	1,37	13,33	14,06	2,69	52 603
Banten	6,43	0,27	4,14	5,91	6,95	3,35	12 737
Bali	12,06	0,40	3,30	11,28	12,84	1,45	10 780
Nusa Tenggara Barat	8,79	0,32	3,66	8,16	9,42	1,52	11 604
Nusa Tenggara Timur	8,45	0,22	2,58	8,02	8,88	0,76	26 082
Kalimantan Barat	8,09	0,27	3,29	7,57	8,61	1,07	15 747
Kalimantan Tengah	6,03	0,27	4,53	5,49	6,56	0,77	13 110
Kalimantan Selatan	7,95	0,27	3,40	7,42	8,48	0,94	13 011
Kalimantan Timur	6,05	0,33	5,45	5,40	6,69	1,53	10 419
Kalimantan Utara	6,28	0,51	8,06	5,29	7,27	0,68	5 006
Sulawesi Utara	11,89	0,37	3,10	11,17	12,62	0,72	14 801
Sulawesi Tengah	8,37	0,31	3,73	7,76	8,98	0,86	13 864
Sulawesi Selatan	10,62	0,25	2,31	10,14	11,10	1,30	28 972
Sulawesi Tenggara	7,31	0,27	3,65	6,79	7,83	0,64	18 382
Gorontalo	8,62	0,43	4,99	7,78	9,46	0,64	6 186
Sulawesi Barat	7,25	0,39	5,44	6,48	8,02	0,72	6 713
Maluku	7,59	0,32	4,22	6,96	8,22	0,59	13 329
Maluku Utara	6,40	0,30	4,62	5,82	6,97	0,40	10 949
Papua Barat	4,54	0,27	5,93	4,01	5,07	0,34	13 150
Papua	3,06	0,19	6,31	2,68	3,43	0,91	25 509
Indonesia	10,10	0,06	0,61	9,98	10,22	2,50	600 411

Sumber: BPS – Sakernas Agustus 2019

Tabel A.5 Sampling Error Persentase Penduduk Lansia Menurut Provinsi, 2018

Perkotaan+Perdesaan, Laki-laki+Perempuan							
Provinsi	Nilai Estimasi	Standard Error	Relative Standard Error (RSE)	Selang Kepercayaan		Efek Rancangan Sampling	Jumlah Sampel
				Batas Atas	Batas Bawah		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Aceh	7,07	0,18	2,53	6,72	7,42	1,18	48 276
Sumatera Utara	7,87	0,17	2,20	7,53	8,21	2,71	78 675
Sumatera Barat	9,80	0,25	2,57	9,30	10,29	1,77	42 111
Riau	5,71	0,19	3,29	5,34	6,08	2,06	29 972
Jambi	7,59	0,25	3,23	7,11	8,07	1,40	23 373
Sumatera Selatan	7,99	0,20	2,55	7,59	8,39	2,16	38 796
Bengkulu	7,46	0,26	3,48	6,95	7,97	0,88	19 526
Lampung	8,88	0,20	2,22	8,49	9,27	1,84	35 459
Kep. Bangka Belitung	7,78	0,35	4,48	7,10	8,47	1,14	13 458
Kepulauan Riau	4,70	0,31	6,61	4,09	5,31	2,13	14 314
DKI Jakarta	7,79	0,28	3,60	7,25	8,34	5,21	18 298
Jawa Barat	9,25	0,16	1,72	8,94	9,57	6,68	82 910
Jawa Tengah	13,36	0,16	1,17	13,05	13,66	3,30	97 420
DI Yogyakarta	14,50	0,44	3,06	13,63	15,37	2,75	12 136
Jawa Timur	12,96	0,15	1,18	12,66	13,26	3,69	103 745
Banten	6,28	0,21	3,40	5,86	6,70	4,50	25 942
Bali	11,30	0,33	2,96	10,64	11,96	2,18	21 658
Nusa Tenggara Barat	8,50	0,26	3,09	7,99	9,02	2,02	22 831
Nusa Tenggara Timur	8,07	0,18	2,18	7,72	8,41	1,03	51 754
Kalimantan Barat	7,87	0,22	2,80	7,44	8,30	1,53	32 135
Kalimantan Tengah	5,99	0,22	3,68	5,56	6,43	1,06	26 905
Kalimantan Selatan	7,48	0,21	2,86	7,06	7,90	1,27	26 340
Kalimantan Timur	6,25	0,27	4,27	5,72	6,77	2,04	21 505
Kalimantan Utara	6,47	0,40	6,12	5,69	7,24	0,86	10 283
Sulawesi Utara	11,15	0,30	2,72	10,55	11,74	1,05	30 193
Sulawesi Tengah	8,14	0,25	3,09	7,65	8,64	1,16	28 087
Sulawesi Selatan	9,66	0,20	2,11	9,26	10,06	1,89	56 818
Sulawesi Tenggara	6,88	0,21	2,99	6,48	7,28	0,80	36 160
Gorontalo	8,05	0,35	4,33	7,36	8,73	0,89	12 571
Sulawesi Barat	6,80	0,30	4,47	6,20	7,40	0,91	13 395
Maluku	7,26	0,26	3,62	6,75	7,78	0,84	26 820
Maluku Utara	6,35	0,24	3,75	5,88	6,81	0,54	22 163
Papua Barat	4,70	0,24	5,02	4,23	5,16	0,54	26 699
Papua	3,44	0,17	5,04	3,10	3,78	1,38	53 738
Indonesia	9,60	0,05	0,52	9,50	9,69	3,53	1 204 466

Sumber: BPS – Sakernas Agustus 2019

Tabel B.1 *Sampling Error* Persentase Rumah Tangga Penduduk Lansia Menurut Provinsi, 2019

Perkotaan							
Provinsi	Nilai Estimasi	Standard Error	Relative Standard Error (RSE)	Selang Kepercayaan		Efek Rancangan Sampling	Jumlah Sampel
				Batas Atas	Batas Bawah		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Aceh	21,14	0,99	4,68	19,20	23,08	0,81	3 624
Sumatera Utara	24,81	0,72	2,89	23,41	26,22	1,72	8 564
Sumatera Barat	29,15	1,30	4,48	26,59	31,71	1,68	4 506
Riau	17,53	0,87	4,95	15,83	19,23	1,20	2 818
Jambi	22,96	1,37	5,95	20,28	25,64	1,06	1 746
Sumatera Selatan	25,35	1,06	4,19	23,27	27,43	1,47	3 166
Bengkulu	20,07	1,12	5,59	17,87	22,27	0,45	1 575
Lampung	25,41	1,16	4,57	23,14	27,69	1,55	2 394
Kep. Bangka Belitung	22,50	1,25	5,55	20,05	24,94	0,66	1 845
Kepulauan Riau	12,14	0,92	7,55	10,35	13,94	1,39	2 786
DKI Jakarta	21,81	0,74	3,40	20,36	23,26	3,16	5 255
Jawa Barat	24,57	0,49	1,99	23,61	25,53	4,38	15 455
Jawa Tengah	35,56	0,52	1,47	34,53	36,59	1,89	14 543
DI Yogyakarta	29,44	1,24	4,22	27,00	31,87	2,16	2 558
Jawa Timur	33,35	0,55	1,65	32,27	34,43	2,66	15 800
Banten	18,12	0,77	4,26	16,61	19,63	3,08	4 355
Bali	26,79	1,15	4,30	24,53	29,05	1,79	3 549
Nusa Tenggara Barat	23,47	1,08	4,61	21,35	25,59	1,46	2 796
Nusa Tenggara Timur	23,39	1,33	5,70	20,78	26,00	0,94	1 981
Kalimantan Barat	26,79	1,33	4,98	24,17	29,40	1,27	2 234
Kalimantan Tengah	17,66	1,00	5,64	15,71	19,61	0,63	2 385
Kalimantan Selatan	20,71	0,93	4,47	18,90	22,53	0,96	2 991
Kalimantan Timur	18,83	0,98	5,21	16,90	20,75	1,34	3 260
Kalimantan Utara	19,73	1,58	8,02	16,63	22,83	0,57	1 112
Sulawesi Utara	30,35	1,21	4,00	27,97	32,73	0,78	3 122
Sulawesi Tengah	23,13	1,60	6,93	19,99	26,27	1,06	1 450
Sulawesi Selatan	28,33	1,01	3,58	26,34	30,32	1,50	4 715
Sulawesi Tenggara	21,02	1,34	6,39	18,39	23,66	0,86	1 786
Gorontalo	24,90	1,57	6,32	21,82	27,99	0,57	1 051
Sulawesi Barat	24,76	2,05	8,27	20,75	28,77	0,57	608
Maluku	24,35	1,48	6,09	21,44	27,25	0,68	1 801
Maluku Utara	21,21	1,78	8,37	17,73	24,69	0,50	1 132
Papua Barat	17,10	1,46	8,54	14,24	19,96	0,45	1 296
Papua	16,03	1,15	7,14	13,79	18,28	0,76	2 437
Indonesia	26,33	0,20	0,75	25,94	26,72	2,66	130 696

Sumber: BPS – Susenas Maret 2019

Tabel B.2 *Sampling Error* Persentase Rumah Tangga Penduduk Lansia Menurut Provinsi, 2019

Provinsi	Nilai Estimasi	Standard Error	Relative Standard Error (RSE)	Selang Kepercayaan		Efek Rancangan Sampling	Jumlah Sampel
				Batas Atas	Batas Bawah		
				(5)	(6)	(7)	(8)
Aceh	24,85	0,60	2,40	23,68	26,02	0,99	8 671
Sumatera Utara	25,53	0,58	2,28	24,39	26,67	1,74	10 956
Sumatera Barat	32,16	0,80	2,50	30,58	33,73	1,24	6 236
Riau	18,68	0,76	4,05	17,19	20,16	2,28	4 775
Jambi	22,07	0,73	3,30	20,64	23,49	1,20	4 631
Sumatera Selatan	23,88	0,67	2,81	22,57	25,20	2,03	7 064
Bengkulu	22,82	0,82	3,58	21,23	24,42	0,80	3 728
Lampung	26,29	0,59	2,25	25,14	27,45	1,69	7 259
Kep. Bangka Belitung	21,34	1,16	5,43	19,06	23,61	0,86	1 862
Kepulauan Riau	23,90	1,97	8,26	20,03	27,76	0,78	1 098
DKI Jakarta	-	-	-	-	-	-	-
Jawa Barat	29,98	0,58	1,94	28,84	31,11	3,26	8 328
Jawa Tengah	37,92	0,51	1,34	36,92	38,91	3,06	12 974
DI Yogyakarta	47,70	1,90	3,99	43,98	51,43	2,51	1 176
Jawa Timur	38,13	0,47	1,24	37,20	39,05	2,95	14 221
Banten	25,18	1,09	4,33	23,05	27,32	3,35	2 265
Bali	37,31	1,46	3,90	34,46	40,17	1,92	2 289
Nusa Tenggara Barat	23,27	0,86	3,68	21,59	24,95	1,83	3 614
Nusa Tenggara Timur	29,82	0,58	1,95	28,68	30,97	0,88	9 700
Kalimantan Barat	24,70	0,69	2,81	23,34	26,06	1,23	5 803
Kalimantan Tengah	18,36	0,79	4,29	16,82	19,91	1,08	4 965
Kalimantan Selatan	22,61	0,72	3,17	21,20	24,01	1,09	4 625
Kalimantan Timur	21,08	1,29	6,13	18,54	23,61	1,85	2 328
Kalimantan Utara	22,19	1,68	7,57	18,90	25,49	0,65	1 372
Sulawesi Utara	33,23	0,91	2,75	31,44	35,02	0,70	4 879
Sulawesi Tengah	26,08	0,72	2,78	24,66	27,50	0,86	5 555
Sulawesi Selatan	33,37	0,67	1,99	32,07	34,67	1,43	9 378
Sulawesi Tenggara	24,67	0,69	2,79	23,32	26,02	0,59	6 924
Gorontalo	25,09	1,21	4,83	22,71	27,47	0,80	2 139
Sulawesi Barat	21,95	1,10	5,00	19,80	24,11	1,07	2 643
Maluku	27,58	1,03	3,75	25,55	29,61	0,67	3 849
Maluku Utara	23,15	0,91	3,91	21,37	24,92	0,53	3 882
Papua Barat	15,85	0,91	5,73	14,07	17,63	0,48	4 589
Papua	8,49	0,56	6,64	7,38	9,59	1,59	11 198
Indonesia	29,84	0,16	0,53	29,53	30,15	2,22	184 976

Sumber: BPS – Sakernas Agustus 2019

Tabel B.3 *Sampling Error* Persentase Rumah Tangga Penduduk Lansia Menurut Provinsi, 2019

Provinsi	Nilai Estimasi	Standard Error	Relative Standard Error (RSE)	Selang Kepercayaan		Efek Rancangan Sampling	Jumlah Sampel
				Batas Atas	Batas Bawah		
				(5)	(6)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Aceh	23,64	0,52	2,19	22,63	24,65	0,85	12 295
Sumatera Utara	25,14	0,47	1,87	24,22	26,07	1,86	19 520
Sumatera Barat	30,75	0,75	2,42	29,29	32,22	1,54	10 742
Riau	18,21	0,57	3,14	17,09	19,33	1,68	7 593
Jambi	22,35	0,66	2,95	21,06	23,64	1,07	6 377
Sumatera Selatan	24,40	0,57	2,35	23,27	25,52	1,70	10 230
Bengkulu	21,92	0,67	3,04	20,61	23,22	0,61	5 303
Lampung	26,03	0,54	2,07	24,98	27,09	1,51	9 653
Kep. Bangka Belitung	21,98	0,86	3,92	20,29	23,67	0,78	3 707
Kepulauan Riau	13,34	0,88	6,63	11,61	15,08	1,80	3 884
DKI Jakarta	21,81	0,74	3,40	20,36	23,26	4,28	5 255
Jawa Barat	25,92	0,40	1,53	25,14	26,69	5,03	23 783
Jawa Tengah	36,73	0,36	0,99	36,01	37,44	2,43	27 517
DI Yogyakarta	33,97	1,07	3,15	31,87	36,07	2,67	3 734
Jawa Timur	35,58	0,37	1,04	34,86	36,30	2,96	30 021
Banten	20,07	0,64	3,17	18,83	21,32	3,63	6 620
Bali	30,02	0,93	3,11	28,20	31,85	2,14	5 838
Nusa Tenggara Barat	23,36	0,68	2,92	22,02	24,70	1,66	6 410
Nusa Tenggara Timur	28,27	0,55	1,96	27,19	29,36	0,81	11 681
Kalimantan Barat	25,43	0,65	2,54	24,16	26,69	1,20	8 037
Kalimantan Tengah	18,09	0,62	3,42	16,88	19,30	0,83	7 350
Kalimantan Selatan	21,71	0,58	2,67	20,57	22,85	1,05	7 616
Kalimantan Timur	19,55	0,79	4,03	18,01	21,10	1,69	5 588
Kalimantan Utara	20,66	1,17	5,67	18,37	22,96	0,66	2 484
Sulawesi Utara	31,72	0,77	2,44	30,21	33,24	0,80	8 001
Sulawesi Tengah	25,21	0,70	2,78	23,84	26,58	0,87	7 005
Sulawesi Selatan	31,22	0,59	1,88	30,07	32,37	1,50	14 093
Sulawesi Tenggara	23,28	0,67	2,88	21,96	24,59	0,71	8 710
Gorontalo	25,01	0,97	3,87	23,11	26,91	0,67	3 190
Sulawesi Barat	22,60	0,97	4,28	20,71	24,50	0,79	3 251
Maluku	26,13	0,88	3,38	24,39	27,86	0,69	5 650
Maluku Utara	22,58	0,83	3,66	20,96	24,20	0,48	5 014
Papua Barat	16,37	0,80	4,89	14,80	17,94	0,46	5 885
Papua	10,50	0,52	4,91	9,49	11,51	1,12	13 635
Indonesia	27,88	0,13	0,47	27,62	28,13	2,74	315 672

Sumber: BPS – Sakernas Agustus 2019

Tabel C.1 Sampling Error Persentase Penduduk Lansia yang Tinggal Sendiri Menurut Provinsi, 2019

Provinsi	Nilai Estimasi	Standard Error	Relative Standard Error (RSE)	Selang Kepercayaan		Efek Rancangan Sampling	Jumlah Sampel
				Batas Atas	Batas Bawah		
				(5)	(6)	(7)	(8)
Aceh	8,03	1,07	13,39	5,92	10,13	0,60	1 038
Sumatera Utara	8,78	0,81	9,22	7,20	10,37	1,68	2 822
Sumatera Barat	7,27	0,88	12,07	5,55	8,99	0,90	1 847
Riau	5,24	0,99	18,83	3,31	7,18	1,03	776
Jambi	6,68	1,14	17,11	4,44	8,93	0,63	549
Sumatera Selatan	4,79	0,72	14,98	3,38	6,20	0,94	1 098
Bengkulu	7,92	1,50	18,99	4,97	10,87	0,44	444
Lampung	5,92	0,93	15,65	4,11	7,74	1,11	855
Kep. Bangka Belitung	9,49	1,27	13,38	7,00	11,98	0,42	695
Kepulauan Riau	5,69	1,23	21,56	3,28	8,09	0,80	791
DKI Jakarta	7,91	0,76	9,55	6,43	9,39	2,17	1 618
Jawa Barat	10,53	0,58	5,53	9,39	11,67	3,93	5 033
Jawa Tengah	9,27	0,44	4,73	8,41	10,13	1,75	6 339
DI Yogyakarta	10,95	1,16	10,61	8,67	13,22	1,67	1 104
Jawa Timur	9,56	0,45	4,73	8,68	10,45	2,05	6 710
Banten	5,77	0,81	14,04	4,18	7,36	2,15	1 193
Bali	4,91	0,63	12,89	3,67	6,15	0,87	1 588
Nusa Tenggara Barat	8,25	1,24	15,09	5,81	10,68	1,41	871
Nusa Tenggara Timur	3,06	0,89	28,96	1,32	4,79	0,82	638
Kalimantan Barat	5,59	0,83	14,87	3,96	7,23	0,65	821
Kalimantan Tengah	6,23	1,03	16,47	4,22	8,24	0,38	631
Kalimantan Selatan	11,29	1,22	10,82	8,90	13,69	0,72	797
Kalimantan Timur	7,64	1,22	15,92	5,25	10,02	1,07	733
Kalimantan Utara	8,82	2,35	26,70	4,20	13,44	0,64	255
Sulawesi Utara	6,88	0,84	12,18	5,24	8,53	0,52	1 446
Sulawesi Tengah	4,27	1,15	26,97	2,01	6,53	0,75	433
Sulawesi Selatan	5,59	0,66	11,84	4,29	6,89	0,92	1 757
Sulawesi Tenggara	5,49	1,46	26,67	2,62	8,36	0,89	506
Gorontalo	6,48	1,61	24,90	3,32	9,65	0,59	328
Sulawesi Barat	5,61	1,75	31,20	2,18	9,04	0,47	219
Maluku	3,53	0,87	24,66	1,82	5,24	0,41	588
Maluku Utara	3,01	0,96	31,80	1,13	4,89	0,23	308
Papua Barat	7,09	1,74	24,59	3,67	10,50	0,29	349
Papua	7,51	1,68	22,41	4,21	10,81	0,66	458
Indonesia	8,74	0,20	2,28	8,35	9,13	2,28	45 638

Keterangan : Warna kuning () artinya perlu kehati-hatian dalam menggunakan hasil estimasi
 Sumber: BPS – Susenas Maret 2019

Tabel C.2 Sampling Error Persentase Penduduk Lansia yang Tinggal Sendiri Menurut Provinsi, 2019

Provinsi	Nilai Estimasi	Standard Error	Relative Standard Error (RSE)	Selang Kepercayaan		Efek Rancangan Sampling	Jumlah Sampel
				Batas Atas	Batas Bawah		
				(5)	(6)	(7)	(8)
Aceh	12,40	0,78	6,27	10,87	13,92	0,81	2 689
Sumatera Utara	13,15	0,77	5,86	11,64	14,66	1,54	3 635
Sumatera Barat	10,73	0,67	6,29	9,41	12,05	0,78	2 738
Riau	8,11	0,97	11,92	6,22	10,01	1,66	1 209
Jambi	9,57	0,90	9,44	7,80	11,34	0,96	1 313
Sumatera Selatan	7,27	0,60	8,23	6,10	8,44	1,26	2 297
Bengkulu	9,86	0,95	9,68	7,99	11,73	0,60	1 138
Lampung	7,73	0,63	8,16	6,49	8,97	1,64	2 482
Kep. Bangka Belitung	9,02	1,66	18,45	5,76	12,28	0,92	473
Kepulauan Riau	11,66	2,56	21,94	6,64	16,67	0,64	326
DKI Jakarta	-	-	-	-	-	-	-
Jawa Barat	14,59	0,72	4,92	13,18	16,00	3,01	3 284
Jawa Tengah	10,20	0,44	4,35	9,33	11,07	2,80	6 537
DI Yogyakarta	7,18	0,92	12,83	5,38	8,99	1,39	860
Jawa Timur	10,22	0,41	4,02	9,42	11,03	2,61	7 454
Banten	10,36	1,30	12,55	7,81	12,91	2,82	695
Bali	7,82	0,93	11,88	6,00	9,65	1,24	1 380
Nusa Tenggara Barat	9,51	1,13	11,89	7,30	11,73	1,85	1 145
Nusa Tenggara Timur	6,73	0,44	6,47	5,88	7,58	0,58	4 325
Kalimantan Barat	7,21	0,68	9,49	5,87	8,55	0,97	1 866
Kalimantan Tengah	11,22	1,36	12,10	8,56	13,88	1,01	1 272
Kalimantan Selatan	14,20	1,18	8,34	11,88	16,52	1,10	1 281
Kalimantan Timur	11,02	2,31	20,95	6,50	15,55	2,41	689
Kalimantan Utara	3,99	1,10	27,48	1,84	6,15	0,34	359
Sulawesi Utara	7,61	0,71	9,32	6,22	9,00	0,55	2 296
Sulawesi Tengah	5,87	0,62	10,60	4,65	7,10	0,69	1 831
Sulawesi Selatan	7,22	0,44	6,04	6,36	8,07	0,82	4 202
Sulawesi Tenggara	9,37	0,80	8,49	7,81	10,92	0,50	2 189
Gorontalo	6,80	1,07	15,73	4,70	8,90	0,55	679
Sulawesi Barat	7,90	1,01	12,84	5,91	9,88	0,54	807
Maluku	4,70	0,74	15,75	3,25	6,15	0,51	1 499
Maluku Utara	4,55	0,62	13,73	3,32	5,77	0,29	1 157
Papua Barat	8,25	1,11	13,47	6,07	10,43	0,24	1 022
Papua	12,61	1,72	13,60	9,25	15,97	1,00	1 189
Indonesia	10,10	0,17	1,67	9,77	10,43	2,08	66 318

Keterangan : Warna kuning () artinya perlu kehati-hatian dalam menggunakan hasil estimasi

Sumber: BPS – Sakernas Agustus 2019

Tabel C.3 Sampling Error Persentase Penduduk Lansia yang Tinggal Sendiri Menurut Provinsi, 2019

Laki-laki

Provinsi	Nilai Estimasi	Standard Error	Relative Standard Error (RSE)	Selang Kepercayaan		Efek Rancangan Sampling	Jumlah Sampel
				Batas Atas	Batas Bawah		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Aceh	3,40	0,57	16,64	2,29	4,50	0,75	1 713
Sumatera Utara	5,89	0,63	10,76	4,64	7,13	1,66	2 797
Sumatera Barat	4,96	0,63	12,74	3,72	6,20	0,90	2 084
Riau	5,22	0,87	16,69	3,51	6,93	1,35	991
Jambi	5,88	0,85	14,54	4,20	7,55	0,80	933
Sumatera Selatan	3,90	0,53	13,56	2,86	4,94	1,07	1 613
Bengkulu	5,95	1,00	16,76	3,99	7,90	0,58	777
Lampung	3,33	0,46	13,91	2,42	4,24	1,10	1 703
Kep. Bangka Belitung	5,67	1,06	18,62	3,60	7,74	0,52	576
Kepulauan Riau	6,30	1,69	26,91	2,97	9,62	1,09	554
DKI Jakarta	5,49	0,90	16,41	3,72	7,25	2,70	782
Jawa Barat	6,08	0,51	8,39	5,08	7,08	4,42	4 076
Jawa Tengah	4,67	0,30	6,39	4,09	5,26	1,90	6 185
DI Yogyakarta	6,46	0,93	14,34	4,64	8,27	1,58	878
Jawa Timur	4,81	0,32	6,59	4,19	5,44	2,29	6 623
Banten	4,09	0,77	18,84	2,58	5,60	2,67	911
Bali	3,47	0,54	15,51	2,42	4,53	0,87	1 424
Nusa Tenggara Barat	3,59	0,70	19,63	2,21	4,97	1,26	947
Nusa Tenggara Timur	3,74	0,41	11,03	2,93	4,54	0,43	2 337
Kalimantan Barat	5,25	0,63	11,98	4,02	6,48	0,68	1 323
Kalimantan Tengah	5,80	0,86	14,82	4,11	7,48	0,50	980
Kalimantan Selatan	5,43	0,88	16,20	3,71	7,16	1,00	976
Kalimantan Timur	6,62	1,22	18,39	4,23	9,01	1,31	782
Kalimantan Utara	4,34	1,60	36,82	1,21	7,47	0,69	328
Sulawesi Utara	5,21	0,72	13,80	3,80	6,62	0,61	1 765
Sulawesi Tengah	3,91	0,72	18,37	2,50	5,32	0,74	1 097
Sulawesi Selatan	3,55	0,41	11,68	2,73	4,36	0,82	2 605
Sulawesi Tenggara	3,40	0,58	17,05	2,26	4,53	0,39	1 203
Gorontalo	4,15	1,00	24,19	2,18	6,12	0,50	462
Sulawesi Barat	5,65	1,28	22,59	3,15	8,15	0,58	463
Maluku	3,46	0,76	21,89	1,97	4,94	0,47	1 004
Maluku Utara	2,74	0,58	21,30	1,60	3,88	0,22	757
Papua Barat	5,93	1,09	18,32	3,80	8,06	0,22	715
Papua	8,73	1,43	16,35	5,93	11,52	0,75	916
Indonesia	4,98	0,14	2,84	4,70	5,25	2,27	53 280

Keterangan : Warna kuning () artinya perlu kehati-hatian dalam menggunakan hasil estimasi
 Sumber: BPS – Susenas Maret 2019

Tabel C.4 Sampling Error Persentase Penduduk Lansia yang Tinggal Sendiri Menurut Provinsi, 2019

Perempuan							
Provinsi	Nilai Estimasi	Standard Error	Relative Standard Error (RSE)	Selang Kepercayaan		Efek Rancangan Sampling	Jumlah Sampel
(1)	(2)	(3)	(4)	Batas Atas	Batas Bawah	(7)	(8)
Aceh	17,80	1,04	5,86	15,76	19,85	0,66	2 014
Sumatera Utara	15,03	0,79	5,24	13,48	16,57	1,32	3 660
Sumatera Barat	12,80	0,75	5,85	11,33	14,26	0,64	2 501
Riau	8,80	1,09	12,37	6,67	10,94	1,27	994
Jambi	11,41	1,12	9,81	9,22	13,61	0,74	929
Sumatera Selatan	8,72	0,74	8,51	7,27	10,17	1,05	1 782
Bengkulu	12,73	1,21	9,54	10,35	15,11	0,43	805
Lampung	11,18	0,93	8,29	9,36	12,99	1,40	1 634
Kep. Bangka Belitung	12,86	1,58	12,25	9,78	15,95	0,56	592
Kepulauan Riau	7,22	1,40	19,36	4,48	9,96	0,66	563
DKI Jakarta	10,16	1,11	10,97	7,97	12,34	2,55	836
Jawa Barat	17,08	0,71	4,14	15,69	18,46	3,61	4 241
Jawa Tengah	14,22	0,50	3,48	13,25	15,19	2,17	6 691
DI Yogyakarta	12,25	1,28	10,48	9,73	14,76	2,03	1 086
Jawa Timur	14,31	0,49	3,44	13,34	15,27	2,38	7 541
Banten	10,63	1,14	10,74	8,39	12,87	2,44	977
Bali	8,31	0,84	10,04	6,68	9,95	1,04	1 544
Nusa Tenggara Barat	13,60	1,37	10,08	10,92	16,29	1,60	1 069
Nusa Tenggara Timur	7,95	0,62	7,78	6,73	9,16	0,53	2 626
Kalimantan Barat	7,95	0,82	10,26	6,35	9,54	0,80	1 364
Kalimantan Tengah	13,06	1,65	12,66	9,82	16,30	0,82	923
Kalimantan Selatan	19,68	1,37	6,95	17,00	22,36	0,86	1 102
Kalimantan Timur	11,38	1,94	17,05	7,58	15,18	1,75	640
Kalimantan Utara	9,71	2,46	25,37	4,88	14,53	0,66	286
Sulawesi Utara	9,11	0,81	8,94	7,51	10,70	0,51	1 977
Sulawesi Tengah	6,94	0,82	11,87	5,32	8,55	0,58	1 167
Sulawesi Selatan	8,96	0,56	6,26	7,86	10,06	0,81	3 354
Sulawesi Tenggara	12,18	1,17	9,57	9,89	14,46	0,55	1 492
Gorontalo	8,86	1,40	15,82	6,11	11,60	0,55	545
Sulawesi Barat	8,77	1,21	13,75	6,41	11,14	0,40	563
Maluku	4,92	0,76	15,52	3,42	6,41	0,37	1 083
Maluku Utara	5,56	0,85	15,30	3,90	7,23	0,24	708
Papua Barat	9,94	1,73	17,43	6,55	13,34	0,30	656
Papua	12,94	1,84	14,18	9,35	16,54	0,64	731
Indonesia	13,39	0,21	1,54	12,99	13,80	2,16	58 676

Keterangan : Warna kuning () artinya perlu kehati-hatian dalam menggunakan hasil estimasi
 Sumber: BPS – Susenas Maret 2019

Tabel C.5 *Sampling Error* Persentase Penduduk Lansia yang Tinggal Sendiri Menurut Provinsi, 2019

Perkotaan+Perdesaan, Laki-laki+Perempuan

Provinsi	Nilai Estimasi	Standard Error	Relative Standard Error (RSE)	Selang Kepercayaan		Efek Rancangan Sampling	Jumlah Sampel
				Batas Atas	Batas Bawah		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Aceh	11,08	0,64	5,74	9,83	12,33	0,68	3 727
Sumatera Utara	10,84	0,57	5,23	9,73	11,95	1,67	6 457
Sumatera Barat	9,21	0,54	5,87	8,15	10,27	0,82	4 585
Riau	6,99	0,71	10,10	5,60	8,37	1,33	1 985
Jambi	8,63	0,72	8,32	7,22	10,03	0,79	1 862
Sumatera Selatan	6,37	0,46	7,28	5,46	7,28	1,07	3 395
Bengkulu	9,31	0,81	8,65	7,73	10,89	0,50	1 582
Lampung	7,22	0,52	7,26	6,19	8,24	1,35	3 337
Kep. Bangka Belitung	9,29	1,02	10,97	7,29	11,28	0,62	1 168
Kepulauan Riau	6,76	1,12	16,53	4,57	8,95	0,89	1 117
DKI Jakarta	7,91	0,76	9,55	6,43	9,39	2,82	1 618
Jawa Barat	11,71	0,46	3,96	10,80	12,62	4,16	8 317
Jawa Tengah	9,74	0,31	3,20	9,13	10,36	2,25	12 876
DI Yogyakarta	9,60	0,82	8,49	8,00	11,20	1,87	1 964
Jawa Timur	9,89	0,31	3,09	9,29	10,49	2,36	14 164
Banten	7,37	0,70	9,52	5,99	8,74	2,55	1 888
Bali	6,03	0,53	8,76	4,99	7,07	1,06	2 968
Nusa Tenggara Barat	8,91	0,84	9,40	7,27	10,55	1,63	2 016
Nusa Tenggara Timur	5,96	0,39	6,56	5,20	6,73	0,52	4 963
Kalimantan Barat	6,61	0,53	8,01	5,57	7,65	0,79	2 687
Kalimantan Tengah	9,28	0,93	10,04	7,46	11,11	0,73	1 903
Kalimantan Selatan	12,89	0,85	6,61	11,22	14,56	0,90	2 078
Kalimantan Timur	8,81	1,14	12,96	6,57	11,05	1,65	1 422
Kalimantan Utara	6,80	1,46	21,47	3,94	9,66	0,70	614
Sulawesi Utara	7,24	0,55	7,57	6,17	8,32	0,55	3 742
Sulawesi Tengah	5,44	0,55	10,17	4,35	6,52	0,65	2 264
Sulawesi Selatan	6,59	0,37	5,63	5,86	7,32	0,83	5 959
Sulawesi Tenggara	8,04	0,73	9,05	6,61	9,47	0,58	2 695
Gorontalo	6,67	0,92	13,79	4,86	8,47	0,57	1 007
Sulawesi Barat	7,31	0,88	12,03	5,59	9,03	0,47	1 026
Maluku	4,21	0,57	13,47	3,10	5,32	0,46	2 087
Maluku Utara	4,13	0,53	12,74	3,10	5,17	0,24	1 465
Papua Barat	7,77	0,97	12,47	5,87	9,67	0,26	1 371
Papua	10,50	1,21	11,55	8,12	12,88	0,79	1 647
Indonesia	9,38	0,13	1,41	9,12	9,64	2,31	111 956

Sumber: BPS – Susenas Maret 2019

Tabel D.1 *Sampling Error* Rata-rata Lama Sekolah dari Penduduk Lansia Menurut Provinsi, 2019

Perkotaan							
Provinsi	Nilai Estimasi	Standard Error	Relative Standard Error (RSE)	Selang Kepercayaan		Efek Rancangan Sampling	Jumlah Sampel
				Batas Atas	Batas Bawah		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Aceh	7,52	0,28	3,76	6,97	8,08	1,95	1 038
Sumatera Utara	7,67	0,17	2,25	7,34	8,01	4,16	2 822
Sumatera Barat	6,81	0,23	3,35	6,37	7,26	2,41	1 847
Riau	7,17	0,23	3,15	6,73	7,61	1,82	776
Jambi	7,31	0,35	4,81	6,62	8,00	2,15	549
Sumatera Selatan	7,13	0,24	3,40	6,65	7,60	2,88	1 098
Bengkulu	6,90	0,33	4,83	6,25	7,55	0,84	444
Lampung	5,93	0,33	5,56	5,29	6,58	4,50	855
Kep. Bangka Belitung	5,95	0,26	4,34	5,45	6,46	1,20	695
Kepulauan Riau	5,96	0,31	5,16	5,36	6,56	1,77	791
DKI Jakarta	9,09	0,18	1,98	8,73	9,44	5,41	1 618
Jawa Barat	5,89	0,11	1,89	5,67	6,10	9,11	5 033
Jawa Tengah	5,21	0,10	1,84	5,02	5,40	4,37	6 339
DI Yogyakarta	6,41	0,25	3,96	5,92	6,91	3,62	1 104
Jawa Timur	5,33	0,10	1,83	5,14	5,52	5,50	6 710
Banten	6,01	0,25	4,16	5,52	6,50	6,23	1 193
Bali	5,31	0,20	3,85	4,91	5,71	2,56	1 588
Nusa Tenggara Barat	3,06	0,27	8,79	2,53	3,59	2,67	871
Nusa Tenggara Timur	7,62	0,36	4,73	6,91	8,33	1,92	638
Kalimantan Barat	5,65	0,25	4,35	5,17	6,13	1,67	821
Kalimantan Tengah	7,31	0,31	4,29	6,70	7,93	1,21	631
Kalimantan Selatan	6,93	0,26	3,68	6,43	7,43	1,68	797
Kalimantan Timur	7,07	0,30	4,25	6,48	7,66	2,54	733
Kalimantan Utara	6,75	0,37	5,47	6,02	7,47	0,84	255
Sulawesi Utara	8,32	0,20	2,36	7,93	8,70	1,17	1 446
Sulawesi Tengah	8,04	0,33	4,16	7,39	8,70	1,77	433
Sulawesi Selatan	7,27	0,22	3,05	6,84	7,71	2,56	1 757
Sulawesi Tenggara	6,98	0,41	5,92	6,17	7,79	1,57	506
Gorontalo	6,49	0,37	5,64	5,77	7,20	1,16	328
Sulawesi Barat	6,56	0,55	8,41	5,48	7,64	1,00	219
Maluku	8,51	0,35	4,08	7,83	9,19	1,42	588
Maluku Utara	8,47	0,43	5,05	7,63	9,31	0,79	308
Papua Barat	7,94	0,34	4,27	7,28	8,61	0,59	349
Papua	9,03	0,33	3,69	8,38	9,68	1,09	458
Indonesia	6,13	0,04	0,73	6,05	6,22	5,29	45 638

Sumber: BPS – Susenas Maret 2019

Tabel D.2 *Sampling Error* Rata-rata Lama Sekolah dari Penduduk Lansia Menurut Provinsi, 2019

Provinsi	Nilai Estimasi	Standard Error	Relative Standard Error (RSE)	Selang Kepercayaan		Efek Rancangan Sampling	Jumlah Sampel
				Batas Atas	Batas Bawah		
				(5)	(6)	(7)	(8)
Aceh	4,77	0,10	2,19	4,56	4,97	0,99	2 689
Sumatera Utara	5,08	0,11	2,08	4,87	5,29	1,95	3 635
Sumatera Barat	4,77	0,12	2,47	4,53	5,00	1,23	2 738
Riau	4,07	0,15	3,61	3,78	4,36	1,96	1 209
Jambi	3,80	0,13	3,42	3,54	4,05	1,09	1 313
Sumatera Selatan	3,93	0,10	2,62	3,73	4,13	2,07	2 297
Bengkulu	3,90	0,15	3,95	3,60	4,20	0,77	1 138
Lampung	3,53	0,08	2,39	3,37	3,70	1,80	2 482
Kep. Bangka Belitung	2,75	0,20	7,44	2,35	3,15	1,03	473
Kepulauan Riau	3,05	0,29	9,59	2,48	3,62	0,78	326
DKI Jakarta	-	-	-	-	-	-	-
Jawa Barat	4,13	0,10	2,31	3,95	4,32	5,25	3 284
Jawa Tengah	3,36	0,06	1,84	3,24	3,48	3,48	6 537
DI Yogyakarta	4,11	0,22	5,40	3,67	4,54	2,69	860
Jawa Timur	3,08	0,06	2,03	2,95	3,20	3,98	7 454
Banten	3,58	0,17	4,77	3,25	3,92	3,38	695
Bali	3,21	0,16	5,00	2,90	3,53	1,41	1 380
Nusa Tenggara Barat	2,07	0,16	7,79	1,76	2,39	1,90	1 145
Nusa Tenggara Timur	3,71	0,09	2,32	3,54	3,88	0,90	4 325
Kalimantan Barat	2,66	0,11	4,05	2,45	2,87	1,09	1 866
Kalimantan Tengah	4,57	0,17	3,71	4,24	4,90	0,90	1 272
Kalimantan Selatan	3,80	0,14	3,60	3,53	4,07	1,17	1 281
Kalimantan Timur	4,57	0,26	5,75	4,05	5,08	1,71	689
Kalimantan Utara	3,38	0,30	8,95	2,79	3,98	0,52	359
Sulawesi Utara	6,01	0,12	2,02	5,77	6,25	0,63	2 296
Sulawesi Tengah	5,27	0,15	2,77	4,99	5,56	1,26	1 831
Sulawesi Selatan	3,36	0,09	2,78	3,17	3,54	1,36	4 202
Sulawesi Tenggara	3,66	0,14	3,72	3,40	3,93	0,63	2 189
Gorontalo	4,53	0,24	5,24	4,07	5,00	1,03	679
Sulawesi Barat	3,86	0,19	5,01	3,49	4,24	0,82	807
Maluku	5,70	0,20	3,54	5,30	6,09	1,00	1 499
Maluku Utara	4,35	0,16	3,61	4,04	4,66	0,52	1 157
Papua Barat	4,99	0,25	5,04	4,50	5,49	0,38	1 022
Papua	3,32	0,22	6,61	2,89	3,75	0,99	1 189
Indonesia	3,68	0,02	0,68	3,63	3,73	2,67	66 318

Sumber: BPS – Susenas Maret 2019

Tabel D.3 *Sampling Error* Rata-rata Lama Sekolah dari Penduduk Lansia Menurut Provinsi, 2019

Laki-laki

Provinsi	Nilai Estimasi	Standard Error	Relative Standard Error (RSE)	Selang Kepercayaan		Efek Rancangan Sampling	Jumlah Sampel
				Batas Atas	Batas Bawah		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Aceh	6,61	0,14	2,08	6,34	6,88	0,85	1 713
Sumatera Utara	7,43	0,13	1,81	7,17	7,69	2,34	2 797
Sumatera Barat	6,51	0,16	2,38	6,20	6,81	1,27	2 084
Riau	5,94	0,16	2,62	5,64	6,25	1,37	991
Jambi	5,90	0,19	3,17	5,53	6,27	1,13	933
Sumatera Selatan	5,99	0,15	2,46	5,70	6,28	1,85	1 613
Bengkulu	6,05	0,19	3,16	5,68	6,43	0,59	777
Lampung	5,16	0,13	2,58	4,90	5,42	2,00	1 703
Kep. Bangka Belitung	5,60	0,22	3,87	5,18	6,02	0,78	576
Kepulauan Riau	6,33	0,38	5,97	5,59	7,07	1,48	554
DKI Jakarta	10,09	0,22	2,13	9,67	10,51	3,87	782
Jawa Barat	6,19	0,10	1,62	5,99	6,39	5,34	4 076
Jawa Tengah	5,27	0,07	1,29	5,14	5,41	2,48	6 185
DI Yogyakarta	7,13	0,23	3,25	6,67	7,58	2,36	878
Jawa Timur	5,17	0,07	1,40	5,03	5,31	3,04	6 623
Banten	6,14	0,20	3,33	5,74	6,54	3,73	911
Bali	5,76	0,17	2,88	5,43	6,09	1,30	1 424
Nusa Tenggara Barat	3,54	0,23	6,41	3,09	3,98	1,78	947
Nusa Tenggara Timur	5,49	0,14	2,64	5,21	5,77	0,89	2 337
Kalimantan Barat	4,85	0,16	3,34	4,53	5,17	1,12	1 323
Kalimantan Tengah	6,56	0,20	3,03	6,17	6,95	0,72	980
Kalimantan Selatan	6,40	0,20	3,18	6,00	6,80	1,23	976
Kalimantan Timur	7,06	0,26	3,67	6,55	7,57	1,65	782
Kalimantan Utara	6,29	0,33	5,26	5,64	6,93	0,55	328
Sulawesi Utara	7,62	0,15	2,03	7,32	7,92	0,74	1 765
Sulawesi Tengah	6,67	0,18	2,76	6,31	7,04	1,04	1 097
Sulawesi Selatan	6,10	0,16	2,55	5,79	6,40	1,47	2 605
Sulawesi Tenggara	6,14	0,23	3,83	5,68	6,60	0,83	1 203
Gorontalo	5,50	0,30	5,42	4,91	6,08	0,92	462
Sulawesi Barat	5,45	0,29	5,25	4,88	6,01	0,68	463
Maluku	7,32	0,23	3,09	6,87	7,76	0,77	1 004
Maluku Utara	6,39	0,24	3,79	5,92	6,87	0,53	757
Papua Barat	6,84	0,27	3,93	6,31	7,37	0,37	715
Papua	6,04	0,31	5,08	5,44	6,64	0,97	916
Indonesia	5,94	0,03	0,54	5,87	6,00	2,77	53 280

Sumber: BPS – Susenas Maret 2019

Tabel D.4 *Sampling Error* Rata-rata Lama Sekolah dari Penduduk Lansia Menurut Provinsi, 2019

Provinsi	Nilai Estimasi	Standard Error	Relative Standard Error (RSE)	Selang Kepercayaan		Efek Rancangan Sampling	Jumlah Sampel
				Batas Atas	Batas Bawah		
				(5)	(6)	(7)	(8)
Aceh	4,71	0,14	2,89	4,44	4,98	1,14	2 014
Sumatera Utara	5,63	0,13	2,27	5,38	5,88	2,62	3 660
Sumatera Barat	4,95	0,13	2,58	4,70	5,20	1,22	2 501
Riau	4,61	0,17	3,72	4,28	4,95	1,47	994
Jambi	3,97	0,19	4,69	3,61	4,34	1,26	929
Sumatera Selatan	4,24	0,13	3,10	3,98	4,50	1,81	1 782
Bengkulu	3,44	0,17	4,89	3,11	3,77	0,62	805
Lampung	3,25	0,13	4,05	3,00	3,51	2,36	1 634
Kep. Bangka Belitung	3,55	0,22	6,11	3,13	3,98	0,88	592
Kepulauan Riau	4,55	0,29	6,42	3,98	5,12	1,29	563
DKI Jakarta	8,15	0,21	2,56	7,75	8,56	3,99	836
Jawa Barat	4,60	0,09	1,98	4,42	4,78	5,65	4 241
Jawa Tengah	3,38	0,06	1,88	3,25	3,50	3,01	6 691
DI Yogyakarta	4,30	0,19	4,41	3,93	4,67	2,28	1 086
Jawa Timur	3,36	0,06	1,86	3,24	3,48	3,41	7 541
Banten	4,20	0,19	4,60	3,82	4,58	3,53	977
Bali	3,38	0,16	4,61	3,07	3,68	1,70	1 544
Nusa Tenggara Barat	1,66	0,13	7,95	1,40	1,92	1,52	1 069
Nusa Tenggara Timur	3,67	0,11	3,08	3,44	3,89	0,96	2 626
Kalimantan Barat	2,69	0,14	5,16	2,42	2,97	1,25	1 364
Kalimantan Tengah	4,63	0,20	4,25	4,25	5,02	0,86	923
Kalimantan Selatan	4,12	0,15	3,73	3,82	4,42	1,11	1 102
Kalimantan Timur	5,20	0,26	5,02	4,69	5,71	1,65	640
Kalimantan Utara	4,22	0,30	7,09	3,63	4,80	0,53	286
Sulawesi Utara	6,74	0,14	2,13	6,46	7,02	0,75	1 977
Sulawesi Tengah	5,40	0,18	3,25	5,06	5,74	1,18	1 167
Sulawesi Selatan	3,91	0,12	3,00	3,68	4,14	1,57	3 354
Sulawesi Tenggara	3,60	0,17	4,83	3,26	3,94	0,71	1 492
Gorontalo	5,23	0,23	4,40	4,78	5,68	0,75	545
Sulawesi Barat	3,77	0,22	5,84	3,34	4,21	0,66	563
Maluku	6,46	0,24	3,77	5,99	6,94	0,98	1 083
Maluku Utara	4,49	0,24	5,44	4,01	4,97	0,71	708
Papua Barat	5,47	0,27	4,88	4,95	6,00	0,37	656
Papua	5,20	0,29	5,63	4,62	5,77	0,89	731
Indonesia	4,10	0,03	0,72	4,04	4,16	3,07	58 676

Sumber: BPS – Susenas Maret 2019

Tabel D.5 *Sampling Error* Rata-rata Lama Sekolah dari Penduduk Lansia Menurut Provinsi, 2019

Perkotaan+Perdesaan, Laki-laki+Perempuan

Provinsi	Nilai Estimasi	Standard Error	Relative Standard Error (RSE)	Selang Kepercayaan		Efek Rancangan Sampling	Jumlah Sampel
				Batas Atas	Batas Bawah		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Aceh	5,60	0,12	2,10	5,37	5,83	1,38	3 727
Sumatera Utara	6,46	0,11	1,77	6,23	6,68	3,63	6 457
Sumatera Barat	5,66	0,12	2,13	5,43	5,90	1,78	4 585
Riau	5,29	0,14	2,60	5,02	5,56	1,95	1 985
Jambi	4,94	0,16	3,27	4,63	5,26	1,69	1 862
Sumatera Selatan	5,09	0,12	2,42	4,85	5,33	2,73	3 395
Bengkulu	4,76	0,15	3,15	4,47	5,05	0,76	1 582
Lampung	4,22	0,12	2,74	3,99	4,44	3,09	3 337
Kep. Bangka Belitung	4,57	0,19	4,19	4,20	4,95	1,20	1 168
Kepulauan Riau	5,44	0,27	4,97	4,91	5,97	1,73	1 117
DKI Jakarta	9,09	0,18	1,98	8,73	9,44	5,41	1 618
Jawa Barat	5,38	0,08	1,57	5,21	5,54	8,21	8 317
Jawa Tengah	4,27	0,06	1,33	4,15	4,38	3,90	12 876
DI Yogyakarta	5,59	0,19	3,31	5,23	5,95	3,36	1 964
Jawa Timur	4,20	0,06	1,40	4,09	4,32	4,73	14 164
Banten	5,17	0,17	3,37	4,83	5,51	5,32	1 888
Bali	4,50	0,14	3,15	4,22	4,78	2,14	2 968
Nusa Tenggara Barat	2,54	0,15	6,03	2,24	2,84	2,34	2 016
Nusa Tenggara Timur	4,52	0,11	2,47	4,31	4,74	1,33	4 963
Kalimantan Barat	3,76	0,13	3,36	3,51	4,01	1,54	2 687
Kalimantan Tengah	5,63	0,17	3,02	5,30	5,97	1,09	1 903
Kalimantan Selatan	5,21	0,15	2,81	4,92	5,49	1,48	2 078
Kalimantan Timur	6,20	0,22	3,62	5,76	6,64	2,35	1 422
Kalimantan Utara	5,34	0,27	5,06	4,81	5,87	0,74	614
Sulawesi Utara	7,16	0,12	1,70	6,92	7,40	0,98	3 742
Sulawesi Tengah	6,03	0,15	2,54	5,73	6,33	1,56	2 264
Sulawesi Selatan	4,87	0,12	2,41	4,64	5,10	2,21	5 959
Sulawesi Tenggara	4,80	0,17	3,53	4,47	5,13	1,01	2 695
Gorontalo	5,36	0,21	3,91	4,94	5,77	1,07	1 007
Sulawesi Barat	4,56	0,21	4,62	4,14	4,97	0,91	1 026
Maluku	6,88	0,20	2,97	6,48	7,28	1,31	2 087
Maluku Utara	5,46	0,21	3,87	5,04	5,87	0,86	1 465
Papua Barat	6,21	0,22	3,47	5,79	6,63	0,46	1 371
Papua	5,68	0,25	4,34	5,20	6,17	1,22	1 647
Indonesia	4,98	0,03	0,54	4,92	5,03	4,27	111 956

Sumber: BPS – Susenas Maret 2019

Tabel E.1 **Sampling Error Angka Kesakitan Penduduk Lansia Menurut Provinsi, 2019**

Provinsi	Nilai Estimasi	Standard Error	Relative Standard Error (RSE)	Selang Kepercayaan		Efek Rancangan Sampling	Jumlah Sampel
				Batas Atas	Batas Bawah		
				(5)	(6)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Aceh	31,83	2,89	9,06	26,18	37,49	1,92	1 038
Sumatera Utara	20,03	1,27	6,32	17,54	22,51	2,66	2 822
Sumatera Barat	24,38	2,56	10,50	19,37	29,40	3,64	1 847
Riau	19,43	1,92	9,87	15,67	23,19	1,60	776
Jambi	17,81	2,31	12,98	13,28	22,34	1,43	549
Sumatera Selatan	19,25	1,82	9,44	15,69	22,81	2,28	1 098
Bengkulu	21,76	2,63	12,09	16,60	26,92	0,76	444
Lampung	21,02	2,10	10,00	16,90	25,13	2,49	855
Kep. Bangka Belitung	18,31	2,22	12,13	13,96	22,67	0,95	695
Kepulauan Riau	21,10	2,40	11,39	16,39	25,81	1,28	791
DKI Jakarta	20,13	1,40	6,98	17,37	22,88	4,42	1 618
Jawa Barat	26,04	0,97	3,72	24,14	27,94	6,90	5 033
Jawa Tengah	25,39	0,89	3,50	23,65	27,13	4,14	6 339
DI Yogyakarta	23,01	1,92	8,35	19,25	26,78	3,27	1 104
Jawa Timur	22,11	0,76	3,42	20,63	23,59	3,73	6 710
Banten	31,17	2,34	7,50	26,59	35,76	5,89	1 193
Bali	23,45	1,78	7,59	19,96	26,94	2,32	1 588
Nusa Tenggara Barat	32,85	2,64	8,03	27,68	38,02	2,81	871
Nusa Tenggara Timur	26,17	2,82	10,78	20,64	31,70	1,65	638
Kalimantan Barat	19,11	2,36	12,33	14,49	23,73	2,31	821
Kalimantan Tengah	22,72	2,45	10,78	17,91	27,52	0,94	631
Kalimantan Selatan	22,79	2,12	9,30	18,64	26,95	1,59	797
Kalimantan Timur	22,27	2,30	10,35	17,76	26,79	2,03	733
Kalimantan Utara	22,20	3,19	14,35	15,95	28,44	0,71	255
Sulawesi Utara	20,61	1,75	8,49	17,18	24,05	1,14	1 446
Sulawesi Tengah	27,72	3,29	11,87	21,27	34,17	1,61	433
Sulawesi Selatan	22,88	1,59	6,93	19,77	25,99	2,06	1 757
Sulawesi Tenggara	21,48	2,79	12,97	16,02	26,94	1,28	506
Gorontalo	35,10	3,84	10,95	27,56	42,63	1,15	328
Sulawesi Barat	22,31	3,73	16,72	15,00	29,62	0,84	219
Maluku	13,28	2,31	17,42	8,74	17,81	1,11	588
Maluku Utara	25,51	4,22	16,53	17,24	33,78	0,87	308
Papua Barat	20,65	3,19	15,46	14,39	26,90	0,50	349
Papua	14,97	2,65	17,70	9,77	20,16	1,16	458
Indonesia	23,93	0,37	1,53	23,22	24,65	4,35	45 638

Sumber: BPS – Susenas Maret 2019

Tabel E.2 **Sampling Error Angka Kesakitan Penduduk Lansia Menurut Provinsi, 2019**

Provinsi	Nilai Estimasi	Standard Error	Relative Standard Error (RSE)	Selang Kepercayaan		Efek Rancangan Sampling	Jumlah Sampel
				Batas Atas	Batas Bawah		
				(5)	(6)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Aceh	39,23	1,49	3,80	36,31	42,15	1,08	2 689
Sumatera Utara	28,82	1,33	4,60	26,22	31,42	2,02	3 635
Sumatera Barat	26,64	1,19	4,47	24,31	28,98	0,95	2 738
Riau	27,60	1,92	6,97	23,83	31,37	1,95	1 209
Jambi	25,32	1,76	6,94	21,88	28,76	1,32	1 313
Sumatera Selatan	25,43	1,34	5,29	22,80	28,07	1,79	2 297
Bengkulu	27,37	2,03	7,42	23,39	31,35	0,96	1 138
Lampung	28,66	1,27	4,44	26,16	31,15	1,86	2 482
Kep. Bangka Belitung	24,87	2,91	11,71	19,16	30,58	0,99	473
Kepulauan Riau	33,95	3,65	10,74	26,80	41,09	0,48	326
DKI Jakarta	-	-	-	-	-	-	-
Jawa Barat	33,03	1,30	3,93	30,49	35,58	4,41	3 284
Jawa Tengah	26,83	0,81	3,02	25,24	28,41	3,47	6 537
DI Yogyakarta	29,51	2,36	8,00	24,88	34,13	2,33	860
Jawa Timur	26,07	0,80	3,06	24,51	27,64	3,74	7 454
Banten	39,66	2,80	7,06	34,17	45,15	4,04	695
Bali	31,28	2,14	6,85	27,08	35,48	1,77	1 380
Nusa Tenggara Barat	36,58	2,12	5,78	32,43	40,72	1,92	1 145
Nusa Tenggara Timur	35,78	1,18	3,29	33,47	38,09	0,92	4 325
Kalimantan Barat	29,11	1,68	5,76	25,82	32,39	1,50	1 866
Kalimantan Tengah	25,78	2,22	8,62	21,43	30,14	1,12	1 272
Kalimantan Selatan	26,78	1,93	7,22	22,99	30,57	1,45	1 281
Kalimantan Timur	22,13	2,72	12,27	16,81	27,45	1,51	689
Kalimantan Utara	37,57	3,96	10,54	29,80	45,33	0,58	359
Sulawesi Utara	29,84	1,58	5,30	26,74	32,94	0,73	2 296
Sulawesi Tengah	33,03	1,80	5,44	29,52	36,55	1,15	1 831
Sulawesi Selatan	25,31	1,01	3,97	23,34	27,28	1,23	4 202
Sulawesi Tenggara	30,02	1,44	4,81	27,19	32,85	0,53	2 189
Gorontalo	41,02	2,99	7,29	35,16	46,88	0,90	679
Sulawesi Barat	32,80	2,20	6,70	28,49	37,11	0,67	807
Maluku	23,84	1,61	6,74	20,69	26,98	0,47	1 499
Maluku Utara	26,63	2,06	7,75	22,58	30,67	0,55	1 157
Papua Barat	21,93	2,02	9,21	17,98	25,89	0,27	1 022
Papua	20,19	2,23	11,03	15,83	24,56	0,92	1 189
Indonesia	28,73	0,32	1,12	28,10	29,36	2,70	66 318

Sumber: BPS – Sakernas Agustus 2019

Tabel E.3 Sampling Error Angka Kesakitan Penduduk Lansia Menurut Provinsi, 2019

							Laki-laki
Provinsi	Nilai Estimasi	Standard Error	Relative Standard Error (RSE)	Selang Kepercayaan		Efek Rancangan Sampling	Jumlah Sampel
				Batas Atas	Batas Bawah		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Aceh	36,29	1,73	4,76	32,90	39,68	1,00	1 713
Sumatera Utara	23,46	1,20	5,12	21,11	25,82	1,85	2 797
Sumatera Barat	24,80	1,47	5,94	21,91	27,68	1,24	2 084
Riau	23,74	1,75	7,36	20,32	27,17	1,48	991
Jambi	21,99	1,68	7,62	18,71	25,28	0,99	933
Sumatera Selatan	24,23	1,37	5,67	21,53	26,92	1,48	1 613
Bengkulu	25,74	2,03	7,87	21,77	29,71	0,70	777
Lampung	24,36	1,29	5,31	21,83	26,90	1,50	1 703
Kep. Bangka Belitung	21,27	2,08	9,79	17,19	25,35	0,65	576
Kepulauan Riau	24,55	2,82	11,48	19,03	30,08	0,96	554
DKI Jakarta	18,75	1,72	9,18	15,37	22,12	3,37	782
Jawa Barat	27,27	0,95	3,49	25,40	29,13	4,44	4 076
Jawa Tengah	27,25	0,75	2,75	25,78	28,72	2,70	6 185
DI Yogyakarta	24,44	2,01	8,23	20,49	28,38	2,44	878
Jawa Timur	24,38	0,71	2,89	22,99	25,76	2,83	6 623
Banten	32,47	2,29	7,04	27,98	36,95	4,21	911
Bali	26,39	1,53	5,80	23,39	29,39	1,22	1 424
Nusa Tenggara Barat	35,79	2,13	5,95	31,61	39,96	1,74	947
Nusa Tenggara Timur	33,70	1,38	4,10	30,99	36,41	0,77	2 337
Kalimantan Barat	25,46	1,63	6,39	22,27	28,65	1,20	1 323
Kalimantan Tengah	22,58	1,97	8,73	18,71	26,44	0,82	980
Kalimantan Selatan	23,17	1,76	7,60	19,72	26,63	1,15	976
Kalimantan Timur	21,71	2,19	10,08	17,42	26,00	1,54	782
Kalimantan Utara	29,32	3,35	11,43	22,76	35,89	0,61	328
Sulawesi Utara	25,09	1,48	5,88	22,19	27,98	0,68	1 765
Sulawesi Tengah	30,75	1,86	6,04	27,11	34,39	0,87	1 097
Sulawesi Selatan	24,79	1,16	4,68	22,52	27,07	1,18	2 605
Sulawesi Tenggara	28,06	1,77	6,30	24,60	31,53	0,59	1 203
Gorontalo	36,66	2,97	8,10	30,85	42,48	0,75	462
Sulawesi Barat	32,15	2,56	7,95	27,14	37,16	0,57	463
Maluku	20,46	1,77	8,64	16,99	23,92	0,53	1 004
Maluku Utara	27,36	2,29	8,37	22,87	31,84	0,46	757
Papua Barat	21,27	2,27	10,66	16,82	25,71	0,33	715
Papua	17,60	1,94	11,01	13,80	21,39	0,76	916
Indonesia	26,08	0,31	1,17	25,48	26,68	2,60	53 280

Sumber: BPS – Susenas Maret 2019

Tabel E.4 *Sampling Error* Angka Kesakitan Penduduk Lansia Menurut Provinsi, 2019

							Perempuan
Provinsi	Nilai Estimasi	Standard Error	Relative Standard Error (RSE)	Selang Kepercayaan		Efek Rancangan Sampling	Jumlah Sampel
				Batas Atas	Batas Bawah		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Aceh	37,62	1,58	4,19	34,53	40,71	0,94	2 014
Sumatera Utara	24,74	1,11	4,48	22,57	26,92	1,79	3 660
Sumatera Barat	26,37	1,51	5,72	23,42	29,33	1,48	2 501
Riau	25,05	1,83	7,32	21,46	28,65	1,53	994
Jambi	23,76	1,88	7,93	20,06	27,45	1,17	929
Sumatera Selatan	22,19	1,35	6,07	19,54	24,83	1,59	1 782
Bengkulu	25,79	2,03	7,87	21,81	29,77	0,69	805
Lampung	28,63	1,50	5,23	25,70	31,56	1,78	1 634
Kep. Bangka Belitung	21,02	2,22	10,57	16,66	25,37	0,76	592
Kepulauan Riau	22,26	2,71	12,17	16,95	27,57	0,95	563
DKI Jakarta	21,40	1,74	8,11	18,00	24,80	3,34	836
Jawa Barat	28,84	0,96	3,33	26,95	30,72	4,59	4 241
Jawa Tengah	25,13	0,70	2,79	23,75	26,51	2,82	6 691
DI Yogyakarta	26,09	1,83	7,00	22,51	29,67	2,29	1 086
Jawa Timur	23,85	0,68	2,84	22,52	25,17	3,05	7 541
Banten	35,77	2,15	6,01	31,55	39,98	3,58	977
Bali	26,54	1,67	6,28	23,27	29,80	1,61	1 544
Nusa Tenggara Barat	33,95	2,08	6,12	29,88	38,02	1,93	1 069
Nusa Tenggara Timur	33,84	1,34	3,95	31,22	36,46	0,81	2 626
Kalimantan Barat	25,37	1,61	6,35	22,21	28,52	1,21	1 364
Kalimantan Tengah	26,77	2,23	8,33	22,40	31,14	0,86	923
Kalimantan Selatan	26,64	1,75	6,58	23,20	30,07	1,14	1 102
Kalimantan Timur	22,82	2,34	10,27	18,23	27,42	1,46	640
Kalimantan Utara	27,82	3,43	12,34	21,09	34,54	0,56	286
Sulawesi Utara	25,36	1,48	5,83	22,46	28,26	0,74	1 977
Sulawesi Tengah	32,39	2,06	6,35	28,35	36,42	1,06	1 167
Sulawesi Selatan	24,05	1,06	4,43	21,96	26,13	1,30	3 354
Sulawesi Tenggara	26,23	1,73	6,58	22,85	29,61	0,66	1 492
Gorontalo	40,14	2,99	7,45	34,28	46,01	0,84	545
Sulawesi Barat	28,31	2,37	8,36	23,67	32,95	0,60	563
Maluku	18,45	1,56	8,46	15,39	21,51	0,48	1 083
Maluku Utara	25,27	2,25	8,92	20,85	29,69	0,46	708
Papua Barat	21,56	2,47	11,47	16,72	26,41	0,33	656
Papua	18,63	2,29	12,31	14,13	23,12	0,74	731
Indonesia	26,30	0,30	1,13	25,72	26,89	2,70	58 676

Sumber: BPS – Susenas Maret 2019

Tabel E.5 *Sampling Error* Angka Kesakitan Penduduk Lansia Menurut Provinsi, 2019

Perkotaan+Perdesaan, Laki-laki+Perempuan

Provinsi	Nilai Estimasi	Standard Error	Relative Standard Error (RSE)	Selang Kepercayaan		Efek Rancangan Sampling	Jumlah Sampel
				Batas Atas	Batas Bawah		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Aceh	37,00	1,35	3,64	34,36	39,64	1,29	3 727
Sumatera Utara	24,16	0,93	3,84	22,34	25,97	2,35	6 457
Sumatera Barat	25,65	1,30	5,08	23,10	28,21	2,08	4 585
Riau	24,39	1,41	5,78	21,63	27,15	1,87	1 985
Jambi	22,87	1,40	6,14	20,12	25,62	1,34	1 862
Sumatera Selatan	23,18	1,09	4,69	21,05	25,31	1,96	3 395
Bengkulu	25,76	1,64	6,36	22,55	28,97	0,91	1 582
Lampung	26,48	1,09	4,13	24,33	28,62	2,01	3 337
Kep. Bangka Belitung	21,14	1,80	8,52	17,61	24,67	0,98	1 168
Kepulauan Riau	23,41	2,11	9,01	19,27	27,54	1,11	1 117
DKI Jakarta	20,13	1,40	6,98	17,37	22,88	4,42	1 618
Jawa Barat	28,07	0,79	2,80	26,53	29,61	6,09	8 317
Jawa Tengah	26,12	0,60	2,30	24,95	27,30	3,78	12 876
DI Yogyakarta	25,33	1,50	5,94	22,38	28,28	2,91	1 964
Jawa Timur	24,09	0,55	2,29	23,01	25,17	3,75	14 164
Banten	34,12	1,79	5,26	30,61	37,64	5,07	1 888
Bali	26,47	1,36	5,14	23,80	29,14	2,04	2 968
Nusa Tenggara Barat	34,81	1,67	4,81	31,53	38,09	2,33	2 016
Nusa Tenggara Timur	33,78	1,12	3,31	31,58	35,97	1,08	4 963
Kalimantan Barat	25,41	1,37	5,40	22,72	28,11	1,73	2 687
Kalimantan Tengah	24,59	1,66	6,76	21,33	27,85	1,06	1 903
Kalimantan Selatan	24,99	1,43	5,73	22,18	27,79	1,52	2 078
Kalimantan Timur	22,22	1,78	7,99	18,74	25,70	1,85	1 422
Kalimantan Utara	28,63	2,53	8,84	23,67	33,59	0,65	614
Sulawesi Utara	25,23	1,20	4,75	22,88	27,58	0,93	3 742
Sulawesi Tengah	31,58	1,59	5,03	28,46	34,69	1,27	2 264
Sulawesi Selatan	24,37	0,87	3,57	22,67	26,08	1,54	5 959
Sulawesi Tenggara	27,09	1,37	5,05	24,41	29,77	0,77	2 695
Gorontalo	38,52	2,37	6,16	33,87	43,17	1,00	1 007
Sulawesi Barat	30,11	1,93	6,41	26,32	33,89	0,73	1 026
Maluku	19,42	1,36	7,00	16,76	22,09	0,67	2 087
Maluku Utara	26,33	1,89	7,17	22,63	30,03	0,64	1 465
Papua Barat	21,40	1,77	8,27	17,93	24,87	0,37	1 371
Papua	18,03	1,70	9,42	14,70	21,36	0,99	1 647
Indonesia	26,20	0,25	0,94	25,71	26,68	3,51	111 956

Sumber: BPS – Susenas Maret 2019

Tabel F.1 *Sampling Error* Persentase Penduduk Lansia yang Bekerja Menurut Provinsi, 2019

Perkotaan							
Provinsi	Nilai Estimasi	Standard Error	Relative Standard Error (RSE)	Selang Kepercayaan		Efek Rancangan Sampling	Jumlah Sampel
				Batas Atas	Batas Bawah		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Aceh	33,31	2,09	6,28	29,34	37,53	0,93	374
Sumatera Utara	42,78	1,29	3,02	40,27	45,33	1,76	1 282
Sumatera Barat	45,09	1,78	3,94	41,64	48,59	1,26	693
Riau	33,37	2,34	7,00	28,96	38,10	1,59	241
Jambi	43,62	2,40	5,50	38,99	48,36	0,88	259
Sumatera Selatan	35,53	1,76	4,96	32,16	39,06	1,40	452
Bengkulu	45,04	3,02	6,70	39,22	51,00	0,65	203
Lampung	48,64	2,58	5,31	43,60	53,70	2,41	387
Kep. Bangka Belitung	41,96	2,41	5,74	37,32	46,74	0,66	303
Kepulauan Riau	34,67	2,80	8,08	29,40	40,35	1,26	225
DKI Jakarta	32,08	1,37	4,27	29,46	34,82	3,03	503
Jawa Barat	41,55	0,88	2,13	39,83	43,30	4,41	2 157
Jawa Tengah	47,30	0,80	1,69	45,74	48,87	2,42	3 008
DI Yogyakarta	50,97	1,78	3,49	47,48	54,44	1,90	560
Jawa Timur	48,98	0,77	1,58	47,47	50,50	2,58	3 455
Banten	33,57	1,78	5,30	30,18	37,13	3,17	393
Bali	49,07	1,63	3,31	45,89	52,26	1,33	798
Nusa Tenggara Barat	46,80	2,19	4,68	42,54	51,10	1,63	388
Nusa Tenggara Timur	40,19	2,80	6,96	34,85	45,78	1,25	276
Kalimantan Barat	34,29	2,42	7,05	29,72	39,17	1,58	290
Kalimantan Tengah	43,87	2,74	6,24	38,60	49,29	0,81	245
Kalimantan Selatan	39,04	2,07	5,31	35,07	43,17	1,09	319
Kalimantan Timur	40,14	2,33	5,80	35,67	44,77	1,48	338
Kalimantan Utara	38,96	3,79	9,73	31,84	46,59	0,73	85
Sulawesi Utara	40,77	1,66	4,07	37,56	44,06	0,67	562
Sulawesi Tengah	39,23	3,48	8,87	32,66	46,22	1,46	171
Sulawesi Selatan	34,14	1,42	4,17	31,41	36,99	1,24	608
Sulawesi Tenggara	35,49	3,04	8,56	29,79	41,65	0,94	159
Gorontalo	43,67	3,41	7,81	37,14	50,43	0,81	143
Sulawesi Barat	36,59	3,79	10,36	29,52	44,29	0,52	74
Maluku	35,37	2,76	7,80	30,17	40,94	0,76	224
Maluku Utara	37,65	3,77	10,00	30,60	45,27	0,53	110
Papua Barat	38,08	3,60	9,45	31,32	45,34	0,42	121
Papua	38,65	3,00	7,75	32,97	44,66	0,80	176
Indonesia	43,06	0,34	0,79	42,39	43,72	2,71	19 582

Sumber: BPS – Sakernas Agustus 2019

Tabel F.2 Sampling Error Persentase Penduduk Lansia yang Bekerja Menurut Provinsi, 2019

Provinsi	Nilai Estimasi	Standard Error	Relative Standard Error (RSE)	Selang Kepercayaan		Efek Rancangan Sampling	Jumlah Sampel
				Batas Atas	Batas Bawah		
				(5)	(6)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Aceh	46,01	1,29	2,81	43,49	48,55	0,74	1 224
Sumatera Utara	59,80	1,16	1,94	57,50	62,05	1,27	2 081
Sumatera Barat	56,09	1,20	2,14	53,73	58,43	0,72	1 486
Riau	47,57	1,71	3,60	44,22	50,93	1,22	598
Jambi	49,38	1,58	3,21	46,28	52,48	0,79	660
Sumatera Selatan	54,98	1,32	2,39	52,39	57,55	1,27	1 215
Bengkulu	58,35	1,95	3,34	54,49	62,12	0,70	647
Lampung	58,77	1,23	2,08	56,34	61,14	1,39	1 484
Kep. Bangka Belitung	56,41	2,71	4,80	51,05	61,62	0,62	260
Kepulauan Riau	49,05	3,69	7,52	41,89	56,26	0,40	160
DKI Jakarta	-	-	-	-	-	-	-
Jawa Barat	52,66	1,11	2,10	50,48	54,82	2,70	1 793
Jawa Tengah	56,52	0,73	1,29	55,09	57,94	2,16	3 744
DI Yogyakarta	71,70	2,15	2,99	67,31	75,72	1,83	555
Jawa Timur	61,88	0,71	1,15	60,48	63,26	2,29	4 577
Banten	44,21	2,45	5,55	39,47	49,06	2,93	286
Bali	62,83	1,79	2,85	59,27	66,27	1,06	845
Nusa Tenggara Barat	51,13	1,81	3,54	47,58	54,66	1,24	610
Nusa Tenggara Timur	60,78	1,01	1,65	58,79	62,73	0,61	2 388
Kalimantan Barat	56,66	1,56	2,76	53,58	59,69	1,05	1 033
Kalimantan Tengah	55,05	1,98	3,60	51,14	58,90	0,67	645
Kalimantan Selatan	56,75	1,62	2,86	53,54	59,89	0,79	709
Kalimantan Timur	53,68	3,11	5,80	47,55	59,69	1,33	304
Kalimantan Utara	52,42	2,90	5,53	46,74	58,05	0,29	160
Sulawesi Utara	55,48	1,30	2,34	52,93	58,01	0,39	1 074
Sulawesi Tengah	53,93	1,55	2,87	50,88	56,95	0,73	828
Sulawesi Selatan	45,88	0,99	2,15	43,95	47,82	0,85	1 888
Sulawesi Tenggara	57,34	1,63	2,84	54,12	60,50	0,60	823
Gorontalo	55,83	2,23	3,99	51,43	60,14	0,47	345
Sulawesi Barat	56,83	2,05	3,60	52,78	60,79	0,51	418
Maluku	56,41	1,95	3,46	52,56	60,19	0,49	727
Maluku Utara	53,84	2,04	3,79	49,83	57,81	0,41	512
Papua Barat	63,38	2,67	4,21	58,01	68,45	0,35	408
Papua	68,25	2,27	3,33	63,64	72,53	0,72	597
Indonesia	56,51	0,29	0,51	55,94	57,08	1,75	35 084

Sumber: BPS – Sakernas Agustus 2019

Tabel F.3 *Sampling Error* Persentase Penduduk Lansia yang Bekerja Menurut Provinsi, 2019

							Laki-laki
Provinsi	Nilai Estimasi	Standard Error	Relative Standard Error (RSE)	Selang Kepercayaan		Efek Rancangan Sampling	Jumlah Sampel
				Batas Atas	Batas Bawah		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Aceh	61,66	1,51	2,44	58,67	64,57	0,71	1 083
Sumatera Utara	63,27	1,28	2,02	60,73	65,73	1,56	1 802
Sumatera Barat	68,23	1,53	2,24	65,17	71,15	1,10	1 313
Riau	59,83	1,85	3,09	56,16	63,39	1,21	586
Jambi	65,53	1,82	2,78	61,88	69,01	0,86	620
Sumatera Selatan	62,83	1,41	2,24	60,03	65,54	1,18	1 077
Bengkulu	70,29	1,93	2,75	66,38	73,94	0,56	551
Lampung	72,90	1,22	1,68	70,44	75,23	1,21	1 274
Kep. Bangka Belitung	63,95	2,40	3,76	59,12	68,51	0,60	375
Kepulauan Riau	56,05	3,96	7,07	48,20	63,62	1,39	269
DKI Jakarta	41,81	2,02	4,83	37,91	45,81	2,83	311
Jawa Barat	61,37	0,96	1,57	59,47	63,24	3,64	2 636
Jawa Tengah	67,18	0,68	1,02	65,83	68,51	1,93	4 164
DI Yogyakarta	68,39	1,81	2,64	64,74	71,82	1,58	606
Jawa Timur	70,53	0,66	0,94	69,22	71,81	2,10	4 835
Banten	51,88	1,95	3,75	48,06	55,67	2,60	473
Bali	62,93	1,48	2,36	59,98	65,78	0,90	923
Nusa Tenggara Barat	65,11	1,90	2,92	61,29	68,74	1,33	629
Nusa Tenggara Timur	69,00	1,27	1,84	66,46	71,43	0,64	1 583
Kalimantan Barat	61,68	1,61	2,60	58,48	64,77	0,90	844
Kalimantan Tengah	63,70	2,14	3,35	59,42	67,77	0,71	582
Kalimantan Selatan	62,33	1,96	3,14	58,43	66,08	1,05	622
Kalimantan Timur	58,51	2,44	4,17	53,66	63,21	1,32	472
Kalimantan Utara	61,87	3,32	5,37	55,18	68,13	0,52	180
Sulawesi Utara	66,39	1,55	2,33	63,29	69,35	0,60	1 106
Sulawesi Tengah	66,41	1,87	2,82	62,65	69,97	0,81	643
Sulawesi Selatan	60,84	1,22	2,01	58,41	63,21	0,98	1 625
Sulawesi Tenggara	65,48	2,04	3,12	61,37	69,36	0,69	585
Gorontalo	68,41	2,52	3,68	63,28	73,13	0,56	314
Sulawesi Barat	71,45	2,42	3,39	66,48	75,96	0,52	318
Maluku	60,45	2,27	3,76	55,92	64,81	0,56	573
Maluku Utara	64,98	2,23	3,43	60,49	69,21	0,37	411
Papua Barat	59,39	3,00	5,05	53,40	65,10	0,39	322
Papua	63,35	2,47	3,90	58,39	68,05	0,78	501
Indonesia	64,47	0,30	0,46	63,88	65,06	2,02	34 208

Sumber: BPS – Sakernas Agustus 2019

Tabel F.4 *Sampling Error* Persentase Penduduk Lansia yang Bekerja Menurut Provinsi, 2019

							Perempuan
Provinsi	Nilai Estimasi	Standard Error	Relative Standard Error (RSE)	Selang Kepercayaan		Efek Rancangan Sampling	Jumlah Sampel
				Batas Atas	Batas Bawah		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Aceh	25,09	1,35	5,38	22,53	27,83	0,81	515
Sumatera Utara	40,09	1,13	2,83	37,89	42,33	1,40	1 561
Sumatera Barat	36,74	1,31	3,56	34,22	39,34	0,89	866
Riau	23,81	1,62	6,81	20,78	27,14	1,20	253
Jambi	29,21	1,69	5,80	26,00	32,64	0,80	299
Sumatera Selatan	33,78	1,31	3,87	31,26	36,39	1,12	590
Bengkulu	38,57	2,17	5,62	34,41	42,89	0,61	299
Lampung	38,49	1,58	4,11	35,44	41,64	1,65	597
Kep. Bangka Belitung	32,48	2,35	7,24	28,05	37,25	0,61	188
Kepulauan Riau	18,22	2,66	14,57	13,58	24,01	1,04	116
DKI Jakarta	23,11	1,62	6,99	20,09	26,42	2,68	192
Jawa Barat	28,96	0,86	2,96	27,31	30,66	3,51	1 314
Jawa Tengah	38,71	0,69	1,78	37,37	40,07	2,07	2 588
DI Yogyakarta	49,72	2,00	4,03	45,81	53,65	2,01	509
Jawa Timur	42,26	0,69	1,63	40,91	43,61	2,24	3 197
Banten	22,74	1,69	7,43	19,60	26,22	2,80	206
Bali	46,67	1,49	3,20	43,75	49,61	0,97	720
Nusa Tenggara Barat	35,06	1,74	4,97	31,72	38,54	1,28	369
Nusa Tenggara Timur	45,29	1,32	2,91	42,72	47,88	0,68	1 081
Kalimantan Barat	35,47	1,77	5,00	32,07	39,02	1,15	479
Kalimantan Tengah	36,53	2,08	5,70	32,56	40,70	0,61	308
Kalimantan Selatan	36,31	1,64	4,52	33,15	39,58	0,82	406
Kalimantan Timur	28,80	2,16	7,51	24,75	33,21	1,06	170
Kalimantan Utara	24,11	3,16	13,10	18,47	30,83	0,52	65
Sulawesi Utara	31,09	1,34	4,30	28,53	33,77	0,51	530
Sulawesi Tengah	33,48	1,82	5,44	30,01	37,14	0,78	356
Sulawesi Selatan	26,06	0,98	3,75	24,19	28,02	0,98	871
Sulawesi Tenggara	37,69	1,88	5,00	34,07	41,45	0,63	397
Gorontalo	35,17	2,72	7,73	30,04	40,66	0,70	174
Sulawesi Barat	35,58	2,58	7,26	30,70	40,79	0,59	174
Maluku	35,64	2,04	5,73	31,74	39,74	0,52	378
Maluku Utara	33,90	2,21	6,52	29,71	38,36	0,36	211
Papua Barat	45,68	3,35	7,33	39,23	52,28	0,39	207
Papua	46,15	2,84	6,16	40,65	51,75	0,70	272
Indonesia	35,66	0,29	0,80	35,10	36,22	2,02	20 458

Sumber: BPS – Sakernas Agustus 2019

Tabel F.5 *Sampling Error* Persentase Penduduk Lansia yang Bekerja Menurut Provinsi, 2019

Perkotaan+Perdesaan, Laki-laki+Perempuan

Provinsi	Nilai Estimasi	Standard Error	Relative Standard Error (RSE)	Selang Kepercayaan		Efek Rancangan Sampling	Jumlah Sampel
				Batas Atas	Batas Bawah		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Aceh	42,18	1,13	2,67	39,99	44,41	0,82	1 598
Sumatera Utara	50,74	0,90	1,78	48,97	52,51	1,58	3 363
Sumatera Barat	51,20	1,03	2,01	49,18	53,21	0,94	2 179
Riau	42,11	1,39	3,30	39,41	44,85	1,33	839
Jambi	47,51	1,32	2,78	44,93	50,11	0,81	919
Sumatera Selatan	47,95	1,08	2,24	45,85	50,06	1,32	1 667
Bengkulu	54,60	1,65	3,02	51,35	57,81	0,69	850
Lampung	55,87	1,16	2,08	53,59	58,13	1,72	1 871
Kep. Bangka Belitung	48,17	1,86	3,87	44,54	51,83	0,67	563
Kepulauan Riau	37,09	2,41	6,49	32,51	41,92	1,08	385
DKI Jakarta	32,08	1,37	4,27	29,46	34,82	3,03	503
Jawa Barat	44,73	0,71	1,59	43,34	46,13	3,95	3 950
Jawa Tengah	52,04	0,54	1,04	50,98	53,11	2,30	6 752
DI Yogyakarta	58,22	1,48	2,55	55,29	61,10	2,08	1 115
Jawa Timur	55,41	0,53	0,96	54,37	56,45	2,47	8 032
Banten	37,28	1,45	3,88	34,50	40,16	3,07	679
Bali	54,30	1,22	2,24	51,90	56,68	1,21	1 643
Nusa Tenggara Barat	49,08	1,41	2,86	46,33	51,83	1,42	998
Nusa Tenggara Timur	56,44	1,02	1,81	54,43	58,42	0,77	2 664
Kalimantan Barat	48,48	1,36	2,81	45,82	51,15	1,24	1 323
Kalimantan Tengah	50,71	1,62	3,19	47,54	53,88	0,72	890
Kalimantan Selatan	48,75	1,32	2,72	46,16	51,34	0,94	1 028
Kalimantan Timur	44,75	1,89	4,23	41,07	48,49	1,45	642
Kalimantan Utara	44,59	2,56	5,73	39,65	49,64	0,55	245
Sulawesi Utara	48,03	1,10	2,29	45,88	50,18	0,56	1 636
Sulawesi Tengah	49,88	1,50	3,00	46,95	52,82	0,94	999
Sulawesi Selatan	41,32	0,83	2,01	39,70	42,96	1,01	2 496
Sulawesi Tenggara	50,89	1,47	2,89	48,01	53,77	0,68	982
Gorontalo	50,68	1,94	3,82	46,88	54,46	0,61	488
Sulawesi Barat	52,44	1,85	3,53	48,80	56,05	0,53	492
Maluku	47,54	1,72	3,63	44,17	50,92	0,65	951
Maluku Utara	49,55	1,82	3,67	46,00	53,11	0,44	622
Papua Barat	53,13	2,26	4,25	48,69	57,52	0,39	529
Papua	56,13	1,94	3,46	52,30	59,89	0,78	773
Indonesia	49,39	0,23	0,47	48,94	49,84	2,28	54 666

Sumber: BPS – Sakernas Agustus 2019

Tabel G.1 *Sampling Error* Persentase Penduduk Lansia yang Tinggal di Rumah Tangga Ekonomi Bawah Menurut Provinsi, 2019

Provinsi	Nilai Estimasi	Standard Error	Relative Standard Error (RSE)	Selang Kepercayaan		Efek Rancangan Sampling	Jumlah Sampel
				Batas Atas	Batas Bawah		
				(5)	(6)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Aceh	35,76	3,43	9,59	29,04	42,49	2,56	1 038
Sumatera Utara	30,57	1,71	5,59	27,22	33,92	3,66	2 822
Sumatera Barat	37,31	2,46	6,59	32,50	42,13	2,64	1 847
Riau	32,64	2,80	8,57	27,16	38,12	2,43	776
Jambi	31,92	3,70	11,60	24,67	39,18	2,47	549
Sumatera Selatan	31,36	2,50	7,98	26,45	36,26	3,13	1 098
Bengkulu	43,42	3,53	8,12	36,50	50,33	0,94	444
Lampung	40,29	3,53	8,76	33,37	47,20	4,84	855
Kep. Bangka Belitung	38,77	3,28	8,46	32,34	45,20	1,30	695
Kepulauan Riau	41,15	3,50	8,49	34,30	48,00	1,86	791
DKI Jakarta	26,43	1,75	6,62	23,00	29,86	5,68	1 618
Jawa Barat	41,18	1,27	3,08	38,70	43,67	9,41	5 033
Jawa Tengah	42,70	1,13	2,65	40,48	44,91	5,18	6 339
DI Yogyakarta	51,03	2,49	4,87	46,16	55,91	3,87	1 104
Jawa Timur	46,33	1,19	2,56	44,00	48,65	6,37	6 710
Banten	41,30	2,84	6,88	35,73	46,87	7,69	1 193
Bali	49,54	2,32	4,67	45,00	54,08	2,83	1 588
Nusa Tenggara Barat	44,71	2,93	6,54	38,98	50,44	3,09	871
Nusa Tenggara Timur	33,95	3,67	10,81	26,76	41,14	2,41	638
Kalimantan Barat	36,40	3,09	8,50	30,33	42,46	2,66	821
Kalimantan Tengah	33,82	3,52	10,41	26,92	40,72	1,53	631
Kalimantan Selatan	35,10	2,64	7,53	29,92	40,28	1,91	797
Kalimantan Timur	42,02	3,08	7,33	35,98	48,05	2,57	733
Kalimantan Utara	29,82	3,95	13,25	22,07	37,56	0,90	255
Sulawesi Utara	35,63	2,56	7,20	30,61	40,66	1,75	1 446
Sulawesi Tengah	40,63	4,14	10,19	32,51	48,74	2,12	433
Sulawesi Selatan	37,31	2,16	5,79	33,07	41,54	2,88	1 757
Sulawesi Tenggara	39,96	4,33	10,85	31,46	48,45	2,18	506
Gorontalo	35,57	4,44	12,49	26,86	44,28	1,53	328
Sulawesi Barat	33,29	4,96	14,91	23,56	43,02	1,17	219
Maluku	39,25	3,93	10,02	31,54	46,95	1,55	588
Maluku Utara	41,47	5,25	12,65	31,19	51,75	1,06	308
Papua Barat	34,88	4,13	11,83	26,79	42,96	0,61	349
Papua	35,07	3,69	10,53	27,83	42,31	1,26	458
Indonesia	42,84	0,49	1,15	41,88	43,80	5,84	45 638

Sumber: BPS – Susenas Maret 2019

Tabel G.2 *Sampling Error* Persentase Penduduk Lansia yang Tinggal di Rumah Tangga Ekonomi Bawah Menurut Provinsi, 2019

Provinsi	Nilai Estimasi	Standard Error	Relative Standard Error (RSE)	Selang Kepercayaan		Efek Rancangan Sampling	Jumlah Sampel
				Batas Atas	Batas Bawah		
				(5)	(6)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Aceh	34,84	1,76	5,07	31,38	38,30	1,59	2 689
Sumatera Utara	31,64	1,30	4,11	29,09	34,18	1,84	3 635
Sumatera Barat	37,08	1,51	4,08	34,12	40,04	1,28	2 738
Riau	41,57	2,37	5,70	36,93	46,22	2,44	1 209
Jambi	39,65	2,13	5,37	35,47	43,82	1,53	1 313
Sumatera Selatan	37,03	1,69	4,56	33,72	40,34	2,30	2 297
Bengkulu	41,37	2,29	5,54	36,88	45,87	1,00	1 138
Lampung	41,05	1,56	3,79	38,00	44,10	2,35	2 482
Kep. Bangka Belitung	44,59	3,79	8,49	37,17	52,01	1,27	473
Kepulauan Riau	43,59	5,47	12,56	32,87	54,32	0,98	326
DKI Jakarta	-	-	-	-	-	-	-
Jawa Barat	43,00	1,46	3,39	40,15	45,86	5,01	3 284
Jawa Tengah	44,75	1,08	2,40	42,65	46,86	4,85	6 537
DI Yogyakarta	45,34	3,09	6,82	39,28	51,40	3,36	860
Jawa Timur	47,48	1,00	2,10	45,52	49,43	4,50	7 454
Banten	41,91	2,82	6,72	36,39	47,43	4,01	695
Bali	40,61	2,54	6,25	35,63	45,59	2,21	1 380
Nusa Tenggara Barat	43,86	2,74	6,24	38,50	49,23	3,02	1 145
Nusa Tenggara Timur	35,64	1,29	3,62	33,10	38,17	1,11	4 325
Kalimantan Barat	41,92	1,88	4,48	38,23	45,60	1,59	1 866
Kalimantan Tengah	39,69	2,58	6,50	34,63	44,75	1,21	1 272
Kalimantan Selatan	41,19	2,09	5,08	37,10	45,29	1,38	1 281
Kalimantan Timur	39,19	3,71	9,48	31,91	46,47	2,04	689
Kalimantan Utara	42,99	4,71	10,97	33,75	52,23	0,79	359
Sulawesi Utara	31,94	1,53	4,78	28,95	34,93	0,65	2 296
Sulawesi Tengah	36,98	1,99	5,38	33,08	40,87	1,34	1 831
Sulawesi Selatan	41,43	1,33	3,20	38,83	44,03	1,67	4 202
Sulawesi Tenggara	38,27	1,69	4,43	34,95	41,59	0,65	2 189
Gorontalo	35,46	3,12	8,81	29,33	41,58	1,04	679
Sulawesi Barat	36,73	2,70	7,35	31,43	42,02	0,96	807
Maluku	33,96	2,85	8,40	28,36	39,55	1,21	1 499
Maluku Utara	36,23	2,36	6,53	31,59	40,86	0,62	1 157
Papua Barat	34,48	2,78	8,07	29,02	39,94	0,40	1 022
Papua	28,07	2,65	9,43	22,88	33,26	1,03	1 189
Indonesia	43,46	0,39	0,90	42,69	44,23	3,31	66 318

Sumber: BPS – Susenas Maret 2019

Tabel G.3 *Sampling Error* Persentase Penduduk Lansia yang Tinggal di Rumah Tangga Ekonomi Bawah Menurut Provinsi, 2019

							Laki-laki
Provinsi	Nilai Estimasi	Standard Error	Relative Standard Error (RSE)	Selang Kepercayaan		Efek Rancangan Sampling	Jumlah Sampel
				Batas Atas	Batas Bawah		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Aceh	32,02	1,75	5,48	28,58	35,46	1,09	1 713
Sumatera Utara	28,80	1,28	4,45	26,28	31,31	1,84	2 797
Sumatera Barat	34,37	1,55	4,52	31,33	37,42	1,14	2 084
Riau	35,67	2,05	5,75	31,65	39,69	1,61	991
Jambi	35,46	2,02	5,70	31,50	39,43	1,08	933
Sumatera Selatan	33,26	1,61	4,83	30,11	36,41	1,68	1 613
Bengkulu	37,87	2,32	6,11	33,34	42,41	0,75	777
Lampung	41,09	1,62	3,93	37,92	44,26	1,79	1 703
Kep. Bangka Belitung	41,24	2,84	6,89	35,67	46,81	0,84	576
Kepulauan Riau	42,33	3,51	8,29	35,45	49,21	1,13	554
DKI Jakarta	26,30	2,07	7,86	22,25	30,36	3,82	782
Jawa Barat	40,29	1,14	2,83	38,05	42,52	5,25	4 076
Jawa Tengah	42,93	0,87	2,02	41,23	44,62	2,91	6 185
DI Yogyakarta	48,86	2,39	4,89	44,18	53,55	2,54	878
Jawa Timur	45,82	0,86	1,87	44,14	47,51	3,11	6 623
Banten	42,25	2,25	5,33	37,84	46,67	3,68	911
Bali	46,96	1,95	4,15	43,14	50,78	1,54	1 424
Nusa Tenggara Barat	42,86	2,25	5,24	38,46	47,26	1,82	947
Nusa Tenggara Timur	34,41	1,41	4,09	31,65	37,17	0,80	2 337
Kalimantan Barat	37,32	1,87	5,02	33,65	40,99	1,29	1 323
Kalimantan Tengah	36,00	2,41	6,69	31,28	40,72	0,93	980
Kalimantan Selatan	38,49	2,00	5,20	34,57	42,41	1,12	976
Kalimantan Timur	40,99	2,65	6,47	35,80	46,19	1,59	782
Kalimantan Utara	35,27	3,52	9,99	28,36	42,18	0,61	328
Sulawesi Utara	34,28	1,76	5,15	30,82	37,74	0,81	1 765
Sulawesi Tengah	36,64	2,00	5,45	32,72	40,55	0,93	1 097
Sulawesi Selatan	38,29	1,35	3,51	35,65	40,93	1,25	2 605
Sulawesi Tenggara	37,78	2,17	5,73	33,54	42,03	0,76	1 203
Gorontalo	34,66	2,98	8,61	28,81	40,51	0,77	462
Sulawesi Barat	35,16	2,78	7,92	29,70	40,62	0,65	463
Maluku	34,28	2,49	7,27	29,40	39,17	0,76	1 004
Maluku Utara	39,26	2,65	6,74	34,07	44,45	0,52	757
Papua Barat	35,18	2,65	7,54	29,98	40,38	0,33	715
Papua	29,95	2,46	8,22	25,12	34,77	0,85	916
Indonesia	41,97	0,36	0,86	41,26	42,67	2,83	53 280

Sumber: BPS – Susenas Maret 2019

Tabel G.4 *Sampling Error* Persentase Penduduk Lansia yang Tinggal di Rumah Tangga Ekonomi Bawah Menurut Provinsi, 2019

Provinsi	Nilai Estimasi	Standard Error	Relative Standard Error (RSE)	Selang Kepercayaan		Efek Rancangan Sampling	Jumlah Sampel
				Batas Atas	Batas Bawah		
				(5)	(6)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Aceh	35,91	1,70	4,73	32,58	39,24	1,11	2 014
Sumatera Utara	33,74	1,22	3,62	31,34	36,13	1,81	3 660
Sumatera Barat	39,95	1,53	3,82	36,96	42,95	1,23	2 501
Riau	40,58	2,32	5,72	36,03	45,13	1,91	994
Jambi	41,72	2,17	5,21	37,46	45,98	1,16	929
Sumatera Selatan	38,02	1,63	4,28	34,83	41,20	1,70	1 782
Bengkulu	45,74	2,32	5,07	41,20	50,29	0,70	805
Lampung	42,76	1,75	4,10	39,32	46,20	2,04	1 634
Kep. Bangka Belitung	41,91	2,87	6,84	36,30	47,53	0,86	592
Kepulauan Riau	43,83	3,65	8,34	36,67	51,00	1,22	563
DKI Jakarta	26,55	2,00	7,54	22,63	30,47	3,84	836
Jawa Barat	45,08	1,13	2,50	42,87	47,29	5,26	4 241
Jawa Tengah	45,60	0,86	1,88	43,92	47,28	3,19	6 691
DI Yogyakarta	51,65	2,19	4,25	47,34	55,95	2,55	1 086
Jawa Timur	48,56	0,86	1,76	46,88	50,24	3,53	7 541
Banten	42,71	2,32	5,44	38,16	47,26	3,92	977
Bali	49,54	1,86	3,76	45,89	53,19	1,57	1 544
Nusa Tenggara Barat	45,54	2,33	5,12	40,97	50,11	2,19	1 069
Nusa Tenggara Timur	37,86	1,40	3,69	35,12	40,59	0,84	2 626
Kalimantan Barat	41,87	1,87	4,48	38,19	45,54	1,27	1 364
Kalimantan Tengah	38,11	2,37	6,23	33,46	42,76	0,81	923
Kalimantan Selatan	41,31	1,92	4,64	37,56	45,07	1,10	1 102
Kalimantan Timur	40,82	2,88	7,06	35,17	46,47	1,61	640
Kalimantan Utara	36,10	3,70	10,26	28,84	43,36	0,57	286
Sulawesi Utara	34,93	1,66	4,75	31,68	38,18	0,77	1 977
Sulawesi Tengah	36,33	1,98	5,44	32,46	40,20	0,92	1 167
Sulawesi Selatan	43,56	1,35	3,11	40,91	46,22	1,57	3 354
Sulawesi Tenggara	42,57	2,09	4,91	38,47	46,66	0,77	1 492
Gorontalo	36,31	2,82	7,77	30,78	41,85	0,78	545
Sulawesi Barat	34,15	2,63	7,70	29,00	39,31	0,67	563
Maluku	36,26	2,39	6,60	31,56	40,95	0,73	1 083
Maluku Utara	38,36	2,52	6,58	33,41	43,31	0,46	708
Papua Barat	40,20	3,09	7,68	34,15	46,25	0,36	656
Papua	26,92	2,76	10,24	21,52	32,32	0,82	731
Indonesia	45,54	0,35	0,78	44,84	46,23	2,98	58 676

Sumber: BPS – Susenas Maret 2019

Tabel G.5 *Sampling Error* Persentase Penduduk Lansia yang Tinggal di Rumah Tangga Ekonomi Bawah Menurut Provinsi, 2019

Perkotaan+Perdesaan, Laki-laki+Perempuan

Provinsi	Nilai Estimasi	Standard Error	Relative Standard Error (RSE)	Selang Kepercayaan		Efek Rancangan Sampling	Jumlah Sampel
				Batas Atas	Batas Bawah		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Aceh	34,09	1,52	4,47	31,11	37,08	1,71	3 727
Sumatera Utara	31,47	1,09	3,45	29,34	33,60	2,75	6 457
Sumatera Barat	37,40	1,37	3,67	34,71	40,09	1,87	4 585
Riau	38,09	1,89	4,95	34,39	41,79	2,62	1 985
Jambi	38,57	1,85	4,81	34,94	42,21	1,74	1862
Sumatera Selatan	35,70	1,44	4,02	32,88	38,51	2,66	3 395
Bengkulu	41,77	2,05	4,90	37,76	45,79	1,12	1 582
Lampung	41,92	1,46	3,48	39,05	44,78	2,88	3 337
Kep. Bangka Belitung	41,58	2,56	6,16	36,56	46,60	1,36	1 168
Kepulauan Riau	43,08	3,15	7,31	36,91	49,25	1,81	1 117
DKI Jakarta	26,43	1,75	6,62	23,00	29,86	5,68	1 618
Jawa Barat	42,74	1,00	2,33	40,79	44,69	8,10	8 317
Jawa Tengah	44,35	0,77	1,73	42,84	45,85	4,84	12 876
DI Yogyakarta	50,38	2,03	4,02	46,41	54,34	4,00	1 964
Jawa Timur	47,29	0,76	1,61	45,80	48,78	5,22	14 164
Banten	42,48	1,98	4,67	38,60	46,37	5,70	1 888
Bali	48,33	1,74	3,60	44,92	51,73	2,59	2 968
Nusa Tenggara Barat	44,28	2,00	4,52	40,37	48,20	3,05	2 016
Nusa Tenggara Timur	36,23	1,21	3,35	33,85	38,61	1,23	4 963
Kalimantan Barat	39,62	1,65	4,16	36,39	42,84	1,98	2 687
Kalimantan Tengah	37,01	2,11	5,69	32,88	41,14	1,35	1 903
Kalimantan Selatan	39,97	1,69	4,23	36,65	43,28	1,65	2 078
Kalimantan Timur	40,91	2,36	5,77	36,29	45,54	2,34	1 422
Kalimantan Utara	35,65	3,12	8,74	29,54	41,76	0,88	614
Sulawesi Utara	34,62	1,55	4,46	31,59	37,65	1,29	3 742
Sulawesi Tengah	36,48	1,75	4,81	33,04	39,92	1,44	2 264
Sulawesi Selatan	41,25	1,20	2,90	38,91	43,60	2,21	5 959
Sulawesi Tenggara	40,31	1,84	4,55	36,72	43,91	1,14	2 695
Gorontalo	35,54	2,49	7,02	30,65	40,43	1,15	1 007
Sulawesi Barat	34,62	2,34	6,76	30,04	39,21	0,99	1 026
Maluku	35,30	2,21	6,27	30,97	39,64	1,23	2 087
Maluku Utara	38,82	2,31	5,94	34,30	43,34	0,78	1 465
Papua Barat	37,48	2,43	6,47	32,73	42,24	0,49	1 371
Papua	28,67	2,30	8,04	24,15	33,19	1,32	1 647
Indonesia	43,84	0,31	0,72	43,22	44,45	4,50	111 956

Sumber: BPS – Susenas Maret 2019

Tabel H.1 Sampling Error Persentase Rumah Tangga Lansia yang Menerima Beras Sejahtera (Rastra) Menurut Provinsi, 2019

Perkotaan							
Provinsi	Nilai Estimasi	Standard Error	Relative Standard Error (RSE)	Selang Kepercayaan		Efek Rancangan Sampling	Jumlah Sampel
				Batas Atas	Batas Bawah		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Aceh	29,53	3,63	12,30	22,41	36,64	2,48	833
Sumatera Utara	5,79	0,76	13,20	4,30	7,29	2,23	2 250
Sumatera Barat	7,99	1,86	23,25	4,35	11,63	3,73	1 414
Riau	10,96	1,72	15,73	7,58	14,34	1,64	613
Jambi	7,48	1,96	26,20	3,64	11,32	1,71	434
Sumatera Selatan	6,22	1,27	20,44	3,73	8,72	2,33	858
Bengkulu	7,56	1,89	25,06	3,85	11,27	0,79	362
Lampung	10,55	2,15	20,38	6,33	14,76	3,62	659
Kep. Bangka Belitung	5,12	1,33	25,95	2,51	7,72	0,80	517
Kepulauan Riau	4,14	0,81	19,47	2,56	5,73	0,47	607
DKI Jakarta	0,59	0,25	41,82	0,11	1,07	2,97	1 291
Jawa Barat	3,58	0,53	14,71	2,55	4,61	8,95	3 982
Jawa Tengah	1,71	0,32	18,79	1,08	2,33	4,61	4 900
DI Yogyakarta	0,00	-	-	-	-	-	-
Jawa Timur	2,09	0,35	16,72	1,40	2,77	5,21	5 260
Banten	4,71	0,99	20,93	2,78	6,65	4,04	951
Bali	9,61	1,65	17,16	6,38	12,84	2,97	1 127
Nusa Tenggara Barat	29,67	3,42	11,52	22,97	36,36	3,93	681
Nusa Tenggara Timur	11,41	2,48	21,77	6,54	16,27	1,82	476
Kalimantan Barat	5,45	1,57	28,78	2,38	8,53	2,40	649
Kalimantan Tengah	5,38	1,50	27,96	2,43	8,33	0,97	506
Kalimantan Selatan	6,63	1,46	22,03	3,76	9,49	1,76	652
Kalimantan Timur	3,15	0,95	30,07	1,30	5,01	1,58	604
Kalimantan Utara	3,16	1,51	47,61	0,21	6,12	0,71	207
Sulawesi Utara	11,20	1,44	12,89	8,37	14,03	0,96	1 072
Sulawesi Tengah	9,76	2,47	25,32	4,92	14,60	1,57	339
Sulawesi Selatan	4,72	0,80	16,91	3,15	6,28	1,59	1 374
Sulawesi Tenggara	9,18	2,50	27,17	4,29	14,08	1,67	404
Gorontalo	5,30	2,00	37,67	1,39	9,22	1,13	263
Sulawesi Barat	28,46	4,77	16,76	19,12	37,81	0,93	169
Maluku	15,65	2,64	16,86	10,48	20,82	0,97	464
Maluku Utara	6,25	2,17	34,73	2,00	10,51	0,61	249
Papua Barat	8,29	1,79	21,56	4,78	11,79	0,29	286
Papua	11,63	2,29	19,68	7,14	16,12	0,85	367
Indonesia	4,38	0,19	4,44	4,00	4,76	4,17	35 634

Keterangan : Warna kuning () artinya perlu kehati-hatian dalam menggunakan hasil estimasi

Sumber: BPS – Susenas Maret 2019

Tabel H.2 Sampling Error Persentase Rumah Tangga Lansia yang Menerima Beras Sejahtera (Rastra) Menurut Provinsi, 2019

Provinsi	Nilai Estimasi	Standard Error	Relative Standard Error (RSE)	Selang Kepercayaan		Efek Rancangan Sampling	Jumlah Sampel
				Batas Atas	Batas Bawah		
				(5)	(6)	(7)	(8)
Aceh	59,79	1,83	3,06	56,21	63,37	1,33	2 203
Sumatera Utara	25,51	1,48	5,79	22,62	28,41	2,12	2 888
Sumatera Barat	23,47	1,36	5,78	20,81	26,13	1,03	2 095
Riau	23,60	2,11	8,95	19,45	27,74	2,08	964
Jambi	26,36	1,84	6,97	22,76	29,96	1,10	1 029
Sumatera Selatan	31,64	1,70	5,38	28,31	34,98	1,94	1 768
Bengkulu	32,41	2,09	6,44	28,32	36,50	0,71	885
Lampung	36,72	1,89	5,15	33,01	40,42	2,81	1 935
Kep. Bangka Belitung	15,54	2,23	14,33	11,18	19,91	0,64	371
Kepulauan Riau	19,27	3,54	18,35	12,34	26,20	0,52	262
DKI Jakarta	-	-	-	-	-	-	-
Jawa Barat	7,80	1,00	12,86	5,84	9,77	6,31	2 539
Jawa Tengah	1,61	0,30	18,66	1,02	2,20	4,47	4 941
DI Yogyakarta	0,00	-	-	-	-	-	-
Jawa Timur	9,04	0,71	7,84	7,65	10,43	5,35	5 699
Banten	51,24	3,50	6,83	44,38	58,11	4,86	561
Bali	9,97	1,42	14,22	7,19	12,75	1,31	955
Nusa Tenggara Barat	51,19	3,23	6,31	44,85	57,52	3,21	852
Nusa Tenggara Timur	48,56	1,40	2,89	45,81	51,31	0,94	3 294
Kalimantan Barat	31,42	2,09	6,64	27,33	35,51	1,76	1 473
Kalimantan Tengah	15,50	2,26	14,56	11,08	19,93	1,38	1 024
Kalimantan Selatan	19,27	1,67	8,65	16,01	22,54	1,11	1 049
Kalimantan Timur	21,69	2,99	13,76	15,84	27,55	1,51	538
Kalimantan Utara	25,43	5,17	20,34	15,30	35,57	0,93	280
Sulawesi Utara	30,42	2,00	6,59	26,49	34,34	0,86	1 691
Sulawesi Tengah	44,57	1,99	4,48	40,66	48,48	0,98	1 418
Sulawesi Selatan	20,86	1,20	5,77	18,50	23,22	1,56	3 249
Sulawesi Tenggara	40,94	1,87	4,56	37,28	44,60	0,61	1 746
Gorontalo	18,27	2,19	11,97	13,98	22,56	0,61	527
Sulawesi Barat	49,32	3,58	7,25	42,32	56,33	1,26	642
Maluku	41,66	2,93	7,04	35,91	47,41	0,91	1 157
Maluku Utara	26,51	2,41	9,10	21,78	31,24	0,59	901
Papua Barat	61,01	3,34	5,47	54,47	67,56	0,43	802
Papua	46,18	3,39	7,34	39,54	52,83	1,13	955
Indonesia	18,73	0,30	1,60	18,14	19,32	2,44	51 293

Sumber: BPS – Susenas Maret 2019

Tabel H.3 Sampling Error Persentase Rumah Tangga Lansia yang Menerima Beras Sejahtera (Rastra) Menurut Provinsi, 2019

Perkotaan+Perdesaan

Provinsi	Nilai Estimasi	Standard Error	Relative Standard Error (RSE)	Selang Kepercayaan		Efek Rancangan Sampling	Jumlah Sampel
				Batas Atas	Batas Bawah		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Aceh	50,98	1,67	3,28	47,71	54,26	1,50	3 036
Sumatera Utara	15,06	0,83	5,54	13,42	16,69	2,14	5 138
Sumatera Barat	16,62	1,12	6,72	14,43	18,82	1,62	3 509
Riau	18,65	1,46	7,85	15,78	21,52	1,95	1 577
Jambi	20,18	1,43	7,08	17,38	22,98	1,19	1 463
Sumatera Selatan	22,32	1,26	5,67	19,84	24,80	2,11	2 626
Bengkulu	24,91	1,63	6,54	21,71	28,10	0,72	1 247
Lampung	29,18	1,52	5,21	26,20	32,16	2,87	2 594
Kep. Bangka Belitung	9,63	1,23	12,77	7,22	12,04	0,68	888
Kepulauan Riau	6,91	0,94	13,61	5,06	8,75	0,48	869
DKI Jakarta	0,59	0,25	41,82	0,11	1,07	2,97	1 291
Jawa Barat	4,80	0,47	9,87	3,87	5,72	7,69	6 521
Jawa Tengah	1,66	0,22	13,24	1,23	2,09	4,54	9 841
DI Yogyakarta	0,00	-	-	-	-	-	-
Jawa Timur	5,57	0,39	7,08	4,80	6,34	5,17	10 959
Banten	20,86	1,47	7,03	17,98	23,73	3,72	1 512
Bali	9,75	1,15	11,84	7,49	12,01	2,32	2 082
Nusa Tenggara Barat	40,90	2,36	5,77	36,28	45,53	3,39	1 533
Nusa Tenggara Timur	41,14	1,27	3,08	38,65	43,62	0,99	3 770
Kalimantan Barat	21,89	1,48	6,74	19,00	24,78	1,75	2 122
Kalimantan Tengah	11,64	1,53	13,11	8,65	14,63	1,29	1 530
Kalimantan Selatan	13,56	1,14	8,42	11,33	15,80	1,26	1 701
Kalimantan Timur	9,60	1,15	12,01	7,34	11,87	1,26	1 142
Kalimantan Utara	12,24	2,52	20,56	7,31	17,18	0,95	487
Sulawesi Utara	20,81	1,25	6,02	18,35	23,26	0,87	2 763
Sulawesi Tengah	35,15	1,75	4,97	31,72	38,57	1,12	1 757
Sulawesi Selatan	14,62	0,80	5,48	13,05	16,19	1,49	4 623
Sulawesi Tenggara	29,99	1,58	5,28	26,88	33,09	0,77	2 150
Gorontalo	12,72	1,47	11,53	9,84	15,59	0,65	790
Sulawesi Barat	44,05	3,02	6,85	38,14	49,97	1,22	811
Maluku	30,76	2,15	6,98	26,55	34,97	0,95	1 621
Maluku Utara	20,89	1,92	9,19	17,13	24,66	0,61	1 150
Papua Barat	38,33	2,45	6,38	33,53	43,12	0,40	1 088
Papua	32,12	2,22	6,92	27,76	36,47	0,93	1 322
Indonesia	11,14	0,18	1,59	10,79	11,48	2,76	86 927

Keterangan : Warna kuning () artinya perlu kehati-hatian dalam menggunakan hasil estimasi
Sumber: BPS – Susenas Maret 2019

Tabel I.1 *Sampling Error* Persentase Rumah Tangga Lansia yang Memiliki Jaminan Sosial Menurut Provinsi, 2019

Provinsi	Nilai Estimasi	Standard Error	Relative Standard Error (RSE)	Selang Kepercayaan		Efek Rancangan Sampling	Jumlah Sampel
				Batas Atas	Batas Bawah		
				(5)	(6)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Aceh	31,18	2,65	8,49	25,99	36,37	1,28	833
Sumatera Utara	17,91	1,43	7,99	15,10	20,71	2,89	2 250
Sumatera Barat	27,11	2,13	7,86	22,93	31,28	1,82	1 414
Riau	17,05	2,18	12,76	12,79	21,32	1,81	613
Jambi	21,42	2,81	13,11	15,92	26,93	1,44	434
Sumatera Selatan	22,71	2,17	9,55	18,46	26,96	2,25	858
Bengkulu	25,71	3,13	12,18	19,57	31,84	0,79	362
Lampung	14,42	2,10	14,58	10,30	18,54	2,65	659
Kep. Bangka Belitung	13,71	1,86	13,57	10,06	17,36	0,65	517
Kepulauan Riau	18,40	2,71	14,76	13,08	23,72	1,41	607
DKI Jakarta	15,47	1,46	9,41	12,62	18,32	4,64	1 291
Jawa Barat	15,69	0,81	5,16	14,11	17,28	5,52	3 982
Jawa Tengah	17,16	0,76	4,41	15,67	18,64	3,03	4 900
DI Yogyakarta	28,47	2,10	7,38	24,36	32,59	2,48	814
Jawa Timur	14,63	0,77	5,27	13,12	16,14	4,16	5 260
Banten	12,59	1,43	11,33	9,80	15,39	3,45	951
Bali	19,20	1,65	8,61	15,96	22,44	1,67	1 127
Nusa Tenggara Barat	14,24	1,88	13,17	10,57	17,92	2,02	681
Nusa Tenggara Timur	36,51	3,19	8,75	30,25	42,77	1,31	476
Kalimantan Barat	19,24	2,31	12,00	14,72	23,77	1,73	649
Kalimantan Tengah	29,91	2,83	9,45	24,37	35,45	0,83	506
Kalimantan Selatan	29,47	2,26	7,67	25,04	33,90	1,26	652
Kalimantan Timur	26,37	2,63	9,98	21,21	31,53	1,92	604
Kalimantan Utara	18,54	3,35	18,08	11,97	25,11	0,71	207
Sulawesi Utara	18,94	1,59	8,40	15,82	22,05	0,75	1 072
Sulawesi Tengah	27,15	4,01	14,76	19,29	35,00	1,84	339
Sulawesi Selatan	28,90	1,89	6,53	25,20	32,59	1,94	1 374
Sulawesi Tenggara	32,70	3,96	12,10	24,95	40,46	1,59	404
Gorontalo	19,29	2,62	13,57	14,16	24,42	0,63	263
Sulawesi Barat	23,79	3,84	16,15	16,26	31,32	0,68	169
Maluku	26,80	2,98	11,13	20,95	32,64	0,84	464
Maluku Utara	40,10	4,91	12,25	30,47	49,74	0,76	249
Papua Barat	25,57	4,43	17,31	16,90	34,25	0,71	286
Papua	39,02	4,24	10,86	30,72	47,33	1,26	367
Indonesia	17,81	0,33	1,85	17,16	18,46	3,43	35 634

Sumber: BPS – Susenas Maret 2019

Tabel I.2 Sampling Error Persentase Rumah Tangga Lansia yang Memiliki Jaminan Sosial Menurut Provinsi, 2019

Provinsi	Nilai Estimasi	Standard Error	Relative Standard Error (RSE)	Selang Kepercayaan		Efek Rancangan Sampling	Jumlah Sampel
				Batas Atas	Batas Bawah		
				(5)	(6)	(7)	(8)
Aceh	7,94	0,79	9,91	6,40	9,48	0,81	2 203
Sumatera Utara	9,21	0,86	9,37	7,52	10,91	1,64	2 888
Sumatera Barat	8,80	0,80	9,10	7,23	10,37	0,80	2 095
Riau	5,15	0,86	16,66	3,47	6,83	1,26	964
Jambi	5,80	0,82	14,10	4,20	7,41	0,77	1 029
Sumatera Selatan	4,70	0,66	14,04	3,41	5,99	1,41	1 768
Bengkulu	7,01	1,00	14,32	5,04	8,98	0,55	885
Lampung	3,88	0,57	14,81	2,75	5,00	1,62	1 935
Kep. Bangka Belitung	5,77	1,80	31,17	2,25	9,30	1,01	371
Kepulauan Riau	1,85	0,79	42,92	0,29	3,41	0,22	262
DKI Jakarta	-	-	-	-	-	-	-
Jawa Barat	8,30	0,76	9,13	6,82	9,79	3,40	2 539
Jawa Tengah	7,32	0,49	6,69	6,36	8,28	2,78	4 941
DI Yogyakarta	26,89	2,80	10,43	21,40	32,39	2,45	600
Jawa Timur	5,01	0,37	7,29	4,29	5,73	2,46	5 699
Banten	7,04	1,22	17,26	4,66	9,42	2,23	561
Bali	9,73	1,31	13,50	7,15	12,30	1,15	955
Nusa Tenggara Barat	6,08	0,94	15,54	4,23	7,93	1,20	852
Nusa Tenggara Timur	7,01	0,56	8,04	5,90	8,11	0,58	3 294
Kalimantan Barat	6,64	0,83	12,50	5,02	8,27	0,97	1 473
Kalimantan Tengah	12,33	1,84	14,91	8,73	15,93	1,11	1 024
Kalimantan Selatan	11,06	1,15	10,43	8,80	13,32	0,84	1 049
Kalimantan Timur	16,90	2,94	17,37	11,14	22,65	1,76	538
Kalimantan Utara	7,81	2,42	31,06	3,05	12,56	0,54	280
Sulawesi Utara	12,34	1,04	8,46	10,29	14,38	0,46	1 691
Sulawesi Tengah	8,20	1,00	12,15	6,25	10,16	0,80	1 418
Sulawesi Selatan	9,55	0,70	7,35	8,18	10,93	1,02	3 249
Sulawesi Tenggara	8,86	0,90	10,13	7,10	10,62	0,42	1 746
Gorontalo	10,42	1,71	16,42	7,06	13,77	0,60	527
Sulawesi Barat	7,11	1,39	19,54	4,39	9,84	0,72	642
Maluku	11,71	1,66	14,14	8,47	14,96	0,68	1 157
Maluku Utara	5,69	0,85	14,95	4,02	7,36	0,27	901
Papua Barat	12,51	2,09	16,68	8,42	16,59	0,36	802
Papua	6,73	1,50	22,23	3,80	9,66	0,87	955
Indonesia	7,40	0,18	2,45	6,40	9,48	0,81	2 203

Keterangan : Warna kuning () artinya perlu kehati-hatian dalam menggunakan hasil estimasi
 Sumber: BPS – Susenas Maret 2019

Tabel I.3 *Sampling Error* Persentase Rumah Tangga Lansia yang Memiliki Jaminan Sosial Menurut Provinsi, 2019

Provinsi	Nilai Estimasi	Standard Error	Relative Standard Error (RSE)	Selang Kepercayaan		Efek Rancangan Sampling	Jumlah Sampel
				Batas Atas	Batas Bawah		
				(5)	(6)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Aceh	14,70	0,96	6,50	12,83	16,58	0,98	3 036
Sumatera Utara	13,82	0,86	6,24	12,13	15,51	2,45	5 138
Sumatera Barat	16,90	1,07	6,32	14,80	18,99	1,46	3 509
Riau	9,81	1,00	10,23	7,84	11,77	1,57	1 577
Jambi	10,92	1,13	10,39	8,69	13,14	1,25	1 463
Sumatera Selatan	11,31	0,94	8,34	9,46	13,15	2,03	2 626
Bengkulu	12,66	1,24	9,83	10,22	15,09	0,71	1 247
Lampung	6,91	0,75	10,84	5,44	8,38	2,24	2 594
Kep. Bangka Belitung	10,27	1,30	12,62	7,73	12,82	0,71	888
Kepulauan Riau	15,38	2,26	14,72	10,94	19,81	1,38	869
DKI Jakarta	15,47	1,46	9,41	12,62	18,32	4,64	1 291
Jawa Barat	13,56	0,62	4,54	12,36	14,77	5,07	6 521
Jawa Tengah	12,13	0,45	3,69	11,25	13,01	2,89	9 841
DI Yogyakarta	27,92	1,68	6,02	24,63	31,21	2,46	1 414
Jawa Timur	9,82	0,43	4,36	8,98	10,66	3,63	10 959
Banten	10,67	1,02	9,56	8,67	12,67	3,12	1 512
Bali	15,58	1,14	7,31	13,35	17,82	1,51	2 082
Nusa Tenggara Barat	9,98	1,03	10,32	7,96	12,00	1,74	1 533
Nusa Tenggara Timur	12,90	0,81	6,30	11,31	14,50	0,88	3 770
Kalimantan Barat	11,27	1,02	9,07	9,26	13,27	1,43	2 122
Kalimantan Tengah	19,04	1,57	8,25	15,97	22,12	0,92	1 530
Kalimantan Selatan	19,37	1,22	6,32	16,97	21,77	1,09	1 701
Kalimantan Timur	23,08	1,98	8,60	19,19	26,97	1,83	1 142
Kalimantan Utara	14,16	2,22	15,64	9,82	18,50	0,65	487
Sulawesi Utara	15,64	0,96	6,12	13,76	17,51	0,63	2 763
Sulawesi Tengah	13,33	1,36	10,22	10,66	16,00	1,34	1 757
Sulawesi Selatan	17,03	0,89	5,20	15,29	18,76	1,61	4 623
Sulawesi Tenggara	17,09	1,49	8,74	14,16	20,01	1,02	2 150
Gorontalo	14,21	1,48	10,44	11,31	17,12	0,60	790
Sulawesi Barat	11,33	1,48	13,07	8,42	14,23	0,72	811
Maluku	18,03	1,59	8,79	14,93	21,14	0,75	1 621
Maluku Utara	15,24	1,74	11,44	11,82	18,65	0,64	1 150
Papua Barat	18,13	2,28	12,58	13,66	22,60	0,56	1 088
Papua	19,88	2,16	10,86	15,64	24,11	1,20	1 322
Indonesia	12,91	0,19	1,51	12,53	13,29	2,94	86 927

Sumber: BPS – Susenas Maret 2019

Tabel J.1 *Sampling Error* Persentase Penduduk Lansia yang Memiliki Jaminan Kesehatan Menurut Provinsi, 2019

Perkotaan							
Provinsi	Nilai Estimasi	Standard Error	Relative Standard Error (RSE)	Selang Kepercayaan		Efek Rancangan Sampling	Jumlah Sampel
				Batas Atas	Batas Bawah		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Aceh	98,06	0,63	0,65	96,82	99,30	1,05	1 038
Sumatera Utara	71,90	1,82	2,54	68,32	75,47	4,37	2 822
Sumatera Barat	77,60	2,27	2,93	73,14	82,05	3,04	1 847
Riau	73,87	2,69	3,64	68,59	79,14	2,56	776
Jambi	74,62	3,34	4,47	68,08	81,16	2,31	549
Sumatera Selatan	72,16	2,18	3,02	67,89	76,44	2,55	1 098
Bengkulu	73,46	3,24	4,41	67,11	79,81	1,00	444
Lampung	76,16	2,82	3,71	70,62	81,69	4,11	855
Kep. Bangka Belitung	80,60	2,64	3,27	75,43	85,77	1,28	695
Kepulauan Riau	72,89	3,33	4,56	66,37	79,40	2,06	791
DKI Jakarta	92,24	0,96	1,04	90,35	94,12	4,64	1 618
Jawa Barat	73,49	1,04	1,42	71,45	75,53	7,89	5 033
Jawa Tengah	78,18	0,86	1,10	76,49	79,87	4,31	6 339
DI Yogyakarta	87,63	1,40	1,60	84,87	90,38	2,85	1 104
Jawa Timur	68,05	1,09	1,60	65,92	70,17	6,10	6 710
Banten	70,88	2,23	3,15	66,50	75,25	5,57	1 193
Bali	79,14	1,67	2,11	75,86	82,41	2,23	1 588
Nusa Tenggara Barat	69,74	2,80	4,01	64,26	75,22	3,31	871
Nusa Tenggara Timur	77,14	3,46	4,48	70,36	83,91	2,72	638
Kalimantan Barat	73,14	2,73	3,74	67,79	78,50	2,45	821
Kalimantan Tengah	70,40	3,07	4,36	64,38	76,41	1,25	631
Kalimantan Selatan	85,77	1,98	2,30	81,89	89,64	2,00	797
Kalimantan Timur	84,50	2,03	2,41	80,51	88,48	2,09	733
Kalimantan Utara	88,42	2,45	2,78	83,61	93,23	0,71	255
Sulawesi Utara	87,73	1,30	1,48	85,19	90,27	0,96	1 446
Sulawesi Tengah	81,38	3,42	4,21	74,67	88,09	2,31	433
Sulawesi Selatan	83,34	1,55	1,86	80,30	86,38	2,49	1 757
Sulawesi Tenggara	74,38	3,36	4,52	67,79	80,96	1,65	506
Gorontalo	85,25	3,03	3,55	79,31	91,18	1,30	328
Sulawesi Barat	96,45	1,47	1,52	93,57	99,32	0,66	219
Maluku	76,56	2,81	3,67	71,06	82,06	1,05	588
Maluku Utara	78,69	3,19	4,05	72,44	84,93	0,57	308
Papua Barat	85,30	2,28	2,67	80,82	89,77	0,34	349
Papua	85,80	2,67	3,11	80,58	91,03	1,23	458
Indonesia	75,86	0,40	0,53	75,07	76,65	5,31	45 638

Sumber: BPS – Susenas Maret 2019

Tabel J.2 *Sampling Error Persentase Penduduk Lansia yang Memiliki Jaminan Kesehatan Menurut Provinsi, 2019*

Provinsi	Nilai Estimasi	Standard Error	Relative Standard Error (RSE)	Selang Kepercayaan		Efek Rancangan Sampling	Jumlah Sampel
				Batas Atas	Batas Bawah		
				(5)	(6)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Aceh	97,14	0,45	0,46	96,26	98,02	0,84	2 689
Sumatera Utara	53,75	1,43	2,67	50,94	56,56	1,94	3 635
Sumatera Barat	68,10	1,49	2,18	65,19	71,02	1,33	2 738
Riau	55,01	2,49	4,53	50,13	59,89	2,64	1 209
Jambi	52,75	2,12	4,03	48,58	56,91	1,46	1 313
Sumatera Selatan	55,20	2,12	3,84	51,04	59,36	3,43	2 297
Bengkulu	61,61	2,44	3,96	56,82	66,40	1,17	1 138
Lampung	50,42	1,67	3,32	47,14	53,70	2,62	2 482
Kep. Bangka Belitung	63,04	3,55	5,62	56,09	69,99	1,18	473
Kepulauan Riau	71,93	6,24	8,68	59,69	84,17	1,56	326
DKI Jakarta	-	-	-	-	-	-	-
Jawa Barat	56,89	1,40	2,46	54,14	59,63	4,63	3 284
Jawa Tengah	69,40	0,94	1,35	67,56	71,24	4,30	6 537
DI Yogyakarta	84,06	2,61	3,11	78,93	89,18	4,43	860
Jawa Timur	55,51	1,02	1,83	53,52	57,50	4,71	7 454
Banten	50,49	2,92	5,79	44,76	56,22	4,21	695
Bali	71,88	2,38	3,31	67,22	76,55	2,32	1 380
Nusa Tenggara Barat	55,22	2,35	4,25	50,62	59,82	2,22	1 145
Nusa Tenggara Timur	70,76	1,13	1,60	68,54	72,98	0,95	4 325
Kalimantan Barat	49,02	1,93	3,94	45,23	52,81	1,64	1 866
Kalimantan Tengah	57,79	2,54	4,39	52,81	62,76	1,14	1 272
Kalimantan Selatan	73,83	2,12	2,87	69,68	77,98	1,77	1 281
Kalimantan Timur	76,49	3,20	4,18	70,23	82,76	2,00	689
Kalimantan Utara	90,91	2,30	2,53	86,39	95,42	0,56	359
Sulawesi Utara	77,50	1,51	1,95	74,54	80,46	0,80	2 296
Sulawesi Tengah	63,77	1,74	2,73	60,35	67,18	1,03	1 831
Sulawesi Selatan	76,29	1,10	1,44	74,14	78,44	1,52	4 202
Sulawesi Tenggara	71,08	1,50	2,11	68,14	74,03	0,59	2 189
Gorontalo	82,09	2,14	2,61	77,90	86,28	0,76	679
Sulawesi Barat	83,83	1,85	2,21	80,20	87,46	0,77	807
Maluku	60,98	2,79	4,57	55,52	66,44	1,09	1 499
Maluku Utara	70,16	2,34	3,34	65,56	74,76	0,67	1 157
Papua Barat	84,78	2,27	2,68	80,33	89,24	0,46	1 022
Papua	88,86	1,72	1,93	85,49	92,22	0,89	1 189
Indonesia	62,79	0,38	0,61	62,04	63,54	3,34	66 318

Sumber: BPS – Sakernas Agustus 2019

Tabel J.3 *Sampling Error* Persentase Penduduk Lansia yang Memiliki Jaminan Kesehatan Menurut Provinsi, 2019

							Laki-laki
Provinsi	Nilai Estimasi	Standard Error	Relative Standard Error (RSE)	Selang Kepercayaan		Efek Rancangan Sampling	Jumlah Sampel
				Batas Atas	Batas Bawah		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Aceh	98,05	0,41	0,41	97,25	98,85	0,67	1 713
Sumatera Utara	64,54	1,44	2,23	61,71	67,37	2,09	2 797
Sumatera Barat	74,21	1,48	1,99	71,31	77,11	1,22	2 084
Riau	64,36	2,14	3,33	60,17	68,56	1,76	991
Jambi	59,28	2,08	3,51	55,19	63,36	1,09	933
Sumatera Selatan	61,39	1,76	2,87	57,93	64,85	1,89	1 613
Bengkulu	66,85	2,27	3,40	62,40	71,31	0,76	777
Lampung	58,57	1,67	2,85	55,30	61,83	1,90	1 703
Kep. Bangka Belitung	71,10	2,57	3,61	66,07	76,13	0,81	576
Kepulauan Riau	74,84	3,07	4,10	68,82	80,86	1,12	554
DKI Jakarta	92,23	1,14	1,23	89,99	94,46	3,13	782
Jawa Barat	68,75	1,02	1,48	66,75	70,74	4,69	4 076
Jawa Tengah	73,56	0,74	1,01	72,11	75,01	2,68	6 185
DI Yogyakarta	86,44	1,67	1,93	83,17	89,71	2,65	878
Jawa Timur	61,81	0,86	1,40	60,11	63,50	3,32	6 623
Banten	66,62	2,10	3,15	62,50	70,73	3,50	911
Bali	77,58	1,50	1,94	74,63	80,53	1,31	1 424
Nusa Tenggara Barat	64,85	2,14	3,30	60,65	69,04	1,77	947
Nusa Tenggara Timur	75,41	1,25	1,66	72,96	77,86	0,76	2 337
Kalimantan Barat	58,71	1,81	3,08	55,17	62,25	1,16	1 323
Kalimantan Tengah	64,47	2,29	3,56	59,98	68,96	0,85	980
Kalimantan Selatan	79,80	1,76	2,21	76,34	83,25	1,27	976
Kalimantan Timur	82,58	1,84	2,23	78,97	86,19	1,29	782
Kalimantan Utara	89,91	1,97	2,19	86,04	93,78	0,48	328
Sulawesi Utara	83,12	1,18	1,42	80,80	85,44	0,58	1 765
Sulawesi Tengah	70,58	1,83	2,59	66,99	74,16	0,87	1 097
Sulawesi Selatan	79,71	1,08	1,36	77,59	81,83	1,18	2 605
Sulawesi Tenggara	73,26	1,97	2,69	69,40	77,12	0,76	1 203
Gorontalo	84,96	1,93	2,27	81,18	88,74	0,57	462
Sulawesi Barat	87,20	1,79	2,06	83,68	90,71	0,55	463
Maluku	69,42	2,42	3,48	64,68	74,15	0,76	1 004
Maluku Utara	73,30	2,18	2,97	69,04	77,57	0,43	757
Papua Barat	86,86	1,70	1,95	83,53	90,19	0,27	715
Papua	87,89	1,66	1,89	84,63	91,15	0,76	916
Indonesia	70,16	0,33	0,47	69,51	70,80	2,78	53 280

Sumber: BPS – Susenas Maret 2019

Tabel J.4 *Sampling Error* Persentase Penduduk Lansia yang Memiliki Jaminan Kesehatan Menurut Provinsi, 2019

							Perempuan
Provinsi	Nilai Estimasi	Standard Error	Relative Standard Error (RSE)	Selang Kepercayaan		Efek Rancangan Sampling	Jumlah Sampel
				Batas Atas	Batas Bawah		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Aceh	96,87	0,50	0,52	95,88	97,85	0,74	2 014
Sumatera Utara	62,39	1,33	2,14	59,77	65,00	2,06	3 660
Sumatera Barat	70,63	1,44	2,04	67,81	73,45	1,27	2 501
Riau	60,42	2,32	3,83	55,88	64,96	1,92	994
Jambi	60,51	2,07	3,42	56,46	64,56	1,07	929
Sumatera Selatan	61,35	1,78	2,90	57,87	64,83	2,02	1 782
Bengkulu	63,12	2,34	3,70	58,54	67,70	0,75	805
Lampung	56,95	1,72	3,02	53,57	60,32	1,96	1 634
Kep. Bangka Belitung	74,93	2,49	3,32	70,06	79,80	0,84	592
Kepulauan Riau	70,60	3,71	5,26	63,33	77,87	1,49	563
DKI Jakarta	92,24	1,24	1,34	89,82	94,67	3,99	836
Jawa Barat	68,59	0,96	1,41	66,70	70,48	4,41	4 241
Jawa Tengah	73,81	0,71	0,97	72,41	75,21	2,85	6 691
DI Yogyakarta	86,28	1,41	1,64	83,51	89,05	2,23	1 086
Jawa Timur	61,73	0,82	1,33	60,12	63,34	3,46	7 541
Banten	60,99	2,07	3,40	56,92	65,05	3,20	977
Bali	75,23	1,55	2,07	72,18	78,28	1,47	1 544
Nusa Tenggara Barat	59,66	2,10	3,52	55,55	63,78	1,83	1 069
Nusa Tenggara Timur	69,13	1,38	2,00	66,42	71,84	0,91	2 626
Kalimantan Barat	57,17	1,90	3,33	53,45	60,90	1,30	1 364
Kalimantan Tengah	60,74	2,31	3,80	56,22	65,27	0,76	923
Kalimantan Selatan	78,65	1,70	2,16	75,33	81,98	1,25	1 102
Kalimantan Timur	80,71	2,33	2,88	76,15	85,27	1,62	640
Kalimantan Utara	88,94	2,17	2,44	84,68	93,19	0,46	286
Sulawesi Utara	82,14	1,17	1,42	79,85	84,43	0,59	1 977
Sulawesi Tengah	66,65	1,86	2,80	62,99	70,30	0,86	1 167
Sulawesi Selatan	78,46	1,06	1,35	76,38	80,54	1,40	3 354
Sulawesi Tenggara	71,27	1,95	2,74	67,45	75,10	0,80	1 492
Gorontalo	82,08	2,25	2,74	77,67	86,49	0,78	545
Sulawesi Barat	86,96	1,61	1,85	83,81	90,11	0,50	563
Maluku	65,70	2,39	3,63	61,02	70,37	0,75	1 083
Maluku Utara	71,58	2,36	3,29	66,96	76,20	0,47	708
Papua Barat	82,80	2,41	2,91	78,07	87,53	0,37	656
Papua	87,18	1,99	2,28	83,28	91,08	0,76	731
Indonesia	69,27	0,32	0,46	68,64	69,89	2,79	58 676

Sumber: BPS – Susenas Maret 2019

Tabel J.5 *Sampling Error* Persentase Penduduk Lansia yang Memiliki Jaminan Kesehatan Menurut Provinsi, 2019

Perkotaan + Perdesaan, Laki-laki + Perempuan							
Provinsi	Nilai Estimasi	Standard Error	Relative Standard Error (RSE)	Selang Kepercayaan		Efek Rancangan Sampling	Jumlah Sampel
				Batas Atas	Batas Bawah		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Aceh	97,42	0,37	0,38	96,70	98,14	0,89	3 727
Sumatera Utara	63,37	1,21	1,91	61,00	65,74	3,15	6 457
Sumatera Barat	72,27	1,30	1,80	69,73	74,81	1,96	4 585
Riau	62,42	1,89	3,03	58,71	66,13	2,65	1 985
Jambi	59,89	1,82	3,05	56,31	63,47	1,66	1 862
Sumatera Selatan	61,37	1,59	2,60	58,25	64,49	3,17	3 395
Bengkulu	65,00	1,97	3,03	61,14	68,87	1,11	1 582
Lampung	57,76	1,48	2,56	54,86	60,66	2,94	3 337
Kep. Bangka Belitung	73,02	2,19	3,00	68,72	77,33	1,24	1 168
Kepulauan Riau	72,71	2,95	4,06	66,93	78,50	1,97	1 117
DKI Jakarta	92,24	0,96	1,04	90,35	94,12	4,64	1 618
Jawa Barat	68,67	0,86	1,25	66,99	70,34	6,79	8 317
Jawa Tengah	73,69	0,64	0,87	72,44	74,95	4,28	12 876
DI Yogyakarta	86,35	1,31	1,51	83,79	88,91	3,52	1 964
Jawa Timur	61,77	0,74	1,20	60,31	63,22	5,28	14 164
Banten	63,79	1,76	2,76	60,34	67,24	4,75	1 888
Bali	76,34	1,38	1,81	73,64	79,04	2,26	2 968
Nusa Tenggara Barat	62,09	1,81	2,91	58,55	65,64	2,62	2 016
Nusa Tenggara Timur	72,09	1,15	1,59	69,84	74,34	1,26	4 963
Kalimantan Barat	57,93	1,62	2,80	54,75	61,12	1,89	2 687
Kalimantan Tengah	62,68	1,97	3,15	58,82	66,55	1,18	1 903
Kalimantan Selatan	79,20	1,48	1,87	76,29	82,11	1,86	2 078
Kalimantan Timur	81,72	1,74	2,13	78,31	85,12	2,05	1 422
Kalimantan Utara	89,46	1,73	1,93	86,08	92,85	0,66	614
Sulawesi Utara	82,61	1,01	1,23	80,62	84,60	0,88	3 742
Sulawesi Tengah	68,60	1,61	2,35	65,44	71,76	1,31	2 264
Sulawesi Selatan	79,01	0,91	1,15	77,23	80,78	1,85	5 959
Sulawesi Tenggara	72,21	1,51	2,09	69,25	75,17	0,92	2 695
Gorontalo	83,42	1,78	2,14	79,93	86,91	0,97	1 007
Sulawesi Barat	87,07	1,42	1,63	84,30	89,85	0,73	1 026
Maluku	67,49	2,14	3,17	63,30	71,68	1,19	2 087
Maluku Utara	72,45	1,92	2,64	68,70	76,20	0,64	1 465
Papua Barat	84,99	1,63	1,92	81,79	88,20	0,41	1 371
Papua	87,59	1,50	1,71	84,66	90,53	1,05	1 647
Indonesia	69,69	0,28	0,40	69,14	70,24	4,22	111 956

Sumber: BPS – Susenas Maret 2019

DATA

MENCERDASKAN BANGSA

<https://www.bps.go.id>



BADAN PUSAT STATISTIK

Jl. Dr. Sutomo No. 6-8, Jakarta 10710

Telp. (021) 3841195, 3842508, 3810291-4, Fax. (021) 3857046

Homepage : <http://www.bps.go.id>, email : bpshq@bps.go.id

ISSN 2086-1036



9 772086 103005